



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BONTANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017



**PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2017 ini dapat tersusun sebagai implementasi amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan dokumen LKPJ ini dapat menjadi salah satu media yang mampu memberikan informasi secara transparan dan komprehensif terkait pencapaian indikator kinerja daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 kepada DPRD Kota Bontang. Berbagai informasi tentang pencapaian keberhasilan, peluang, hambatan, dan tantangan yang dihasilkan dan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017, diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dan positif untuk penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan penyajian LKPJ ini dapat menjadi cermin bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Kota Bontang untuk dapat mengevaluasi kinerjanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Sehingga kedepan kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lebih produktif, inovatif, efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas partisipasi aktif dan dukungannya dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang.



Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan bathin kepada kita untuk melaksanakan bagian dari pengabdian serta tanggungjawab yang baik kepada Kota Bontang yang kita cintai ini menuju terwujudnya Bontang yang Smart, Green dan Creative.

Bontang, 14 Maret 2018

Wali Kota Bontang,

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG



Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	I – 1
A. Dasar Hukum	I – 1
B. Gambaran Umum Daerah	I – 3
C. Sistematika Penulisan	I - 22
Bab II. Kebijakan Pemerintahan Daerah	II – 1
A. Visi dan Misi	II – 1
B. Strategi dan Arah Pembangunan Kota Bontang	II – 5
C. Prioritas Daerah	II - 18
Bab III. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	III – 1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	III – 1
B. Pengelolaan Belanja Daerah	III – 16
C. Pembiayaan Daerah	III – 32
D. Permasalahan dan Solusi	III - 36
Bab IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV – 1
A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2017..	IV - 1
B. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	IV – 11
C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	IV – 85
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan.....	IV - 96
Bab V. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	V – 1
A. Dasar Hukum	V – 1
B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	V – 2
C. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan	V – 3
D. Permasalahan dan Solusi	V - 5
Bab VI. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	VI – 1
A. Kerjasama Antar Daerah	VI – 1
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI – 3
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	VI – 20
D. Pembinaan Batas Wilayah	VI – 22
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI - 23
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	VI - 28
Bab VII. Penutup	VII – 1
Lampiran	



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1	Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha) I-7
Tabel 1.2	Penggunaan Tanah di Kota Bontang I-12
Tabel 1.3	Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang I-13
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 I-14
Tabel 1.5	Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2017 I-15
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 I-15
Tabel 1.7	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2013 – 2016 I-17
Tabel 1.9	PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha (ADHK 2010) (Rp. Juta) Tahun 2014-2017 I-21
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang II-4
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 II-7
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 II-12
Tabel 2.4	Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3 II-15
Tabel 2.5	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 II-18
Tabel 3.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 III-9
Tabel 3.2.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 III-13
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 III-28
Tabel 3.4.	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 III-29
Tabel 4.1.	Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2017 IV-1
Tabel 4.2.	Sumbangan Gas Rumah Tangga 2013-2017 IV-11
Tabel 4.3.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2017 IV-14
Tabel 4.4.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2017 IV-18
Tabel 4.5.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 IV-25
Tabel 4.6.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 IV-28
Tabel 4.7.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017 IV-32
Tabel 4.8.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Tahun 2017 IV-35



Tabel 4.9.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017.....	IV-38
Tabel 4.10.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017	IV-40
Tabel 4.11.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pangan Tahun 2017	IV-44
Tabel 4.12.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanahan Tahun 2017.....	IV-46
Tabel 4.13.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017.....	IV-48
Tabel 4.14.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.....	IV-54
Tabel 4.15.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017	IV-56
Tabel 4.16.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017.....	IV-58
Tabel 4.17.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Tahun 2017.....	IV-60
Tabel 4.18.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2017	IV-64
Tabel 4.19.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2017	IV-68
Tabel 4.20.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal Tahun 2017.....	IV-71
Tabel 4.21.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017.....	IV-73
Tabel 4.22.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kebudayaan Tahun 2017.....	IV-76
Tabel 4.23.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Tahun 2017.....	IV-78
Tabel 4.24.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Tahun 2017.....	IV-81
Tabel 4.25.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017	IV-83
Tabel 4.26.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2017.....	IV-87
Tabel 4.27.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata Tahun 2017.....	IV- 88
Tabel 4.28.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian Tahun 2017.....	IV-92



Tabel 4.29.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perdagangan Tahun 2017.....	IV-94
Tabel 4.30	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Tahun 2017.....	IV-98
Tabel 4.31	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2017.....	IV-102
Tabel 4.32	Realisasi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Tahun 2017.....	IV-104
Tabel 4.34	Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah dan Sekretariat KORPRI Tahun 2017	IV-106
Tabel 4.35	Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2017 ..	IV-109
Tabel 4.36	Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2017.....	IV-113
Tabel 5.1.	Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017.....	V-3
Tabel 5.2.	Alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016.....	V-3
Tabel 6.1.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Badak NGL	VI-6
Tabel 6.2.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Indominco Mandiri..	VI-14
Tabel 6.3.	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pupuk Kaltim.....	VI-16
Tabel 6.4	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Daya Mandiri.....	VI-17
Tabel 6.5	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. PLN	VI-17
Tabel 6.6	Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. KNI.....	VI-18
Tabel 6.7	Jenis dan jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Bontang Tahun 2017	VI-24
Tabel 6.8	Potensi Bencana, Penyebab dan Solusi Penanganan Bencana di Kota Bontang Tahun 2017	VI-27
Tabel 6.9	Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Bontang Tahun 2016-2017	VI-29



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Bontang.....	I-4
Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Bontang	I-5
Gambar 1.3. Letak geografis Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.....	I-6
Gambar 1.4. Peta Topografi Kota Bontang	I-7
Gambar 1.5. Peta Geologi Kota Bontang	I-9
Gambar 1.6. Peta Jenis Tanah Kota Bontang	I-10
Gambar 1.7. Persentase Penduduk Kota Bontang menurut Kelompok Umur Tahun 2017.....	I-16
Gambar 1.8. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bontang Tahun 2017	I-16
Gambar 1.9. Perkembangan IPM Kota Bontang.....	I-17
Gambar 1.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 2011-2017	I-22
Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017..	III-8
Gambar 3.2. Komposisi Pendapatan Kota Bontang Tahun 2016 dan 2017 (%).....	III-10
Gambar 3.3. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 dan 2017	III-30
Gambar 3.4. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2016 dan 2017.....	III-31
Gambar 4.1. Perkembangan RLS Kota Bontang Tahun 2014 – 2017	IV-3
Gambar 4.2. Perkembangan Angka HLS Tahun 2014-2017	IV-3
Gambar 4.3. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2014-2017.....	IV-4
Gambar 4.4. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2014-2017	IV-5
Gambar 4.5. Perkembangan Angka Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2014-2017	IV-5
Gambar 4.6. Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2014-2017	IV-6
Gambar 4.7. Perkembangan Tingkat Pengangguran Tahun 2014-2017	IV-7
Gambar 4.8. Perkembangan Nilai LHE AKIP Tahun 2014-2017	IV-7
Gambar 4.9. Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2014-2017	IV-9
Gambar 4.10. Perkembangan Cakupan Penanganan Sampah Tahun 2014-2017	IV-9
Gambar 4.11. Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2014-2017	IV-9



BAB 1 PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Bontang dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam seluruh rangkaian proses, dari perencanaan sampai pelaporan atas kinerja pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, ditegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2017 sebagai sebuah laporan tahunan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat laporan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2017.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat



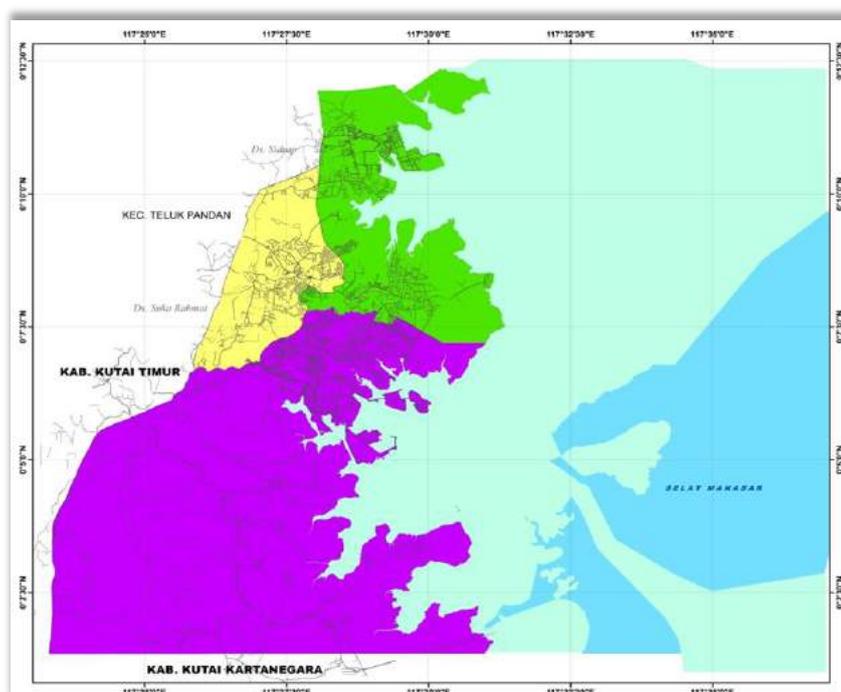
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang;
 16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017;
 18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017;
 19. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2017;
 20. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bontang Tahun 2017.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang–Undang Nomor 47 tahun 1999, bersama–sama dengan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Dengan luas wilayah sekitar 497,57 km², Kota Bontang merupakan daerah otonomi dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan Timur, berbatasan dengan dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah selatan.

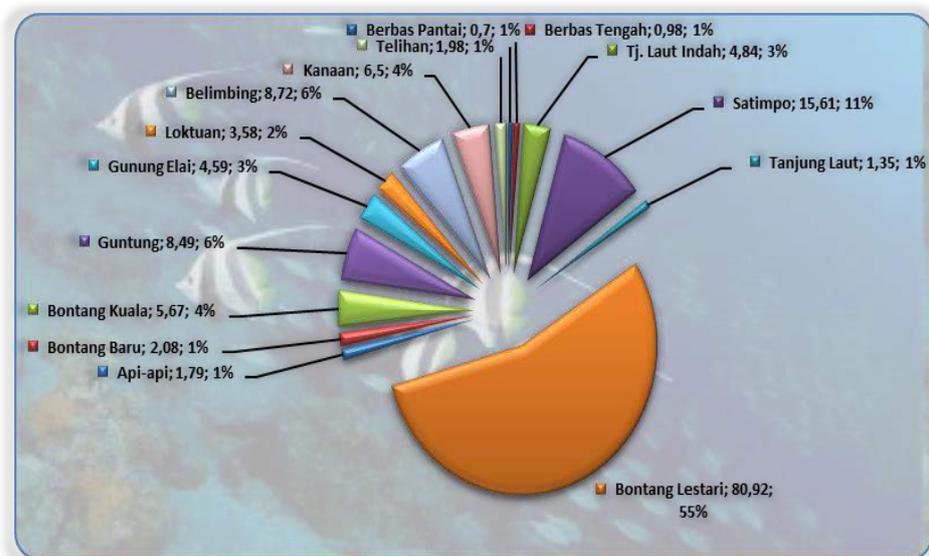


Gambar 1.1. Peta Administrasi Kota Bontang

Luas wilayah Kota Bontang adalah 497,57 km² terdiri dari wilayah laut seluas 349,77 km² (70,30%) dan wilayah darat seluas 147,80 km² (29,70%). Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing–masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km², Kecamatan Bontang Utara

seluas 26,20 km², dan Bontang Barat seluas 17,20 km². Kelurahan yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 80,92 km².

Adapun gambaran luas wilayah administrasi masing-masing kelurahan dapat disajikan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Administrasi Kelurahan di Kota Bontang

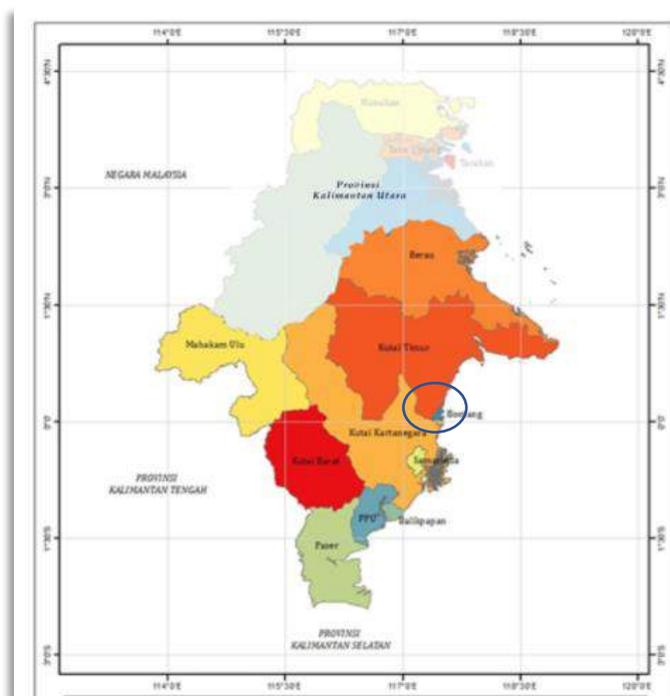
b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomi terletak di antara 117^o23' – 117^o38' Bujur Timur dan antara 0^o01' – 0^o12' Lintang Utara. Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak di pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke Selat Makassar yang dengan panjang pantai ± 24,4 km. Wilayah tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan Internasional sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Kondisi ini menjadikan Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan diantaranya: 3 (tiga) terminal khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan ikan.

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah berupaya membangun pelabuhan serta jaringan jalan untuk akses keluar masuk Kota

Bontang. Dengan ketersediaan tersebut Kota Bontang akan menjadi jalur transportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk wilayah tengah.

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya dengan keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta afiliasinya. Untuk menarik investor agar berinvestasi di Kota Bontang maka pemerintah menyiapkan kawasan industri baru serta membangun bandara umum.



Gambar 1.3. Letak geografis Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang lengkap karena terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Bontang juga memiliki potensi untuk wisata bahari dan wisata mangrove selain perikanan. Sebagian terumbu karangnya masih baik sehingga dapat dikembangkan untuk lokasi diving dan snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok untuk ekowisata.

c. Topografi

Secara topografis, wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 106 m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah (48%) menempati kawasan pinggir pantai

yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar di wilayah pantai, dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 1.1

Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha)

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Luas (Ha)
1.	0 – 15	5.415
2.	15 – 25	3.622
3.	25 – 100	5.723
4.	Diatas 100	20
Jumlah		14.780

Sumber: BPS Kota Bontang, 2015



Gambar 1.4. Peta Topografi Kota Bontang



d. Geologi

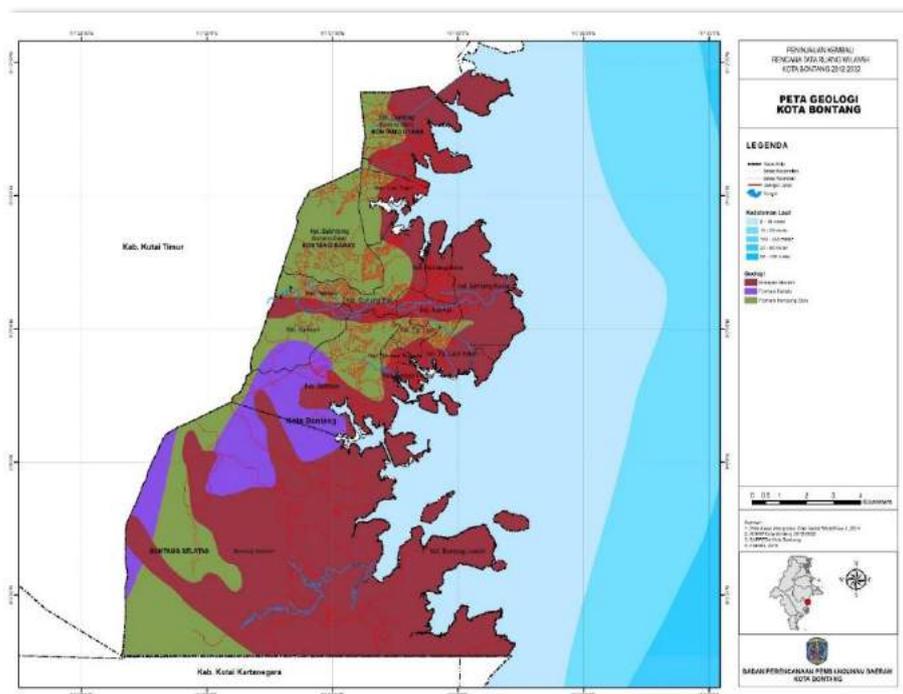
Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:

1. Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.
2. Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai aquifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung.
3. Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
4. Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
5. Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.
6. Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.

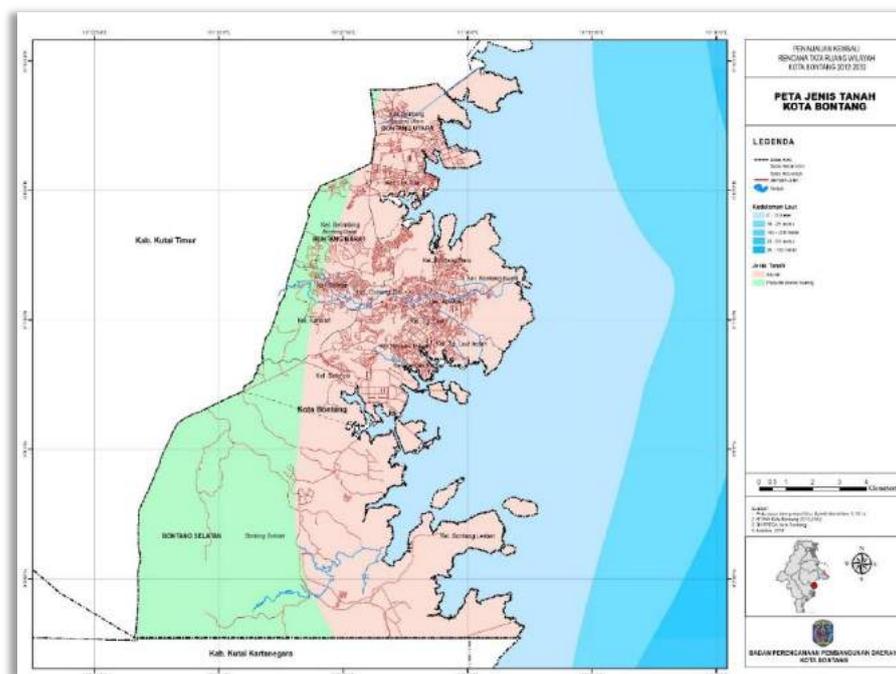
Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.

Struktur geologi daerah Bontang adalah struktur perlipatan antiklin dan sinklin serta sesar dan kekar. Struktur batuan tersebut terjadi pada umur Tersier awal sampai Tersier akhir, yang terlihat oleh bentuk bentang alamnya pada beberapa lokasi, tapi di tempat lain hanya dapat diketahui dari pola sebaran batuan atau dari hasil penafsiran pengukuran bidang perlapisannya.

Sebagian struktur lipatan berarah baratdaya-timurlaut. Antiklin Api-api pada Formasi Pulau Balang melandai kearah barat dan timur, dengan kemiringan lapisan berkisar dari 5-200, mendekati puncak antiklin kemiringan lapisan mencapai 500. Struktur sesar berupa patahan naik dan sesar geser jurus. Sesar naik terdapat di bagian barat berarah barat daya-timur laut melewati Gunung Lobang batik. Sesar naik ini diduga merupakan kelanjutan proses dari pembentukan antiklin. Pada peta geologi (GTL Bandung, 1990), maka pelurusan sesar naik masih diduga sebagai kelurusan sumbu antiklin.



Gambar 1.5. Peta Geologi Kota Bontang



Gambar 1.6. Peta Jenis Tanah Kota Bontang

Formasi batuan bagian barat relatif naik terhadap formasi batuan bagian timur sehingga formasi batuan tua naik terhadap yang muda. Pada beberapa tempat, terdapat formasi batuan tergeserkan oleh patahan geser (sesar mendatar), patahan ini memotong antiklin, salah satu bukti dapat dilihat adanya pergeseran dari batu gamping dengan bidang geser yang nyata di dekat S. Santan (tepi Jalan Bontang-Samarinda). Zona kelurusan patahan dapat menjadi idang lemah yang mengarahkan aliran air tanah. Strike (jurus) sesar geser jurus umumnya berarah utara-selatan atau hampir berarah barat laut-tenggara, dengan posisi memotong struktur antiklin dan sinklin dengan arah barat laut-tenggara, utara-selatan dan timur laut-barat daya.

Sesar geser diduga terjadi setelah perlipatan struktur kekar terutama dijumpai pada batu gamping dari formasi bebulu dengan arah tidak beraturan. Struktur geologi ini aktif setelah semua formasi batuan diendapkan. kegiatan tektonik diperkirakan dimulai pada Umur Pleistosen, dengan Wilayah Bontang mengalami perlipatan dengan arah gaya lipatan dari barat dan timur, ditandai dengan adanya punggungan antiklin Api-api yang letaknya memanjang dari utara



ke selatan. Pada puncak antiklin tersingkap formasi batuan tertua, yang berturut-turut ke arah yang lebih muda, dimulai dari Formasi pamaluan (Tomp), Formasi Bebulu (Tmb), Formasi Pulubalang (Tmpb), Formasi Balikpapan (Tmbp), dan Formasi Kampungbaru adalah formasi batuan Tersier termuda, juga mengalami pengangkatan pada saat terbentuk antiklin, lapisan relatif miring ke arah timur. Dengan adanya kemiringan yang paralel dari formasi diatas, secara hidrogeologi aliran air tanah mengikuti arah kemiringan lapisan. Setelah terjadi pengangkatan, terjadi pengendapan hasil proses geologi seperti pelapukan, erosi dan transportasi. Hal ini ditandai oleh adanya endapan kolovium disebelah barat daya Bontang dan aluvium di daerah datarannya.

e. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menempati wilayah Kota Bontang merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini adalah Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuk, Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri yang semuanya bermuara di Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut berhulu di bagian barat wilayah Kota Bontang atau di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.

Secara administratif DAS Bontang terletak di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur (DAS Bontang hulu), Kecamatan Bontang Barat (DAS Bontang Tengah), Kecamatan Bontang Selatan (DAS Bontang Tengah), Kecamatan Bontang Utara (DAS Bontang Tengah) dan Kecamatan Bontang Baru (DAS Bontang Hilir). DAS Bontang memiliki luas 59,710 Km² dan panjang sungai utama 41,173 Km dengan alur berkelok-kelok (meandering). DAS Bontang yang melintasi Kota Bontang memiliki luas kurang lebih 300 Km² dan panjang sungai utama 17 Km.

f. Klimatologi

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau



biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan April. Selain itu, iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi oleh angin Muson Barat (November – April) dan angin Muson Timur (Mei – Oktober). Namun, beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke musim hujan tidak jelas sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung rata sepanjang tahun.

Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00°C. Sedangkan kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 – 98,00% dengan kecepatan angin berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Rata-rata catatan curah hujan Kota Bontang cukup besar, yakni pada kisaran 176,00 – 225,20 mm/th. sehingga Kota Bontang perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya teknis pengelolaan DAS agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar 6.870,98 ha (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19%), pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%), rumah/bangunan gedung seluas 1.355,56 ha (9,170%) dan fasilitas umum seluas 562,43 ha (3,13%). Jenis penggunaan lahan secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Penggunaan Tanah di Kota Bontang

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Hektar	%
1	Permukiman		
	a. Rumah/Bangunan Gedung	1.355,56	9,17
	b. Pekarangan	972,87	6,58
	c. Fasilitas Sosial	29,76	0,20
	d. Fasilitas Umum	462,43	3,13
	e. Permukiman Atas Air	53,94	0,36
	f. Jasa	69,52	0,47
2	Tambak	323,18	2,19
3	Kawasan Industri/Pabrik		
	a. PT. Pupuk Kaltim	192,46	1,30



No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas	
		Hektar	%
	b. PT. Badak NGL	278,07	1,88
	c. Industri terbatas	7,77	0,05
4	Rawa	53,54	0,36
5	Danau/Waduk/Situ	15,11	0,10
6	Hutan Kota	196,98	1,33
7	Hutan Sejenis	2.764,48	18,70
8	Bakau	1.115,51	7,55
9	Belukar	6.870,98	46,49
10	Tanah Terbuka	17,83	0,12
Jumlah		14.780,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Bontang, 2010

Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup kompleks. Pada wilayah tersebut telah terdapat banyak aktivitas masyarakat maupun swasta yang menjadikan potensi pengembangan wilayah lautnya sangat sempit. Penggunaan ruang laut yang terbesar adalah untuk alur pelayaran. Gambaran pemanfaatan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Penggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang

No	Penggunaan	Luas (Ha)	%
A	Flat		
	- Gosong karang	940	2,69
	- Pasir	158	0,45
	- Pasir lumpur	100	0,29
B	Terumbu karang	2.799	8,00
C	Alur pelayaran		
	- PT. Badak NGL	1.311	3,75
	- PT.PKT	3.464	9,90
D	Area efektif untuk kegiatan perikanan	9.384	26,83
E	Penggunaan lain (alur rakyat, alur Tanjung)	16.821,0	48,092
	Luas Total Wilayah Laut	34.977,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Bontang, 2010

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk



Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Bontang pada tahun 2017 sebanyak 170.611 jiwa, terdiri dari 89.280 jiwa penduduk laki-laki dan 81.331 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,82% atau berkurang 3.159 jiwa jika dibandingkan penduduk tahun 2016. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu 76.358 jiwa atau sebesar 45% dari jumlah penduduk Kota Bontang, sebagaimana Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Rasio Jenis Kelamin
1	Bontang Utara	40.000	36.358	76.358	45	110
2	Bontang Selatan	34.430	31.333	65.763	39	110
3	Bontang Barat	14.850	13.639	28.489	17	109
	Total	89.280	81.331	170.611	100	110

Sumber: BPS Kota Bontang, 2017 diolah

b. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Bontang tahun 2014-2017 mengalami pertumbuhan sebagai akibat kelahiran alami dan migrasi. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,07% dengan kepadatan penduduk tahun 2017 yaitu 1.154 jiwa/km². Adapun penyebaran penduduk secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5

Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014-2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (Jiwa)				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)			
			2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Bontang Utara	26,20	71.106	73.284	77.772	76.358	2.714	2.797	2.968	2.914
2	Bontang Selatan	104,40	62.990	63.542	66.981	65.764	603	609	642	630
3	Bontang Barat	17,20	27.317	27.432	29.017	28.489	1.588	1.595	1.687	1.656
	Jumlah	147,80	161.413	164.258	173.770	170.611	1.092	1.111	1.176	1.154

Sumber: BPS Kota Bontang, 2017

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2017 masih berada di Kecamatan Bontang Utara yakni sebesar



2.914 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan yaitu 630 jiwa/km².

c. Struktur dan Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut kelompok umur terbanyak pada umur 0-4 tahun sebanyak 17.537 jiwa, sedangkan komposisi penduduk terkecil pada umur 75 tahun keatas sebanyak 609 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut umur sesuai Tabel 1.6.

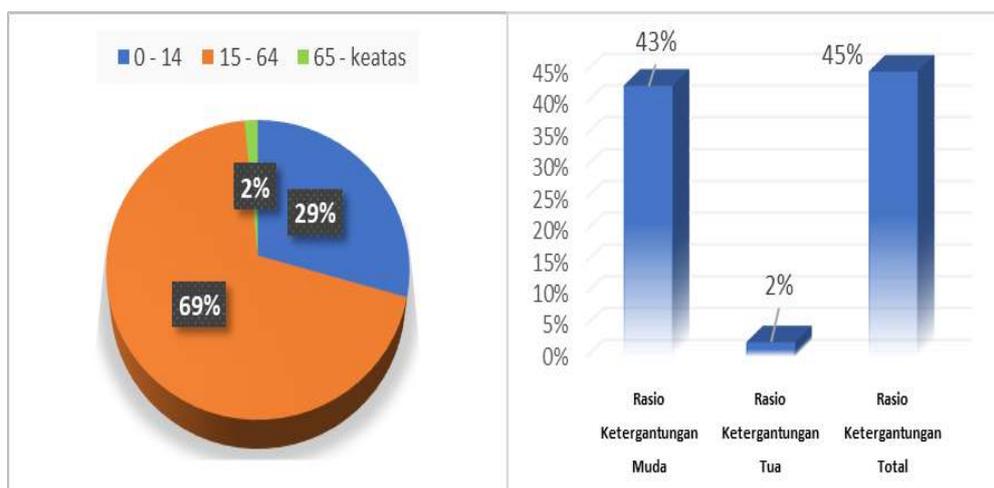
Tabel 1.6

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2017

Kelompok Umur	2017
0 - 4	17.537
5 - 9	16.866
10 - 14	15.770
15 - 19	14.886
20 - 24	13.782
25 - 29	15.002
30 - 34	15.022
35 - 39	14.650
40 - 44	14.770
45 - 49	13.167
50 - 54	8.922
55 - 59	5.014
60 - 64	2.576
65 - 69	1.346
70 - 74	692
75+	609
Jumlah	170.611

Sumber: BPS Kota Bontang, 2017

Dari tabel 1.6 terlihat bahwa kondisi struktur umur penduduk Kota Bontang pada tahun 2017 yang telah dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan, penduduk Kota Bontang tergolong penduduk transisi, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69% (Gambar 1.7). Besarnya penduduk usia produktif ini perlu diantisipasi dengan kebijakan dan program pemerintah pro-job. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



Gambar 1.7
Persentase Penduduk Kota Bontang
menurut Kelompok Umur Tahun 2017

Gambar 1.8
Rasio Ketergantungan Penduduk
Kota Bontang Tahun 2017

Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Bontang dapat diukur dengan rasio ketergantungan, yakni membandingkan penduduk yang dianggap belum produktif (0-14 tahun) atau sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) (Gambar 1.8). Rasio ketergantungan penduduk tahun 2017 sebesar 45%, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Bontang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, terdiri dari rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 43% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 2%. Dari gambaran tersebut juga terlihat bahwa pada tahun 2017 penduduk usia kerja di Kota Bontang masih dibebani tanggung jawab akan penduduk usia muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua. Sehingga kebijakan dan program perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar maupun pendidikan.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan dimana penduduk merupakan sasaran utama untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitas hidupnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat

kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yang diukur dengan menggunakan indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) dimensi parameter, yaitu:

- 1) Derajat kesehatan dan usia hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup.
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan kombinasi antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.
- 3) Standar hidup layak penduduk yang dilihat dari paritas daya beli masyarakat.

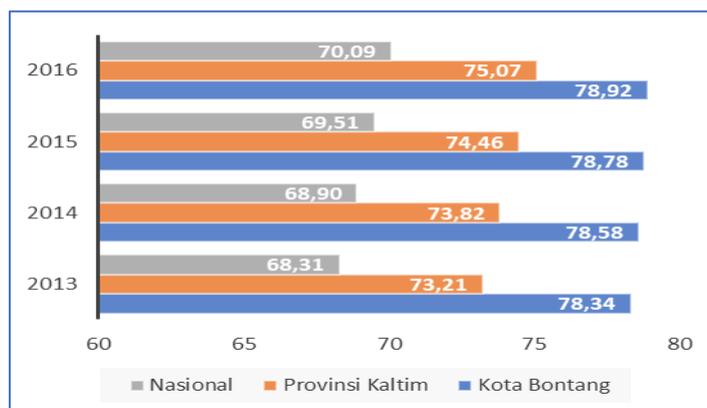
Tabel 1.7

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2013 – 2016

Komponen IPM	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (tahun)	73.67	73.68	73.69	73.71
Harapan Lama Sekolah (HLS) Usia 7 Tahun Keatas (tahun)	12.50	12.68	12.77	12.79
Rata-Rata Lama Bersekolah Usia 25 Tahun Keatas (tahun)	10.34	10.35	10.38	10.39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.34	78.58	78.78	78.92

Sumber: BPS Kota Bontang, 2017

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang selama periode 2013-2016 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016, pencapaian IPM Kota Bontang sebesar 78,92 atau mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin dari tahun 2015. Angka IPM Kota Bontang berada diatas angka IPM Provinsi Kalimantan Timur dan angka IPM Nasional.



Gambar 1.7. Perkembangan IPM Kota Bontang



3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Kehadiran PT. Badak NGL sebagai industri pengilangan gas alam cair dan PT. Pupuk Kalimantan Timur, Tbk. sebagai industri pupuk menjadikan Bontang cukup dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga dengan kehadiran perusahaan PT. Black Bear dan PT. Kaltim Nitrat Indonesia yang merupakan industri pembuat bahan amonium nitrat yang bertaraf internasional, akan menjadi potensi unggulan daerah karena mampu memberikan income besar serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik di Bontang, Kalimantan Timur dan Nasional. Potensi lainnya yang dapat diproyeksikan menjadi potensi unggulan serta dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi Kota Bontang diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jasa Kelautan

Sebagai daerah pesisir, Kota Bontang memiliki potensi jasa kelautan yang dapat dikembangkan berupa jasa transportasi laut. Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan perdagangan lokal, regional dan internasional. Dengan kedalaman alur yang berkisar antara 17 – 20 m, perairan Kota Bontang dapat dilayari kapal-kapal besar dengan kapasitas 20.000-40.000DWT serta dapat melakukan bongkar muat. Saat ini Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan untuk mendukung aktivitas industri dan masyarakat umum, antara lain pelabuhan khusus yang berjumlah 3 buah (PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak NGL, dan PT. Indominco Mandiri), pelabuhan Umum di Loktuan, Pelabuhan Rakyat di Tanjung Laut Indah dan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Tanjung Limau.

2. Perikanan

Dengan dukungan perairan yang luasnya mencapai 49,757 ha atau 70,30% dari luas Kota Bontang maka perikanan dan kelautan sangat potensial dikembangkan. Pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Potensi perikanan yang menjadi unggulan saat ini adalah kepiting, ikan kerapu, kakap, lobster, teripang dan



rumput laut. Jenis-jenis ikan tersebut bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik dan pasar internasional. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan hanya memenuhi kebutuhan lokal sedangkan kebutuhan pasar regional dan internasional hanya dapat dipenuhi dalam jumlah kecil. Dengan demikian pengembangan kegiatan perikanan mempunyai peluang yang sangat besar mengingat kebutuhan konsumsi ikan baik dalam negeri maupun luar negeri terus mengalami peningkatan. Begitupun dengan rumput laut yang sangat menjanjikan karena mempunyai kualitas terbaik ditingkat nasional.

3. Pariwisata

Sebagai kawasan pesisir, Kota Bontang mempunyai potensi wisata yang layak untuk dikembangkan seperti: pemukiman di atas air, wisata kuliner, hutan mangrove dan terumbu karang. Objek wisata pemukiman di atas air dapat dipadukan dengan hiburan, tempat bersantai dan industri pengolahan perikanan skala rumah tangga. Terdapat pula pesta laut sebagai acara tahunan untuk masyarakat pesisir seperti di Bontang Kuala yang diisi dengan acara adat disertai hiburan rakyat. Selain itu, Kota Bontang juga mengadakan acara pesta adat Erau Pelas Benua yang dilaksanakan di Kelurahan Guntung. Berdasarkan kepercayaan warga setempat, bahwa acara pesta adat Erau Pelas Benua dilaksanakan sebagai ritual tolak bala. Acara ini dirangkai dengan olahraga tradisional antara lain berupa permainan sumpit dan gassing. Wisata kuliner yang sudah eksis terdapat di Bontang Kuala serta di Selangan. Komoditas yang ditawarkan berupa masakan khas Bontang dan ikan bakar segar dengan suasana pemandangan laut. Luas hutan mangrove Kota Bontang adalah 2.105 ha. Kawasan tersebut potensial untuk dikembangkan menjadi ekowisata karena beberapa faktor pendukung antara lain: mudah dijangkau, memiliki struktur tegakan yang sempurna, serta spesies penyusun tegakannya beraneka ragam. Hutan mangrove Kota Bontang tersebar di sepanjang pesisir pantai yang membentang mulai dari Guntung, Gunung Elai, Bontang Kuala, Rawa Indah, Teluk Kadere dan Manuk-manukan. Ketebalannya dari garis pantai ke arah darat bervariasi antara 50 – 710 M. Terumbu karang



potensial untuk wisata snorkeling dan diving. Lokasinya berada di Karang Kiampau, Karang Segajah, Agar-agar, Melahing, Kedindingan, Beras Basah dan Tihik-tihik. Terumbu karang dapat dijumpai sampai kedalaman 15 m dan dihuni oleh ikan-ikan hias maupun komersil.

b. Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di Kota Bontang dalam periode satu tahun. Nilai PDRB tersebut sekaligus menggambarkan pula kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kota Bontang yang dicerminkan dengan PDRB yang dinilai harga berlaku mengalami kenaikan, namun yang dihitung dalam harga konstan mengalami penurunan. PDRB Kota Bontang dengan harga konstan tahun 2010, pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.41,54 trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -3,41%. Dengan demikian nilai PDRB tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi negatif ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai yang dihasilkan sektor industri pengolahan yang selama ini mendominasi PDRB Kota Bontang dengan migas, dimana pada tahun 2014 kontribusinya mencapai 83,93%.

Nilai PDRB Kota Bontang dengan harga konstan tahun 2010 masih mengalami penurunan hingga tahun 2017 dengan kisaran tahun 2016 adalah Rp.38,54 trilyun dan tahun 2017 Rp.37,19 trilyun.

Namun demikian jika nilai PDRB dihitung dengan mengeluarkan unsur dari hasil pengolahan minyak dan gas, maka nilai PDRB mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar Rp.19,59 trilyun dan mencapai Rp.20,95 trilyun pada tahun 2017.



Tabel 1.9
PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha
(ADHK 2010) (Rp. Juta) Tahun 2014-2017

	Lapangan Usaha/Industry	2014*	2015**	2016***	2017***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	353.995,35	399.921,72	451.747,08	510.400,67
2	Pertambangan dan Penggalian	587.774,81	512.691,69	254.329,74	234.736,30
3	Industri Pengolahan	4.869.242,97	33.470.041,62	31.641.500,45	29.942.468,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.432,90	9.404,20	10.113,03	11.285,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.480,24	7.758,20	8.113,03	8.410,41
6	Konstruksi	1.991.244,34	2.025.801,35	2.075.265,50	2.145.791,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.039.278,32	1.075.545,56	1.112.719,68	1.163.515,04
8	Transportasi dan Pergudangan	516.466,81	532.218,65	554.642,41	578.210,26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155.377,73	159.524,27	164.773,58	174.367,46
10	Informasi dan Komunikasi	339.822,49	342.409,75	385.599,28	418.306,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	305.999,72	317.187,77	308.034,14	312.782,87
12	Real Estat	175.203,28	179.439,64	180.312,67	183.355,47
13	Jasa Perusahaan	192.842,58	210.432,72	223.877,81	245.497,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	428.262,12	434.737,91	469.981,58	492.776,70
15	Jasa Pendidikan	277.125,45	270.789,97	354.225,52	398.628,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.058,97	188.877,63	231.582,21	252.141,09
17	Jasa lainnya	100.834,28	106.379,52	115.182,39	121.856,16
Produk Domestik Regional Bruto		41.544.442,36	40.246.162,17	38.542.000,09	37.194.530,66
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product @		17.190.924,14	18.521.965,50	19.587.169,90	20.956.326,00

* : angka sangat sementara ** : angka sangat sementara

*** : angka proyeksi

Sumber: SIPD Tahun 2015 dan analisis Rancangan Teknokratis RPJMD 2016-2021

Proyeksi PDRB pada tabel 1.9 dilakukan dengan mengacu pada tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2015, dimana berdasarkan perhitungan angka sangat sementara BPS, pertumbuhan ekonomi dengan migas masih mengalami pertumbuhan negatif mencapai -3,13%, meskipun jika dibanding tahun 2014 dimana pertumbuhan ekonomi tercatat -3,41%, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis, perekonomian Kota Bontang tahun 2016 dan tahun 2017 diproyeksikan

akan tumbuh pada kisaran -3 s.d -4%. Situasi ekonomi nasional dan masih belum pulihnya harga komoditas utamanya minyak dunia diperkirakan akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan PDRB Kota Bontang yang masih sangat didominasi sektor migas. Disamping itu tren penurunan produksi migas diperkirakan masih akan berlanjut.

Dengan perhitungan PDRB tanpa unsur Migas, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2015 mencapai 7,74% meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum pola pertumbuhan ekonomi tanpa migas menunjukkan bahwa pertumbuhannya akan mengalami kenaikan pada saat pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami tekanan dan sebaliknya. Meskipun secara keseluruhan perekonomian Kota Bontang tanpa migas terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya sangat fluktuatif dan terlihat sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dengan migas. Peran sektor-sektor ekonomi tanpa migas meningkat jika sektor ekonomi dengan migas mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.8.

Gambar 1.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Bontang 2011-2017



Sumber: SIPD Tahun 2015 dan analisis Rancangan Teknokratis RPJMD 2016-2021

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
- BAB VII : PENUTUP



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi

A.1. Visi

Visi Pembangunan Kota Bontang tahun 2016–2021 adalah **“Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Rumusan Visi tersebut mengadung elemen pokok pembangunan yaitu Menguatkan Bontang sebagai **Kota Maritim Berkebudayaan Industri** yang Bertumpu pada **Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup** untuk **Kesejahteraan Masyarakat**. Secara filosofis masing-masing elemen pembangunan tersebut mengandung makna yang saling berkaitan, yakni sebagai berikut:

a. Kota Maritim

Kota Bontang sebagai entitas wilayah administratif dan ekologis didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (city icon) bagi Kota Bontang. Mewujudkan Bontang sebagai kota maritim pada prinsipnya merupakan keyakinan akan potensi utama kewilayahan yang memang sangat didominasi oleh pesisir dan laut. Dimensi kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore). Fokus pengembangan potensi maritim ini juga sejalan dengan RPJMN 2015-2019 khususnya dimensi pembangunan sektor unggulan yang salah satu fokusnya adalah kemaritiman dan kelautan.

b. Berkebudayaan Industri

Sektor Industri merupakan sektor utama yang telah menjadi cikal-bakal tumbuh dan terbentuknya Kota Bontang sebagai daerah otonom. Oleh karena itu budaya industri telah sangat mewarnai dinamika pembangunan daerah Kota



Bontang. Dalam konteks pembangunan Bontang sebagai sebuah kota, pengembangan sektor industri merupakan keniscayaan dan pilihan rasional mengingat berkembangnya industri merupakan salah satu indikator utama kemajuan. Budaya industri yang sangat dinamis mewakili sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya. Sebagai elemen visi yang secara filosofis menggambarkan cita-cita pembangunan ekonomi daerah masa depan, berkebudayaan industri bermakna bahwa industri baik industri maritim maupun industri petrokimia akan berkembang dan semakin mapan dalam perannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia yang ingin diwujudkan dalam pernyataan visi RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi untuk masa depan yang akan menjadi salah satu pemicu efektifnya pencapaian dimensi pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai elemen utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu ditingkatkan baik dari sisi akses maupun kualitasnya. Sejalan dengan visi untuk mewujudkan kota berkebudayaan industri, pengembangan SDM tentu akan diarahkan pada penguatan dan penguasaan bidang industri sehingga pada gilirannya akan siap bersaing dan siap mengisi kebutuhan tenaga kerja baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global.

d. Kualitas lingkungan hidup

Kota Bontang adalah kota dengan struktur industri yang sangat kuat, disamping menjadi sektor utama penopang perekonomian kota, keberadaan industri tersebut juga berimplikasi pada ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan pencemaran. Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan



untuk menjamin keseimbangan antara pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Elemen kualitas lingkungan hidup dalam struktur visi pembangunan RPJMD merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagai elemen utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

e. Kesejahteraan Masyarakat

Elemen kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin diwujudkan melalui implementasi berbagai program pembangunan. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan industri yang produktif dan berkeadilan, dan terjaminnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terwujudnya elemen-elemen pembangunan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik untuk saat ini maupun masa datang.

A.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi “Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”, maka Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

A.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai



dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang

Misi I : Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia			
Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua
		2.	Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua
2.	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	3.	Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama
		4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
Misi II: Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup			
Tujuan		Sasaran	
1.	Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan	1.	Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi
		2.	Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan
		3.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
		4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
		5.	Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum	6.	Meningkatnya akses pelayanan air minum
		7.	Terlaksananya konservasi sumber daya air
3.	Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	8.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
		9.	Terselesaikannya permasalahan banjir



Misi III : Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
		2.	Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim
		3.	Meningkatnya Perdagangan dan industri
2.	Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang	4.	Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota
		5.	Meningkatnya usaha mikro kecil

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.



Dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Bontang, maka telah ditetapkan strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran pembangunan. Tabel berikut ini adalah strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kota Bontang tahun 2016-2021.



Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1

Misi 1: Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan kualitas Pendidikan untuk semua	1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan status lembaga pendidikan.	1.1.	Peningkatan persentase tingkat kelulusan
				1.2.	Pengembangan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan sekolah rujukan
				1.3.	Peningkatan kualitas kelompok pendukung Pendidikan Anak Usia Dini
				1.4.	Mendorong status STITEK Bontang menjadi Perguruan Tinggi Negeri
			2. Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang mampu mendorong siswa berprestasi dan iklim inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah.	2.1.	Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
				3. Meningkatkan minat baca dengan perbaikan kualitas dan aksesibilitas perpustakaan bagi masyarakat. Mendorong keberadaan perpustakaan ditengah-tengah masyarakat.	3.1.
			3.2.		Melengkapi koleksi buku selain ilmu pengetahuan juga ilmu-ilmu keterampilan.
			4. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung peningkatan prestasi siswa yang berahlak mulia dan berwawasan lingkungan	4.1.	Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksisting
				4.2.	Peningkatan akhlak dan budi pekerti siswa melalui pendidikan agama
				4.3.	Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat (<i>Eco School</i>)



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
				4.4.	Penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa.
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan untuk semua	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan	1.1.	Peningkatan jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
				1.2.	Memberikan jaminan perlindungan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan	2.1	Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu
				2.2.	Pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu
				2.3.	Peningkatan mutu pelayanan, sarana dan prasarana RSUD
			3. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan	3.1	Pemenuhan kuantitas dan Peningkatan kualitas SDM Kesehatan
			4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan perbaikan gizi masyarakat	4.1.	Mendorong peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam upaya penerapan PHBS
				4.2.	Melakukan perbaikan gizi masyarakat
				4.3.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
				4.4.	Program pengembangan model operasional BKB Pos Yandu PADU
				4.5.	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
			5. Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyebaran penyakit	5.1.	Peningkatan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			menular dan pencegahan penyakit tidak menular	5.2.	Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
			6. Membangun iklim kondusif bagi berkembangnya aktifitas kreatif dan olahraga yang kompetitif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan prestasi	6.1.	Pengembangan event kepemudaan/kepemimpinan dan olah raga
				6.2.	Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga
				6.3.	Pemeliharaan Kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial bagi Anak dengan Disabilitas (ADD)
2.	Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	1. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama	1. Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, remaja dan perempuan.	1.1.	Pengembangan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
			2. Meningkatkan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang mengalami permasalahan sosial penyandang cacat.	2.1.	Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) baik kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			3. Meningkatkan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparat pemerintah daerah	3.1.	Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat
			4. Pemerataan guru dan penyuluh agama serta mengedepankan inovasi metode pembelajaran dalam rangka menjawab	4.1.	Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah
				4.2.	Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
1	2	3	4	5			
			tantangan kehidupan beragama di tengah masyarakat	4.3.	Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar		
			5. Membangun dan mengembangkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dalam keberagaman.	5.1.	Mengoptimalkan Peran lembaga politik, lembaga kemasyarakatan, organisasi pemuda dan organisasi keagamaan.		
				5.2.	Pengembangan pusat-pusat kegiatan keagamaan		
				5.3.	Penguatan dan Internalisasi ideologi Pancasila dan Nilai-nilai kebangsaan		
				5.4.	Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik		
				5.5.	Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik		
				5.6.	Peningkatan peran ormas		
	2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif		1. Penguatan kelembagaan perangkat daerah dilakukan selain melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur para aparat, juga dengan penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi	1.1.	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan dan Kelurahan		
					1.2.	Penguatan data basis RT dan RW	
					1.3.	Penguatan kelembagaan masyarakat	
					2. Penguatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	2.1.	Membangun mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan melalui musrenbang yang direalisasikan dalam RPJM
						2.2.	Pemetaan <i>stakeholder</i> potensial di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten
					3. Mendorong penegakan hukum menjalankan perundangan daerah, Peraturan Kepala Daerah sehingga dapat	3.1.	Penegakan peraturan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terutama untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan kenyamanan



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			memberikan kepastian realisasi program-program pembangunan	3.2.	Optimalisasi satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4. Meningkatkan implementasi <i>e-government</i> disertai pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daerah	4.1.	Implementasi <i>e-Government</i>
				4.2.	Penyebarluasan Infomasi melalui media cetak dan elektronik
				4.3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
			5. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah disertai Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	5.1.	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan
				5.2.	Peningkatan Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pengawas
				5.3.	Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.
			6. Mengoptimalkan keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi	6.1.	Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif
				6.2.	Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Bontang



Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2

Misi 2 Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
1	Membangun Kota yang Ramah Lingkungan	1. Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	1. Pengelolaan sampah perkotaan berbasis 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>)	1.1.	Peningkatan Penanganan Sampah
				1.2.	Peningkatan Majemen Pengelolaan Sampah Daerah
				1.3.	Pemanfaatan gas metan di TPA Sampah
			2. Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara 3R)	2.1.	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai kebutuhan
		2.2.		Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak	
		2. Meningkatnya Pengelolaan limbah	1. Pengawasan, penertiban dan perbaikan infrastruktur pengolahan limbah usaha dan kegiatan	1.1.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan
				1.2.	Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
		3. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Mengoptimalkan fungsi RTH eksisting dengan menata taman-taman kota yang berorientasi sosial dan lingkungan, serta memanfaatkan aset seperti kawasan-kawasan sempadan sungai	1.1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau
2. Mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan hutan melalui upaya-upaya penyuluhan dan pelibatan gerakan penanaman pohon	2.1.			Pelibatan masyarakat dalam menanam pohon dilingkungan perkotaan	



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	2	3	4	5		
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1. Menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas	1.1.	Penyediaan hunian baru atau Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA), Rumah Susun Milik (RUSUNAMI) dan Rumah Swadaya serta peningkatan kualitas hunian sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh	
				1.2.	Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah kampung khusus pada masyarakat miskin dan lingkungan kumuh	
		5. Menurunnya laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	1. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	1.1.	Pemanfaatan teknologi penerangan hemat energi listrik dan ramah lingkungan.	
				2. Meningkatkan bangunan gedung/fasilitas umum berwawasan lingkungan	2.1.	Pelaksanaan audit energi untuk gedung-gedung pemerintahan
					3. Mengurangi polusi udara	3.1.
				3.2.		Peningkatan perilaku budaya bersepeda
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Air Minum	1. Meningkatnya akses pelayanan air bersih	1. Meningkatkan kapasitas pelayanan air minum	1.1.	Pengembangan sumber air baku air minum	
		2. Terlaksananya konservasi sumber air	1. Menjaga ketersediaan air baku dan air minum	1.2.	Peningkatan cakupan pelayanan air minum	
3	Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas dokumen rencana tata ruang yang disertai pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan peran serta masyarakat dan teknologi informasi	1.1.	Pemetaan daerah rawan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, kegagalan teknologi industri, epidemi penyakit, gempa bumi, tsunami)	
				1.2.	Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan	
				2.1.	Penghijauan di kawasan pesisir dan mangrove	



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			2. Meningkatkan pelestarian kawasan pesisir melalui konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat dan kerjasama berbagai pihak	2.2.	Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelestarian ekosistem pesisir
		2. Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanganan bencana	1. Mitigasi dan Penanganan Bencana melalui pemetaan potensi bencana yang disertai upaya-upaya antisipasi melalui penyadaran, penyuluhan dan pelatihan	1.1.	Pemetaan daerah rawan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, kegagalan teknologi industri, epidemi penyakit, gempa bumi, tsunami)
				1.2.	Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan
				2. Menata kawasan rawan bencana	2.1.



Tabel 2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3

Misi 3. Menjadikan Kota Bontang Sebagai *Creative City* Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	1. Menjaga Stabilitas Ekonomi Kota Bontang melalui optimalisasi penerimaan PAD dan investasi	1.1.	Peningkatan Pengelolaan Fiskal daerah yang transparan, akuntable dan pro rakyat
				1.2.	Peningkatan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di semua sektor
				1.3.	Penyediaan regulasi untuk mendorong peningkatan investasi
		2. Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	1. Meningkatkan produksi perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan daerah tangkapan dan peralatan yang ramah lingkungan disertai pengembangan budidaya termasuk membangun industri rumput laut	1.1.	Membangun satu perusahaan industri pengolahan rumput laut
				1.2.	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
				1.3.	Meningkatkan produksi perikanan budidaya
			2. Mengembangkan kegiatan pariwisata pesisir dan modern disertai pembinaan dan pengembangan potensi wisata unggulan	2.1.	Peningkatan jumlah kunjungan wisata
				2.2.	Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya
				2.3.	Penetapan dan pelestarian situs cagar budaya
				2.4.	Penetapan obyek wisata laut dan pesisir unggulan yang berwawasan lingkungan.
			3. Mengembangkan sarana prasarana wisata serta promosi dan penyiapan masyarakat sadar wisata	3.1.	Penciptaan produk-produk yang mempunyai kekhasan lokal sebagai daya tarik wisata
				3.2.	Peningkatan fasilitas ekowisata, kesenian dan budaya
		3.3.		Pengembangan Promosi dan kapasitas SDM kelompok sadar wisata di kawasan ekowisata	



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
			4. Mempermudah Proses Peizinan Usaha Perdagangan menjadi hanya 3 hari	4.1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan satu pintu (PTSP)
			4.2.	Menciptakan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di sektor maritim, industri migas dan non migas serta perdagangan	
		3. Meningkatkan perdagangan dan industri	1. Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar yang sudah ada	1.1.	Peningkatan kualitas pasar tradisional
				1.2.	Pembangunan pasar tradisional
			2. Pengembangan kualitas koperasi dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam mendukung peningkatan perdagangan daerah	2.1.	Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
				2.2.	Penataan data base koperasi dan UMKM yang valid
				2.3.	Pengembangan SDM gerakan koperasi
				2.4.	Pendampingan pelaku usaha mikro
				2.5.	Fasilitasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan eskpor
2	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kota Bontang	1. Tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam menjamin kelancaran aktifitas dan mobilitas masyarakat	1.1.	Peningkatan Pembangunan jaringan Gas rumah tangga di setiap kelurahan
			2. Membangun sarana dan prasarana transportasi publik yang berorientasi pada kenyamanan dan ramah lingkungan.	2.1.	Peningkatan kualitas transportasi massal.
				2.2.	Memperlancar aksesibilitas dan pergerakan aktifitas di dalam dan antar daerah.
			2. Meningkatkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.
		1.2.			Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha mikro kecil



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
				1.3.	Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro
				1.4.	Mendorong iklim usaha bagi pelaku wira usaha baru kreatif
				1.5.	Terwujudnya Pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil
			2. Meningkatkan kegiatan industri rumah tangga melalui basis produk unggulan kelurahan	2.1.	Mengembangkan keunggulan lokal pada setiap kelurahan (<i>One Village One Product</i>)
			3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas untuk mendukung ketahanan pangan daerah	3.1.	Peningkatan produksi hasil pertanian dalam arti luas
				3.2.	Pengembangan Ketahanan Pangan Masyarakat



C. Prioritas Daerah

Sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah maka arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2017 yakni: "Penguatan sektor-sektor pembangunan daerah menuju pengembangan sektor ekonomi maritim untuk perekonomian daerah yang berdaya saing". Berdasarkan arah kebijakan di atas maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

Prioritas	Sasaran Pembangunan
Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Peningkatan daya saing dan prestasi siswa pada semua jenjang pendidikan
	Angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan meningkat
	Angka putus sekolah menurun
Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Meningkat
	Angka kesakitan (Morbiditas) menurun
	Cakupan pelayanan kesehatan meningkat
Kesejahteraan sosial dan keagamaan	Menurunkan Jumlah penduduk miskin
	Menurunkan angka pengangguran
	Mingkatkan kerukunan antar umat beragama
	Angka kriminalitas menurun
Penataan pemukiman dan infrastruktur wilayah	Berkurangnya pemukiman tidak layak huni
	Berkurangnya pemukiman dan lingkungan kumuh
	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar meningkat
Tata Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Pengelolaan sampah	Penumpukan sampah di TPS menurun
Penghijauan	Kawasan RTH meningkat
Penataan Taman Kota	Jumlah taman kota yang dikelola dengan baik meningkat
Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan	Mengkatnya masyarakat nelayan yang ramah terhadap ekosistem laut dan pesisir
	Jumlah objek wisata laut dan pesisir bertambah
Pencemaran lingkungan	Kasus-kasus pencemaran lingkungan menurun
	Kualitas air sungai dan danau meningkat
Penanggulangan Banjir	Menurunnya kawasan yang tergenang air
Polusi dan Emisi	Meningkatnya kualitas udara
Pengendalian pemanfaatan Ruang	Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap Perda tata ruang
Daya saing ekonomi - Iklim Usaha dan Investasi - Infrastruktur	Meningkatnya nilai investasi
	Meningkatnya jumlah wirausaha produktif
Ekonomi maritim	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor maritim
Perdagangan dan industri	Usaha niaga dan industri kecil menengah produktif meningkat.



Penetapan prioritas pembangunan tersebut menjadi rujukan dalam menentukan program-program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2017. Implementasi program-program pembangunan secara operasional dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah melalui belanja langsung.



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan daerah telah membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemajuan daerah juga menjadi kunci kemajuan bangsa termasuk didalamnya daya saing daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber peningkatan daya saing bangsa pada lingkup regional Asia maupun internasional.

Kota Bontang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan peningkatan kemajuan kesejahteraan rakyat dengan upaya pelaksanaan sistem pelayanan pemerintah daerah yang responsif, efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah dan salah satu mesin pendorong yang digunakan Pemerintah Kota Bontang dalam menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah mempunyai posisi sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Anggaran daerah berusaha difungsikan secara optimal sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, alat untuk memotivasi aparatur dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara umum struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kota Bontang terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi besarnya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang disebabkan tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal needs*) sedangkan kemampuan



daerah atau kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan satu kebijakan dari sisi pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2017 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut:

A. 1. Pendapatan Daerah

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Bontang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- 2) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan



penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan, Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 4) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 5) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 6) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.



- 7) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penganggaran pendapatan Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 dan perubahannya serta memperhatikan realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013.
- 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017 serta memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2017.
- 3) Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.



- 4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan;
- c. Penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017.
- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 3) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2017.



- 4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017.
- 5) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.
- 6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- 7) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 8) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan-penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Secara umum **arah kebijakan pendapatan daerah**, adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



2. Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
3. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.

A. 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

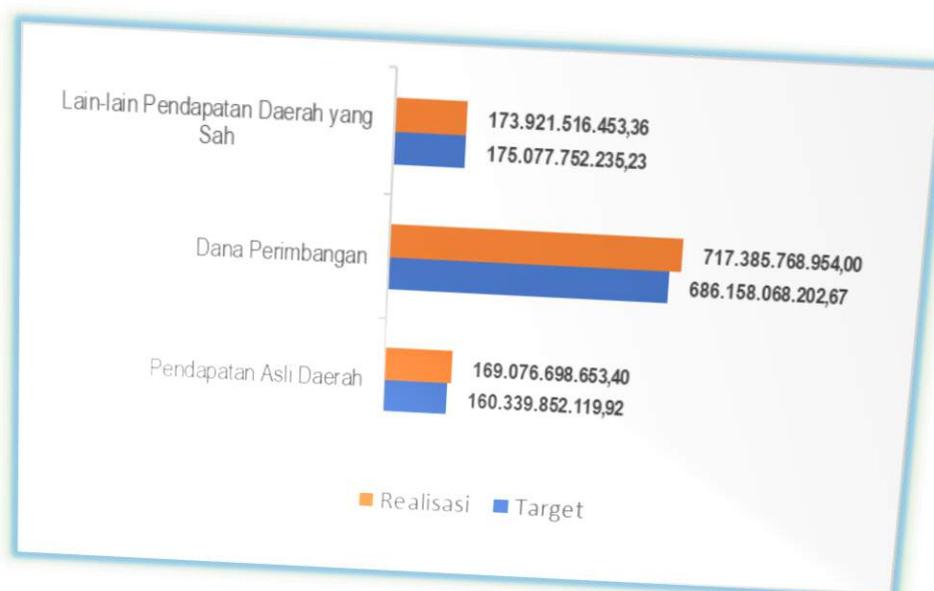
Bentuk kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam upaya peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah melakukan upaya antara lain:

1. Melakukan intensifikasi dalam proses pemungutan potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan cara penyederhanaan administrasi dan restrukturisasi kelembagaan pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah;
 - c. Manajemen data base wajib pajak dan wajib retribusi sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan;
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan agar proses pemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien, validasi dan updating data, serta melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik;
 - e. Pemberian reward dan punishment dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Pelaksanaan uji petik untuk memprediksi potensi dan menentukan target pajak dan retribusi;

- g. Pengawasan penyetoran untuk menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah melalui pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses penyetoran PAD, dan melakukan evaluasi.
2. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah melalui pendataan penerimaan.

A. 3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan tahun 2017 sebesar Rp.1.021.575.672.557,82 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.160.339.852.119,92, Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.686.158.068.202,67 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.175.077.752.235,23. Jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.060.383.984.060,76 atau 103,80% dari target yang ditetapkan, terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.169.076.698.653,40 atau 105,45% dari target. Realisasi pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.717.385.768.954,00 atau 104,55% dari target, dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.173.921.516.453,36 atau 99,34% dari target.



Gambar 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017



Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, sedangkan untuk penerimaan Dana Perimbangan mengalami penurunan cukup signifikan. Perkembangan realisasi pendapatan Kota Bontang Tahun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun Anggaran 2017 dan 2016

URAIAN	2017	2016	PERTUMBUHAN (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.060.383.984.060,76	1.183.838.415.872,19	-11,64
1. Pendapatan Asli Daerah	169.076.698.653,40	150.349.246.779,19	11,08
- Hasil Pajak Daerah	82.122.896.197,00	71.426.252.746,00	13,03
- Hasil Retribusi Daerah	4.596.396.523,51	6.528.480.653,70	-42,03
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.014.543.695,44	4.547.569.478,33	24,39
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.342.862.237,45	67.846.943.901,16	11,13
2. Dana Perimbangan	717.385.768.954,00	910.458.458.699,00	-26,91
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	411.561.773.702,00	557.539.086.900,00	-35,47
- Dana Alokasi Umum	203.310.751.000,00	202.805.729.000,00	0,25
- Dana Alokasi Khusus	102.513.244.252,00	150.113.642.799,00	-46,43
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	173.921.516.453,36	123.030.710.394,00	29,26
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	128.188.899.000,00	92.634.792.000,00	27,74
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00	33,33
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.990.463.000,00	25.305.995.000,00	25,55
- Penerimaan Lain-Lain	4.242.154.453,36	89.923.394,00	97,88

Sumber: BPKD Kota Bontang

Dari Tabel di atas terlihat bahwa secara umum realisasi pendapatan Kota Bontang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dari Rp.910.458.458.699,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.717.385.768.954,00 pada tahun 2017. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan pada komponen Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah, namun karena masih besarnya proporsi komponen Dana Perimbangan terhadap pendapatan Kota Bontang, mengakibatkan perkembangan pendapatan daerah mengalami tren penurunan. Proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah menunjukkan kontribusi komponen pendapatan pada pendapatan agregat Kota Bontang. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Bontang tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Komposisi Pendapatan Kota Bontang
Tahun 2016 dan 2017 (%)



Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 meningkat signifikan dari 12,70% pada tahun 2016 menjadi 15,94% dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah meningkat relatif cukup pesat dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang.

A.3.1. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2017

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp.160.339.852.119,92, dengan realisasi mencapai Rp.169.076.698.653,40 atau 105,45% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah



dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp.74.240.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.82.122.896.197,00 atau 110,62% dari target yang ditetapkan.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp.5.766.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.596.396.523,51 atau 79,71% dari target yang direncanakan.

c. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2017 secara keseluruhan PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp.5.512.793.695,44 dengan realisasi mencapai Rp.6.014.543.695,44 atau 109,10% dari target yang direncanakan. PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada BPD KALTIM, Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. BME dan PT. Bontang Transport.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya, Pendapatan dari BLUD, Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pendapatan Dana BOS.

Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp.74.820.358.424,48 dengan realisasi mencapai Rp.76.342.862.237,45 atau 102,03% dari target yang direncanakan. Dari realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut terdapat pendapatan dari RSUD Kota Bontang selaku BLUD sebesar Rp.51.334.136.076,41 yang dikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Bontang.

A.3.2. Dana Perimbangan



Dana Perimbangan dianggarkan tahun 2017 sebesar Rp.686.158.068.202,67, dengan realisasi mencapai Rp.717.385.768.954,00 atau 104,55% dari target yang direncanakan, terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp.372.144.408.926,67 dengan realisasi sebesar Rp. 411.561.773.702,00 atau 110,59% dari target yang direncanakan.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.203.310.751.000,00 dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.110.702.908.276,00 dengan realisasi sebesar Rp.102.513.244.252,00 atau 92,60% dari target yang direncanakan.

A.3.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah Yang Sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Provinsi serta Penerimaan Lain-Lain Yang Sah. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp.173.921.516.453,36 atau 99,34% dari target yang direncanakan sebesar Rp.175.077.752.235,23, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.126.359.267.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.128.188.899.000,00 atau 101,45% dari target yang direncanakan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

b. Dana Penyesuaian



Realisasi Pendapatan dari Dana Penyesuaian pada tahun 2017 merupakan pendapatan dana insentif daerah sebesar Rp.7.500.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan.

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi

Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur dianggarkan sebesar Rp.36.800.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.33.990.463.000,00 atau 92,37% dari target yang dianggarkan.

d. Penerimaan Lain-Lain

Penerimaan Lain-Lain Yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp.4.242.154.453,36 atau 96,01% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.4.418.485.235,23.

Pada tabel dibawah ini diuraikan besaran target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun Anggaran 2017

Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	1.021.575.672.557,82	1.060.383.984.060,76	103,80
1. Pendapatan Asli Daerah	160.339.852.119,92	169.076.698.653,40	105,45
1.1 Hasil Pajak Daerah	74.240.000.000,00	82.122.896.197,00	110,62
Pajak Hotel	955.000.000,00	1.133.926.531,00	118,74
Pajak Restoran	5.165.000.000,00	7.136.344.791,00	138,17
Pajak Hiburan	500.000.000,00	541.810.458,00	108,36
Pajak Reklame	455.000.000,00	563.504.950,00	123,85
Pajak Penerangan Jalan	24.500.000.000,00	25.723.105.202,00	104,99
Pajak Parkir	90.000.000,00	96.632.800,00	107,37
Pajak Air Tanah	5.500.000.000,00	5.812.303.551,00	105,68
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	0	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000,00	0	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.500.000.000,00	35.293.203.997,00	105,35
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.500.000.000,00	5.822.063.917,00	166,34
1.2 Hasil Retribusi Daerah	5.766.700.000,00	4.596.396.523,51	79,71
Retribusi Jasa Umum	1.775.000.000,00	1.633.391.120,00	92,02



Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	%
Retribusi Jasa Usaha	822.200.000,00	976.406.751,00	118,76
Retribusi Perijinan Tertentu	3.169.500.000,00	1.986.598.652,51	62,68
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.512.793.695,44	6.014.543.695,44	109,10
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.512.793.695,44	6.014.543.695,44	109,10
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.820.358.424,48	76.342.862.237,45	102,03
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	467.300.000,00	467.300.000,00	100,00
Penerimaan Jasa Giro	1.680.000.000,00	2.256.604.376,62	134,32
Pendapatan Bunga Deposito	0	0	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	116.524.784,00	207.371.803,64	177,96
Pendapatan Denda Pajak	938.565.716,48	908.422.800,78	96,79
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	365.000.000,00	220.566.250,00	60,43
Pendapatan dari Pengembalian	278.500.000,00	337.645.626,00	121,24
Pendapatan dari BLUD	49.500.000.000,00	51.334.136.076,41	103,71
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.752.683.260,00	5.948.204.230,00	103,40
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.200.000.000,00	687.781.074,00	57,32
Pendapatan Dana BOS	14.521.784.664,00	13.974.830.000,00	96,23
2. Dana Perimbangan	686.158.068.202,67	717.385.768.954,00	104,55
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	372.144.408.926,67	411.561.773.702,00	110,59
Bagi Hasil Pajak	130.276.396.854,67	163.374.108.391,00	125,41
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	241.868.012.072,00	248.187.665.311,00	102,61
2.2 Dana Alokasi Umum	203.310.751.000,00	203.310.751.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum	203.310.751.000,00	203.310.751.000,00	100,00
2.3 Dana Alokasi Khusus	110.702.908.276,00	102.513.244.252,00	92,60
Dana Alokasi Khusus Fisik	78.050.835.276,00	72.999.454.004,00	93,53
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	32.652.073.000,00	29.513.790.248,00	90,39
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	175.077.752.235,23	173.921.516.453,36	99,34
3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	126.359.267.000,00	128.188.899.000,00	101,45



Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	126.359.267.000,00	128.188.899.000,00	101,45
3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36.800.000.000,00	33.990.463.000,00	92,37
Bantuan Keuangan dari Provinsi	36.800.000.000,00	33.990.463.000,00	92,37
3.4 Penerimaan Lain-Lain	4.418.485.235,23	4.242.154.453,36	96,01
Penerimaan Lain-Lain	4.418.485.235,23	4.242.154.453,36	96,01

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2018

A. 4. Permasalahan dan Solusi

Tantangan Pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan otonomi daerah dan implementasi Desentralisasi fiskal tentu tidak sedikit terutama dalam upaya mengurangi kesenjangan fiskal yang ada, dalam hal ini upaya pengelolaan pendapatan daerah harus mendapat perhatian agar mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, beberapa permasalahan masih dialami oleh Pemerintah Kota Bontang, antara lain:

a) Permasalahan

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas teknologi sistem informasi dan SDM Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Masih kurangnya partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak dan retribusi.
3. Belum optimalnya alokasi, transfer dan petunjuk teknis pelaksanaan dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat.
4. Lemahnya manajemen dan pengelolaan pendapatan daerah di unit-unit pengelola PAD khususnya dari sisi administrasi dan pengawasan.
5. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah.

b) Solusi

1. Penerapan informasi teknologi (IT) dan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.



2. Mendorong partisipasi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah dengan melakukan peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Memberikan dukungan data dan informasi yang akurat, cepat, dan tepat sehingga dalam formulasi penghitungan penetapan alokasi dana perimbangan bersesuaian dengan realitas kondisi daerah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
4. Melakukan perbaikan dan tertib administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Serta melakukan pengawasan dan evaluasi berjangka mulai dari aparat pelaksana maupun wajib pajak dan wajib retribusi.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan peraturan daerah misalnya pengadaan mobil operasional.
6. Peningkatan SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.
7. Sosialisasi peraturan daerah melalui berbagai media.
8. Pemberian *reward* dan *punishment* untuk membangkitkan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Penyerahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi pada perlu dilakukannya penyesuaian yang sangat signifikan khususnya menyangkut manajemen keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan merumuskan arah kebijakan mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif



untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2017 secara umum diarahkan:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2017 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2017.
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2017 dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan yang harus dialokasikan pada tahun 2017.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, proporsi belanja langsung diupayakan mendapatkan alokasi lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai. Hal ini merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Pada dasarnya belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagai berikut:



1. Kebijakan belanja/pengeluaran diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal sehingga diharapkan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan daerah.
2. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi perangkat pengelola keuangan daerah, serta penerapan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian pembangunan daerah.
3. Kebijakan untuk mendorong peran dan partisipasi swasta dalam pembangunan daerah melalui penanaman modal maupun pelayanan publik.

Belanja daerah tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.1.096.221.065.820,00 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.344.468.509.258,00 atau sebesar 31,42% dan belanja langsung sebesar Rp.751.752.556.562,00 atau sebesar 68,58%. Hal ini memperlihatkan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan.

B.1.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terkait dengan strategi penganggaran belanja tidak langsung pada APBD Kota Bontang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD



Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial



- a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- c) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.
- f) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- g) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan



dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

- h) Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
- i) Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2014 serta Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2014 tentang Perubahan kedua dan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.



4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B.1.2. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), standar satuan harga, RKBK serta RKPBU.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Penganggaran Honorarium PNSD pada prinsipnya tidak dianggarkan dalam RKA SKPD, kecuali untuk yang diperbolehkan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang mengenai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan performance kinerja.



Penganggaran honorarium Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang memperhatikan:
 1. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
 2. Untuk belanja hadiah/souvenir/piala dalam bentuk barang menggunakan rekening belanja hadiah/souvenir/piala.
- d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam



- bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
 - f) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
 - g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing perangkat daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah.



- h) Penganggaran belanja bahan bakar kendaraan bermotor hanya dianggarkan untuk kendaraan operasional sebanyak unit kendaraan operasional yang ada dan rencana pengadaan kendaraan yang baru.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- j) Penganggaran belanja hibah dalam bentuk barang dianggarkan pada rekening Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- k) Penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan pada rekening Belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang



ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penganggaran belanja ini hanya dialokasikan pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Rekening transport akomodasi untuk narasumber/tenaga ahli menggunakan rekening perjalanan dinas untuk non PNSD.

- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan daerah, mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.



Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.



Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk Pengadaan belanja modal yang berbeda rekening rincian objeknya dan tidak dapat disatukan paket pengadaannya maka belanja terkait pengadaan dianggarkan dalam masing-masing rekening rincian objek.

B. 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Bontang untuk tahun 2017 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

No.	URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	1.096.221.065.820,00	945.166.142.323,00	86,22
1.	Belanja Tidak Langsung	344.468.509.258,00	305.175.409.853,00	88,59
	- Belanja Pegawai	315.159.234.496,00	281.386.137.326,00	89,28
	- Belanja Hibah	14.447.674.762,00	9.540.913.309,00	66,04
	- Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	897.579.508,00	89,76
	- Belanja Bantuan Keuangan	3.706.600.000,00	3.706.499.110,00	100,00
	- Belanja Tidak Terduga	10.155.000.000,00	9.644.280.600,00	94,97
2	Belanja Langsung	751.752.556.562,00	639.990.732.470,00	85,13
	- Belanja Pegawai	92.426.332.308,00	74.327.206.935,00	80,42
	- Belanja Barang dan Jasa	389.645.443.000,00	344.175.470.611,00	88,33
	- Belanja Modal	269.680.781.254,00	221.488.054.924,00	82,13

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2018

Dari tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat serapan belanja APBD Tahun 2017 sebesar 86,22% dari total anggaran, mengalami peningkatan sebesar 1,86% dibandingkan dengan tingkat serapan belanja pada tahun 2016 sebesar 84,36%. Realisasi belanja daerah pada tahun 2017 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.305.175.409.853,00 atau 88,59% dan Belanja Langsung sebesar Rp.639.990.732.470,00 atau 85,13%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, secara umum realisasi Belanja



Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2016

No.	URAIAN BELANJA	REALISASI		Perubahan (%)
		2016	2017	
	BELANJA DAERAH	1.136.526.669.836,00	945.166.142.323,00	-20,25
1.	Belanja Tidak Langsung	425.060.488.148,00	305.175.409.853,00	-39,28
	- Belanja Pegawai	383.041.695.539,00	281.386.137.326,00	-36,13
	- Belanja Hibah	20.296.422.600,00	9.540.913.309,00	-112,73
	- Belanja Bantuan Sosial	39.429.050,00	897.579.508,00	95,61
	- Belanja Bantuan Keuangan	474.902.872,00	3.706.499.110,00	87,19
	- Belanja Tidak Terduga	21.208.038.087,00	9.644.280.600,00	-119,90
2	Belanja Langsung	711.466.181.688,00	639.990.732.470,00	-11,17
	- Belanja Pegawai	91.300.714.836,00	74.327.206.935,00	-22,84
	- Belanja Barang dan Jasa	374.872.477.514,00	344.175.470.611,00	-8,92
	- Belanja Modal	245.292.989.338,00	221.488.054.924,00	-10,75

Sumber: BPKD Kota Bontang, 2018

B.2.1. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam APBD kota Bontang Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp.344.468.509.258,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Belanja Tak Terduga. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.305.175.409.853,00 dengan persentase pencapaian sebesar 88,59 persen dari target yang ditetapkan. Secara rinci target dan realisasi belanja tidak langsung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai;** Realisasi belanja pegawai hingga akhir tahun 2017 sebesar Rp.281.386.137.326,00 atau 89,28% dari target anggaran sebesar Rp.315.159.234.496,00
- Belanja Hibah;** Rencana belanja pada pos belanja hibah dialokasikan sebesar Rp.14.447.674.762,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.9.540.913.309,00 dengan persentase pencapaian sebesar 66,04 persen dari anggaran yang ditetapkan.

- c) **Belanja Bantuan Sosial;** Rencana belanja pada pos belanja bantuan sosial ditetapkan dengan plafon sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.897.579.508,00 atau 89,76 persen.
- d) **Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik;** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.706.600.000,00, pada tahun 2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.706.499.110,00 atau 99,99 persen.
- e) **Belanja Tak Terduga;** Alokasi anggaran belanja pada pos belanja tidak terduga ditetapkan sebesar Rp.10.155.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.9.644.280.600,00 dengan persentase pencapaian sebesar 94,97 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Secara grafis perkembangan realisasi komponen Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:



B.2.2. Target dan Realisasi Belanja Langsung

Rencana Belanja Langsung dalam APBD Kota Bontang Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.751.752.556.562,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp.639.990.732.470,00 atau sebesar 85,13% yang meliputi:

- a) **Belanja Pegawai;** rencana belanja pegawai ditetapkan dengan pagu sebesar Rp.92.426.332.308,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp.74.327.206.935,00 atau sebesar 80,42%.

- b) **Belanja Barang dan Jasa;** rencana belanja barang dan jasa ditetapkan dengan pagu sebesar Rp.389.645.443.000,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp.344.175.470.611,00 atau sebesar 88,33%.
- c) **Belanja Modal;** rencana belanja modal ditetapkan dengan pagu sebesar Rp.269.680.781.254,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp.221.488.054.924,00 atau sebesar 82,13%.

Secara grafis perkembangan realisasi komponen Belanja Langsung pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut ini:



Gambar 3.4. Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Langsung Tahun 2016 dan 2017

B.3. Surplus/Defisit APBD

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah



yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester tahun anggaran berjalan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2017, APBD Kota Bontang mengalami surplus sebesar Rp.115.217.841.737,76 yang merupakan selisih positif antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah. Kondisi ini disebabkan antara lain karena capaian realisasi beberapa komponen pendapatan daerah melampaui target yang ditetapkan.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016.
- b) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.



- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- d) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- c) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud



- guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e) Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal's (MDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - f) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - g) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2017 bersaldo nol.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

C.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

C.1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada tahun 2017 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan SILPA tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja. Total penerimaan pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp.74.645.393.262,18 atau sebesar SILPA Tahun Anggaran 2016.

C.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Bontang tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan mengingat realisasi penerimaan daerah yang relatif terbatas sehingga alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat dan belanja program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

C.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah



Dalam Tahun Anggaran 2017, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.74.645.393.262,18 yang seluruhnya merupakan penerimaan SILPA tahun 2016 dengan realisasinya mencapai 100% dari anggaran. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2017 tidak dialokasikan anggaran mengingat realisasi penerimaan daerah yang relatif terbatas sehingga alokasi anggaran sepenuhnya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta belanja program/kegiatan pada tahun 2017.

C.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pada akhir Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Bontang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp.189.863.234.999,94. SILPA tersebut terdiri dari surplus APBD sebesar Rp.115.217.841.737,76 dan pembiayaan netto sebesar Rp.74.645.393.262,18.

D. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi permasalahan utama. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.
2. Regulasi sering mengalami perubahan sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Terbatasnya sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana di atas, beberapa solusi yang perlu untuk dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan alokasi dana perimbangan.
3. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal.
4. Mendorong peran serta dan partisipasi aktif pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.



5. Melakukan penyesuaian dan sosialisasi terhadap perubahan regulasi.
6. Restrukturisasi kelembagaan pengelola keuangan daerah.
7. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan perangkat daerah melalui bimbingan teknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah.



BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Sebagaimana kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang diklasifikasikan ke dalam 23 urusan wajib dan 5 urusan pilihan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran dari visi misi pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran pembangunan merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Adapun pencapaian beberapa sasaran yang merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan di Kota Bontang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	2015		Capaian
				2016	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan untuk Semua	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Tahun	10,38	10,39	10,39	100
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,77	12,82	12,79	99,77
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan untuk Semua	Angka Kematian Bayi	Rasio	11,6	10,2	7,63	133,68
		Angka Kematian Ibu	Rasio	110,9	197	131,61	149,68
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	0,39	<5	0,17	100
		Angka Harapan Hidup	Tahun	73,69	73,94	73,71	99,69
3	Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial	Tingkat Pengangguran	Persen	12,18	11,98	12,08	99,17

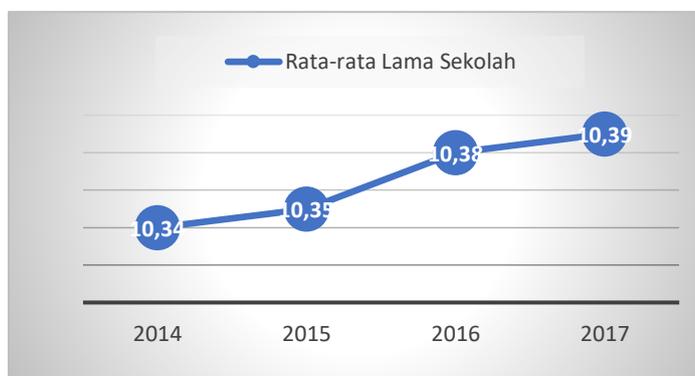


4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	64,74/B	B (66,3)	B (65,1)	98,19
		Nilai LPPD	Nilai	ST (3,2802)	ST	ST	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,43	80,23	75,36	93,93
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	43.20/C	B	B (62,27)	100
		Nilai Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi)	Poin/skor		2,6	3,29	126,54
5	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	96,54	96,54	98,76	102,3
		Cakupan Penanganan Sampah	Persen	94,85	94,85	94,87	100,02
6	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	98,32	98,32	98,74	100,43
7	Terselesaikannya Permasalahan Banjir	Luas Wilayah Tergenang	Ha		33,81	29,81	113,42
8	Tersedianya Infrastruktur Kota yang Memadai untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota	Panjang Jalan Kondisi Baik	Persen	95,8	95,8	97,64	101,92
		Jumlah sarana perdagangan/pasar	Unit	3	3	3	100
		Jaringan gas rumah tangga	Kelurahan	3	5	14	280

Berdasarkan capaian sasaran kinerja pembangunan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian 100% keatas sebanyak 14 indikator dari total 20 indikator, sedangkan 6 indikator lainnya belum tercapai sesuai target, atau tingkat capaiannya kurang dari 100%. Namun demikian, secara umum kinerja indikator tersebut menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum, capaian indikator sasaran pada tahun 2017, memiliki progres yang lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2016. Untuk itu, dukungan program yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran, sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa:

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bontang pada tahun 2017 sebesar 10,39 tahun. Hasil ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan tahun 2017 dengan capaian 100 persen. Dalam kurun empat tahun terakhir (2014-2017), angka RLS Kota Bontang terus mengalami peningkatan dari 10,34 tahun 2014 menjadi 10,39 tahun 2017.



Gambar 4.1. Perkembangan RLS Kota Bontang Tahun 2014 – 2017

2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bontang pada tahun 2017 sebesar 12,79 tahun dengan tingkat capaian 99,77 persen dari target yang ditetapkan sebesar 12,82 tahun. Namun demikian, Dalam kurun empat tahun terakhir (2014-2017), Angka HLS Kota Bontang terus mengalami peningkatan dari 12,5 tahun 2014 menjadi 12,79 tahun 2017.

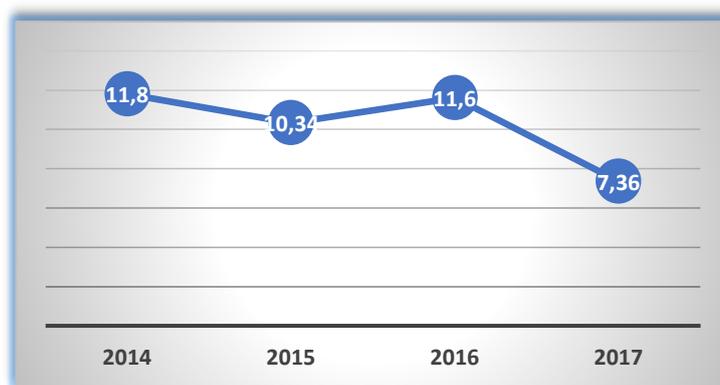


Gambar 4.2. Perkembangan Angka HLS Tahun 2014-2017

Capaian kedua indikator kinerja tersebut di atas, tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, adanya perbaikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pemenuhan fasilitas pendidikan

bagi murid dan guru serta kebijakan subsidi biaya sekolah pada jenjang Pendidikan anak usia dini hingga jenjang Pendidikan dasar melalui pemberian dana bantuan operasional sekolah.

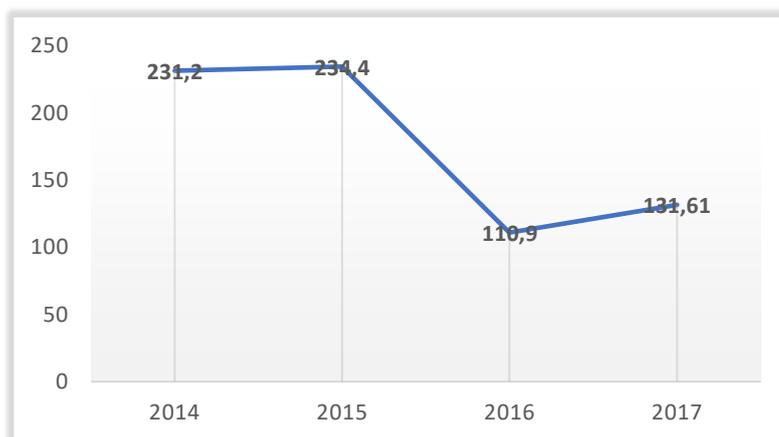
3. Pencapaian Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2017 sebesar 7,63 per 1.000 kelahiran hidup dengan target 10,20 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 29 kasus kematian bayi dari 3.799 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi tahun 2017 mengalami penurunan 3,97 (34,22 persen) dibanding tahun 2016.



Gambar 4.3. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2014-2017

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang mengarah ke pencapaian yang bersifat negatif, semakin kecil rasionya berarti semakin baik. Dilihat dari grafik di atas, AKB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi capaian sebesar 11,8, 10,34 dan 11,6 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni 7,63 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target SDG's sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka capaian AKB Kota Bontang pada tahun 2011-2017 dibawah angka MDG's atau dengan kata lain melampaui target.

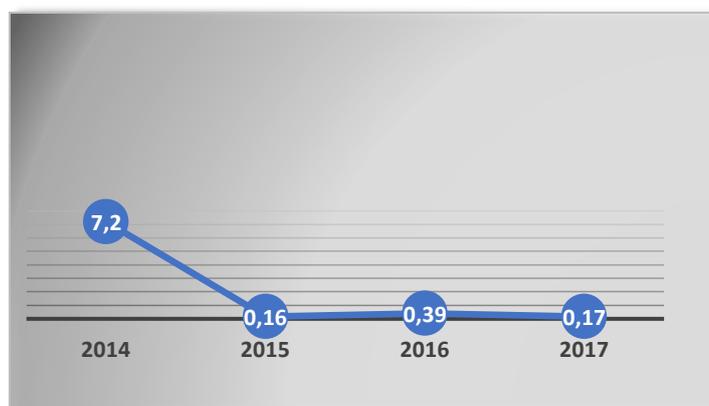
4. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 sebesar 131,61 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian 149,68 persen dari target 197 per 100.000 kelahiran hidup. Dimana pada tahun 2017 terdapat 5 kasus kematian ibu dari 3.799 bayi lahir hidup. Angka Kematian Ibu tahun 2017 mengalami kenaikan 20,71 (18,67 persen) dibanding tahun 2016.



Gambar 4.4. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2014-2017

Sama halnya dengan AKB, semakin kecil rasio Angka Kematian Ibu (AKI) maka semakin baik hasil capaiannya. Indikator AKI dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 terjadi penurunan sangat signifikan yakni 123,5 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan tahun 2015.

5. Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2017 sebesar 0,17 persen atau ada sebanyak 30 balita dengan status gizi kurang dari 17.573 balita. Pencapaian ini menunjukkan hasil yang sangat baik jika dibandingkan dengan target Nasional <5 persen. Prevalensi Balita Gizi Kurang mengalami penurunan sebesar 0,22 (56,41 persen) dibanding tahun 2016. Pada gambar 4.5 menunjukkan bawah Indikator prevalensi gizi kurang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan dari 7,2 persen menjadi 0,17 persen.



Gambar 4.5. Perkembangan Angka Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2014-2017

- Angka Harapan Hidup Kota Bontang tahun 2017 ditetapkan 73,94 tahun dengan realisasi sebesar 73,71 tahun dengan capaian 99,69 persen. Pada dasarnya angka harapan hidup ini adalah angka harapan hidup untuk tahun 2016 yang merupakan penerbitan terakhir dari BPS Kota Bontang. Sedangkan angka harapan hidup mengalami peningkatan 0,02 tahun (0,03 persen) dibanding tahun 2016.

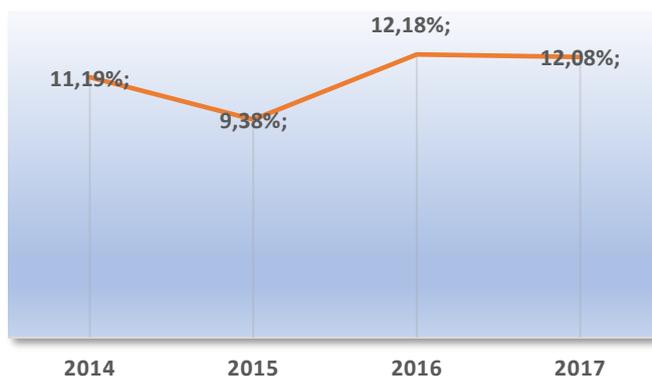


Gambar 4.6. Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2014-2017

Pada grafik diatas menunjukkan bawah angka harapan hidup tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 secara konsisten mengalami peningkatan dari 73,67 tahun 2014 menjadi 73,71 tahun 2017.

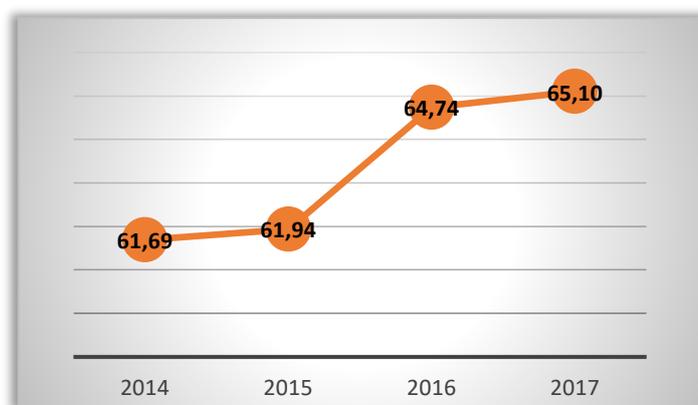
- Tingkat pengangguran ditargetkan 11,98 persen, terealisasi 12,08 persen dengan capaian 99,17 persen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, jumlah angkatan kerja 79.638 jiwa. Jumlah penduduk yang tidak bekerja 9.697 jiwa atau 12,18 persen dari jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran tahun 2017 menurun tipis 0,82 persen dibanding tahun 2016. Dalam kasus pengangguran di Kota Bontang, angka pengangguran jumlahnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan investasi dan proyek pembangunan yang dilakukan sejumlah perusahaan yang memiliki porsi terbesar dalam struktur ekonomi Kota Bontang.

Tingkat pengangguran sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu 12,18 persen dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 9,38 persen.



Gambar 4.7. Perkembangan Tingkat Pengangguran Tahun 2014-2017

8. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bontang tahun 2017 ditargetkan 66,3/B dengan realisasi sebesar 65,1/B dan capaian 98,79 persen. Realisasi ini lebih rendah 1,2 dibanding target yang ditetapkan. Nilai AKIP tersebut merupakan hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur dan RB tahun 2017 atas AKIP Kota Bontang tahun 2016 dan dipublikasikan di tahun 2017. Predikat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bontang tahun 2017 meningkat 0,56 dibanding tahun 2016. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sejak tahun 2014 secara terus menerus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 mendapat nilai 61,69 dan meningkat hingga 65,10 pada tahun 2017. Kota Bontang mendapat predikat B sejak tahun 2014 hingga tahun 2017.

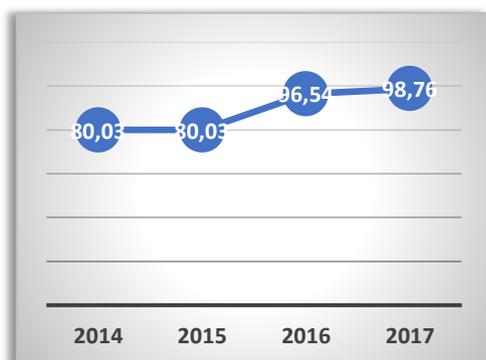


Gambar 4.8. Perkembangan Nilai LHE AKIP Tahun 2014-2017

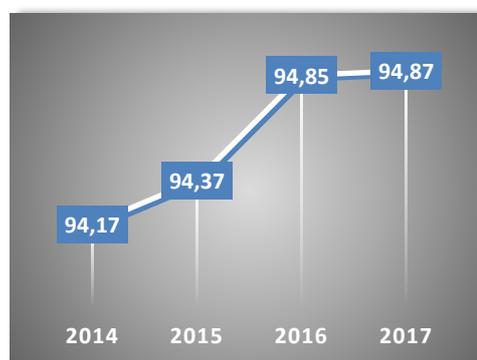


9. LPPD Kota Bontang tahun 2017 ditargetkan mendapat predikat Sangat Tinggi (ST) dengan realisasi Sangat Tinggi (ST), sesuai dengan target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bontang. Nilai LPPD Kota Bontang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014 dengan perolehan nilai diatas 3 (tiga) atau predikat Sangat Tinggi (ST).
10. Survey kepuasan masyarakat tahun 2017 ditargetkan 80,23 dengan realisasi sebesar 75,36 dan capaian 93,93 persen. Realisasi ini lebih rendah 4,1 dari target yang ditetapkan. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2017 menurun 5,12 dibanding tahun 2016. Survey kepuasan masyarakat secara komprehensif mulai dilaksanakan Pemerintah Kota tahun 2015 lalu, melalui kerja sama dengan STITEK Kota Bontang seperti pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016 dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Perangkat Daerah. Terjadi peningkatan nilai tahun 2016 sebesar 4,87 dibanding tahun 2015. Sedangkan tahun 2017 menurun 4,07 dibandingkan tahun 2016. Karena dilakukan secara mandiri, SKM pada tahun 2016 hanya dilaksanakan oleh 10 Perangkat Daerah/Unit Kerja. Sedangkan pada tahun 2017 dilaksanakan pada 34 Perangkat Daerah/Unit Kerja.
11. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2017 terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu predikat B. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2017 meningkat sangat signifikan dibanding tahun 2016, yakni 44,14 persen.
12. Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) tahun 2017 ditargetkan 2,6 dengan realisasi sebesar 3,29 dan capaian 126,54 persen. Realisasi ini lebih tinggi 0,9 dari target yang ditetapkan. Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru pertama kali dilakukan pengukuran.
13. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 96,54 persen dengan realisasi sebesar 98,76 persen dan capaian 102,30 persen. Realisasi ini lebih tinggi sebesar 2,22 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi indikator kinerja Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik tahun 2017 lebih tinggi 2,30 persen dibandingkan tahun 2016.
14. Indikator kinerja Cakupan Penanganan Sampah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 94,85 persen dengan realisasi sebesar 94,87 persen dan capaian 100,02

persen. Realisasi ini lebih tinggi sebesar 0,02 persen dari target yang ditetapkan. realisasi indikator kinerja Cakupan Penanganan Sampah tahun 2017 lebih tinggi 0,02 persen dibandingkan tahun 2016.

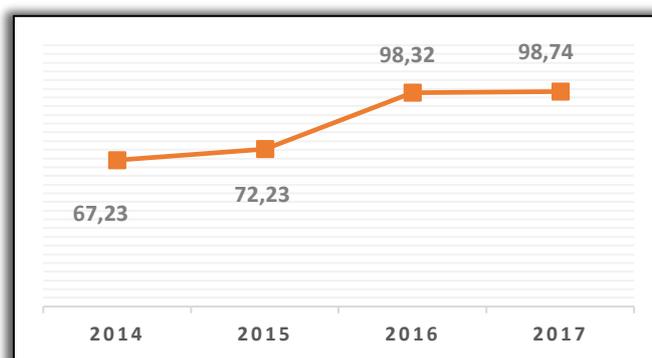
**Gambar 4.9**

Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2014-2017

**Gambar 4.10**

Perkembangan Cakupan Penanganan Sampah Tahun 2014-2017

15. Cakupan Pelayanan Air Minum pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 98,32 persen, terealisasi sebesar 98,74 persen dengan capaian 100,43 persen. Realisasi tersebut lebih tinggi 0,42 persen dari target yang telah ditetapkan. Realisasi Cakupan Pelayanan Air Minum tahun 2017 lebih tinggi 0,43 persen dibanding tahun 2016.

**Gambar 4.11.** Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2014-2017

16. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Luas Wilayah Tergenang pada tahun 2017 sebesar 33,81 Ha, terealisasi sebesar 29,81 Ha dengan capaian 113,42 persen. Realisasi tersebut lebih rendah 4 Ha dari target yang telah ditetapkan.
17. Panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2017 ditargetkan 95,80 persen (195.825 m) dengan realisasi sebesar 97,64 persen (199.586 m) atau 101,92 persen. Total panjang



jalan di Kota Bontang 204.410 meter. Panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2017 meningkat 1,92 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Selama 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2014-2017) panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Bontang terus meningkat dan melebihi target yang ditetapkan. Jalan dalam kondisi baik tahun 2014 sebanyak 95,65 persen meningkat menjadi 97,64 persen pada tahun 2017.

18. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan/pasar yang ditargetkan Pemerintah Kota Bontang adalah modernisasi pasar Rawa Indah dengan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai dilakukan pada tahun 2016, peningkatan prasarana pasar Citra Mas Loktuan serta kegiatan DAK terhadap Revitalisasi Pasar Tradisional. Jumlah sarana perdagangan/pasar tahun 2017 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya disebabkan pemerintah saat ini focus untuk melanjutkan pembangunan dan pengembangan pasar Rawa Indah sehingga tidak ada perubahan pencapaian. Indikator sarana perdagangan/pasar tidak ada perubahan selama 3 tahun terakhir karena hanya melakukan pengembangan terhadap pasar yang telah ada dari pasar tradisional menjadi pasar modern.
19. Pembangunan jaringan gas untuk sambungan rumah tangga pada tahun 2017 ditargetkan dapat mencakup 5 Kelurahan. Berdasarkan realisasinya pada tahun 2017 pemasangan jaringan gas untuk rumah tangga telah mencakup 14 Kelurahan dengan satuan sambungan mencapai 8.000 SR dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp 98,89 Miliar. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Kota Bontang yang secara intensif dan bersungguh-sungguh berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Persentase jaringan gas rumah tangga tahun 2017 meningkat 366,67 persen dibandingkan dengan tahun 2016, yakni dari 3 kelurahan menjadi 14 kelurahan. Selama 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2014-2017), jaringan gas rumah tangga di Kota Bontang terus mengalami peningkatan, dan yang paling signifikan adalah peningkatan pada tahun 2017 yakni 11 kelurahan. Sedangkan jumlah sambungan gas rumah tangga sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.2. Sambungan Gas Rumah Tangga 2013-2017

Sumber Dana	Total Sambungan Rumah	Total SR Aktif
APBN (2013)	3.690 SR	3.556 SR
APBN (2015)	1.448 SR	1.403 SR
APBN (2017)	8.000 SR	296 SR
Jumlah Total	13.138 SR	5.255 SR

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 23 urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pendidikan

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pendidikan antara lain: meningkatkan akses pemerataan pendidikan sehingga kemudahan akses memperoleh pendidikan dan kesenjangan mutu antar sekolah dan antar wilayah kecamatan dapat diseimbangkan secara proporsional, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif, berkarakter serta mempunyai daya saing yang dilandasi dengan akhlak mulia dan meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama.

Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program pokok sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui Pembangunan Sarana Prasarana Kelas SD dan SMP, Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi), Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD), Rehabilitasi Sedang/Berat SD Negeri 005 Bontang Selatan (DAK Fisik Reguler



Bidang Pendidikan SD), Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 9 (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP), Pengadaan Komputer SMP Negeri 4 (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP), Pengadaan Komputer SMP Negeri 6 (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP), Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN dan SMPN, Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga, Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah, Penyelenggaraan Paket A Setara SD, Penyelenggaraan Paket B Setara SMP, Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa, serta Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah.

- 3) Program Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Paket C setara SMU, Peningkatan Prestasi Siswa dan Pembinaan Kegiatan, serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah.
- 4) Program Pendidikan Non Formal, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKB
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi, Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik, Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan, Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan, Penyediaan Dana Pendamping Tambahan Penghasilan Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) APBN
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK)



- TK, SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan SLBN, Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMAN dan SMKN, serta Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)
- 8) Program Peningkatan Manajemen Pendidikan, dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi dan Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya
 - 9) Program Pengembangan Akademi Komunitas Bontang (AK) dan Bontang Technopark, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah dan Penyediaan Dana Operasional Lembaga Akademi Komunitas dan BTP
 - 10) Program Pendidikan Inklusif, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre, Operasionalisasi Lembaga Autis Centre, Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Autis Centre, serta Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusif
 - 11) Program Pendidikan Tinggi, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang serta Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM melalui Beasiswa.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pendidikan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 11 program pokok dan 5 program penunjang serta 149 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.99.049.737.159 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.80.529.510.131 atau 81,30% dan realisasi fisik sebesar 93,17%. Capaian realisasi anggaran 81,30% karena terdapat efisiensi dari sisa lelang, serta beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap seluruhnya. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 93,17% disebabkan adanya pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga, serta kegiatan yang tidak terselesaikan yaitu kegiatan Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Belajar.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pendidikan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2016	2017
1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,77	12,79
2 Angka rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,38	10,39
3 Angka Partisipasi Kasar (APK)			
- SD/MI/Paket A (%)	Persentase	107,65	106,07
- SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	107,30	106,99
4 Angka Pendidikan yang ditamatkan			
a. SD/MI/Paket A (%)	Persentase	1,98	2,02
b. SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	1,86	1,88
5 Angka Partisipasi Murni (APM)			
a. SD/MI/Paket A (%)	Persentase	96,50	97,09
b. SMP/MTS/Paket B (%)	Persentase	83,62	74,17
6 Pendidikan Sekolah Dasar			
a. Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	896,64	970,89
b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	Rasio	33,06	31,08
c. Rasio Guru/Murid	Rasio	524,69	507,92
d. Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	Rasio	52,47	50,79
7 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
a. Angka Partisipasi Sekolah	Persentase	711,33	740,58
b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	Rasio	29,53	37,25
c. Rasio Guru/Murid	Rasio	730,14	647,40
d. Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	Rasio	73,01	64,74
8 Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	Persentase	99,78	99,78
9 Fasilitas Pendidikan			
a. Sekolah / Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persentase	95,00	95,00
b. Sekolah / Pendidikan SMP/MTS Kondisi Bangunan Baik	Persentase	91,67	91,18
10 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2016	2017
a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persentase	68,89	99,68
11 Angka Putus Sekolah			
a) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase	0,015	0,00
b) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	Persentase	0,032	0,00

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 antara lain; indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di tahun 2017 adalah 12,79, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, Angka Rata-Rata Lama Bersekolah di tahun 2017 adalah 10,39 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2017 dari jenjang SD hingga SMP mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena menurunnya jumlah penduduk usia sekolah, Angka pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2017 dari jenjang SD hingga SMP mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016, Angka Partisipasi Murni jenjang SD tahun 2017 mengalami peningkatan, sedangkan untuk jenjang SMP mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh adanya anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

Indikator yang digunakan pada pendidikan sekolah dasar berupa angka partisipasi sekolah sebesar 970,89 meningkat dari tahun sebelumnya, rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah, dengan nilai 31,08 lebih rendah dari tahun 2016 yaitu 33,49 serta rasio guru dan murid sebesar 507,92 menurun dari tahun 2016 dikarenakan jumlah guru menurun. Indikator yang digunakan pada pendidikan sekolah menengah pertama berupa angka partisipasi sekolah dan rasio sekolah dengan penduduk usia sekolah telah dapat mencapai target yang ditetapkan dan lebih tinggi dari tahun 2016, sedangkan indikator lainnya yaitu rasio guru dan murid dengan nilai capaian sebesar 647,40 lebih rendah dari tahun 2016 disebabkan oleh banyaknya guru yang memasuki masa pensiun dan berhenti mengajar di sekolah swasta.

Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di tahun 2017 telah tercapai sebesar 99,78 %. Masih adanya penduduk yang buta aksara



mengindikasikan Dinas Pendidikan masih perlu meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatannya dalam bidang pendidikan non formal sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kota Bontang.

Pada indikator fasilitas pendidikan, Bangunan SD/ MI dalam kondisi baik sebesar 95% sama dengan kondisi tahun 2016 sedangkan Bangunan SMP/MTS dalam kondisi baik sebesar 91,18 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yaitu 91,67. Hal ini disebabkan dari 34 sekolah jenjang SMP/MTs terdapat 3 sekolah yang memiliki bangunan rusak yaitu SMPN 2 sebanyak 12 kelas yang saat ini sedang dalam tahap rehabilitasi, sedangkan SMP YPL dan SMP YPPI yang merupakan sekolah swasta juga memiliki bangunan yang rusak. Diadakannya kegiatan rehabilitasi gedung sekolah setiap tahunnya diharapkan dapat membantu mencapai target di tahun mendatang mengingat keterbatasan dana untuk memperbaiki seluruh gedung sekolah di kota Bontang.

Indikator Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat di tahun 2017 sebesar 99,68. Dicanangkannya program 1 PAUD 1 RT sangat membantu peningkatan nilai APK PAUD, dengan pendidikan sejak dini diharapkan dapat terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi syarat mutlak kemajuan bangsa ini di masa datang.

Dari total siswa SD/ MI kota Bontang 20.200 siswa, tidak terdapat anak putus sekolah sehingga persentasi putus sekolah tahun 2017 telah sesuai target yang ditetapkan yaitu 0. Dari total siswa SMP/ MTs kota Bontang 9.206 siswa, tidak terdapat anak putus sekolah sehingga persentasi putus sekolah tahun 2017 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 0. Angka putus sekolah yang telah sesuai dengan target yaitu 0 merupakan capaian yang menggembirakan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yaitu 0,015 untuk jenjang SD/ MI dan 0,032 untuk jenjang SMP/MTS. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah Kota Bontang seperti pemberian bantuan alat sekolah berupa seragam, tas dan sepatu tentu sangat membantu meringankan biaya pendidikan bagi para orang tua siswa. Selain itu, pemberian dana BOSTK bagi seluruh sekolah di Kota Bontang juga membuat sekolah negeri tidak lagi memungut bayaran, hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dan orang tua.



c) Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Adanya beberapa kegiatan yang belum masuk kedalam Renja OPD.	Melakukan Revisi Renja dengan membuat Renja Perubahan.
2	Masih kecilnya Realisasi untuk Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Tuntas Kualitas.	Melakukan Minitoring kegiatan dan menambah uang persediaan pada OPD.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah.

a) Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Keluarga Berencana (DKKB) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan Kota Bontang yakni Peningkatan Kualitas Kesehatan untuk semua. Pelaksanaan urusan ini diharapkan Pemerintah Kota Bontang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada seluruh masyarakat melalui program-program prioritas bidang kesehatan yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
6. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
7. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
8. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak



11. Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
12. Program Penanggulangan Masalah Kesehatan, Wabah Dan Bencana
13. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
14. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
15. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
16. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
17. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Keluarga Berencana (DKKB) dilaksanakan melalui 12 program pokok dengan 107 kegiatan dan 5 program penunjang dengan 16 kegiatan penunjang, sedangkan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dilaksanakan melalui 4 program pokok dengan 6 kegiatan dan 3 program penunjang dengan 12 Kegiatan penunjang. Alokasi dana untuk urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.160.210.946.763,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.140.859.396.061,00 atau 87,92 % dan realisasi fisik sebesar 97,80%. Capaian realisasi anggaran 87,92% karena terdapat efisiensi dari sisa lelang, serta bebertapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap seluruhnya. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 97,80% disebabkan adanya pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan item pemeliharaan Lift 3 unit di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Persentase Rumah tangga ber-PHBS	Prosentase	31,40	81,3
Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Prosentase	96,1	90
Persentase TTU yang memenuhi syarat	Prosentase	93,2	95



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Presentase TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat)	Prosentase	78,61	30,2
Angka Harapan Hidup	Prosentase	73,69	73,69
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	110,9	131,6
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Rasio	11,6	7,6
Prevalensi Balita Gizi Kurang/Underweight (BB/U)	Prosentase	0,39	0,17
Insiden Rate DBD	Rasio	313,42	77,95

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui capaian Realisasi Indikator Persentase Rumah Tangga ber-PHBS mengalami peningkatan ataupun kenaikan capaian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 31,40 persen menjadi 81,3 persen. Adapun penyebab dari keberhasilan itu dikarenakan sebagian besar rumah tangga sudah memenuhi seluruh indikator rumah tangga ber-PHBS dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama pada indikator tunggal yaitu Aktifitas Fisik, tidak merokok dan makan sayur dan buah setiap hari.

Persentase sarana air yang dilakukan pengawasan memiliki realisasi capaian sebesar 90 persen. Dimana rumah tangga memiliki sarana air minum sudah memenuhi syarat untuk layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat memiliki realisasi 95 persen, dimana masyarakat memiliki sarana umum yang dilakukan pengawasan sudah memenuhi syarat untuk layak digunakan. Hal tersebut dikarenakan adanya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan tempat-tempat umum sehat terhadap dampak kesehatan masyarakat.

Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diperiksa memenuhi syarat memiliki realisasi 30,2 persen dengan target tahun 2017 sebesar 36 persen. Tahun 2017 yang menjadi indikator bagi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) adalah TPM yang bersertifikat kesehatan, bukan hanya yang memenuhi syarat kesehatan.

Angka harapan hidup untuk masyarakat Kota Bontang yaitu 73,69 persen. Sedangkan angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2017 mengalami peningkatan



dari tahun 2016 yaitu sebesar 110,9 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 131,9 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Adapun faktor utama penyebab angka kematian ibu yaitu: pendarahan, hipertensi saat hamil atau preeklamsi dan infeksi. Sehingga hal ini perlu mendapat perhatian terutama peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko tinggi kematian ibu dan bayi.

Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 11,6 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 7,6 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017.

Prevalansi Balita Gizi Kurang/Underweight (BB/U) pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,39 persen menjadi 0,17 persen, yang merupakan penurunan positif.

Insiden Rate DBD pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 313,42 rasio menjadi 77,95 rasio pada tahun 2017 yang merupakan penurunan positif.

Selain pencapaian terhadap kinerja urusan kesehatan, pada tahun 2017 Kota Bontang mendapatkan apresiasi/penghargaan dalam bidang kesehatan sebagai Klinik terbaik tingkat Nasional yang diwakili oleh Klinik Rudal Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Pengadaan Alat Kesehatan dengan anggaran DAK tidak terbayarkan karena ketidaktahuan PPTK dalam penunjukan penyedia tidak sesuai batas waktunya dengan Peraturan Menteri Kesehatan yaitu pertanggal 31 Agustus 2017 (lewat dari tgl tersebut).	Pembayaran alat kesehatan tersebut menjadi beban APBD Kota Bontang TA. 2017.
2 Realisasi pemeliharaan Lift sangat kecil karena penyedia tidak dapat melaksanakan maintenance karena permintaan penyedia maintenance lift harus perbulan dg biaya 12 jt/unit, sedangkan anggarannya tidak mencukupi.	Harus ada ijin operasional Lift / harus ada revitalisasi lift.



3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi, meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanggulangan bencana dan tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 12 (dua belas) program pokok, sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang, Pembangunan Jalan Abdi Negara Teluk Kadere (DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas), Pembangunan Jembatan Kelurahan Gunung Telihan (Bantuan Keuangan Provinsi), DED Pembangunan Jalan SP Bhayangkara - Jalan Ir. Simon Tampubolon, DED Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang, Review DED dan AMDAL Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang, Peningkatan Jalan Karya Bakti (Tambahan DAK Jalan/Jembatan), Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo (Tambahan DAK Jalan/Jembatan), Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Menuju Taman Wisata Mangrove BSD, dan Pembangunan Jalan di Perumahan Pemkot Bontang.
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah dan Bontang Kuala, Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah, DED Pembangunan Drainase Kelurahan Tanjung Laut Indah, Pembangunan Saluran Drainase di RT. 19 dan RT. 20, Kelurahan Telihan, Normalisasi Saluran Drainase RT. 27 Kelurahan Telihan, Pembuatan Parit Induk + Penutup Parit gg Damai RT. 25 Kelurahan Bontang Baru, Pembuatan Saluran Induk RT. 12 Kelurahan Api-Api, Revitalisasi Parit Jalan



- Habibon RT. 32 Kel. Tanjung Laut dan Normalisasi Saluran Drainase Jalan KS. Tubun Kel. Api – Api.
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dilaksanakan melalui kegiatan Penurapan Sungai Bontang, Penanganan Longsor Jalan Lingkar Komplek Pemerintah Kota Bontang, Pembangunan Turap Jalan Mangga RT. 25, Pembuatan Siring Sungai dan Semenisasi Bahu Jalan RT. 15 Kel. Api-api, Penurapan Sungai RT. 21 Belakang HOP 1 Kel. Satimpo, Penurapan Sungai RT. 21 Belakang Masjid Al Falah Kel. Satimpo, Penurapan Sungai RT. 21 Dekat Jembatan Kelurahan Satimpo, dan Penurapan Sungai RT. 21 Pisangan Kel. Satimpo.
 4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat dan Kecamatan Bontang Selatan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Soekarno – Hatta dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan M. Roem.
 5. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Nyerakat Kiri (DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Pendukung Kedaulatan Pangan) dan Peningkatan Jaringan Irigasi Nyerakat Kiri (DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Pendukung Kedaulatan Pangan).
 6. Program Pengendalian Banjir, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat.
 7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Keciptakarya, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Keciptakarya.
 8. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Guntung, kelurahan Tanjung Laut Indah dan Kelurahan Kanaan.



9. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Revitalisasi POLRES Kota Bontang, Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pemerintah Daerah Kota Bontang, Pembangunan Kantor KPU Bontang, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah, Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lanjutan), Rehabilitasi Musholla At-Taqwa Kelurahan Api-Api, Pembangunan Barak Bujang Kejaksaan Negeri Kota Bontang, Rehabilitasi Masjid Nurul Hikmah, Rehabilitasi Mushola Kejaksaan Negeri Bontang, Pembangunan Masjid Baitul Muttaqin RT. 20 Gn. Elai (Lanjutan), Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga POLRES Bontang, Rehabilitasi Pagar Kejaksaan Negeri Bontang, Rehabilitasi Masjid Nurul Huda, Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan, dan Rehabilitasi Sarana Pendukung Pelayanan Gedung Kejaksaan.
10. Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan, dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Longsoran Jl. Soekarno-Hatta Bontang Lestari, Peningkatan Jalan Kenangan (Bantuan Keuangan Provinsi), Peningkatan Jalan Pontianak (Bantuan Keuangan Provinsi), Pembangunan Turap Jalan Brokoli (Bantuan Keuangan Provinsi), Pembangunan Turap Jalan Brokoli (Bantuan Keuangan Provinsi), Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo (DAK Bidang Infrastruktur Publik), Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari (DAK Bidang Infrastruktur Publik), Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bontang Lestari (DAK Bidang Infrastruktur Publik), Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo (DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas), Peningkatan Jalan M. Roem (Bantuan Keuangan Provinsi), Peningkatan Jalan Satya Lencana 1 (Bantuan Keuangan Provinsi), Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan BSD, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Habibon, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan KS. Tubun, Peningkatan Jalan Arief Rahman Hakim RT. 41 (Bantuan Keuangan Provinsi), Peningkatan Jalan RT. 15 Lok Tunggul (Bantuan Keuangan



Provinsi), dan Peningkatan Jalan Salantuko RT. 14 (Bantuan Keuangan Provinsi).

11. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan, Pembangunan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Berbas Pantai, Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Kota Bontang, Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan, Pembangunan Badan Jalan dan Parit Gang Ampana RT.16 Kelurahan Bontang Kuala (Bantuan Keuangan Provinsi), Pembuatan Parit Jalan Brokoli RT. 14 Kelurahan Gunung Elai (Bantuan Keuangan Provinsi), Pembuatan Parit Gang Piranha RT. 20 Kel. Tanjung Laut Indah (Bantuan Keuangan Provinsi), Pembuatan Badan Jalan RT. 25 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan (Bantuan Keuangan Provinsi), Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Perumahan HOP Kel. Satimpo, Kel. Gunung Elai, Kel. Kanaan, Kel. Gunung Telihan, Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kota Bontang, dan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Perumahan Griya Wisata Kelurahan Bontang Kuala.
12. Program Perencanaan Tata Ruang, dilaksanakan melalui kegiatan Verifikasi Permohonan Site Plan Kawasan Non Perumahan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan melalui 12 program pokok dan 5 program penunjang melalui 138 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.172.972.768.237,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.162.927.521.839,00 atau 94,20% dan realisasi fisik sebesar 97,29%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi dari sisa lelang, paket pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2017 dan adanya paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan.



Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Presentase rumah tangga bersanitasi	%	96,54	97,38
Luas wilayah banjir / tergenang	ha	38,78	29,81
Jalan dalam kondisi baik	%	95,80	97,64

Indikator kinerja persentase rumah tangga bersanitasi mengalami peningkatan dari 96,54% pada tahun 2016 menjadi 97,38% pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,84%. Kenaikan ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pengelolaan sanitasi dan masyarakat berakses sanitasi mengalami peningkatan. Program yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga bersanitasi yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah.

Untuk indikator kinerja luas wilayah banjir/tergenang juga mengalami tren yang positif dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 38,78 ha berkurang menjadi 29,81 ha pada tahun 2017 yang berarti luas wilayah banjir/genangan di Kota Bontang mengalami penurunan luasan sebesar 8,97 ha. Program yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja luas wilayah banjir/tergenang yaitu Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Program Pengendalian Banjir.

Sedangkan untuk indikator kinerja jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 1,84% dari 95,80% pada tahun 2016 menjadi 97,64% pada tahun 2017. Program yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja jalan dalam kondisi baik yaitu Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman.



c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah daerah seperti pembangunan kantor-kantor kelurahan yang belum selesai	Pembangunan kantor-kantor kelurahan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan anggaran
2 Program pengendalian banjir yang belum optimal karena alokasi anggaran yang terbatas	Alokasi anggaran harus ditambah karena ini merupakan program prioritas yang harus ditangani
3 Ada beberapa kegiatan yang tidak selesai tepat waktu	Percepatan proses lelang di awal tahun dan pengawasan yang lebih optimal
4 Proses rekomendasi penerbitan IMB yang kewenangannya diambil alih DPMPTSP sehingga pengendalian terhadap kesesuaian tata ruang tidak optimal	Kewenangan yang harus dikembalikan ke DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam peraturan daerah dan peraturan wali kota.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan, Tercapainya Waktu Tanggap Penanganan Bencana Kebakaran, Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum, dan Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan, dilaksanakan melalui kegiatan Kajian Naskah Akademik Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bontang.



2. Program Penataan Permukiman Lingkungan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa, Pembangunan Rumah Khusus Kota Bontang, Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kota Program KOTAKU, Pembangunan Rusunawa Kota Bontang, dan Pembuatan DED Kawasan Kumuh Kota Bontang.
3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dilaksanakan melalui kegiatan Penimbunan Lahan Kuburan Baru Loktuan.
4. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran, Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK, Pembinaan Kesiapsiagaan Linmas dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Rehabilitasi Workshop Pemadam Kebakaran, dan Pengadaan Alat Penyelamatan.
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan IPAL Kota Bontang, Peningkatan IPAL Kota Bontang (DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi), Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bontang (DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum), Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Konvensional Kap. 25 lt/dt di Kelurahan Loktuan, Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Bidang Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi), Perencanaan Teknis Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbas Tengah, Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem IPAL Berbas Pantai, dan Pemeliharaan IPAL Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 5 program penunjang serta 47 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.20.163.067.289,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.737.362.812,00 atau 87,97% dan realisasi fisik



sebesar 94,38%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi dari sisa lelang dan adanya paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Jumlah RUSUNAWA yang terbangun	Unit	1	2
Jumlah rumah khusus yang terbangun	Rumah	0	50
Berkurangnya luas kawasan kumuh	ha	88,20	73,56
Terbangunnya infrastruktur di 15 Kelurahan	Kelurahan	15	15
Tercapainya waktu tanggap daerah Wialayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	44,56	100
Jumlah penduduk yang terlayani air minum	%	98,32	98,74
Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	%	62	65
Prosentase bangunan yang taat terhadap perizinan bangunan	%	17,5	54

Indikator kinerja berkurangnya luas kawasan kumuh mengalami tren yang positif dari tahun 2016 ke tahun 2017. Luasan kumuh Kota Bontang tahun 2016 seluas 88,20 ha berkurang sebesar 14,64 ha menjadi 73,56 ha pada tahun 2017. Melalui Program Penataan Permukiman Lingkungan diharapkan target 0% kawasan kumuh pada tahun 2019 yang telah ditargetkan secara nasional dapat tercapai.

Untuk indikator tercapainya waktu tanggap daerah Wialayah Manajemen Kebakaran (WMK) mengalami peningkatan dari 44,56% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 55,44%. Tercapainya 100% dikarenakan seluruh kejadian kebakaran yang telah ditanggulangi pada tahun 2017 berada pada jarak kurang dari 5 km dari pos pemadam kebakaran sehingga waktu tanggap dapat terpenuhi. Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja waktu tanggap daerah Wialayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.



Sedangkan indikator kinerja jumlah penduduk yang terlayani air minum mengalami peningkatan sebesar 0,42% dari 98,32% ditahun 2016 meningkat menjadi 98,74% di tahun 2017. Penyediaan akses air minum aman bagi masyarakat Kota Bontang dilakukan melalui jaringan air minum perpipaan. Selain dari Pemerintah Kota Bontang dan PDAM, penyediaan air minum di Kota Bontang dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan perorangan. Akses air minum juga merupakan target nasional dimana pada tahun 2019 akses terhadap air minum aman ditargetkan telah mencapai 100%. Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja jumlah penduduk yang terlayani air minum yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Sebagian besar pelaksanaan pekerjaan fisik tidak dilaksanakan di anggaran perubahan hanya dilaksanakan perencanaan dikarenakan waktu yang tidak mencukupi	Pekerjaan fisik yang perencanaannya telah selesai, dilaksanakan pada anggaran murni tahun berikutnya.
2 Sumber air baku untuk air minum saat ini hanya dari air bawah tanah	Perlu sumber air baku alternatif dari sumber air baku permukaan, dapat dilakukan dengan mendorong SPAM Regional
3 Belum tersedianya pos-pos pembantu pemadam kebakaran dan penyelamatan pada beberapa titik daerah wilayah manajemen kebakaran.	Untuk mencapai sasaran indikator kinerja dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bontang yaitu tercapainya waktu tanggap penanganan bencana kebakaran maka perlu pengadaan lahan dan bangunan pos-pos pemadam kebakaran pada beberapa titik daerah wilayah manajemen kebakaran antara lain: Loktuan,



Permasalahan	Solusi
	Bebas Pantai, Telihan/Kanaan dan Bontang lestari.
4 Belum tersedianya Sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memadai.	Dalam rangka optimalisasi penanggulangan kebakaran maka perlu pengadaan :12 unit mobil pemadam kebakaran, 24 unit mobil tangki penyuplai air dan 12 unit ploating pump untuk daerah-daerah pesisir, 1 unit mobil Rescue, 1 unit mobil Ambulance, 50 buah APD lengkap, 3 unit mobil tangga dan 6 unit mesin pompa portable.
5 Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi permasalahan bahaya kebakaran.	Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi permasalahan bahaya kebakaran maka perlu dilaksanakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan/sosialisasi.
6 Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang masih belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.	Perlu penambahan sumberdaya aparatur dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal
7 Ketersedian sumber air sebagai media pemadam kebakaran belum memadai.	Dalam rangka memenuhi kebutuhan ketersediaan sumber air sebagai media pemadam kebakaran maka perlu dilakukan pendekatan dan kerjasama dengan pemilik/pengelola sumber air (PDAM, Kenari Water Park, Surya Raya PT. Badak, PT. Pupuk Kaltim dan lain-lain) dan atau pengadaan sumber air sendiri dengan pengadaan sumur bor dan kolam air.



5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Ketentraman dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat serta Kecamatan Bontang Selatan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat dan Terlaksananya Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah yang berlaku. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui kegiatan Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan Monitoring Wilayah.
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota, Perayaan HUT RI, Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang, Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam dan Intensitas Komunikasi dan Ketertiban Umat Beragama.
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 4 program penunjang serta 24 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan ini pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.4.142.631.376,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.569.508.155,00 atau 86,17% dan realisasi fisik sebesar 93,57%.



Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Ketentraman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Prosentase Zona Merah Gangguan Trantibum Kota Bontang	Persen	70.00	60.00
Prosentase Penegakan Produk Hukum Daerah	Persen	85.71	85.71

Terlihat pada tabel diatas capaian kinerja keseluruhan persentase capaian agak membaik di bandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya hal ini disebabkan sinerginya antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Perangkat Daerah yang lain dalam Menciptakan Kentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Peraturan dan Perundangan Daerah Kota Bontang.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari penetapan Target Kinerja dari Indikator Kinerja Utama Prosentase Zona Merah Gangguan Trantibum Kota Bontang adalah sebesar 70,00% telah terealisasi sebesar 60,00% dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 85,71% yang artinya semakin menurunnya daerah rawan gangguan trantibum serta meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bontang. hal ini dapat kami capai dengan meningkatkan intensitas Patroli Wilayah serta Monitoring pada Pagi, Siang dan Malam hari pada Daerah Daerah yang teridentifikasi Zona Merah Gangguan Trantibum.

Untuk Capaian indikator dari Prosentase Penegakan Produk Hukum Daerah dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari penetapan Target Kinerja sebesar 85,71% telah terealisasi sebesar 85,71% dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 100% yang artinya keberhasilan dala mencapai target yang telah di tentukan didalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang berdampak



terhadap Kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundangan serta Produk Hukum Daerah yang berlaku di Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Pelaksanaan Monitoring Area Penggunaan Lain (APL) masih belum ada titik temu/kejelasan mengenai permasalahan tumpang tindih lahan garapan dikawasan APL	1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait agar segera menyelesaikan Pendataan status penguasaan Tanah Garapan di kawasan APL
2. Penegakan Peraturan Daerah dan Pelanggaran Ketertiban Umum dalam penindakan menemui kendala terkait masalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang masih belum ada, adapun PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang ada tetapi belum memperbaharui SKEP.	2. Segera mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang baru sesuai dengan kebutuhan Kota Bontang
3. Kurang sinerginya antar OPD terkait dan SATPOL PP dalam menangani pelanggaran, dimana tugas SATPOL PP hanya sebatas Penertiban saja.	3. Pengawasan dan Pengendalian sebaiknya dibentuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mensinergikan antara SATPOL PP dengan OPD terkait.
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan	4. Dialokasikannya anggaran untuk penambahan Sarana dan Prasarana agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan Lancar dan Maksimal
5. Kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dalam melaksanakan Penjagaan, Pengamanan, Pengawasan dan Regu Taktis dimana untuk suatu daerah Kota idealnya mempunyai 250 Orang Personil.	5.1. Agar dilakukan Perekrutan Anggota Baru Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang
	5.2. Penambahan Alokasi Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran
6. Tipiring ketika akan dilaksanakan terkendala tidak adanya alokasi anggaran selama ini hanya dialokasi untuk Pembinaan (Pendataan, Penertiban, Surat Teguran dan Surat	6. Mengalokasikan Anggaran dalam melaksanakan Tipiring sebagai tindak lanjut pelanggaran untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelanggar.



Permasalahan	Solusi
Pernyataan) tetapi tidak ada tidak lanjutnya	

6. Urusan Wajib Sosial

Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (DSP3M) dan sebagian kecil dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara bermartabat dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya, dilaksanakan melalui kegiatan: Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan Sewa dan Operasional Rumah Singgah.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan: Penanganan Korban Bencana, Penyaluran Beras Raskin, Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang, dan Penyediaan Rasda.
3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS.
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan di DSP3M dan Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat (dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Sosial).



b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Sosial pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 4 program penunjang serta 21 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp4.731.592.471,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.539.833.119,00 atau 74,81% dan realisasi fisik sebesar 99,27%. Capaian realisasi anggaran 74,81% karena efisiensi pada kegiatan-kegiatan di program penunjang dan kendala teknis pada kegiatan Penyediaan Rasda terkait adanya pergantian Kepala Bulog. Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan Penanganan Korban Bencana bersifat insidental.

Realisasi indikator kinerja utama urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Sosial Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti Asuhan	7	7
PMKS yang memperoleh bantuan	%	73,44	70,64
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	95,68	76,10

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama urusan Sosial telah cukup baik. Sarana sosial telah sesuai target, yaitu sejumlah 7 panti asuhan yang berfungsi dengan baik. Berdasarkan basis data PMKS Kota Bontang Tahun 2017, jumlah PMKS sebanyak 52.365 jiwa yang terbagi dalam 26 jenis/kategori. PMKS terbesar berasal dari kategori fakir miskin (38.703) dan korban bencana alam (11.307 jiwa).

Dari total jumlah PMKS, sebanyak 39.848 (76,10) telah ditangani dan sejumlah 36.991 (70,64) telah mendapatkan bantuan. Bantuan terbesar diberikan kepada kelompok fakir miskin melalui program PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran Daerah), bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), dan bantuan pendidikan. Selain itu, sejumlah besar bantuan berikutnya diberikan untuk kelompok Anak dengan Kedisabilitas (ADK).



Penanganan PMKS tidak hanya dari segi fisik namun secara holistik dengan menggunakan pendekatan biopsikososial dan spiritual. Pendekatan biopsikososial melibatkan suatu konsep hubungan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam upaya mengerti dan memahami kondisi PMKS, sehingga penanganannya dapat paripurna.

Bila dibandingkan dengan tahun 2016, terdapat penurunan capaian pada tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena capaian pada tahun 2016 menggunakan cara penghitungan berganda. Pada tahun 2017 telah dilakukan pemetaan ulang dan penghitungan sebagaimana mestinya.

Meskipun terjadi pengurangan anggaran menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2017, DSP3M terbantu oleh Bansos APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1 miliar sehingga penanganan PMKS tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain pencapaian terhadap kinerja urusan Sosial, pada tahun 2017 Kota Bontang mendapatkan apresiasi/penghargaan dalam bidang Sosial antara lain: Juara I Kategori Karang Taruna Tingkat Provinsi Tahun 2017 (Karang Taruna Bontang Kuala) dan Penghargaan sebagai Peserta Orientasi dan Seleksi Karang Taruna Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017 (Karang Taruna Maskapei Masyarakat Kreatif Pesisir).

c) Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi
	<i>Kelembagaan Sosial</i>	
1	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelembagaan sosial yang ada	Pemberitahuan ke lembaga sosial
2	Kelembagaan Sosial belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya	Melakukan Pembinaan (Pelatihan & Pendataan PMKS)
3	Belum adanya surat pemberitahuan dari kelembagaan sosial terkait struktur kepengurusan	Membuat Draf & SK pelaksanaan kegiatan untuk pelaporan
4	Belum adanya dana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan operasional kelembagaan sosial khususnya WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	Merencanakan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan operasional kelembagaan sosial khususnya WKSBM



Permasalahan	Solusi
5 Pengurus tidak mengetahui tentang program kerja yang ada	Melakukan <i>Capacity Building</i> bagi kelembagaan sosial
6 Kurangnya efisiensi lembaga sosial	Melibatkan Kelembagaan Sosial dalam Penanganan Masalah Sosial
<i>Rehabilitasi Sosial</i>	
1 Belum ada SDM Profesi di Rumah Singgah sesuai kebutuhan: Peksos, Rohaniawan, psikolog, perawat, advokat/ Hukum	Rekrutmen SDM yang berkualitas
2 Belum adanya Panti Sosial Terpadu Pemerintah Penampung PMKS yang tidak dikehendaki keluarga dan yang sudah tidak mempunyai keluarga	Pembangunan Panti Sosial Terpadu
3 Belum berjalannya layanan Konseling Mobil LK3 di tempat-tempat umum	Bersama Tim terkait menjadwalkan Layanan Konseling
4 Belum terakreditasinya semua panti asuhan di Kota Bontang	Melakukan Bimbingan Teknis dan akreditasi
5 Kurang optimalnya pekerja sosial dan Asisten Peksos (LK3)	Rapat dan pembagian tugas Peksos dan Asisten Peksos (LK3) per wilayah
6 Belum tersistemnya verifikasi/ validasi <i>data base</i> PMKS di masing-masing seksi	Dilakukannya validasi data di masing-masing seksi setiap bulan
7 <i>Ase/lon</i> yang berbasis Kesos sebaiknya memperkuat di bidang social	Penempatan kembali <i>ase/lon</i> yang berbasis kesos di bidang sosial
8 Belum berjalannya penyuluhan sosial	Pengaktifan penyuluh sosial di setiap Kecamatan & Kelurahan
9 Masyarakat dan aparat tidak mengetahui prosedur Pelayanan Adopsi	Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan aparat pemerintah
10 Adanya informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pengurusan adopsi dikenakan biaya	Koordinasi dengan pengadilan Agama

7. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Urusan Wajib Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP).

a) Program dan Kegiatan



Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan perbaikan iklim ketenagakerjaan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit dan kegiatan Dewan Pengupahan Kota Bontang

b) Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 program pokok yang terdiri dari 2 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.301.162.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.267.368.505,00 atau 88,78% dan realisasi fisik sebesar 99,87%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Persentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar	%	7,20	4,19
Pencari kerja yang ditempatkan	%	21,75	15,6
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama	%	85	70

Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja Kota Bontang yang terdaftar adalah 11.535 orang. Jumlah pencari kerja yang dilatih mencapai 483 orang (4,19%) dari yang ditargetkan sebesar 5,26%. Penyebab tidak tercapainya target ini terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Namun demikian telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut, misalnya melalui pendanaan APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2017 terdapat 36 paket pelatihan dengan



sumber dana APBN dan 1 paket pelatihan dari APBD Provinsi. Selain itu, sebanyak 4 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) mendapatkan hibah bantuan peralatan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.

Target pencari kerja yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 16,79% dan terealisasi sebesar 15,6% (1800 orang). Regulasi daerah telah mengatur agar rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal. Namun adanya kesenjangan antara kemampuan dan keahlian pencari kerja dengan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan mengakibatkan penempatan tenaga kerja lokal menjadi tidak maksimal.

Pada tahun 2017 terdapat 20 kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Seluruh kasus perselisihan tersebut telah diselesaikan. Sebanyak 14 (70%) kasus telah diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dan sisanya (6 kasus) diselesaikan melalui anjuran.

Capaian indikator kinerja urusan Tenaga Kerja pada tahun 2017 seluruhnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga beberapa kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Anggaran APBD yang tidak mendukung pelaksanaan rencana kegiatan bidang	Alokasi APBD untuk menunjang kegiatan bidang khususnya berkenaan dengan urusan wajib pemerintah serta mengupayakan sumber pendanaan lain misalnya APBN dan APBD Provinsi
2 Adanya kesenjangan antara kemampuan pencari kerja dengan spesifikasi yang diminta perusahaan	Sosialisasi ke sekolah mengenai proyeksi tenaga kerja yang dibutuhkan di masa yang akan datang, peningkatan kemampuan pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
3 Minimnya kuantitas tenaga teknis untuk mediator	Penambahan tenaga teknis untuk mediator



8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta meningkatnya perlindungan anak dan perempuan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan melalui 2 program pokok serta 2 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp. 199.850.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 171.762.410,00 atau 85,95% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Prosentase	49,35	12,43
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Prosentase	33,91	87,57
Ratio KDRT	Prosentase	0,112	0,039



Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Prosentase	50,65	99,24
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Prosentase	100	100

Capaian Indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 12,43%. Berdasarkan data tahun 2017, hanya terdapat 3.560 pekerja perempuan di lembaga pemerintah. Sementara indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta mengalami peningkatan 52,57 % dari target yang ditetapkan yaitu 35% dan terealisasi sebesar 87,57%. Pada tahun 2017, terdapat 25.085 pekerja perempuan di lembaga swasta. Berdasarkan data tersebut, capaian Indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah berbanding terbalik dengan indikator Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta hal ini disebabkan data yang dipergunakan pada Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta pada tahun 2017 merupakan data hasil validasi antara DPMTKPTSP (Bidang Tenaga Kerja) dan BPS Kota Bontang. Sedangkan pada penetapan target awal data tersebut menggunakan angka pencari kerja (Jumlah Kartu Kuning yang diterbitkan) dari Dissosnaker pada tahun 2016, sehingga perlu adanya validasi dan sinkronisasi data antar Perangkat Daerah terkait.

Capaian indikator Ratio KDRT cenderung mengalami penurunan dari target yang ditetapkan yaitu 0,96% dan terealisasi sebesar 0,039%. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menurunkan rasio KDRT melalui berbagai upaya pencegahan KDRT dan sosialisasi serta pelatihan sampai ke tingkat RT dengan melibatkan PATBM-3PANG LAUT.

Capaian indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan telah terealisasi sebesar 100%. Berdasarkan data tahun 2017, dari 49 pengaduan mengenai perlindungan perempuan dan anak yang diajukan terdapat 49 pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang



terselesaikan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani kasus/tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui:

- ✓ Peningkatan pemahaman masyarakat bahwa perempuan dan anak dilindungi haknya sebagaimana terdapat dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- ✓ Pembentukan Forum Anak Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- ✓ Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kecamatan dan Kota.
- ✓ Adanya layanan hotline pengaduan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Disamping pencapaian indikator kinerja sebagaimana di atas, terkait dengan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan layak anak, pada tahun 2017 Kota Bontang telah mendapatkan penghargaan/apresiasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, antara lain:

- ❖ Penghargaan Pakarti Madya I Kategori Kota Pelaksana Terbaik PKDRT Tahun 2017 (Nasional)
- ❖ Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya Tahun 2017 (Nasional)
- ❖ Forum Anak Bontang Meraih Daffa Award Tingkat Provinsi Kaltim sebagai Terbaik ke-2 (Provinsi)

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Kurangnya partisipasi perangkat daerah terhadap Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender	a. Perlu adanya regulasi dukungan terhadap responsive gender pada masing-masing OPD b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan Pelatihan Responsive Gender di Luar Daerah
2 Belum adanya rumah perlindungan trauma centre (RPTC) ataupun rumah penanganan terpadu untuk kasus	Adanya rumah aman yang akan diberlakukan SOP didalamnya untuk mencover



Permasalahan	Solusi
anak (ngelem, korban kekerasan dan sejenisnya) yang tersistem	sementara permasalahan tersebut
3 Penanganan anak putus sekolah belum maksimal	Bekerjasama dengan dinas pendidikan dan instansi terkait tentang penanganan anak putus sekolah
4 Kurangnya partisipasi keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak	Pelaksanaan KIE terhadap keluarga dan masyarakat
5 Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak	a. Pembentukan detektif cekatan dilingkungan sekolah b. Pembentukan PATBM/3PANG LAUT di Kelurahan c. Sosialisasi dan Monev
6 Optimalisasi tim (SIMPONI-PPPA) dalam menjalankan tugas dan fungsi belum optimal	Peningkatan SDM bagi operator SIMPONI-PPPA

9. Urusan Wajib Pangan

Urusan Wajib Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Penyelenggaraan urusan pangan di Kota Bontang pada hakikatnya mempunyai beban tugas dan tanggung jawab untuk mampu menyelenggarakan pengaturan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi kebutuhan penduduk Kota Bontang. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok yakni Program Peningkatan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penganeekaragaman Komsumsi Pangan serta kegiatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan;

b) Realisasi Program dan Kegiatan



Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan alokasi anggaran pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.169.945.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.159.077.700,00 atau sekitar 93.61% dari alokasi anggaran.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pangan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90.84	90.84
Cadangan Pangan Pemerintahan	%	0	0
Penanganan Rawan Pangan	%	50	0
Presentase Stabilitas Harga dan Pasokan	%	111.11	94.34
Presentase Ketersediaan Informasi Harga Pangan Pokok	%	111.11	91.67
Presentase Pangan Aman dikonsumsi	%	93,5	87.5
Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	84.4	84.4

Keberhasilan kinerja tersebut didukung dengan adanya Program dan Kegiatan yang mendukung serta anggaran yang sesuai, sehingga untuk indikator Pola Pangan Harapan, Presentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, Ketersediaan Informasi Harga serta Pangan Aman Dikonsumsi dapat terealisasi melebihi dari target, sedangkan untuk indikator Cadangan Pangan Pemerintah dan Penanganan Daerah Rawan Pangan tidak terealisasi dikarenakan di tahun 2017 tidak dialokasikan anggaran, mengingat kondisi keuangan daerah masih belum sepenuhnya normal seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain pencapaian terhadap kinerja urusan ketahanan pangan, pada tahun 2017 Kota Bontang mendapatkan apresiasi/penghargaan dalam bidang ketahanan pangan sebagai Juara 3 Lomba B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

c) Permasalahan dan Solusi



Permasalahan	Solusi
1 Realisasi IKU pada Cadangan Pangan Pemerintah 0% karena tidak tersedianya dana untuk pengadaan CPP	Perlu adanya Kajian Perda sebagai oayung hukum dalam penyediaan/pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
2 Berdasarkan surat dari Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian nomor 063/K.N.030/i.2/01/2018 bahwa perlu dilaporkan kondisi stok cadangan pangan pemerintah setiap minggu	Perlu adanya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota minimal 100 Ton per tahun, hal tersebut berdasarkan pada PP No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3 Realisasi IKU pada Penanganan Rawan Pangan dengan realisasi 0% karena tidak tersedianya dana untuk penyediaan Penaganan Rawan Pangan yang didalamnya termasuk kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Perlu adanya penyediaan bahan untuk pelaksanaan SKPG serta pembuatan Peta Kerawanan Pangan

10. Urusan Wajib Pertanahan

Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yakni: Bertambahnya luas lahan untuk kepentingan publik, dengan indikator kinerja utama berupa tersedianya lahan untuk sarana dan prasarana publik. Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem Administrasi Pertanahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan lahan bagi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik; dan Inventarisasi permasalahan pertanahan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pertanahan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 program dan 2 kegiatan. Alokasi dana pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.17.728.719.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.516.200.640,00 atau hanya 2,91%, sedangkan realisasi fisik sebesar 26,00%. Rendahnya capaian fisik maupun keuangan pelaksanaan urusan Pertanahan disebabkan oleh rendahnya realisasi fisik dan keuangan Kegiatan Pengadaan lahan bagi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, yakni di 2 perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah, realisasi fisik sebesar 1,19% dan realisasi keuangan sebesar 0,83%;
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, realisasi fisik sebesar 3,63% dan realisasi keuangan sebesar 2,80%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pertanahan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Bertambahnya luas lahan untuk kepentingan publik	Ha		0%

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanahan Tahun 2017 sebesar 0%, jauh dari target sebesar 100%. Kegagalan pencapaian target tersebut disebabkan jangka waktu pengadaan lahan tidak mencukupi jika dilaksanakan di waktu anggaran perubahan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

c) Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi
1	Jangka waktu pengadaan lahan tidak mencukupi di anggaran perubahan	Diusulkan ke anggaran murni ditahun berikutnya



11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup diarahkan dalam mewujudkan misi pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*). Penyelenggaraan urusan Lingkungan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah melalui kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, dan Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui kegiatan Perencanaan Pembuatan Alun-Alun Kota, Pemeliharaan RTH, Pembuatan Taman Median Jalan, dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkantoran.



4. Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum.
5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan lingkungan hidup pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 5 program pokok dan 4 program penunjang serta 23 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan lingkungan hidup pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp. 24.680.053.536,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.574.183.111,00 atau 93,63% dan realisasi fisik sebesar 98,50%. Capaian realisasi anggaran 93,63% karena ada efisiensi dalam proses pengadaan.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Indeks Pencemaran Air	-	70,00	70,00
Indeks Pencemaran Udara	-	75,64	79,11
Prosentase pelayanan persampahan	Persen	78,00	88,74
Persentase RTH Kota Bontang	Persen	-	18,82
Persentase TPU yang memenuhi standar	Persen	-	100
Persentase sarana dan prasarana PJU dalam kondisi baik	Persen	-	48,28

Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (PU) termasuk dalam indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Pencemaran Air adalah indeks yang digunakan menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Obyek pengukuran IPA adalah kualitas air sungai.



Dari hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bontang pada tahun 2017 maka dapat dihitung nilai rata-rata dan nilai maksimum dari perbandingan konsentrasi kualitas air sungai (Ci) dan konsentrasi kualitas Baku Mutu Air (Li). Nilai tersebut selanjutnya dimasukkan dalam formula PI_j sebagaimana berikut :

No.	Nama Sungai	Titik Sampling	Bulan	Ci/Lj, R	Ci/Lj, M	Pij	Tingkat Mutu Air
1	Bontang	Jembatan Merah Jl. Imam Bonjol	Agustus	0,03	0,07	0,05	Memenuhi
2	Bontang	Jembatan Merah Jl. A. Yani	Agustus	0,02	0,07	0,05	Memenuhi
3	Bontang	Jembatan kuning Simpang 4 Jl.KS Tubun	Agustus	0,02	0,07	0,05	Memenuhi
4	Bontang	Jembatan Kuning Jl.Flores	Agustus	0,02	0,06	0,05	Memenuhi
5	Guntung	Jembatan kuning dekat ex. Kel. Guntung	Agustus	0,07	0,11	0,09	Memenuhi
6	Guntung	Jembatan ulin dekat pujasera/ TPST	Agustus	0,09	0,18	0,14	Memenuhi
7	Guntung	Pelabuhan Nelayan	Agustus	0,03	0,10	0,07	Memenuhi
8	Nyerakat Hulu	Jembatan Jl. Satya Lencana	Agustus	0,09	0,24	0,18	Memenuhi
9	Nyerakat Hilir	Jembatan depan musholla dan Panti Anak Yatim Al-Barokah	Agustus	0,10	0,30	0,22	Memenuhi

Sumber Data : Pemantauan Kualitas Air Sungai, DLH Kota Bontang Tahun 2017

Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian dikalikan bobot indeks yaitu 70 untuk memenuhi mutu air, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat. sehingga akan didapat masing-masing nilai indeks per mutu air dan kemudian dijumlahkan menjadi Indeks Pencemaran Air Kota Bontang, seperti yang tercantum pada tabel berikut :

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel yang Memenuhi Mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	9	100%	70	70
Ringan	0	0%	50	0
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	9			
Indeks pencemaran Air Kota Bontang				70

Catatan:

1. Data yang digunakan adalah data pemantauan Bulan Agustus 2017
2. Jumlah titik sampling adalah 9 titik, yaitu Sungai Bontang 4 titik, Sungai Guntung 3 titik dan Sungai Nyerakat 2 titik
3. Penentuan titik pantau sungai tahun 2017 berdasarkan data dari Bapelitbang bahwa sungai yang terdapat di Kota Bontang adalah: Sungai Bontang, Sungai Guntung dan Sungai Nyerakat



Metodologi perhitungan Indeks Kualitas Udara mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development*. Data diperoleh dari hasil pengukuran parameter gas NO₂ dan SO₂ yang dicatat alat AQMS pada Plant 49 (station Bontang-pertigaan YABIS). Data disajikan pada tabel berikut ini :

No	Titik Pantau	Rerata NO ₂	Rerata SO ₂
1	Plant 49 (station Bontang-pertigaan YABIS)	14,98	11,55

Masing-masing nilai parameter dibagi dengan koefisien Standar EU untuk mendapatkan nilai indeks parameter. Selanjutnya nilai rerata indeks dimasukkan ke dalam persamaan berikut :

$$\text{Indeks udara} = 100 - \left[\left(\frac{50}{0,9} \right) \times (\text{rerata indeks} - 0,1) \right]$$

Indeks pencemaran udara Kota Bontang dapat dilihat pada tabel berikut:

Parameter	Rerata Parameter	Standar EU	Indeks
NO ₂	14,98	40	0,3745
SO ₂	11,55	20	0,5775
Indeks Udara (Indeks Annual Model EU-Ieu)			0,4760
Indeks Pencemaran Udara 2017			79,11

Pencapaian kinerja untuk indikator IPA dan IPU tahun 2017 diperoleh melalui beberapa faktor :

- Komitmen yang kuat dari segenap sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.
- Pengawasan yang ketat terhadap aktifitas kegiatan dan atau usaha yang menimbulkan dampak lingkungan.
- Sarana dana prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemantauan kualitas udara dan air.
- Adanya sistem *reward* dan *punishment* yang diberikan kepada badan usaha dari pemerintah melalui PROPER baik pusat maupun propinsi.



Indikator kinerja sasaran meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi yaitu persentase penanganan sampah. Persentase pencapaian indikator kinerja ini dirumuskan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Sampah yang Dilayani}}{\text{Timbulan Sampah}} \times 100\% = \frac{93,7730 \left(\frac{\text{ton}}{\text{hari}}\right)}{98,8484 \left(\frac{\text{ton}}{\text{hari}}\right)} \times 100\% = 94,87\%$$

Pencapaian kinerja untuk indikator penanganan sampah tahun 2017 diperoleh melalui beberapa faktor :

- a. Komitmen yang kuat dari segenap sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana kebersihan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup secara maksimal.
- c. Peran serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 3R dalam pengelolaan sampah.
- d. Pengaturan jadwal kerja tenaga kebersihan lapangan.
- e. Monitoring kebersihan lingkungan oleh masyarakat Kota Bontang yang ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- f. Adanya komitmen dari perusahaan sekitar (*stakeholder*) dalam penanganan sampah.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdapat indikator kinerja utama yaitu persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bontang pada tahun 2017 dengan realisasi 18,82 % dan persentase sarana dan prasarana PJU dalam kondisi baik dengan realisasi 48,28%. Sedangkan data tersebut pada tahun 2016 tidak didapatkan karena Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang sebagai perangkat daerah teknis baru terbentuk pada tahun 2017.

Jumlah persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kecil disebabkan tidak adanya anggaran untuk pengadaan lahan bagi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Jumlah persentase sarana dan prasarana PJU dalam kondisi baik dengan realisasi 48,28% disebabkan kondisi sarana dan prasarana lampu penerangan jalan umum (LPJU) terutama pada LPJU tenaga surya memerlukan biaya pemeliharaan



yang tinggi untuk penggantian baterai dan komponen lainnya karena faktor umur pemakaian baterai yang terbatas. Selain itu LPJU tenaga surya rawan akan tindak pencurian atas komponen LPJU tersebut terutama baterai. Kondisi tersebut juga disebabkan karena terbatasnya jumlah armada serta kondisi armada truk hidrolik yang tidak optimal yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana lampu penerangan jalan umum (LPJU).

Disamping pencapaian indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2017 Kota Bontang telah mendapat apresiasi maupun penghargaan dalam bidang lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun nasional, antara lain disajikan pada tabel berikut:

No.	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Nirwasintra Tantra Juara Harapan I untuk Kategori Kota	Indikator Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Sekolah Adiwiyata Mandiri	SD YPVDP
3	Sekolah Adiwiyata Tk Nasional	SMKN 2
4	Sekolah Adiwiyata Tk Provinsi	SMA YPVDP, SMP YPVDP, SMPN 8

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Tidak tercapainya target nilai pemantauan Adipura karena tutupan zona aktif di TPA tidak dapat dilakukan karena terbatasnya anggaran.	Perbaikan sarana dan prasarana serta pengelolaan TPA, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">• Penutupan sel area secara teratur• Perbaikan fasilitas (gerbang, pemasangan papan petunjuk arah, pemeliharaan gedung)• Pembangunan landasan lapangan pembuangan sampah• Perbaikan/rehab parit kolam leacheate
2 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Armada/sarana mobilitas truk hidrolik yang dimiliki terbatas sehingga diperlukan penambahan truk hidrolik.• PJU tenaga surya yang biaya pemeliharaannya tinggi dan rawan akan tindak pencurian sehingga perlu



	dilakukannya migrasi dari tenaga surya ke listrik PLN
3 Kegiatan penyiraman tanaman yang belum optimal	Armada truk tangki yang dimiliki jumlahnya terbatas, perlu penambahan armada mobil tangki, diusulkan menggunakan mobil pick up dilengkapi tandon air dan mesin pompa.

12. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang serta Kecamatan Bontang Utara.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan), serta Mobilisasi dan Pendistribusian e-KTP.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 5 program penunjang serta 22 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.6.970,260.958,00 dengan



realisasi keuangan sebesar Rp.5.962.975.842,00 atau 85,55% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,97	1
Kepemilikan KTP	Prosentase	0,97	96
Rasio Bayi Berakta Kelahiran	Rasio	0,72	0,7
Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	0,44	0,5
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Prosentase	0,57	59

Capaian indikator kepemilikan KTP mengalami peningkatan sebesar 3% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data tahun 2017, penduduk usia >17 yang ber KTP berjumlah 116.755 jiwa. Sejalan dengan hal tersebut, capaian indikator Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk juga mengalami peningkatan sebesar 59,05% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data tahun 2017, penduduk yang memiliki akta kelahiran berjumlah 104.334 jiwa. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bontang.

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017 telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik tingkat Provinsi maupun nasional, antara lain:



- ✓ Penghargaan Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 Kategori MADYA dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- ✓ Terbaik ke-3 Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam rangka HUT Provinsi Kalimantan Timur

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1. Kurangnya Sarana dan Prasarana	Mengajukan anggaran untuk penambahan Sarana dan Prasarana
2. SDM terbatas (kuantitas dan kualitas)	- Mengajukan penambahan SDM/ Pegawai ke BKPP. - Perlu adanya pelatihan teknis peningkatan kualitas SDM.
3. Penempatan SDM yang tidak sesuai kompetensi	Menempatkan SDM sesuai kompetensi/ Keahliannya
Kecamatan Bontang Utara	
1. Data Kependudukan tidak sinkron	Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi data kependudukan antara Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang (Mobil operasional kecamatan)	Perlu pengadaan mobil operasional kecamatan)

13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (DSP3M).

a) Program dan Kegiatan

Pevelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditujukan untuk meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1



(satu) program pokok, yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat PKK).

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 program pokok yang terdiri dari 1 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp 342.470.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 321.795.676,00 atau 93,96% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Rata-rata jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	LPM	15	15
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	PKK	1700	1823
Jumlah LPM	LPM	60	19
LPM Berprestasi (%)	%	46,67	0
PKK Aktif (%)	%	100	100
Posyandu Aktif (%)	%	100	100
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100

Capaian beberapa indikator, yaitu: rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, PKK aktif, Posyandu aktif, dan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat telah mencapai target.

Beberapa indikator yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yaitu: jumlah LPM, dan LPM berprestasi tidak dapat mencapai target. Jumlah LPM menurun bila dibandingkan dengan tahun 2016. Sedangkan lomba LPM Berprestasi tidak dapat dilaksanakan sehingga LPM Berprestasi tidak dapat ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan anggaran pada tahun 2017.



Disamping pencapaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2017 Kota Bontang telah mendapat apresiasi maupun penghargaan dalam bidang lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun nasional, antara lain disajikan pada tabel berikut:

No.	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Juara I Lomba Pidato Ketua PKK Tahun 2017	Provinsi
2	Harapan II Lomba Busana Santai Tahun 2017	Provinsi
3	Harapan III Lomba Penyuluh Pokja I Tahun 2017	Provinsi
4	Juara II Lomba Up2k Tahun 2017	Provinsi
5	Juara III Lomba Cipta Menu (B2SA) Tahun 2017	Provinsi
6	Juara III Lomba Panji-Panji Keberhasilan Tahun 2017	Provinsi
7	Juara III Lomba Pelaksana Posyandu Terbaik Tahun 2017	Provinsi
8	Pakarti Madya Tingkat Nasional Lomba PKDRT Tingkat Nasional Tahun 2017	Nasional

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Keterbatasan anggaran	Mencari sumber pendanaan lain, misalnya CSR Perusahaan

14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan sebagai tujuan untuk meningkatkan pelayanan pengendalian keluarga berencana dengan sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:



1. Program Keluarga Berencana. Peningkatan program keluarga berencana Dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Balai Penyuluh KKB Tingkat Kecamatan dan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga.
2. Program Pelayanan Kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB, Penyediaan Pelayanan KB Mobile, Pelayanan KB di Daerah Pesisir dan Pelayanan Manunggal KB KES.
3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan IMP KB.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui 3 program pokok dan 7 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp. 2.840.325.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.244.883.000,00 atau 79,04 % dan realisasi fisik sebesar 97,26%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Cakupan Peserta KB Aktif	Prosentase	51,1	70,7

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi sasaran cakupan peserta KB Aktif bagi masyarakat pada tahun 2017 telah mencapai 70,7%. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kota Bontang telah menyadari pentingnya penggunaan KB dalam mengatur jarak kelahiran. Peningkatan ini dikarenakan program KB di Kota Bontang terlaksana secara sistematis melalui penggerakan dan pemberdayaan masyarakat sebagai penyuluh aktif KB di masyarakat.

c) Permasalahan dan Solusi



Permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain:

1. Pencapaian peserta KB baru non hormonal masih relatif rendah
2. Masih rendahnya tingkat pengetahuan & pemahaman remaja tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
3. Kurangnya Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) seperti booklet, leaflet, brosur dan poster

Dalam mengatasi permasalahan umum sebagaimana di atas, beberapa upaya akan terus dilakukan, antara lain:

- 1) Meningkatkan gerak kader, dalam rangka mencari akseptor baru.
- 2) Memantapkan Operasional konseling bagi Konselor dan Pelatihan bagi Konselor, serta melakukan pembinaan secara rutin kepada kelompok-kelompok PIKKRR yang ada.
- 3) Memperbanyak media komunikasi, informasi dan edukasi (booklet, leaflet, brosur, poster tentang KRR)

15. Urusan Wajib Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya keselamatan dan ketertiban pengguna jasa perhubungan serta Terwujudnya standar pelayanan minimal bagi pengguna jasa di bidang perhubungan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 5 program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dilaksanakan melalui kegiatan Revitalisasi terminal dan pemeliharaan traffic light serta rambu-rambu lalu lintas, Pembangunan sarana penunjang terminal pelabuhan, Pengecetan zona aman anak sekolah, Pembangunan jembatan penyebrangan anak sekolah, Penimbungan lahan ex shet pile area parkir pelabuhan.



2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dilaksanakan melalui Pelaksanaan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) dan dukungan lomba Wahana Tata Nugraha (WTN) serta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas.
3. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan dilaksanakan melalui Perencanaan pengadaan lahan bandara, dan Lajutan pembangunan Jalan masuk Bandara Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi).
4. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan pengecetan median jalan.
5. Program peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan perhubungan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 4 program penunjang dan 5 program pokok serta 21 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan perhubungan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp11.063.911.241,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp7.601.517.918,00 atau 68,71 % dan realisasi fisik 75,99%. Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib dinas perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Prosentase ketertiban dan kelancaran pengguna jasa perhubungan	Prosentase	100	100
Rasio kapal GT7 ke bawah yang laik layar	Prosentase	52	54
Penilaian tertib berlalu lintas	Piala	WTN	WTN
Prosentase rekomendasi/pertimbangan angkutan umum yang disetujui	Prosentase	80	80
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum	Prosentase	94	95
Rasio kendaraan bermotor laik jalan	Prosentase	45	44



1. Prosentase ketertiban dan kelancaran pengguna jasa perhubungan
 - Persentase ketertiban dan kelancaran pengguna jasa perhubungan tahun 2017 terealisasi 100% dengan capaian 125%. Prosentase ini diperoleh dari pegawai/anggota Dinas Perhubungan yang telah bekerja keras untuk menjaga ketertiban jalan, yang mana terdapat 4 titik lokasi penjagaan yaitu di jalan MT.Haryono (SD 02 Bontang Utara dan Sekolah Bahrul Ulum), jalan A.Yani (SD 02 Bontang Selatan) dan Jalan Sultan Syahrir (SD 01 Bontang Selatan).
 - Realisasi indikator prosentase ketertiban dan kelancaran pengguna jasa perhubungan tahun 2016 dan 2017 telah terealisasi 100%.
2. Rasio kapal GT7 kebawah yang laik layar.
 - Target jumlah kapal GT 7 kebawah yang terdaftar di Dinas Perhubungan pada Tahun 2017 yaitu 500 unit sementara Jumlah kapal GT 7 kebawah yang terukur dan terdata yaitu 469 unit , Sehingga presentasi capaiannya yaitu 94 %.Capaian yang belum sesuai target dikarenakan kurangnya sosialisasi Dinas Perhubungan kepada masyarakat yang memiliki kapal GT 7 kebawah.
 - Realisasi indikator kinerja rasio kapal GT7 ke bawah laik layar tahun 2017 hanya sebesar 52% tidak mengalami perubahan dari tahun 2016, meskipun belum sesuai target tahun 2017 yaitu 56%.
3. Penilaian tertib berlalu lintas
 - Keikutsertaan Dinas Perhubungan Kota Bontang dalam mengikuti lomba tertib berlalu lintas yang di adakan setiap tahun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur merupakan konsistensi Dinas Perhubungan untuk terus menjaga ketertiban lalu lintas di Kota Bontang. Target Dinas Perhubungan tahun 2017 untuk mendapatkan dan terus mempertahankan piala WTN telah tercapai berkat kerja keras Dinas Perhubungan untuk terus menjaga ketertiban lalu lintas di Kota Bontang.
 - Realisasi indikator kinerja Penilaian tertib berlalu lintas dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sesuai dengan target Dinas Perhubungan, yaitu



mendapat penghargaan piala WTN (Wahana Tata Nugraha) dalam perlombaan penilaian tertib berlalu lintas yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

4. Prosentase rekomendasi/pertimbangan Angkutan Umum yang disetujui
 - Kelengkapan administrasi dalam operasional kendaraan umum sangat diperlukan, dengan bertambahnya angkutan barang dan kelengkapan administrasi angkutan umum di Kota Bontang, sehingga dalam mengeluarkan rekomendasi / persetujuan, Dinas Perhubungan memasukkan dalam indikator kinerja pada sasaran 1 (satu). Adapun target rekomendasi yang di keluarkan / di setujui yaitu 80% dengan realisasi 80% sehingga capaian indikator ke 4 (empat) ini 100%.
 - Realisasi indikator kinerja ke 4 (empat) Prosentase rekomendasi / pertimbangan yang disetujui tahun 2016 dan 2017 sebesar 80%. Indikator kinerja ini sudah sesuai target Dinas Perhubungan, yaitu 80%.
5. Tingkat kepuasan masrarakat terhadap pelayanan umum.
 - Kepuasan Masyarakat merupakan tujuan utama dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini Dinas Perhubungan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur dan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat Kota Bontang.
 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum di Tahun 2017 terealisasi sebesar 94 %. Realisasi indikator kinerja ini dapat di hitung berdasarkan data pada laporan Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana responden sebanyak 362 orang dan yang menyatakan cukup puas atas pelayanan di Dinas Perhubungan sebanyak 344 orang.
 - Realisasi Indikator kinerja Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum tahun 2016 sebesar 94% dan mengalami kenaikan 1% pada tahun 2017 sehingga untuk tahun 2017 terealisasi sebesar 95%. Hal ini tidak lepas dari kerja keras Dinas Perhubungan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Bontang.



6. Rasio kendaraan bermotor laik jalan.

- Pengujian kendaraan bermotor adalah bagian dari pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, untuk itu dalam LKIP Dinas Perhubungan rasio kendaraan bermotor laik jalan menjadi salah satu indikator kinerja untuk mengetahui pemilik kendaraan yang melakukan uji dan jumlah kendaraan yang wajib uji.
- Target Rasio kendaraan bermotor laik jalan tahun 2017 sebesar 80% dengan realisasi sebesar 44% dan capaian sebesar 55%. Dimana rasio kendaraan bermotor laik jalan dapat dihitung dengan perbandingan jumlah kendaraan yang taat uji berbanding dengan jumlah kendaraan yang wajib uji. Adapun jumlah kendaraan yang taat uji di Tahun 2017 yaitu 4.773 unit (hasil registrasi/pendaftaran pengujian kendaraan bermotor) dan jumlah kendaraan yang wajib uji yaitu sebesar 10.827 kendaraan dengan target uji kendaraan sebanyak 8.661 (80%) kendaraan.
- Realisasi kinerja pada indikator Rasio kendaraan bermotor laik jalan tahun 2017 mengalami penurunan. Realisasi tahun 2016 mencapai 45% turun menjadi 44% pada tahun 2017. Penurunan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan dan masih kurangnya kesadaran bagi pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan demi keselamatan berlalu lintas.

Disamping pencapaian indikator kinerja urusan perhubungan sebagaimana di atas, dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, pada tahun 2017 Kota Bontang mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Kegiatan pengadaan lahan Pelabuhan karena kegiatan tersebut masuk di anggaran perubahan, maka waktu tidak cukup untuk melaksanakannya	Agar dianggarkan pada tahun berikutnya (tahun anggaran 2018)



16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi, Informatika dan Statistik diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan jasa layanan internet, Pelaksanaan e-Procurement, Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang, Pembangunan Sistem Smart City Kota Bontang, Launching Sistem Smaer City Kota Bontang, Bimtek e-government, Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi.
2. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, dilaksanakan melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 2 program pokok dan 4 program penunjang serta 18 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp 9.868.532.424,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 9.095.938.763,00 atau 98,31% dan realisasi fisik sebesar 92,17%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib komunikasi, informatika dan statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18.

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)	Skor	2,5	3,2



Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2016 dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,7, maka dapat dikatakan bahwa pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah BAIK SEKALI. Secara umum Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bontang dan akan dilakukan review apabila tidak menunjang target yang telah ditetapkan.

Disamping pencapaian indikator kinerja sebagaimana di atas, dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informastika, pada tahun 2017 Kota Bontang mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, sebagaimana tabel berikut:

No.	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Peringkat 1 Rating Kota Cerdas Indonesia (RKC) 2017	Wakil Presiden RI Yusuf Kalla
2	Kategori Kota Kecil oleh Institut Teknologi Bandung	
3	Innovative Government Award 2017	RI Mendagri
4	Program Interkoneksi : Internet Gratis Bagi Komunitas Nelayan, Kepulauan dan Pesisir oleh Badan Litbang Depdagri RI	
5	Peringkat 2 Se-Kalimantan Timur	Gubernur Kalimantan Timur
6	Bidang Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 oleh Gubernur Kaltim pada Acara HUT Provinsi Kaltim 2018	

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
KOMUNIKASI	
1 Kurangnya SDM Spesialisasi di bidang desain grafis dan editing film	Perlunya menempatkan tenaga ASN yang memiliki kecakapan, skill dan pengalaman di bidang tersebut
2 Adanya tumpang tindih antar bidang, teknis penanganan pengelolaan website	1. Perlunya buku teknis, SOP dan SK untuk penegasan bidang penyajian informasi dalam pengelolaan website



Permasalahan	Solusi
	<ol style="list-style-type: none">2. Perlu ada koordinasi lebih dulu dalam pengadaan website ke bidang penyaji informasi3. Pelaksanaan Bimtek bagi staf pengelola website
3 Masih lemahnya tingkat kedisiplinan animo dan semangat khususnya para staf untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tupoksi di bidang penyajian informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Perlunya dilakukan pencerahan kepada seluruh staf secara berkala2. Perlunya dilakukan pembagian tupoksi dan pengarahan SOP masing masing tahapan dalam pengelolaan bidang penyajian informasi
4 Perlunya tambahan tenaga personil di lapangan	Perlu tenaga ASN untuk melakukan manajemen pengelolaan berita yang mencakup pemberitaan pemerintahan seluruh OPD dan masyarakat
5 Masih ada tumpang tindih dalam penggunaan fasilitas kamera dan handycam	<ol style="list-style-type: none">1. Perlunya penegasan dan kejelasan dalam penggunaan fasilitas kamera dan handycam2. Perlunya rak khusus untuk penyimpanan barang barang tersebut
INFORMATIKA	
1 Kurang update-nya aplikasi lama sehingga tidak memungkinkan untuk dikembangkan	Pembuatan aplikasi baru sesuai kebutuhan
2 Penunjang target pelaksanaan Masterplan IT belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran	Penambahan anggaran secara proposional sesuai kebutuhan
3 Pelayanan akses internet dan intranet	Internet dan intranet hanya dipakai di lingkungan pemkot
4 Kurangnya Data Center	Penambahan perangkat untuk pelaksanaan e-Government
5 Kurangnya Pelayanan TIK	Penambahan SDM TIK dan Bintek
PERSANDIAN	



Permasalahan	Solusi
1 Belum adanya tenaga jabatan fungsional persandian	Diusulkan formasi jabatan fungsional persandian
STATISTIK	
1 Kurangnya sarana dan prasana	1. Penambahan sarana dan prasarana 2. Adanya pembagian sarana dan prasarana sesuai jumlah pegawai
2 Kurang SDM ASN yang memahami statistik/mempunyai latar belakang pendidikan statistik	

17. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bontang dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor serta penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif; dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab/Kota Se-Kalimantan Timur, Pendampingan Legalitas Operasional BLUD Dana Bergulir.
- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Permodalan bagi UKM dan Koperasi.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah ini terdiri dari 2 program pokok dan 4 program penunjang yang diimplementasikan dalam 15 kegiatan. Alokasi



anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.9.509.891.870,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.9.067.905.678,00 atau 95,35% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,17%.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas	%	70.43	66.26
Persentase pertumbuhan IKM	%	6.54	8.42
Persentase Koperasi Aktif	%	83.76	50.00
Jumlah UMKM (kualitas)	%	0	99.74
Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah yang difasilitasi untuk mendapat penguatan modal	Pelaku UMKM	200	178

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Persentase pertumbuhan IKM pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,11% atau 110 IKM apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah IKM di Kota Bontang tahun 2017 sebanyak 1.258 IKM sedangkan jumlah IKM tahun 2016 sebanyak 1140 IKM (sesuai pendataan dan monitoring seksi ILMEA & IKAHH). Bertambahnya jumlah IKM ini diharapkan memunculkan produk produk industri yang dapat berdaya saing baik di Kota Bontang ataupun diluar Kota Bontang. Namun dari jumlah 1.258 IKM belum seluruhnya terbina mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Namun ke depan akan dicarikan solusi mengingat jumlah IKM yang banyak merupakan lahan pembinaan yang kontinu



dan konsisten dilanjutkan sehingga menciptakan produk yang dapat berdaya saing.

Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dapat diukur dengan indikator persentase koperasi aktif. Indikator persentase koperasi aktif ini adalah persentase jumlah koperasi aktif tahun 2017 dibagi dengan jumlah seluruh koperasi tahun 2017. Dari table diatas dapat dilihat bahwa indikator ini tidak mencapai target, sehingga capaiannya dibawah 100. Hal ini karena perbedaan regulasi pendataan koperasi. Jika tahun 2016 dan tahun tahun sebelumnya pendataan koperasi belum berbasis Online sehingga koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) 3 tahun berturut turut masih dimasukkan kategori koperasi aktif. Sedangkan tahun 2017 sesuai Permen KUKM No.10 tahun 2016 Pendataan koperasi dan UKM melalui sistim Online Data System (ODS), jika koperasi tidak melakukan RAT 2 tahun berturut turut otomatis dinyatakan tidak aktif.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	
1	Untuk indikator kinerja pembangunan daerah persentase koperasi aktif terjadi penurunan lebih 30% (Sesuai Permen KUKM No.10 tahun 2016 Pendataan koperasi dan UKM melalui sistim Online Data System (ODS), jika koperasi tidak melakukan RAT 2 tahun berturut turut otomatis dinyatakan tidak aktif)	1.1	Mengusulkan pembubarkan koperasi yang tidak aktif 3 tahun berturut turut ke Kementerian KUKM RI
		1.2	Meningkatkan program pengawasan dan pembinaan pada koperasi yang tidak melaksanakan RAT
2	Untuk indikator kinerja pembangunan daerah Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP) 85 % koperasi yang tidak aktif dan 100% koperasi dalam prosese pembubaran adalah koperasi simpan pinjam, dikarenakan macetnya usaha simpan pinjam	2.1	Untuk koperasi baru diarahkan pada koperasi konsumen atau produsen
		2.2	Peningkatan program revitalisasi koperasi dengan cara penggabungan koperasi yang tidak aktif tapi punya peluang usaha



Permasalahan		Solusi	
3	Perijinan, Monitoring dan Evaluasi BPR bukan tufoksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	3.1	Perlu ditetapkan Instansi / OPD yang melaksanakan Perijinan, Monitoring dan Evaluasi serta pendataan BPR
4	Untuk indikator kinerja pembangunan daerah Usaha Mikro dan Kecil Sesuai Permen KUKM No.10 tahun 2016 Pendataan koperasi dan UKM, maka pendataan UKM melalui Kecamatan dengan sistim Online Ijin Usaha Mikro	4.1	Segera mengaplikasikan Perwali No. 15 tahun 2017 tentang Ijin Usaha Mikro

18. Urusan Wajib Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Urusan Penanaman Modal dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya mutu pelayanan dan PAD dari retribusi perizinan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:

- 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Urusan Penanaman Modal ini terdiri dari 3 program pokok dan 3 program penunjang yang diimplementasikan dalam 16 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.6.399.771.924,00.



Realisasi keuangan sebesar Rp.5.935.201.324,00 atau 92,74% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 98,89%.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah. Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.20
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)	Investor	9	9
Jumlah Investor berskala nasional (PMA)	Investor	14	14
Jumlah Nilai berskala nasional (PMDN) Rp.x(000.000,-)	Rupiah	4,112,008	700,113
Jumlah Nilai berskala nasional (PMA) \$.x(000,-)	\$	235,349.43	1,072,625
Jumlah peraturan yang mendukung iklim investasi	perda	3	3
Peningkatan PAD dari retribusi perijinan Rp. (000.000,-)	Rupiah	3,558	1,985
Nilai IKM	Poin	76.39	79.97

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	
1.	Penanam modal yang telah mempunyai Izin Prinsip Penanaman Modal belum semua melaksanakan realisasi investasi	1.1	Monitoring dan koordinasi pelaksanaan dengan penanam modal



Permasalahan		Solusi	
2.	Anggaran yang tidak mendukung pelaksanaan rencana kegiatan	2.1	Alokasi APBD untuk menunjang kegiatan bidang
3.	Minimnya kuantitas tenaga teknis	3.1	Penambahan tenaga teknis untuk monitoring realisasi investasi
4.	Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung percepatan perizinan	4.1	Alokasi APBD untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
5.	Minimnya kuantitas tenaga teknis	5.1	Penambahan tenaga teknis yang memiliki pengetahuan dasar terkait perizinan

19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan, Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, Meningkatnya Sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan khususnya milik daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. dilaksanakan melalui kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka, Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra serta Seleksi Paskibraka Kota Bontang.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga,



Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi, Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta, Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta.

b) Realisasi Pelaksanaan dan Program dan Kegiatan

Urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 2 program pokok dan 5 program penunjang serta 25 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp. 12.662.894.312,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.607.321.440,00 atau 91,66 % dan realisasi fisik sebesar 98,52%. Capaian realisasi anggaran 91,66% karena ada efisiensi dan sisa lelang kontrak yang pekerjaannya tidak dapat terselesaikan. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 98,52% disebabkan adanya pekerjaan yang belum terselesaikan pada peningkatan sarana dan prasarana Stadion Bessai Berinta Kota Bontang.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM	Presentase	0,06	0,05
Persentase pelaku olahraga, pembibitan, masyarakat dan olahraga prestasi	Presentase	0,09	0,13
Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olahraga	Rasio	0,72	0,66

Terjadi kenaikan jumlah prosentase pemuda dan pramuka yang mengikuti kegiatan Kepemudaan dan Kepramukaan yang memperoleh peningkatan SDM dengan capaian realisasi sebesar 0,05%. Penyebab dari keberhasilan ini dikarenakan :

- a. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang melakukan kegiatan Kepemudaan dan Kepramukaan yang dilaksanakan secara rutin setiap 1 tahun sekali,



sehingga terjalin kemitraan yang sinergis antar organisasi kepemudaan dengan Kepramukaan.

- b. Tumbuhnya semangat dan jiwa berorganisasi dalam diri pemuda dan pramuka Kota Bontang.
- c. Melibatkan secara langsung anggota Purna Paskibraka dalam rangka pelaksanaan seleksi dan proses pelatihan dan pembinaan serta kegiatan Kepramukaan yang sudah berjalan dengan baik
- d. Terjadinya sinkronisasi program kegiatan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota yang tertuang didalam berita acara Rakor, sehingga banyak kegiatan – kegiatan nasional dan provinsi yang bisa diadopsi daerah.
- e. KNPI dan perkumpulan pemuda (PPI dan PPMI) aktif dalam memberikan masukan dalam penyusunan Renja SKPD.

Adapun Indikator Kinerja pada prosentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga prestasi pada tahun 2017 telah mencapai kenaikan senilai 0,13%. Penyebab dari keberhasilan ini dikarenakan oleh:

1. Tingginya kecintaan masyarakat terhadap olahraga hal ini dapat dilihat dari berkembang pesatnya jumlah klub olahraga di Kota Bontang.
2. Kompetisi dan kejuaraan olahraga tingkat klub khususnya sepakbola yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk ikut ambil bagian dengan membentuk klub sepakbola.
3. Sarana Olahraga berupa kompleks stadion bessai berinta cukup refresentatif dengan arena olahraga sepakbola, volley, basket, jogging track, panjat tebing dan roller coster yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan klub olahraga secara gratis dan bertanggung jawab.

Adapun untuk realisasi capaian kinerja Tahun 2017 pada jumlah sarana dan prasarana olahraga diperoleh senilai 0,66% menurun dari tahun sebelumnya. Penyebab menurunnya rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olahraga di Tahun 2017 ini dikarenakan:

1. Untuk perhitungan realisasi capaian kinerja pada rasio jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Bontang menggunakan Data Jumlah



Penduduk yang semakin bertambah, sehingga perolehan capaian realisasinya tidak mencapai target senilai 1,16;

2. Penetapan nilai target di Tahun 2017 terlalu tinggi, sehingga perolehan realisasi capaian kinerja tidak tercapai;
3. Adanya keterbatasan jumlah Alokasi Anggaran di Tahun Anggaran 2017 dikarenakan defisit Anggaran Pemerintah Kota Bontang; dan
4. Data penduduk pada target berdasarkan pada data dasar Renstra yaitu jumlah penduduk menurut data BPS di tahun 2017 dengan asumsi kenaikan 2% per tahun, sedangkan pada data realisasi menggunakan data penduduk dari Disdukcapil per 31 Desember 2017.

c) Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi
1	Belum Ada Tenaga Teknis di Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata yang terkait dengan kegiatan fisik, sehingga apabila ada kegiatan yang terkait dengan kegiatan fisik harus berkoordinasi dengan OPD Teknis yang paham akan kegiatan fisik.	Diusulkan Ke BPKD terkait Staf Tenaga Teknis Fisik
2	Adanya keterbatasan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak terlaksana yang ada Di DISPOPAPAR	Diusulkan di Tahun Anggaran Berikutnya sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana.
3	Kekurangan peralatan kelengkapan kantor	Diusulkan Kedalam RKBU sehingga pengadaan peralatan kelengkapan kantor terpenuhi.
4	Perlu peningkatan SDM Bagi ASN di DISPOPAPAR Pemerintah Kota Bontang	Perlu Dianggarkan Kegiatan Pelatihan Bagi ASN sesuai dengan bidang yang ditangani

20. Urusan Wajib Kebudayaan

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas, perlindungan, pengembangan dan



pemanfaatan warisan budaya. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya, Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya.
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan melalui kegiatan Festival Seni Budaya.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah ini terdiri dari 2 program pokok yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.043.798.800,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.022.163.634,00 atau 97,93% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.22.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kebudayaan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2016	2017
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	1	2
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	1
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	2	3
Jumlah Grup Kesenian	Unit	20	22
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan



Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan pada tahun 2016 sebanyak 1 unit, realisasi pada 2017 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 2 unit dari target 0. Kawasan cagar budaya tersebut adalah Kantor Camat dan Polsek Pertama di Bontang Kuala.

Jumlah Gedung Kesenian pada tahun 2016 sebanyak 1 unit, target pada 2017 yaitu 0 unit, realisasi pada 2017 telah sesuai dengan target sehingga capaian jumlah gedung kesenian yaitu 1 unit. Gedung kesenian tersebut adalah gedung MTQ yang sering digunakan untuk kegiatan masyarakat berupa pertemuan kelompok atau komunitas budaya yang ada di Kota Bontang.

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya pada tahun 2017 yaitu 3 kegiatan dari target 2 kegiatan. Festival tersebut yaitu Erau Pelas Benua di Guntung, Pesta Laut di Bontang Kuala dan Bontang City Carnival (BCC) dalam rangka memeriahkan HUT Kota Bontang Ke-18.

Jumlah Grup Kesenian pada tahun 2016 sebanyak 20 grup, target pada 2017 yaitu 2 grup, realisasi pada 2017 telah sesuai dengan target sehingga capaian jumlah grup seluruhnya yaitu 22 grup. Grup kesenian tersebut misalnya Dendang Bahari dan Lembaga Adat yang mengembangkan Tari Jepen yang berlokasi di Bontang Kuala. Pada kenyataannya masih banyak grup kesenian yang belum terdaftar sehingga jumlah tersebut masih bisa bertambah, diharapkan kedepannya seluruh grup kesenian dapat didata dan data yang dilaporkan lebih akurat.

c) Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Belum adanya kelembagaan yang berfungsi untuk memastikan keberadaan dan keberlanjutan kelompok seni daerah	Membentuk Dewan Kesenian Daerah
2	Masih belum optimalnya kuantitas SDM bidang kebudayaan	SDM bidang kebudayaan. Penambahan personil bidang kebudayaan.
3	Masih minimnya sarana prasarana informasi Promosi Seni dan Budaya	Meningkatkan jumlah sarana promosi seni dan budaya (baliho, dll).



21. Urusan Wajib Perpustakaan

Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pelayanan perpustakaan daerah, Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat Kota Bontang, Meningkatnya Sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana perpustakaan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan melalui kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca, Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan umum Daerah serta Pengadaan Buku – Buku Kota Bontang

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan perpustakaan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 4 program penunjang serta 17 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan perpustakaan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.2.901.977.682 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.782.494.355 atau 95.8% dan realisasi fisik sebesar 99%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun (Presentase pengunjung perpustakaan terhadap jumlah penduduk)	orang	471.201	463.875
Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul Buku	883.189	883.579
Jumlah perpustakaan	Perpustakaan	321	231



Jumlah perpustakaan taman baca dan pojok baca	Taman baca/ Pojok Baca	38	41
---	---------------------------	----	----

Dari persentase capaian IKU yang terlihat pada tabel 4.23 maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

- ✓ Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami kenaikan sebanyak 7.326 orang dari tahun sebelumnya.
- ✓ Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah, pada tahun 2017 ada penambahan sebanyak 378 judul 1.401 eksemplar.
- ✓ Jumlah perpustakaan (daerah, sekolah dan swasta) mengalami penurunan karena ada beberapa perpustakaan yang sudah tidak aktif lagi di sebabkan oleh faktor teknis dan untuk perpustakaan sekolah (SMA) sudah diambil alih oleh Provinsi.
- ✓ Jumlah perpustakaan taman baca / pojok baca, pada tahun 2017 ada penambahan sebanyak 3 pojok baca.

Dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan, Pada tahun 2017 Kota Bontang mendapatkan penghargaan Juara 1 Pemilihan Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Minat baca tahun 2017 yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Belum memadai Sumber Daya Manusia dalam hal tata pengelolaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang (jabatan fungsional Pustakawan, Pengelola, Perpustakaan, dan Jabatan perpustakaan lainnya). Belum ada keseimbangan antara Analisis Beban Kerja dengan fakta SDM yang tersedia	Penambahan SDM Pengelola Perpustakaan
2 Kurangnya Bimtek/Pelatihan peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan	Peningkatan SDM melalui Bimtek/Pelatihan



3	Terbatasnya koleksi bahan pustaka	Penambahan koleksi bahan pustaka
4	Wilayah jangkauan perpustakaan keliling di titik pelayanan tidak seimbang dengan mobilitas yang ada, sehingga pelayanan kurang maksimal	Penambahan mobilitas untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan
5	Sarana pelayanan perpustakaan daerah belum memenuhi standar	Penambahan sarana pelayanan perpustakaan daerah
6	Belum tersedianya perangkat pengembangan perpustakaan digital (Informasi Teknologi)	Perlunya perangkat lunak untuk pengembangan perpustakaan digital (Informasi Teknologi)

22. Urusan Wajib Kearsipan

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan dan perbaikan sistem administrasi kearsipan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Kearsipan.
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah dan Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika.
3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah. Dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan kearsipan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 program pokok. Alokasi dana untuk urusan perpustakaan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya



sebesar Rp.121.222.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.115.987.000 atau 95.9% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Jumlah (persentase) SKPD yang menerapkan arsip secara baku	SKPD	23	23
Jumlah peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	kegiatan	3	4

Dari persentase capaian IKU yang terlihat pada tabel 4.24 maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

1. Jumlah PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara buku, pada tahun 2017 tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggaran yang mendukung untuk pelaksanaan indikator kinerja tersebut. data jumlah PD yang menerapkan arsip secara baku pada tahun 2016 sebanyak 23 PD dan jumlah PD pada tahun 2017 sebanyak 29 PD.
2. Jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2017 telah didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang tertuang di DPA DIInas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Belum memadai Sumber Daya Manusia dalam hal tata pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Jabatan fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip). Belum ada keseimbangan antara Analisis Beban Kerja dengan fakta SDM yang tersedia	Penambahan SDM Pengelola Kearsipan



2	Kurangnya bimtek/pelatihan peningkatan SDM Pengelola Arsip	Peningkatan SDM melalui Bimtek/pelatihan
3	Belum tersedianya Depo Arsip	Pengadaan Depo Arsip
4	Belum terpenuhinya Rekord Center oleh perangkat daerah	Pengadaan Rekord Center
5	Penyimpanan arsip yang belum representatif	Penambahan sarana berupa lemari penyimpanan arsip

23. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Penguatan dan Internalisasi Ideologi Pancasila dan Nilai-Nilai Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai Politik melalui Pendidikan Politik serta Peningkatan Peran Ormas Kota Bontang. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Keagamaan/Paguyuban.
3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota.



4. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat, Verifikasi Data Orkemas dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilukada.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 5 program penunjang serta 26 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.8.548.514.627 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.617.126.899 atau 89,10% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi	Peristiwa	0	0
Jumlah Forum dialog public	Kegiatan	36	40
Jumlah partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Persentase	0%	25%
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	86	57

Secara garis besar capaian realisasi pada indikator kinerja Badan Kesbangpol mencapai 100% bahkan capaiannya ada di posisi diatas 100%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesbangpol mencapai target sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Badan.

Ada dua Indikator kinerja pada strategis satu yaitu berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu



sara dan sumber daya ekonomi dan meningkatnya forum dialog publik. Seiring dengan tujuan pada misi satu bahwa di dalam peningkatan ketahanan dan kewaspadaan ideologi wawasan kebangsaan dan sosial budaya, maka gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber daya ekonomi harus dapat diminimalisir hal ini dalam rangka penguatan ideologi pancasila dan mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan memperkuat persatuan NKRI. Realisasi pada tahun 2017 berdasarkan data dari Badan Kesbangpol sebesar 0 peristiwa, menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang berlatar belakang isu separtisme, isu sara di Kota Bontang tidak menimbulkan dampak terhadap gangguan keamanan, dapat dinyatakan bersifat kondusif pada tahun 2017.

Indikator ke dua adalah meningkatnya jumlah forum dialog publik, termuat pada bidang bina kesbang dan demokrasi. Program kegiatan yang mendukung pada indikator tersebut adalah program pengembangan wawasan pembangunan, kemitraan wawasan pembangunan dan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. Capaian realisasi tahun 2016 sebesar 36, sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 40 kegiatan. Jika dibandingkan dengan target di tahun 2017 yaitu sebanyak 5 kegiatan maka persentase capaian >100 % yaitu di atas 100%. Kegiatan-kegiatan di tahun 2017 yang mendukung indikator tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pertemuan antar umat beragama yaitu PAKEM, memfasilitasi dan membentuk tim terpadu daerah penanganan konflik sosial, memberdayakan beberapa forum di bawah Kesbangpol dan melaksanakan kegiatan rutin pada bidang kesatuan bangsa dan demokrasi.

c) Permasalahan dan Solusi



Permasalahan	Solusi
1 Turunnya kegiatan di tahun 2016 dikarenakan banyaknya anggaran berkaitan dengan peningkatan forum dialog publik dikurangi dan dihilangkan di anggaran perubahan APBD-P 2016,	melakukan sinergitas antara kegiatan vertikal dengan kegiatan Badan Kesbangpol serta mengajak peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam rangka penguatan pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini yaitu dengan melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring di lapangan
2 Peningkatan forum dialog publik relatif rendah, hal ini melihat kondisi keuangan pada Pemerintah Daerah belum stabil akibat turunnya tingkat perekonomian di Indonesia. Adanya peningkatan anggaran akan berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan realisasi kegiatan.	Melakukan sinergitas antara kegiatan vertikal dengan kegiatan Badan Kesbangpol serta mengajak peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
	Melakukan Apel/Irup dalam penguatan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi pancasila di lingkungan sekolah-sekolah.
	Optimalisasi pembentukan dan tim terpadu dalam penanganan konflik
3 Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi di bidang politik bagi kader anggota partai politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kamu marjinal.	Perlunya keterlibatan pemerintah dan pemda dalam penyelenggaraan forum dialog politik dan pendidikan politik.
4 Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan pemilu	Perlu penguatan koordinasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan pemilu sehingga tercipta kesatuan langkah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilu.

C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 5 urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan



Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dengan Meningkatkan Produksi Perikanan, Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Promosi Hasil Perikanan dan Kelautan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana bagi Nelayan Tangkap. Pengoperasian PPI/TPI. Pembangunan Fasilitas TPI.
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan. Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai. Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya. Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumpuk Laut. Pembangunan Sarana dan Prasarana BBIP. Pengumpulan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Perikanan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perikanan dan Kelautan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok dan 5 (lima) program penunjang termasuk 3 kegiatan yang didanai Alokasi dana khusus. Untuk urusan Perikanan dan Kelautan pada tahun anggaran 2017 anggaran seluruhnya sebesar Rp.9.679.184.328,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.291.710.433,00 atau 96% dari alokasi anggaran.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib Perikanan dan Kelautan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.26

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	20,424.70	27,164.20

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Keberhasilan kinerja tersebut di dukung dengan adanya Program dan Kegiatan yang mendukung serta anggaran yang sesuai sehingga Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya realisasi (27.264,20 Ton) terdiri dari perikanan tangkap, ikan budidaya, rumput laut yang melebihi dari target yang ada (20.556,8 Ton).dan di dukung pula bantuan bagi sarana dan prasarana perikanan yaitu pengadaan webbing jaring purse seine,gill net kakap M3",GPS,Fish Finder, Mesin 24 PK ,Webbing jaring sero,dill net baronang M2, webbing gill net kepiting M4.

c) Permasalahan dan Solusi

	Permasalahan	Solusi
1	Terbatasnya jumlah kelompok nelayan perikanan tangkap dan kelompok nelayan budi daya ikan yang mendapatkan bantuan, dimana jumlah kelompok nelayan 283 kelompok sedangkan yang mendapatkan bantuan hanya 68 kelompok	Perlu dikoordinasikan lebih intens lagi data jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan jumlah seluruh kelompok nelayan yang ada agar dapat terdata secara keseluruhan.

2. Urusan Pilihan Pariwisata

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

a) Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut :



- 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan Wisata Adat di Kelurahan Guntung, Pengembangan Objek Pariwisata Mangrove Berbas Pantai (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata Sub Penataan Kawasan Pariwisata), Pembangunan Objek Wisata Pesisir, Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
- 2) Program Pengembangan Kemitraan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Urusan Pariwisata ini terdiri dari 2 program pokok yang diimplementasikan dalam 5 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.957.732.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.790.468.558,00 atau 91,45% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah. Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.27

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	5300	383,868
Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata	Lokasi		1
Meningkatnya Jumlah Kelompok Sadar Wisata Yang Di Bina	Kelompok		8

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



Untuk realisasi Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2017, Khususnya pada Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dari Target 5.565 jumlah kunjungan wisata, ternyata terrealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 bertambah menjadi 383.868 orang wisatawan nusantara sedangkan wisatawan mancanegara berjumlah sebanyak 82 orang.

Sedangkan untuk Jumlah Destinasi Pariwisata tidak mengalami perubahan yaitu satu (1) serta untuk jumlah kelompok sadar wisata sampai dengan 31 Desember 2017 dari Target sebanyak 10 kelompok sampai dengan 31 Desember 2017 telah terrealisasi sebanyak 8 (delapan) Kelompok.

Pada tahun 2017, terkait dengan pelaksanaan urusan Pariwisata, Kota Bontang mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional, sebagai berikut:

1. Penghargaan Desa Wisata Maritim terhadap Bontang Kuala, yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Juara 1 Lomba Kelompok Sadar Wisata (Darwis) tingkat Provinsi Kaltim, diberikan kepada Kelompok Kuala Abadi (Bontang Kuala)

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	
1.	Pengembangan objek wisata mangrove Berbas Pantai, permasalahannya: 1.1 Kurangnya staf dilapangan	1.1	Pernambahan personil petugas
2.	Pembangunan objek wisata pesisir, permasalahannya : 1.1 waktu yang mepet pada kegiatan yang pendanaannya lewat APBDP	2.1	Dianggarkan ditahun berikutnya
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, permasalahannya: 3.1 Anggaran yang minim	3.1	Memaksimalkan anggran yang ada dan menjalin kerjasama dengan perusahaan
4.	Kondisi secara umum pada seksi sarana dan prasarana dan promosi wisata, permasalahannya:	4.1 4.2	Diklat dan peningkatan SDM Meminjam ke perusahaan dan DKPP



Permasalahan		Solusi	
	4.1 kurangnya SDM yang bersertifikasi untuk pelaksanaan monitoring 4.2 Tidak ada sarana transportasi laut untuk monitoring 4.3 Kurang maksimalnya informasi promosi wisata seperti : website, baliho dan leaflet	4.3	Bekerjasama dengan provinsi dalam promosi wisata
5.	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tidak dapat dilaksanakan karena: 5.1 Anggaran yang kurang 5.2 RTRW Kota Bontang sebagai pedoman penyusunan RIPDA belum selesai 5.3 RIPDA Provinsi belum selesai	5.1 5.2 5.3	Mengajukan penambahan anggaran di tahun berikutnya Menunggu selesainya RTRW Kota Bontang Menunggu selesainya RIPDA Provinsi
6.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Wisata Adat Guntung, permasalahannya : 1.1 Wisata adat include dalam RTH sudah di DED 1.2 Tidak tersedianya dana untuk membangun fasilitas sesuai tahapan/jadwal yang sudah direncanakan		Sudah ditawarkan ke pihak ke tiga/mitra pariwisata untuk mengambil/membangun fasilitas baik dalam forum CSR maupun kalangan swasta lainnya

3. Urusan Pilihan Pertanian

Pelaksanaan urusan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan melakukan upaya intensifikasi pertanian, termasuk di dalamnya usaha peternakan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga petani.

a) Program dan Kegiatan



Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Produksi Pertanian, Meningkatnya Produksi Peternakan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) program Penunjang, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, Sarana dan prasarana Operasi Balai Penyuluh.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan), dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan.
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, Pertanian Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan (DAK Fisik Reguler Pertanian), Pendampingan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan, Pengendalian Perencanaan dan Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan/ Penambahan Sarana Balai Penyuluhan (DAK Bidang Kedaulatan Pangan).
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan, Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (DAK Bidang Kedaulatan Pangan), Pembangunan/ Renovasi dan Fasilitasi Peralatan Rumah Potongan Hewan Ruminansia (DAK Bidang Kedaulatan), Operasi Rumah Potong Hewan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pertanian pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 6 program penunjang serta 13 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Pertanian pada tahun



anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.3.586.127.288,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.455.958.799,- atau 100% dan realisasi fisik sebesar 96,37%.

Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28

Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian	
		2016	2017
Meningkatnya Produksi Pertanian	Ton	315	289
Meningkatnya Produksi Peternakan	Ekor	1066	1132

Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, keberhasilan kinerja tersebut di dukung dengan adanya Program dan Kegiatan yang mendukung serta anggaran yang sesuai, ada pun faktor penting yaitu cuaca yang mendukung dalam produksi pertanian. sehingga Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura realisasi sama dengan target untuk padi yaitu 274 ton, selain padi ada pun produksi lain yaitu jagung (58 ton), kacang tanah (15 ton), Ubi kayu (346 ton) dan ubi jalar (71 ton).

Intensifikasi budidaya peternakan. Produksi peternakan, keberhasilan kinerja tersebut di dukung dengan adanya Program dan Kegiatan yang mendukung serta anggaran yang sesuai, sehingga produksi peternakan melebihi dari target yaitu realisasi untuk sapi 1.132 ekor melebihi dari target yang ada (1.066 ekor), selain sapi adapun produksi peternakan lain yaitu kuda (2 ekor, kerbau 20 ekor dan sapi perah 13 ekor.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Serangan Hama dan Penyakit Tanaman.	Pengadaan Pestisida dan perangkap hama
2 Bencana (Kekeringan dan banjir)	Perbaikan irigasi dan drainase

4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral



Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

a) Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya energi guna menunjang perekonomian daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala PLTS Komunal Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ini terdiri dari 1 program pokok yang diimplementasikan dalam 1 kegiatan (Bayar Hutang / Kewajiban Tahun Anggaran 2016). Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.32.065.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.32.065.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

5. Urusan Pilihan Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

a) Program dan Kegiatan

Urusan perdagangan bertujuan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya sarana perdagangan dan sistem distribusi perdagangan serta ekspor dan meningkatnya perdagangan dan industri. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Sarana Pasar Tradisional, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Kota Bontang, Pemeliharaan Pasar Kota Bontang.



2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan; dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan.
3. Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan; dilaksanakan melalui kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar), Pembangunan Pasar Rawa Indah, Pembangunan Pasar Citra Mas Loktuan.

b) Realiasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perdagangan terdiri dari 3 program yang diimplementasikan dalam 7 kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.11.164.969.505,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.4.357.587.123,00 atau 39,02% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 79,45%. Rendahnya realisasi fisik berbanding keuangan karena adanya 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Kota Bontang dimana prosentasi capaian fisik dan keuangannya 0. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena adanya tumpang tindih nomenklatur kegiatan dengan perangkat daerah yang lain yang mengerjakan kegiatan yang sama.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Perdagangan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.29
Realisasi Indikator Kinerja Utama Urusan Perdagangan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Realisasi	
	2016	2017
Volume aktifitas pengawasan peredaran barang/ jasa	40	50
Persentase alat UTTP yang berterra	0	89.86



Banyaknya pelaku usaha yang menjual produk dalam dan luar daerah	4	4
Ekspor bersih perdagangan	3,009	2,769
Cakupan bina kelompok perdagangan/ usaha informal	616	661
Optimalisasi pendapatan sektor pasar	0	111.43
Pembangunan pasar tradisional	0	-

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Indikator volume aktivitas pengawasan peredaran barang/ jasa ini adalah monitoring stok bahan pokok dan barang strategis lainnya yang dilakukan tiap Minggu. Dari sini bisa diperoleh fluktuasi harga dan jumlah stok barang yang tersedia di Kota Bontang untuk memperlancar distribusi perdagangan. Dari 48 kali monitoring yang ditargetkan dapat terealisasi 50 kali monitoring dengan tambahan 2 kali monitoring menjelang hari- hari besar.

Indikator persentase alat UTTP yang berterra. Indikator ini adalah persentase perbandingan alat UTTP yang sudah berterra dengan jumlah alat UTTP yang ada. Karena urusan alat UTTP ini masih sangat baru di Dinas, maka untuk langkah awal hasil pendataan UTTP masih di 3 pasar tradisional dengan jumlah 1.700 unit alat UTTP dan yang sudah berterra sebanyak 1.558 unit alat UTTP. Dengan terra alat UTTP ini diharapkan menciptakan sistem perdagangan yang sehat karena memperhatikan hak- hak konsumen.

Capaian kinerja tahun 2017 untuk realisasi ekspor yang ada di Kota Bontang sebesar 51,32%. Dari target 6.185 milion \$, telah tercapai sebesar 3.174 milion \$. Nilai ekspor ini bisa naik ataupun turun sesuai dengan permintaan Negara tujuan ekspor itu sendiri.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi	
1	Untuk indikator kinerja pembangunan daerah Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (nilai	1.1	Perlu kejelasan instansi/ OPD yang bertanggungjawab terhadap indikator ini



Permasalahan		Solusi	
	ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Bontang)		
2	Untuk indikator kinerja pembangunan daerah <i>Ekspor Bersih Perdagangan</i> Penurunan nilai ekspor dapat dilihat dari jumlah permintaan penerbitan SKA dari perusahaan menurun karena beberapa faktor antara lain: Permintaan SKA terbesar yaitu PT. Badak pada tahun 2017 telah berakhir kontrak ekspor dan masih dalam proses peralihan PT Pertamina, harga jual ekspor yang semakin turun serta menurunnya permintaan ekspor dari negara tujuan ekspor	2.1	Penurunan nilai ekspor ini tidak mengindikasikan penurunan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang karena Seksi Perdagangan Luar Negeri ini hanya memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal yang didalamnya nilai ekspor bisa di hitung.
		2.2	Naik turunnya nilai ekspor ini tergantung pada perusahaan ekspor yang ada di Kota Bontang.

D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Bontang juga melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi beberapa Fungsi Penunjang antara lain Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Fungsi Keuangan; Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Fungsi Pengawasan, Fungsi Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta Fungsi Pendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Tersusunnya standar dan prosedur kerja yang efektif, Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi bidang perencanaan, Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Optimalisasi penelitian dan



pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah, Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, Meningkatnya kesesuaian penataan ruang serta Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Penetapan RKPD, Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Evaluasi RPJMD.
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi melalui kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
4. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya melalui kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat.
5. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi.
6. Program Penelitian Dan Pengembangan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan.
7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah melalui kegiatan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Koordinasi Pembangunan Sanitasi Perkotaan.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Fungsi Perencanaan, Penelitian dan pengembangan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 7 program pokok dan 5 program penunjang serta 26 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Fungsi Fungsi Perencanaan, Penelitian dan



pengembangan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.3.337.358.299,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.177.058.951,00 atau 99,01% dan realisasi fisik sebesar 85,22%. Realisasi indikator kinerja utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel.4.30

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Tingkat implementasi SOP	Persen	67	95
Jumlah aparatur yang lulus uji kompetensi perencana	Orang	5	7
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	Persen	92	96
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persen	60	65,07
Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	Persen	80	69
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	Persen	25	32
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	Persen	100	100
Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	Persen	65	60
Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD	Persen	90	95
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja \geq 76%)	Persen	85	89

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang



Pada tahun 2017 terdapat 6 pegawai yang telah mengikuti Diklat Fungsional Penjurangan Perencana Pertama angkatan XXVI Bappenas pada Puslitbang Kebijakan dan Manajemen (P3KM) Universitas Hasanuddin Makassar dari tanggal 10 April sampai dengan 27 Mei 2017 dan berhasil lulus sertifikasi Perencana Pertama. Sebelumnya pada tahun 2016 sudah ada 1 pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional Penjurangan Perencana Muda angkatan XXVIII Bappenas dan lulus sertifikasi Perencana Muda sehingga pada tahun 2017 terdapat total 7 pegawai yang telah lulus uji kompetensi Perencana.

Indikator Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD pada tahun 2017 merupakan titik terendah nilai APBD akibat penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah terdapat beberapa program yang harus dihapus karena keterbatasan anggaran.

Indikator Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kenaikannya tidak terlalu signifikan dikarenakan sebelumnya kegiatan tentang kelitbang belum pernah dilaksanakan sehingga tingkat penerapan belum pernah dimonitor dan dievaluasi sebelumnya.

Indikator Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW untuk tahun 2017 tidak ada kegiatan pengawas dan pengendalian sehingga tidak ada pengukuran data. Data yang digunakan adalah data pada tahun 2016.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Bapelitbang	1.1 Mengikutsertakan pegawai pada Diklat Fungsional Penjurangan Perencana (6 orang)
	1.2 Mendorong pengangkatan pegawai pada Jabatan Fungsional Perencana (1 orang)
	1.3 Mengadakan Workshop JFP dengan mendatangkan narasumber dari Pusbindiklatren Bappenas



Permasalahan	Solusi
	1.4 Mereviu dan menyusun ulang SOP kegiatan Bapelitbang
2 Adanya kesulitan mendapatkan data yang berkualitas (akurat, valid, dan terkini)	2.1 Merancang suatu mekanisme pengelolaan data informasi pembangunan (oleh Subbid Data dan Litbang) yang mencakup seluruh data-data yang diperlukan dalam proses perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
	2.2 Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan penyedia data
3 Proses perencanaan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis. Banyaknya unsur yang terlibat dalam perencanaan memerlukan strategi yang tepat agar proses perencanaan dapat berjalan dengan baik	3.1 Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan (pimpinan daerah, perangkat daerah, DPRD, masyarakat, dan <i>stakeholder</i>)
	3.2 Penggunaan teknologi informasi (aplikasi <i>e-planning</i>) yang menyajikan data perencanaan termasuk hasil Musrenbang
4 Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum memberikan umpan balik maksimal yang dapat digunakan oleh perangkat daerah untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya. Selain itu, aplikasi pengendalian yang ada (<i>e-controlling</i>) belum sepenuhnya mengukur kinerja	3.1 Mengikutsertakan pegawai pada Diklat Monitoring dan Evaluasi dari Pusbindiklatren Bappenas
	3.2 Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi
	3.3 Merancang dan merencanakan perbaikan aplikasi pengendalian pada Renja 2018

2. Keuangan Daerah

Dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mencapai sasaran strategis Terlaksananya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta Tercapainya optimalisasi pendayagunaan kekayaan/Aset Daerah.



a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui 23 (dua puluh tiga) kegiatan antara lain Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan, Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.
2. Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui kegiatan Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan, Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA), Asosiasi Daerah Penghasil Migas, Fasilitasi Pengelolaan Pajak Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan, Pemeliharaan SISMIOP PBB, Penghapusan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bontang, Pemutakhiran Data Piutang PBB P-2 sebelum Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pajak PBB P-2 oleh Pemerintah Pusat serta Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan.
3. Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah melalui kegiatan Sensus Barang Milik Daerah, Penghapusan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU dan RKPBU), Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus, Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akual, Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan Aset serta Penyusunan Buku Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 program pokok dan 4 program penunjang serta 59 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Fungsi Keuangan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar



Rp.12.257.949.148,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.951.073.308,00 atau 88,70% dan realisasi fisik sebesar 96,58%.

Realisasi indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan daerah Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	*WTP
Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	170.123.811.101.,19	169.339.852.119,92
Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan	Prosentase	100%	100%

* Opini BPK Tahun 2016, Pada Tahun 2017 masih menunggu audit BPK

Indikator kinerja pada sasaran 1 adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan satuan WTP dengan Target Akhir Renstra 2017 WTP, Realisasi di tahun 2017 adalah *WTP (masih menunggu audit dari BPK) dengan titik pencapaian *WTP.

Indikator kinerja pada sasaran 2 adalah Pendapatan Asli Daerah. Satuan rupiah dengan Target akhir Renstra 2017 sebesar Rp 160.339.852.119,92 dengan realisasi di tahun 2017 sebesar Rp 169.339.852.119,92 *(realisasi sebelum audit BPK) dengan tingkat pencapaiannya sebesar 105,45%.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Untuk mempertahankan opini WTP, diperlukan langkah nyata dalam menentukan langkah strategis dan kegiatan nyata lintas sektor.	Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah



Permasalahan	Solusi
2 Kurangnya Sumber daya Manusia yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pendapatan daerah, anggaran, belanja, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan kekayaan/asset milik daerah	Mengikutsertakan pegawai pada Diklat terkait hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi
3 Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait penertiban kekayaan/ asset milik daerah	Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penertiban kekayaan/ asset milik daerah

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a) Program dan Kegiatan

Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Tersedianya sistem perencanaan ASN yang tersistem dengan baik serta Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya, Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS, Pengangkatan dan Pemindehan Pegawai Struktural dan Non Struktural, Pengusulan Kartu Status Pegawai, Pelaksanaan Ujian Dinas, Pengusulan Pemberhentian PNS, Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai serta Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

b) Realisasi Program dan Kegiatan



Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 5 program penunjang serta 23 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan Fungsi Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp 5.013.475.631,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.383.382.662,00 atau 86,78% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32

Realisasi Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Tahun 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Persentase OPD yang sudah menyusun formasi kebutuhan pegawai	Persen	100	100
Persentase kelulusan peserta diklat	Persen	100	100

Sumber: BKPP Kota Bontang

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1 Tidak adanya penganggaran untuk kegiatan Asistensi Penyusunan Formasi Pegawai, dikarenakan keterbatasan anggaran perangkat daerah.	Melaksanakan kegiatan dengan batas waktu yang tidak terlalu lama didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan kinerja yang efektif. Koordinasi dengan perangkat daerah untuk mempersiapkan usulan kebutuhan formasi dan bukti pendukung lainnya sebelum melakukan asistensi formasi.
2 Terdapat 2 (dua) orang Diklat Pim IV yang tidak bisa mengikuti jadwal Diklat Pim IV angkatan awal karena alasan keluarga (istri akan melahirkan).	Menjadwal ulang untuk peserta Diklat Pim IV pada gelombang atau angkatan berikutnya.



3 Terdapat 2 (dua) orang Diklat Pim III yang tidak dapat mengikuti jadwal Diklat Pim III, karena bertepatan dengan jadwal ibadah Umroh dan sedang dalam proses mutasi.	Menjadwalkan dan menganggarkan untuk tahun berikutnya.
--	--

4. Fungsi Pendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik kota, Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah, Meningkatnya Harmonisasi Penataan Produk Hukum Daerah, Meningkatnya Harmonisasi Kebijakan Perekonomian Daerah serta Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun sasaran strategis dari Kantor Sekretariat KORPRI adalah Terwujudnya tertib administrasi perkantoran, Meningkatnya pelayanan kegiatan bidang olah raga, seni budaya, mental dan rohani bagi anggota KORPRI, Meningkatnya pelayanan dan pendampingan anggota Korpri oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI.

a) Program dan Kegiatan

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah pada tahun 2017 dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah melalui 19 program pokok dan 5 program penunjang dan Kantor Sekretariat KORPRI melalui 1 program pokok dan 3 program penunjang yang dilaksanakan dalam 63 kegiatan.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Alokasi dana untuk pelaksanaan Fungsi pendukung pelaksanaan tugas kepala daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat KORPRI pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.76.598.554.118,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.62.283.557.191,00 atau 88,28% dan realisasi fisik sebesar 99,20%.

Realisasi indikator kinerja utama Sekretariat Daerah dan Sekretariat KORPRI adalah sebagai berikut:



Tabel 4.34
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah dan Sekretariat KORPRI Tahun 2017

Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
			2016	2017
Sekretariat Daerah	Nilai SKM Kota Bontang	skor	79,60	76,13
	Nilai LPPD	nilai	ST	ST
	Nilai Akuntabilitas	Nilai	B	B
	Prosentase Kebijakan Perekonomian Daerah yang Adaptif sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	-	100
	Prentase sanggahan terhadap jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilelang	Persen	-	5
Kantor Sekretariat KORPRI	Jumlah Laporan tepat waktu	laporan	60	60
	Jumlah Anggota Korpri yang aktif berpartisipasi di bidang olah raga, seni budaya, mental dan rohani	orang	815	515
	Persentase Anggota KORPRI yang mendapat pendampingan dari LKBH Korpri	%	100	100

Jika dilihat dari tabel diatas bahwa nilai LPPD Tahun 2016 yang ditetapkan di tahun 2017 adalah ST (Sangat Tinggi). Kota Bontang menempati peringkat 4 dengan Skor nilai 3,1842. demi memaksimalkan penyusunan LPPD solusi yang dilakukan yaitu dengan memaksimalkan koordinasi dengan SKPD, melaksanakan workshop penyusunan LPPD, serta melaksanakan Orientasi Lapangan Penyusunan LPPD.

Pada Tahun 2017, target dari Produk Hukum daerah adalah sebesar 53 Produk Hukum sedangkan dari data yang diperoleh terdapat 52 Produk Hukum yang ditetapkan pada Tahun 2017. Capaian ini tentu tidak melampaui dari target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017.



Untuk Indikator Kinerja Utama dari Kantor Sekretariat KORPRI Untuk Sasaran Strategis yang pertama yaitu terwujudnya tertib administrasi perkantoran, indikator kinerjanya adalah jumlah laporan tepat waktu. Indikator ini diukur dengan cara menghitung jumlah laporan yang disusun dengan baik dan disampaikan kepada pengguna sesuai waktu yang ditentukan (tepat waktu). Untuk Tahun 2017 pada Sekretariat Korpri terdapat 83 laporan yang dibuat dengan baik dan disampaikan tepat waktu. Dari data yang dimiliki oleh Sub Bagian Olah raga, seni budaya, mental dan rohani, jumlah anggota yang berpartisipasi aktif dibidang olah raga, seni budaya, mental dan rohani sebanyak 515 (Lima Ratus Lima Belas) anggota Korpri. Target yang ditetapkan untuk indikator ini di tahun 2017 (setelah perubahan target kinerja) sebesar 500 orang. Sehingga capaian kinerja sebesar 103 %. Target kinerja untuk sasaran kedua ini diturunkan dari target semula yaitu sebesar 800 orang. Hal ini disebabkan karena alokasi dana tersedia pada anggaran perubahan yang notabene hanya dapat dilaksanakan selama 3 bulan.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Dana terbatas dan tersedia pada anggaran perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat maksimal	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait
Dana tersedia pada anggaran perubahan, sehingga kegiatan hanya dapat dilaksanakan selama 3 bulan, pembinaan atlit Korpri tidak dapat maksimal	Memanfaatkan sumber daya yang ada dan berkoordinasi dengan masing-masing koordinator cabang olah raga.
Pendanaan ada di Sekretariat Korpri namun pemain Korsik merupakan anggota Satpol PP, sehingga sering terkendala dalam hal penugasan baik ketika latihan maupun tampil pada upacara-upacara hari besar nasional.	Melakukan koordinasi dengan kepala Satpol PP dan Koordinator tim Korsik.
Kurangnya minat anggota Korpri untuk menjadi anggota Tim Fardu Kifayah	Melakukan sosialisasi kepada anggota Korpri



5. Fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

a) Program dan Kegiatan

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan menunjang pelaksanaan tugas DPRD, Fasilitasi pembentukan produk hukum serta Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program pokok, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat melalui kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Kegiatan Reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah, Pelantikan Anggota DPRD, Rapat-Rapat Fraksi, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD serta Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 program pokok dan 4 program penunjang serta 22 kegiatan. Alokasi dana untuk Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.9.245.668.126,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.373.557.392 atau 90,57% dan realisasi fisik sebesar 93,47%.

Realisasi indikator kinerja utama Fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35
Realisasi Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Persentase pencapaian prolegda	Persen	100	100
Persentase usulan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100

Secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara realisasi pada tahun 2016 dan tahun 2017. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Bontang konsisten. Contohnya untuk Indikator persentase pencapaian program legislasi daerah dari tahun 2016 dan 2017 tidak mengalami perubahan yang berarti dapat memenuhi target yang ditentukan. Begitu pula dengan presentase usulan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 100% memenuhi target yang telah ditentukan.

Pelaksanaan fungsi pendukung pelaksanaan tugas DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD secara tidak langsung telah mendorong produktivitas DPRD dalam menjalankan fungsinya. Hal ini tercermin dari jumlah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2017 yakni sebanyak 15 (lima belas) Peraturan Daerah, meningkat jumlahnya dari tahun 2016 yang menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) peraturan daerah.

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Pengadaan Mobil Jabatan batal dilaksanakan karena pertimbangan waktu pelaksanaan pengadaan yang tidak mencukupi	Dianggarkan kembali di tahun anggaran 2018
Rehabilitasi atap dan plafon Ruang Paripurna DPRD batal dilaksanakan karena perubahan perencanaan dan anggaran	Dianggarkan kembali di tahun anggaran 2018

6. Fungsi Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan



Dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat serta Kecamatan Bontang Selatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan Meningkatkan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program pokok sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan melalui kegiatan antara lain Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan, Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan dan Pembinaan Kelurahan.
2. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan antara lain Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan.
3. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat melalui kegiatan Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT di seluruh wilayah kelurahan.
4. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana Dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Utara melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 4 program pokok dan 6 program penunjang serta 255 kegiatan yang tersebar pada 3 (tiga) Kecamatan. Alokasi dana untuk pelaksanaan Fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.32.552.328.923,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.28.155.741.912,00 atau 90,55% dan realisasi fisik sebesar 99,88%.



Terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pada tahun 2017 berbagai penghargaan telah diraih Kota Bontang, antara lain sebagai berikut:

No.	Prestasi/Penghargaan	Keterangan
1	Juara I Camat Berprestasi Tk Kalimantan Timur	Camat Bontang Utara
2	Juara II Lomba Up2K Tk Provinsi Kaltim	Kelurahan Guntung
3	10 Besar Lomba pilar pilar berprestasi Tk Nasional	Kelurahan Bontang Kuala
4	Juara 2 Lomba Masak B2SA Tk Provinsi Kaltim	Kelurahan Gunung Elai
5	Juara Pakarti Madya 1 Tingkat Nasional	Kelurahan Bontang Baru
6	Desa Wisata Tingkat Nasional	Kelurahan Bontang Kuala
7	Juara Pertama Lomba PHBS Tingkat Propinsi Kalimantan Timur	diwakili Kel Berbas Tengah
8	Juara Ketiga Lomba Posyandu Tingkat Propinsi Kalimantan Timur	di wakili Posyandu Pasir Putih IX Bontang Lestari
9	Juara Pertama Lomba Administrasi PKK tingkat Kota Bontang	PKK Kecamatan Bontang Selatan
10	Juara Kedua Lomba LBSI kategori Balita tingkat Kota Bontang	Kelurahan Tanjung Laut
11	Juara Kedua Lomba LBSI kategori Bayi tingkat Kota Bontang	Kelurahan Berbas Tengah
12	Juara Harapan I Lomba Mobil Hias kegiatan Bontang City Carnival	Kecamatan Bontang Selatan
13	Juara I Lomba UKS Tingkat Kota	SD YPK 2
14	Juara I Lomba UKS Tingkat Propinsi	SD YPK 2
15	Juara II Lomba UKS Tingkat Nasional	SD YPK 2
16	Juara II Lomba Pidato Ketua PKK Tingkat Kota	PKK Kecamatan Bontang Barat
17	Juara II Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota	PKK Kecamatan Bontang Barat
18	Juara II Lomba UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Tingkat Nasional	Utusan Kelurahan Belimbing



19	Juara I Lomba UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Tingkat Propinsi	Utusan Kelurahan Belimbing
20	Juara I Lomba Balita Sehat Tingkat Kota	Diwakili Kelurahan Kanaan

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Ruang Pelayanan yang kurang representatif	Perbaiki Ruang Loket
Gudang penyimpanan arsip tidak ada	Pembangunan Gudang
Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang baru
Kurangnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek atau diklat bagi aparatur
Admin Kelurahan kurang memahami Aplikasi Prodeskel untuk penyusunan profil	Pembinaan dan pelatihan oleh bagian terkait
Belum ada aplikasi pengelolaan surat pertanahan di tingkat kecamatan	Pengadaan aplikasi pertanahan
Tidak ada biaya operasional pengukuran tanah di lapangan	Review Peraturan terkait pungutan biaya operasional Kelurahan dan Kecamatan mengenai Surat Pertanahan. (Kota dan Kabupaten yang lainnya masih memberlakukan pemungutan)
Tidak tersedia kendaraan, perlengkapan dan seragam kegiatan patroli	Pengadaan kendaraan, perlengkapan dan seragam patroli
Tidak adanya biaya operasional bagi lembaga kemasyarakatan seperti Forkohat Kecamatan dan Kelurahan	Mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Forkohat Kecamatan dan Kelurahan

7. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Bontang, Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Bontang, Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang terbuka responsif,



Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang serta Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang

a) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program pokok, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan melalui kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

b) Realisasi Program dan Kegiatan

Fungsi pengawasan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 2 program pokok dan 4 program penunjang serta 16 kegiatan. Alokasi dana untuk Fungsi pengawasan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.3.644.880.254,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.905.807.265,00 atau 82,84% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36
Realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	
		2016	2017
Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks	N/A	2
Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	75.46	86.27



Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	N/A	40
Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks	2,5 (CC)	2,5 (CC)
Indeks opini BPK atas LKPD	Indeks	4 (WTP)	4 (WTP)
Indeks RB Kota Bontang	Indeks	B (Skor 70,73)	B
Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	100
Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	Level	2.88	3.717
Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level	2	3

c) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
1. Pengelolaan sistem pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang belum sepenuhnya berbasis manajemen risiko	1.1. Menyusun <i>audit universe</i> Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kota Bontang
	1.2. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kegiatan
	1.3. Menyusun <i>teamate</i> berdasarkan <i>gap competency</i> dan jenis penugasan audit intern
	1.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas audit intern secara berkala
	1.5. Membuat aplikasi SIM Pengawasan terintegrasi



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara serasi, selaras dan seimbang maka pemerintah pusat telah menetapkan 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yakni:

- 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;
- 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
- 3) Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bontang melaksanakan Tugas Pembantuan yang berasal dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2017, maka dalam bab ini akan diuraikan mengenai realisasi pelaksanaan program-program pembangunan melalui anggaran masing-masing kementerian dimaksud baik yang secara teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Perangkat Daerah teknis maupun yang bersifat bantuan dan diterima langsung oleh kelompok sasaran.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait. Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 dapat diuraikan pada tabel berikut:



Tabel. 5.1.
Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017

Tahun	Kementrian	OPD Pelaksana	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuanga Fisik (%) n (%)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2017	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	6.000.000.000,-	5.908.210.500,-	98,47	98,74

Sumber : Laporan pelaksana Tugas Pembantuan 2017

Disamping Tugas Pembantuan, Kota Bontang pada tahun 2017 menerima bantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa program yang bersifat bantuan langsung. Pelaksanaan program ini dilaksanakan langsung oleh kementerian terkait dengan menyalurkan langsung pendanaan pembangunan kepada kelompok sasaran atau kelompok masyarakat penerima bantuan. Peran Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan program ini hanya sebatas membantu proses verifikasi data kelompok yang akan menjadi penerima bantuan program.

C. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung

Pelaksanaan tugas pembantuan dan bantuan langsung yang diterima Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2017, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang berdasarkan instansi pemberi tugas pembantuan sebagai berikut :

- 1) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017, dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
 - OPD Pelaksana; Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.
 - Program; Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
 - Kegiatan; Pengembangan sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.
- 2) Bantuan Langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017



Pelaksanaan program yang langsung dilaksanakan oleh kementerian terkait di Kota Bontang pada tahun 2017 disalurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun OPD yang melakukan verifikasi kepada kelompok sasaran adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
 - Jumlah unit rumah: 347 unit
 - Anggaran: Rp.4.485.000.000,00
2. Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana)
 - a) Rusunawa Lhoktuan
 - Type : 36
 - Anggaran : Rp.17.000.000.000,00
 - Jumlah Lantai : 5 (lima)
 - Jumlah Unit : 70 (tujuh puluh)
 - b) Rusunawa Guntung
 - Type : 24
 - Anggaran : Rp.18.000.000.000,00
 - Jumlah Lantai : 4 (empat)
 - Jumlah Unit : 90 (sembilan puluh)
- 3) Bantuan Langsung dari Kementerian Sosial Tahun 2017

Pelaksanaan program yang langsung dilaksanakan oleh kementerian terkait di Kota Bontang pada tahun 2017 disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun OPD yang melakukan verifikasi kepada kelompok sasaran adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Bantuan Sembako Perintis Kemerdekaan, sebanyak 12 jiwa
- Bantuan Sosial Terencana Perorangan sebanyak 35 jiwa
- Bantuan UEP ODHA sebanyak 15 jiwa
- KUBE Jasa Ewarong dan operasionalnya sebanyak 8 jiwa
- LKSA Anak sebanyak 50 anak



- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- Unit Layanan Sosial Keliling sebanyak 110 jiwa
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 6 orang
- Supervisor dan Pendamping KUBE Jasa Ewarong sebanyak 3 orang
- Operator dan Pendamping PKH sebanyak 9 orang
- Taruna Siaga Bencana sebanyak 25 orang

D. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Bantuan Langsung dari Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan dapat direalisasikan dengan baik dengan realisasi fisik dan keuangan rata-rata mencapai 98%. Data realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program terkait dapat mencapai target yang ditetapkan dengan lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

Adapun permasalahan utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintah pusat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang sebagai pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan (pembangunan pasar prototype di Lhoktuan), realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100%. Hal itu disebabkan karena :
 - ✓ Waktu pelaksanaan pekerjaan yang dirasa sangat singkat, dikarenakan keterlambatan dalam proses lelang.
 - ✓ Pembangunan pasar adalah prototype, artinya perencanaan disusun dari Pemerintah Pusat dengan bentuk dan model yang sama untuk beberapa daerah. Hal ini kurang sesuai dengan kondisi lapangan yang ada di Kota Bontang.
 - ✓ Belum tersedianya SDM teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan baik yang punya latar belakang pendidikan teknik bangunan maupun SDM terkait pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan.



- 2) Koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan program masih belum maksimal sehingga informasi tentang penyelenggaraan program terkait masih sangat terbatas pada OPD teknis pelaksana.
- 3) Penyampaian laporan progres pelaksanaan program belum secara rutin disampaikan kepada Wali Kota Bontang melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan.
- 4) Upaya untuk meningkatkan alokasi program pembangunan melalui sumber-sumber pembiayaan APBN masih perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi beban fiskal daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud telah diupayakan meningkatkan koordinasi dengan masing-masing perangkat daerah terkait melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada setiap triwulan tahun berjalan. Rapat koordinasi ini utamanya dimaksudkan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik yang didanai APBD Kota, APBD provinsi, dan APBN (DAK, Dekon-TP) dan program-program lainnya yang dilaksanakan di Kota Bontang.



BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam rangka menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pelaksanaan kerjasama daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang dioptimalkan dalam upaya mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

Kerjasama daerah dinilai memiliki beberapa peran yang strategis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mensejahterakan masyarakat.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah ini, Pemerintah Kota Bontang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah lainnya melalui berbagai program pembangunan. Kerjasama antar daerah ini diyakini dapat menjadi salah satu media solusi untuk menyelesaikan masalah lintas daerah, pelayanan lintas daerah, mencegah konflik antar daerah dan menjadi wadah



untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Daerah lainnya pada tahun 2017 adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 20 Agustus 2015, Nomor 188.6/35/HUK dan Nomor 134.4/623/OTDA. Adapun kerjasama melalui bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, perikanan, kelautan dan pertanian, sumber daya pengairan dan konservasi, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, penataan ruang dan sosial-budaya.

Selain itu telah dilaksanakan juga penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kutai Kartanegara pada tanggal 17 April 2015, yang meliputi kesepakatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kelautan, perumahan, perhubungan, sumber daya pengairan, konservasi dan pemanfaatan ruang.

Di bidang Jaringan Lintas Perkotaan juga telah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat melalui perjanjian kerjasama nomor : 188.6/52/Huk dan nomor : 119/351-Bag.KS tanggal 2 September 2016.

Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan perpanjangan MOU kerjasama fasilitas pelayanan jasa kepelabuhanan dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV pada bulan Desember 2016. Terdapat 9 (sembilan) point penting dalam perjanjian kerjasama tersebut, antara lain; (1) Pelayanan jasa tambat; (2) Pelayanan jasa dermaga; (3) Pelayanan jasa penumpukan; (4) Pelayanan jasa bongkar muat; (5) Pelayanan jasa pas pelabuhan; (6) Pelayanan jasa PBM; (7) Pelayanan jasa air; (8) Pelayanan jasa listrik; (9) Pelayanan jasa lainnya. Dengan adanya 9 (sembilan) item kesepakatan ini, diharapkan akan mempermudah proses kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan Lhoktuan Kota Bontang, serta memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan. Kepuasan pengguna jasa pelabuhan, fasilitas yang memadai dan proses yang



berorientasi pelanggan merupakan faktor penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). MoU ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan ditinjau ulang setiap tahunnya disesuaikan dengan kondisi eksternal dan internal kepelabuhanan.

3. Permasalahan dan Solusi.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur, belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan pembahasan lebih detail dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu telah dilakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar kerjasama daerah tersebut dapat segera direalisasikan.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Bontang sebagai pengemban pengelolaan pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa sangat diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen stakeholders lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak terbentuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama. Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, Pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan kerjasama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan permasalahan pembangunan daerah. Kerjasama ini melibatkan Perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta serta pihak perbankan yang tergabung dalam Forum CSR Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011 dan SK Walikota Nomor 339 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus



Forum Corporate Socail Responsibility (FCSR) Kota Bontang. Badan Usaha Milik Negara maupun swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a) Direktur PT. Pupuk Kaltim
- b) Direktur PT. Badak NGL
- c) Direktur PT. Indominco Mandiri
- d) Direktur G.A PT Kaltim Methanol Industri
- e) Direktur PT. Kaltim Parna Industri
- f) Direktur PT. Black Bear Resource
- g) Direktur PT. Kaltim Nitrate Indonesia
- h) Direktur PT. Kaltim Industrial Estate
- i) Direktur PT. Kaltim Daya Mandiri
- j) Direktur PT. Kaltim Nusa Etika
- k) Direktur PT. Trust
- l) Direktur PT. Pama Persada Nusantara
- m) Direktur PT. Chevron
- n) Direktur PT. Pertamina Gas
- o) Direktur PT. United Tractor
- p) Direktur PT IKPT
- q) Kepala Telkom Bontang
- r) Kepala PLN Bontang
- s) Bank Indonesia
- t) Kepala Cabang Bank Kaltimtara Bontang
- u) Kepala Cabang Bank Mandiri Bontang
- v) Kepala Cabang Bank Negara Indonesia (BNI 46) Bontang
- w) Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bontang
- x) Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Bontang
- y) Kepala Cabang Bank Danamon Bontang
- z) Kepala Cabang Bank Muamalat Bontang
- aa) Kepala Cabang Bank Mega Bontang
- bb) Kepala Cabang Bank Dhanarta Bontang
- cc) Kepala Cabang Maybank Bontang



dd) Kepala Cabang Bank Central Asia (BCA) Bontang

Bentuk kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan peran pihak perusahaan melalui program-program Corporate Social Responsibility Funds (dukungan alokasi dana CSR) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kebijakan ini diharapkan program-program CSR dapat bersinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan dan tepat sasaran. Sinergi program ini dapat terjadi dengan adanya koordinasi, penyusunan perencanaan bersama dan pelaksanaan program-program CSR dimasing-masing perusahaan.

Disamping itu pada tahun 2017 telah disepakati adanya CSR Kolaborasi, yaitu salah satu bentuk CSR perusahaan yang bentuknya telah disepakati bersama dan dikerjakan secara bersama-sama. Untuk tahun 2017 CSR Kolaborasi telah disepakati berupa penghijauan taman dalam rangka mendukung program "Green City" dengan membuat pot bunga lengkap dengan tanaman bunganya yang ditempatkan pada median-median jalan.

Adapun Kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain terdiri dari program:

- a) Program Pengembangan Ecotourism;
- b) Program Budidaya Ikan;
- c) Program Pengembangan UMKM Pesisir;
- d) Program Peningkata Kapasitas (Capacity Building);
- e) Program Pemberdayaan;
- f) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- g) Program Kesehatan;
- h) Program Pendidikan;
- i) Program Sosial dan Keagamaan;
- j) Program Charity (Amal);
- k) Program Infrastruktur dan Lingkungan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan di Kota Bontang untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan diimplementasikan melalui sinergi program CSR perusahaan. Pelaksanaan kegiatan program CSR perusahaan



pada tahun 2017 bidang ekonomi, sosial dan Lingkungan antara lain dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Badak NGL

No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi
COMMUNITY EMPOWERMENT				
1	PENGEMBANGAN MITRA BINAAN BADAK LNG			
	Bontang Kuala Ecotourism (MASKAPEI)	- Wisata Mangrove dan Sungai Belanda - Wisata homestay ulin - Wisata homestay tengah laut + mancing - Wisata Karang Segajah + Snorkeling	MASKAPEI	Kelurahan Bontang Kuala
	a. Perbaikan Infrastruktur		MASKAPEI	
	Sarana dan Parasarana Homestay BK		MASKAPEI	
	- Perbaikan homestay diatas ulin Bontang Kuala		MASKAPEI	
	- Perbaikan homestay keramba		MASKAPEI	
	- Pembangunan ruang ganti dan kamar mandi keramba		MASKAPEI	
	b. Pengembangan Usaha		MASKAPEI	
	- Kerjasama dengan media massa dan dinas pariwisata untuk promosi		MASKAPEI	
	- Kerjasama dengan Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) untuk menjadikan Maskapei sebagai salah satu tour and travel di Kalimantan Timur		MASKAPEI	
	c. Koordinasi Perencanaan Program		MASKAPEI	
	- Koordinasi pembangunan homestay		MASKAPEI	
	- sosialisasi dengan masyarakat setempat untuk Homestay		MASKAPEI	
	- Koordinasi integrasi Program dengan Mitra Binaan lain		MASKAPEI	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA KERAPU			
	a. Kelompok Kerapu Macan Pengembangan Restoran Terapung "Floating Resto Kerapu Macan"	- Budidaya kerapu & ikan lain - wisata edukasi keramba - Bagan pakan	KERAPU MACAN	Kelurahan Berbas Pantai
	Sarana dan Prasarana		KERAPU MACAN	



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi
	- Pembangunan keramba/perluasan keramba untuk restoran Pengembangan Usaha		KERAPU MACAN	
	- Promosi lokasi restoran skala lokal		KERAPU MACAN	
	- Penjualan produk mitra binaan Badak LNG lainnya		KERAPU MACAN	
	- Kerjasama dengan nelayan lain untuk sewa perahu menuju restoran		KERAPU MACAN	
	b. Kelompok Nelayan Bersama - Perluasan Keramba - pendampingan kelompok dalam penjualan kerapu - Pendampingan sosialisasi pinjaman modal Pertamina	Budidaya Ikan Kerapu	NELAYAN BERSAMA	Kelurahan Berbas Tengah
	Pelatihan diversifikasi olahan kerapu	Budidaya Ikan Kerapu	KERAPU MACAN & NELAYAN BERSAMA	Kelurahan Berbas Tengah, Berbas Pantai, dan Tanjung Laut Indah
3	PROGRAM PEMBIBITAN ULIN			
	Kelompok Green House Pesona Alam - Sertifikasi kelompok sebagai syarat pengerjaan proyek pertamanan di tempat lain	Pembibitan ulin	GREEN HOUSE PESONA ALAM	Kelurahan Berbas Pantai dan Bontang Lestari
4	KONSERVASI & DIVERSIFIKASI MANGROVE			
	Konservasi Mangrove			
	a. Kelompok Tani Bakau Jaya - Pembangunan tambak usaha budidaya kepiting bakau, - Pendampingan	Pembibitan mangrove	Bakau Jaya	Kelurahan Berbas Tengah
	b. Kelompok Tani Beras Basah 1. Pembangunan tambak usaha budidaya kepiting bakau,	Pembibitan mangrove	Beras Basah	Kelurahan Berbas Tengah
	c. Kelompok Tani Lestari Indah - Pembangunan tambak kepiting bakau - pembangunan gazebo wisata mangrove	Pembibitan Mangrove, Ekowisata Mangrove	Tani Lestari Indah	Kelurahan Tanjung Laut Indah
	d. Kelompok Tani Alam Permai - Pengembangan ke usaha budidaya Kepiting Bakau	Pembibitan mangrove	Tani Alam Permai	Kelurahan Tanjung Laut Indah



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi
	Diversifikasi Mangrove			
	Program Diversifikasi Produk Mangrove			
	Kelompok Daun Harum		DAUN HARUM	Tanjung Laut Indah
	a. Pendampingan pemasaran (Tojasera, katalog, bubuhankita.com dll)	diversifikasi olahan mangrove menjad sirup khas mangrove		
	b. Pengadaan kemasan botol sirup			
	Kelompok Karya Wanita		KARYA WANITA	Bontang Baru
	a. Pendampingan pemasaran (Tojasera, katalog, bubuhankita.com dll)	diversifikasi olahan mangrove menjad sirup dan minuman ready to drink khas mangrove		
	b. Pengadaan kemasan botol sirup			
	Kelompok Wanita Pesisir		WANITA PESISIR	Tanjung Laut Indah
	a. Pengadaan kemasan botol sirup	diversifikasi olahan mangrove menjad sirup khas mangrove		
	b. Pendampingan pemasaran (Tojasera, katalog, bubuhankita.com dll)			
	Kelompok Wanita Mandiri		WANITA MANDIRI	Bontang Baru
	a. Pengadaan kemasan botol sirup	diversifikasi olahan mangrove menjadi keripik, coklat, dodol dan amplang mangrove		
	b. Pendampingan pemasaran (Tojasera, katalog, bubuhankita.com dll)			
	Kelompok Thalita Mangrove		THALITA MANGROVE	Tanjung Laut Indah
	a. Pelatihan manajemen keuangan	diversifikasi olahan mangrove menjadi keripik, coklat, dodol dan amplang mangrove		
	b. Pendampingan pemasaran (Tojasera, katalog, bubuhankita.com dll)			
	Kelompok Mangrove Indah		MANGROVE INDAH	Tanjung Laut Indah
	a. Pelatihan manajemen keuangan	diversifikasi olahan mangrove menjadi keripik, coklat, dodol dan amplang mangrove		
	b. Pendampingan pemasaran (Tojasera, katalog, bubuhankita.com dll)			
5	Kelompok Golden Crusty Crabs			
	a. Pendampingan pemasaran b. pendampingan usaha kelompok, diversifikasi produk	biskuit dan kue yang tinggi kalsium	Kelompok Golden Crusty Crabs	Kelurahan Tanjung Laut Indah
6	Koperasi Cipta Busana (KOCIBU)			



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi
	Pengelolaan produk mitra binaan - Bandara Badak LNG - Knowledge house	Tata Busana	Koperasi Cipta Busana (KOCIBU)	Kelurahan Gunung Telihan
	Kerjasama lanjutan tender pengadaan seragam karyawan dan Mahasiswa cooperative program Badak LNG			
7	Mangrove Eco-Mode Kelompok Pondok Batik Etam	Tata Busana	Batik Etam	Kelurahan Gunung Telihan
	Kerjasama pengadaan souvenir perusahaan			
8	Pengelolaan Sampah Kelompok Bontang Lestari Peduli	pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Bontang Lestari Peduli	Kelurahan Bontang Lestari
	Pendampingan program dan kunjunga study banding UMKM - Mensinergikan KSM daur ulang sampah ke Bontang Lestari			
9	Budidaya Kepiting Bakau Kelompok Tani Lestari Indah, Tani Alam Permai, Bakau Jaya, Pantai Harapan	Budidaya kepiting Bakau	Tani Lestari Indah, Alam Permai, Bakau Jaya, Pantai Harapan	Kelurahan Bontang Kuala, Berbas Tengah, dan Tanjung Laut Indah
	Pendampingan kelompok			
	Pemberian bibit kepiting bakau			
	Pelatihan Kepiting Bakau			
	Diversifikasi produk olahan kepiting			
10	Ikatan Teknisi Otomotif Bontang (ITOB)	Bengkel Otomotif	ITOB	Kelurahan Bontang Baru
	- Pendampingan menjadi LPK Otomotif di Kota Bontang - pendampingan modal usaha program kemitraan Pertamina			
11	Satimpo Berhias	Pengolahan sampah	Satimpo Berhias	Kelurahan Satimpo
	- Pembangunan tempat pengelolaan kompos dan sampah kelurahan Satimpo			
12	Pendampingan Masyarakat TEKASALO	Minyak Goreng Kelapa dan VCO	Kelompok Karya Bersama	Kelurahan Bontang Lestari
	a. Kelompok Karya Bersama			
	Pendampingan modal usaha dengan Pertamina			
	b. Kelompok Kembang Lusai	Terasi Udang Papai dan olahan rumput laut	Kelompok Kembang	Kelurahan Bontang



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi
			Lusai	Lestari
	Pendampingan modal usaha dengan Pertamina			
13	Ikatan Welder Bontang	Pengelasan	Ikatan Welder Bontang	Kelurahan Tanjung Laut
	Sertifikasi Welder			
14	Pengembangan UMKM Bontang a. Kelompok Mawar lestari b. Kelompok Saputra Snack c. Kelompok KUBE Mekar Mandiri d. Kelompok Tunas Jaya	- pendampingan modal usaha kerjasama dengan Pertamina - Mitra binaan memiliki outlet usaha sendiri (Mawar Lestari dan Saputra Snack)	a. Kelompok Mawar lestari b. Kelompok Saputra Snack c. Kelompok KUBE Mekar Mandiri d. Kelompok Tunas Jaya	Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Api-api, Kelurahan Tanjung Laut
15	Budidaya Lele Kelompok Barisan Gotong Royong	- Pendampingan pengajuan modal usaha untuk pengembangan pelatihan lele	Bargon	Kelurahan Api-api
	- Pendampingan LPK "Lele Centre" - Pendampingan pengajuan modal usaha dengan Pertamina			
16	Budidaya Jamur Ling Zhi Kelompok Telihan Indah	- Pendampingan menjadi LPK untuk pelatihan budidaya jamur sebagai upaya replikasi kelompok	Telihan Indah	Kelurahan Gunung Telihan
	Pendampingan LPK "Jamur Centre"			
PROGRAM BARU 2017				
17	PROGRAM KAMPUNG ASIMILASI LAPAS KELAS III BONTANG	- Ternak ayam organik - Pertanian terpadu - Pemanfaatan limbah drum bekas untuk furnitur	WARGA BINAAN LAPAS	Kelurahan Bontang Lestari
	a. Perbaikan Infrastruktur			
	Sarana dan Prasarana			
	- Pembelian bibit tanaman hidroponik (sawi)			
	- Pembelian bibit tanaman hortikultura (buah naga)			
	- Pembelian bibit ikan lele			
	b. Pelatihan/Penguatan Kapasitas			



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi
	- Pendampingan		WARGA BINAAN LAPAS	
	- Pelatihan kewirausahaan (pengelasan dan handycraft)			
	- Pembentukan kelompok atau koperasi			
	c. Pengembangan Usaha	- Ternak ayam organik - Pertanian terpadu - Pemanfaatan limbah drum bekas untuk furnitur	WARGA BINAAN LAPAS	
	- Promosi pemasaran hasil peternakan ayam			
	- Promosi pemasaran hasil pemanfaatan limbah drum bekas menjadi furniture			
18	IPROC (Ikatan Pekerja Rigger) pelatihan dan sertifikasi rigger	sertifikasi rigger untuk peningkatan soft skill	IPROC	Bontang
19	Pusat Informasi Konseling Remaja		FORBIS dan Puskesmas Bontang Selatan	Kelurahan Berbas Pantai
20	Posyandu Berbas Pantai	Pengembangan program sosialisasi penanganan DBD	Poskel, Konseling Remaja, Posyandu Lansia	Kelurahan Berbas Pantai
	Posyandu Sejahtera II Kelurahan Kanaan - Pembangunan Posyandu - Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Pembangunan posyandu untuk mendukung kesehatan bagi Ibu dan anak di wilayah Kanaan	Poskel, Konseling Remaja, Posyandu Lansia	Kelurahan Kanaan
21	KSM Pengolahan Sampah - Pengelolaan program inovatif penanggulangan sampah organik dan anorganik - Pelatihan daur ulang sampah - koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait	Pengolahan sampah		Kelurahan Berbas Pantai Kelurahan Satimpo Kelurahan Kanaan
22	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Anggrek (Replikasi KOCIBU) - Pengadaan alat jahit tambahan - Pertemuan rutin - Pendampingan penyusunan laporan keuangan	Bidang tata busana	KUBE Anggrek	Kelurahan Kanaan



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi
	Knowledge House - pengadaan Icon MHE sebagai landmark Kota Bontang - Kerjasama komunitas untuk mengadakan event di Knowledge House	Pusat informasi Badak LNG dan mitra binaan Badak LNG	Kelompok Mitra Binaan Badak LNG	Kota Bontang
CAPACITY BUILDING				
23	Program BAFCO (Badak Full Scholarship) Tingkat SMP kepada lulusan SD di Kota Bontang	Capacity Building		Kota Bontang
24	Program BAFCO (Badak Full Scholarship) Tingkat SMA kepada lulusan SMP di Kota Bontang	Capacity Building		Kota Bontang
25	Program BAFCO (Badak Full Scholarship) Tingkat Perguruan Tinggi kepada lulusan SMA di Kota Bontang	Capacity Building		Kota Bontang
25	Program Magang Lab Angkatan kepada alumni SMA/SMK di Kota Bontang angkatan 11	Capacity Building		Kota Bontang
26	Program Magang Lab Angkatan kepada alumni SMA/SMK di Kota Bontang angkatan 12	Capacity Building		Kota Bontang
27	Program Cooperative Education (COOP) kepada mahasiswa Kaltim angkatan 27	Capacity Building		Kota Bontang dan Prov Kaltim
26	Program Cooperative Education (COOP) kepada mahasiswa Kaltim angkatan 28	Capacity Building		Kota Bontang dan Prov Kaltim
27	Program Cooperative Education (COOP) kepada mahasiswa Kaltim angkatan 29	Capacity Building		Kota Bontang
28	Program Pendidikan LNG Akademi (Full Scholarship)	Capacity Building		Nasional
27	Program Kerja Praktek Lapangan Mahasiswa	Capacity Building		Nasional
28	Program Kerja Praktek Lapangan Siswa SMK	Capacity Building		Bontang
29	Program Magang Laboratorium	Capacity Building		Bontang
INFRASTRUKTUR				
30	Pembangunan Posyandu di Kelurahan Kanaan	Infrastruktur		Kanaan
31	Pemindahan Tempat Air Bersih untuk Warga dari Kantor Pos ke Belakang Lapangan Voli	Infrastruktur		Bontang



No	Program/Kegiatan	Jenis Usaha	Kelompok Sasaran	Lokasi
	Kampung Baru			
32	Bantuan kepada Polsek Bontang Selatan berupa pengecoran halaman depan Kantor dan pemasangan grating pada parit di halaman depan dan samping kantor Polsek Bontang Selatan	Infrastruktur		Bontang
CHARITY				
33	Program BAPEKIA (Badak Peduli Kesehatan Ibu dan Anak) bekerjasama dengan FORBIS Bontang di Kelurahan Berbas Pantai	Charity		Bontang
34	Program Mitra Taman Nasional Kutai	Charity		Bontang
35	Dukungan kegiatan keagamaan di Kota Bontang	Charity		Bontang
36	Dukungan untuk kegiatan olahraga	Charity		Bontang
37	Dukungan untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan	Charity		Bontang
38	Dukungan untuk kegiatan kepemudaan	Charity		Bontang
39	Dukungan Akomodasi kepada Pemerintahan dan TNI/Polri	Charity		Bontang
40	Dukungan kepada etnis lokal Kaltim	Charity		Bontang
41	Dukungan Transportasi Udara (ATR) kepada Pemerintahan dan TNI/Polri	Charity		Bontang
42	Dukungan Kegiatan Menyambut Tahun Baru 2017 oleh Pemerintah Kota Bontang	Charity		Bontang
43	Support Green City melalui pemberian pot di media jalan	Charity		Bontang
44	Program bantuan Paket Lebaran Tahun 2017 sebanyak 500 paket kepada Pasukan Kuning Kota Bontang dan Mitra Binaan Badak LNG	Charity		Bontang
45	Bantuan motor sampah kepada 4 kelurahan (Satimpo, Tanjung Laut, Berbas Pantai, Berbas Tengah)	Charity		Bontang



Tabel 6.2.

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Indominco Mandiri

No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	BIBIT RUMPUT LAUT CATTONEE (PERALATAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT KELOMPOK NELAYAN)	Meningkatkan usaha budi daya rumput laut di wilayah pesisir Bontang lestari	7 kelompok.	Lok tunggul, tihi-tihi, dan Bontang lestari	CCC tahun 2017	44.448.000,00
2	Sarana dan parasana alat budidaya reumput laut					92.168.370,00
3	PERBAIKAN GEDUNG BPU KEPULAUAN TIHI TIHI BONTANG LESTARI, PLAN JULI 2017	membantu kativitas pertemuan dan kegiatan umum masyarakat tihi tihi	Tihi Tihi	Tihi tihi	CCC tahun 2017	143.636.364,00
4	PENGECORAN JALAN BETON SEGENDIS BONTANG LESTARI PLAN 33 (PROGRAM INFRASTRUKTUR)	peningkatan sarana jalan umum	Segendis	Segendis	CCC tahun 2017	254.545.454,55
5	PELEBARAN JALAN DAN PEMBUATAN TURAP DI BALTIM BONTANG LESTARI PLAN 34 (PROGRAM INFRASTRUKTUR)	peningkatan sarana jalan umum	baltim	Baltim/Bontang lestari	CCC tahun 2017	254.545.454,55
6	Pembuatan Perpustakaan Berbas Tengah	meningkatkan minat baca masyarakat	Berbas pantai	Berbas pantai	Proposal	250.000.000
7	Normalisasi sungai RT 8	rehab dan normaslisasi sungai untuk pengairan sawah	Kelompok tani	RT 8 Nyerakat	Proposal	150.000.000
8	POT BUNGA + ANEKA KEMBANG	realisasi program bersama forum MSH CSR untuk go green kota	Kota Bontang	Pintu gerbang kota Bontang	MSH CSR	50.000.000



No	Kegiatan	Output Kegiatan	Sasaran	Lokasi Kegiatan	Sumber usulan	Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		bontang				
9	DISTRIBUSI PAVING BLOCK AREA KOTA	support kegiatan secara umum berdasarkan pengajuan proposal di wilayah Kota bontang (ring 1 dan ring 2)	Kelompok, lembaga sosial, lembaga pendidikan dll.	Bontang Area	Proposal donasi	1.125.000.000
10	Proposal donation				alokasi budget csr 2017	327.692.682,00
TOTAL						1.117.036.325,10

**Tabel 6.3.**

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Pupuk Kaltim

No.	Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyaluran Modal Kerja / Usaha		9.328.000.000,-
	a. Sektor Industri	Bontang	495.000.000,-
	b. Sektor Perikanan	Bontang	215.000.000,-
	c. Sektor Pertanian	Bontang	665.000.000,-
	d. Sektor Jasa	Bontang	875.000.000,-
	e. Sektor Perdagangan	Bontang	5.318.000.000,-
	f. Sektor Peternakan	Bontang	120.000.000,-
	g. Sektor Perkebunan	Bontang	1.640.000.000,-
2.	Hibah		649.032.119,-
	a. Teknik Produksi	Bontang	125.091.400,-
	b. Manajerial	Bontang	75.947.800,-
	c. Pemasaran	Bontang	447.992.919,-
3.	Program Bina Lingkungan		3.035.949.596,-
	a. Bencana Alam	Bontang	8.435.000,-
	b. Pendidikan Masyarakat	Bontang	391.516.304,-
	c. Kesehatan Masyarakat	Bontang	669.158.966,-
	d. Sarana Prasarana Umum	Bontang	215.980.580,-
	e. Bantuan Sarana Ibadah	Bontang	222.060.000,-
	f. Pelestarian Alam	Bontang	226.024.500,-
	g. Bantuan Sosial Kemasyarakatan	Bontang	1.302.774.246,-
4.	Program Bina Wilayah		6.298.881.840,-
	a. Charity	Bontang	843.083.295,-
	b. Infrastruktur	Bontang	740.997.085,-
	c. Capacity Building	Bontang	636.178.899,-
	d. Empowerment	Bontang	4.078.622.561,-
	Jumlah		19.311.863.555,-



Tabel 6.4.

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. Kaltim Daya Mandiri

No.	Program / Kegiatan	Sub. Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Anggaran (Rp.)
1.	Prolansia Sehat	Pemberian Bantuan Alat-alat Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lansia	Guntung	2.800.000,-
2.	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD dan TK	a. Pelatihan Guru PAUD dan TK	Meningkatkan Kompetensi Guru PAUD Dalam memberikan pendidikan kepada Anak Usia Dini	Lhoktuan dan Guntung	63.750.000,-
		b. Bantuan Biaya SPP Kuliah Guru PAUD			
3.	Konservasi Buah Khas Borneo	a. Seminar Hari Konservasi Nasional	Melestarikan Tanaman Khas Borneo	Bontang Kuala	56.000.000,-
		b. Penanaman Pohon Buah Khas Borneo di Taman Adi Pura			
4.	Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove	Penanaman 1000 pohon mangrove	Terlakasananya pola pengelolaan ekosistem mangrove	Guntung	30.700.000,-
5.	Pengembangan Destinasi Wisata	Melengkapi sarana dan prasarana wisata	Pulau Gusung menjadi tujuan wisata	Pulau Gusung	31.000.000,-
Jumlah					214.950.000,-

Tabel.6.5

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. PLN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KELOMPOK SASARAN	JUMLAH SASARAN	LOKASI
1	PLN Peduli Alam dan Lingkungan	Rp. 225.000.000	Bantuan Pembuatan Pot Bunga dan Bantuan Pelestarian Alam Taman Nasional Kutai	2 (dua) Lokasi	1 Jl. MT Haryono Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara
					2 Mangrove Park Salebba (TNK) Kelurahan Bontang Baru, Bontang Utara



Tabel 6.6

Pelaksanaan kegiatan program CSR dari PT. KNI

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penerima Manfaat	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Program 1000 (seribu) Tas Daur Ulang - Go Green KNI	34.100.000	1000	Jalan Tari Enggang RT 06 Kelurahan Guntung
2	KUMM Pemuda - Bantuan Program Pembuatan Sablon Kaos Karang Taruna	26.675.000	10	Jalan Tari Enggang RT 06 Kelurahan Guntung
3	Pembuatan Workshop (Rumah Produksi) Tas Daur Ulang	41.500.000	5	Jalan Tari Gantar RT 09 Kelurahan Guntung Kel. Guntung
4	Pengembangan Bawang Dayak	23.800.000	10	Jalan Tari Jepen RT 02 Kelurahan Guntung
5	Pembuatan Taman Posyandu Bontang Kuala	450.000.000	100	Jalan Kapten Pierre Tendeau Batu Sahasa RT 01 Bontang Kuala
6	STEM Challenges For Science Teachers	36.025.000	100	Jln. Tari Ganjar Ganjur RT 06 Guntung Kel. Guntung
7	Penyuluhan Narkoba	13.500.000	72	SMP Negeri 9 Bontang Jalan Tari Jepen RT 10 Kel. Guntung
8	Sosialisasi Kebakaran Rumah Tangga dan Cara Mengatasinya	10.675.000	198	Jln. Kapal Pini 3 RT 17 - 18 Kel. Loktuan Kel. Lok Tuan
9	Training Motivasi Remaja	13.400.000	56	Gedung Serbaguna Jalan Tari Enggang RT 06 Kel. Guntung
10	Pelatihan Dasar Komputer Bagi Siswa SLTP	20.400.000	100	Jalan Paku Aji Kav.79 Kel. Guntung
11	Kunjungan Mass Media - Liputan Program CD PT KNI	18.450.000	40	SMP Negeri 1 -Jalan Piere Tendeau No. 309 Kel. Bontang Kuala
12	Smart Training Motivasi Untuk Siswa SMP Negeri 9	43.450.000	35	SMP Negeri 9 Jalan Tari Enggang RT 06 Kel. Guntung
13	Paket Sembako Ramadhan 1438 H	57.250.000	200	Jln. Piere Tendeau RT 01 Kel. Bontang Kuala
14	Paket Lebaran Masyarakat Kel. Loktuan	18.262.000	200	Kelurahan Loktuan
15	Paket Lebaran Masyarakat Guntung	34.660.000	80	Kelurahan Guntung
16	PT.KNI-Pelatihan Guru Paud Implementasi k-13 Paud	60.700.000	50	Kelurahan Guntung (PM menyebar)



No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penerima Manfaat	Lokasi
1	2	3	4	5
17	Khitanan Massal CSR PT KNI	54.250.000	65	RS. Pupuk Kaltim
18	Penghijauan Penanaman Pohon Magrove	20.530.000	60	Bontang Mangrove Park (Saleba)
19	Program Detektif Cekatan 3 Pang Laut Kota Bontang	63.110.000	65	Auditorium Kantor Walikota (gedung 3D)
20	Program Pekan Guru Sains Tingkat SMP/MTs Se Kota Bontang	54.550.000	70	Aula SMA YPK
21	Training Course on STELR STEM Education for Asia Pacific Region 2017	10.500.000	6	Bandung - Jawa Barat
22	Program Penyerahan Stelr Kit 2017		6	SMP YPK
	JUMLAH	1.124.287.000		

3. Permasalahan dan Solusi

Kebijakan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang dengan perusahaan dan perbankan baik BUMN maupun swasta melalui forum CSR Kota Bontang dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan antara lain:

- a) Masih ditemukan beberapa kegiatan perusahaan dalam program penanggulangan kemiskinan belum mengarah pada data rumah tangga miskin (RTM) Kota Bontang, untuk itu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bontang (Bapelitbang) telah menyiapkan data rumah tangga miskin (RTM) Kota Bontang sebagai data sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan yang nantinya digunakan dalam program dan kegiatan CSR.
- b) Masih adanya program dan kegiatan CSR perusahaan yang bersifat karikatif (bersifat pemberian langsung yang habis pakai). Untuk itu Program dan kegiatan CSR diharapkan lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat serta dilakukan pendampingan dan pemberdayaan sehingga terwujudnya kemandirian ekonomi
- c) Khusus CSR perbankan masih ditentukan oleh keputusan manajemen pusat sehingga dari sisi waktu dan realisasi pelaksanaan lebih lama, untuk itu



diharapkan ada kebijakan dalam dunia perbankan untuk menentukan program dan kegiatan CSR agar dapat disusun sendiri di level daerah secara langsung.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah keterpaduan gerak yang dilaksanakan baik oleh segenap unsur daerah, maupun dengan Instansi Vertikal yang ada di daerah.

Keberadaan instansi vertikal di dalam proses pembangunan di daerah juga memiliki peran yang cukup besar dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat serta sasaran yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sejalan hal tersebut, pada tahun 2017 sebagai upaya optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, telah dilakukan koordinasi dan kerjasama oleh Pemerintah Kota Bontang dengan instansi vertikal yang ada di Kota Bontang yaitu :

- a. Kodim 0908 Kota Bontang
- b. Den Arhanud Rudal
- c. Polres Kota Bontang
- d. Kantor Kementerian Agama Kota Bontang
- e. Kantor Pengadilan Agama Kota Bontang
- f. Kejaksaan Negeri Kota Bontang
- g. Pengadilan Negeri Kota Bontang
- h. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang
- i. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Kota Bontang
- j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang
- k. Balai Taman Nasional Kutai
- l. Badan Pusat Statistik Kota Bontang



m. Pos TNI Angkatan Laut

2. Bantuan Terhadap Instansi Vertikal

Pemerintah Kota Bontang juga memberikan bantuan terhadap instansi vertikal. Adapun bantuan–bantuan yang diberikan kepada Instansi Vertikal pada tahun 2017 adalah antara lain:

- a. Pinjam pakai kendaraan dinas pejabat dan kendaraan operasional untuk beberapa instansi vertikal.
- b. Revitalisasi Bangunan Kantor POLRES Kota Bontang dengan anggaran sebesar Rp.1.308.732.100,00.
- c. Pembangunan barak bujang Kejaksaan Negeri Bontang dengan anggaran sebesar Rp.532.626.400,00.
- d. Rehabilitasi Pagar Kejaksaan Negeri Bontang dengan anggaran sebesar Rp.178.203.000,00.
- e. Rehabilitasi Sarana Pendukung Pelayanan Gedung Kejaksaan Negeri Bontang, dengan anggaran sebesar Rp.149.211.000,00

3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai perwujudan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Kota Bontang dengan Instansi Vertikal, pada tahun 2017 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui OPD/Unit Kerja Terkait Pemerintah Kota Bontang yang meliputi:

- a. Kerjasama dalam hal SABER PUNGLI dan TP4D dalam rangka menekan dan membersihkan segala bentuk pungutan liar dan segala bentuk korupsi.
- b. Kerjasama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan peringatan seperti Peringatan Hari Kemerdekaan, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota, Peringatan hari Keluarga Nasional, Hari Anti Narkoba Internasional, Penyelenggaraan MTQ, dan lain-lain.
- c. Kerjasama penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri sebagai pengacara pemerintah untuk kasus gugatan tanah,
- d. Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum dan Sosial di Kawasan Hutan Lindung Kota Bontang dalam Tim Terpadu yang melibatkan Polresta Kota



Bontang, Kodim 0908 Kota Bontang, Kejaksaan Negeri Kota Bontang, Den Arhanud Rudal dan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

- e. Kerjasama pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (MTsN dan MAN) dan Pembinaan Keluarga Sakinah dengan Kantor Kementrian Agama Kota Bontang,
- f. Peningkatan ketertiban umum dengan Kepolisian Resort Kota Bontang,
- g. Kerjasama penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah dengan Badan Pusat Statistik.

4. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah selama tahun 2017 berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan dan kendala yang berarti. Mengingat besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan batas wilayah di Kota Bontang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, dan dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas. Demikian pula berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 disebutkan penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Sejalan hal tersebut pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang melakukan penataan batas wilayah baik batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur, maupun batas wilayah kelurahan di Kota Bontang.



2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahun 2017 pelaksanaan pembinaan batas wilayah di Kota Bontang yaitu Kegiatan Penegasan batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur. Kegiatan ini berupa Monitoring dan Penataan Patok Batas Daerah.

3. Permasalahan dan Solusi

Pembinaan batas wilayah di Kota Bontang khususnya kegiatan penegasan batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangnya

Selain potensi bencana yang terjadi di wilayah Kota Bontang yang disebabkan oleh faktor alam pada umumnya, meliputi bencana banjir, pasang ombak yang menyebabkan kapal rusak dan angin kencang serta bencana kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian manusia terlebih lagi jumlah penduduk yang semakin padat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang dan tercatat dalam kurun waktu tahun 2017 di Kota Bontang terjadi Banjir sebanyak 7 (tujuh) Kejadian, Angin Kencang terdapat 2 (dua) kejadian, Evakuasi dan Pencarian Korban kapal rusak sebanyak 3 (tiga) kejadian serta kebakaran rumah sebanyak 9 (Sembilan) kejadian.

Tabel 6.7

Jenis dan jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Bontang Tahun 2017

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya		Status Bencana	sumber dan jumlah anggaran		
Bencana	Penanggulangannya		Sumber	Anggaran	
Angin Puting Beliung	Melakukan evakuasi korban dan pendataan data korban	Lokal/Kota	APBD/ Swasta / Mandiri	dana berasal dari OPD yang terkait	
	melakukan koordinasi dengan OPD terkait, untuk kebutuhan dasar langsung berkoordinasi dengan dinas sosial				
	data dilapangan terkait rehabilitasi rumah dan harta benda langsung dikoordinasikan dengan OPD terkait				
Banjir	Melakukan evakuasi korban dan pendataan data korban		Lokal/Kota	APBD/ Swasta / Mandiri	dana berasal dari OPD yang terkait
	menurunkan perahu karet untuk korban yang terluka maupun yang tidak mampu berjalan				
	melakukan koordinasi dengan OPD terkait, untuk kebutuhan dasar langsung berkoordinasi dengan dinas sosial				
	data dilapangan terkait rehabilitasi rumah dan harta benda langsung dikoordinasikan dengan OPD terkait				
Evakuasi dan Pencarian Korban kapal rusak	menurunkan tim water rescue guna melakukan pencarian korban		Lokal/Kota	APBD	Anggaran berasal dari BPBD Kota Bontang
	tim dibagi dua di darat dan di laut, didarat bertugas membuat laporan di kepolisian yaitu polair dan mendatangi rumah korban guna mendapatkan informasi yang akurat terkait lokasi terakhir korban				
	data yang didapat di darat langsung di koordinasikan dengan tim yang di laut guna melakukan pencarian lebih lanjut				
	tim yang didarat juga bertugas untuk menemani keluarga korban dan memberikan informasi yang akurat terkait pencarian korban sehingga				



Bencana yang terjadi dan penanggulangannya		Status Bencana	sumber dan jumlah anggaran	
Bencana	Penanggulangannya		Sumber	Anggaran
	keluarga korban menjadi lebih tenang			
	pencarian korban di lakukan selama 7 hari, dan dapat di perpanjang selama 7 hari lagi jika mendapat petunjuk terkait lokasi korban			

Sumber: - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2017

Dalam menanggulangi kejadian bencana di atas, mulai dari tahap pra bencana hingga pasca bencana, untuk meminimalisir dampak kerugian materil maupun immateril yang ditimbulkan, Pemerintah Kota Bontang melalui Perangkat Daerah terkait mengambil langkah-langkah strategis antara lain :

- a. Melakukan Klarifikasi Data dilapangan melalui patroli pemantauan daerah rawan bencana per RT pada setiap Kelurahan
- b. Membuat peta rawan bencana Per RT untuk setiap kelurahan
- c. Memberikan Peta Rawan Bencana per RT pada setiap keluarahan yang sudah dilakukan pendataan
- d. Melakukan Sosialisasi dan penyuluhan Antisipasi Bencana pada setiap kelurahan berdasarkan potensi bencana yang ada pada wilayah tersebut dengan peserta dari Instasi Pemerintah, Organisasi, Masyarakat umum maupun pelajar dan Mahasiswa
- e. Melakukan Pelatihan dan simulasi Penanggulangan Bencana dengan peserta dari Instasi Pemerintah, Organisasi, Masyarakat umum maupun pelajar dan Mahasiswa

Meskipun menghadapi beberapa kendala, keseluruhan tindakan di atas dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien untuk menyelamatkan dan mengurangi penderitaan korban bencana, mengurangi dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Pada fase pra dan pasca bencana, kebutuhan sarana/fasilitas penunjang untuk penanggulangan bencana baik dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana,



mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana, diperlukan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai. Terlebih pada masa tanggap darurat kebutuhan peralatan yang memadai dengan jumlah dan spesifikasi yang tepat, dapat tersedia dan termobilisasi dengan cepat ke lokasi bencana untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban, memegang peranan kunci untuk tujuan penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban secara efektif dan efisien.

2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi di wilayah Kota Bontang dikategorikan sebagai bencana lokal/bencana kota sehingga penanganannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan lembaga/instansi terkait lainnya.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bontang mengalokasikan dana pada APBD Kota Bontang sebesar Rp.7.835.719.187,00 untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. Anggaran dialokasikan kepada BPBD Kota Bontang dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dengan rincian sebagai berikut :

- a. BPBD Kota Bontang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.675.719.187,00.
- b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.159.728.161,00.

4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di wilayah Kota Bontang, maka Pemerintah Kota Bontang melalui BPBD Kota Bontang mengambil langkah-langkah antisipasi bencana sebagai berikut :



Tabel 6.8

Potensi Bencana, Penyebab dan Solusi Penanganan Bencana di Kota Bontang Tahun 2017

Potensi bencana	Penyebab	Solusi
Banjir ROB	Air Laut Pasang	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	Daerah Pesisir (Dataran rendah)	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
Banjir Kiriman	Curah Hujan tinggi di daerah Hulu (Kutim dan Kukar)	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	drainase yang buruk	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak
	pendangkalan dan penyempitan sungai	membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
	terhalangnya arus sungai yang disebabkan bangun yang berada di bantaran sungai, konstruksi jembatan dan tumpukan sampah	BPBD berkoordinasi dengan OPD dan instansi terkait untuk mendirikan posko siaga bencana
Banjir Tadah Hujan	Curah Hujan tinggi	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	Dataran rendah	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak
	drainase yang buruk	membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
Tanah Longsor	Mendirikan Bangunan tanpa memiliki IMB	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	Mendirikan bangunan di lokasi yang rawan longsor	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak
	Curah hujan tinggi	membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
Kegagalan teknologi (PT.Badak, PKT)	Kesalahan Manusia dalam mengoperasikan perangkat teknologi	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
		menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak
		membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi
Bencana sosial (kerusuhan)	Sengketa Tanah	membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi



Potensi bencana	Penyebab	Solusi
Transportasi Laut	Kondisi perahu yang tidak layak berlaut	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	kurangnya peralatan dan perlengkapan keselamatan diri (Life Jacket, Lifebouy)	membantu pencarian korban yang membutuhkan bantuan evakuasi
	Cuaca ekstrem	
Kekeringan	Cuaca ekstrem (Kemarau Panjang)	Melakukan pendataan daerah yang terdampak kekeringan
	Kurangnya daerah resapan air	mendistribusikan air bersih ke daerah terdampak
Rumah Roboh	kelebihan beban	mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan evakuasi
	Konstruksi bangunan yang kurang baik	menurunkan tim rescue dan melakukan patroli pemantauan terhadap lokasi yang terdampak membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi

Selama tahun 2017, stabilitas keamanan Wilayah Kota Bontang secara umum relatif baik dan terkendali. Secara politik, ekonomi, sosial dan budaya relatif tidak ada masalah yang berpotensi tinggi menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tahun 2017, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi masih didominasi oleh gangguan kriminal seperti Kasus Penganiayaan, Kasus Narkoba serta pencurian. Dibandingkan dengan tahun 2016, angka gangguan kriminalitas pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 260 kasus menjadi 145 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang secara umum mengalami perbaikan, seiring dengan meningkatnya kinerja aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah Kota Bontang.



Tabel 6.9

Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Bontang
Tahun 2016-2017

No.	Jenis Gangguan Kriminal	2016	2017
1	Jumlah Kasus Narkoba	92.00	62.00
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	4.00	1.00
3	Jumlah Kasus Seksual	1.00	n/a
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	18.00	10.00
5	Jumlah Kasus Pencurian	115.00	62.00
6	Jumlah Kasus Penipuan	29.00	6.00
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	1.00	4.00

2. Perangkat Daerah yang Menangani

Perangkat Daerah (PD) yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Non PNS
102	S2 : 5	Pembina Utama Muda (IV / c) : 1	Eselon II / b : 1	12	58
	S1 : 15	Pembina (IV / a) : 3	Eselon III / b : 3		
	D3 : 3	Penata Tingkat I (III / d) : 5	Eselon IV/a : 6		
	SMA/SMK/MA/Paket C : 72	Penata (III / c) : 2	Non Eselon : 22		
	SMP/MTs/Paket B : 5	Penata Muda Tingkat I (III / b) : 1			
	SD/MI/Paket A : 2	Penata Muda (III / a) : 4			
		Pengatur Tingkat I (II / d) : 7			
		Pengatur (II / c) : 6			
		Pengatur Muda TKI (II / b) : 4			
		Pengatur Muda (II / a) : 8			
	Juru (I / c) : 3				
	- : 58				

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Anggaran penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Bontang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan pada Perangkat Daerah terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.452.970.000,00.



5. Penanggulangan dan Kendalanya

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu : perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban, perumusan, pembinaan, pelayanan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai berikut :

- ✓ Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan, Pengadministrasian urusan Ketata usahaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- ✓ Masih lemahnya koordinasi antara aparaturnya dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan.
- ✓ Belum optimalnya pembagian zona dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran perda.
- ✓ Rendahnya wawasan pengetahuan tentang pendidikan dasar Satuan Polisi Pamong Praja.
- ✓ Rendahnya Pengetahuan, kesiapan pelaksanaan Penegakan Keamanan, Ketertiban dalam pelaksanaan PILEG, PILPRES, PILKADA

Setelah mengetahui permasalahan utama dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang yang telah diuraikan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang menetapkan 5 (lima) Kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan sosialisasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya.
- b) Meningkatkan kegiatan operasional dan pelaksanaan yustisi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan terkendali.



- c) Meningkatkan kegiatan penanganan PSK, gepeng/anjak yang meresahkan masyarakat dan terbinanya suasana yang tertib dan tentram.
- d) Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengaturan PKL untuk mewujudkan Kota yang aman, nyaman, tertib, indah dan bersih.
- e) Meningkatkan kegiatan pengawasan THM dan peredaran miras sehingga terwujudnya kondisi ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang pada tahun 2017 terlaksana dengan baik tanpa terjadi adanya gangguan yang signifikan. Hal ini dapat terwujud karena adanya kesadaran dan koordinasi serta kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Hal ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa semakin baiknya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu menjaga situasi yang kondusif.

Dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Linmas dan Polisi Pamong Praja melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan untuk meningkatkan kesiapan dan keahlian pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Dalam upaya mencapai sasaran Terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat tersebut, kebijakan yang ditetapkan adalah:

- ❖ Peningkatan Penataan terhadap produk hukum daerah (Perda);
- ❖ Peningkatan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- ❖ Mendorong Terciptanya kerukunan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara;
- ❖ Melakukan penyuluhan lewat sosialisasi dan bekerjasama dengan aparat dan instansi terkait dalam rangka terciptanya rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan rasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang, pada tahun 2017 telah dilaksanakan beberapa program pembangunan yaitu :

- a) Penataan peraturan perundang-undangan
- b) Peningkatan kesadaran hukum dan HAM



- c) Pelayanan dan Bantuan Hukum
- d) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- e) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- f) Penanggulangan Dampak Bencana
- g) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- h) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- i) Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
- j) Fasilitas Pemantapan Multikultur dan Umat Beragama

Pemerintah Kota Bontang menyadari bahwa heterogenitas penduduk di daerah ini, selain merupakan potensi dalam pengelolaan keragaman budaya namun juga dapat menjadi potensi terjadinya konflik horizontal jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu pemerintah melalui perangkat daerah terkait selalu melaksanakan pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan. Pembinaan dilaksanakan kepada organisasi masyarakat seperti paguyuban-paguyuban, organisasi kepemudaan dan juga organisasi politik serta keagamaan.



BAB VII

PENUTUP

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2017, merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bontang merupakan hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang selama Tahun 2017 yang memuat tentang capaian kinerja pembangunan, serta disusun berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2017 atau merupakan pelaksanaan capaian kinerja tahun ke 2 dari RPJMD Kota Bontang 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Semua hal yang berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD Kota Bontang.

Sejalan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, semua pihak perlu memahami bahwa Laporan Keterangan Petanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2017 ini bukan semata hanya sebagai pemenuhan formalitas



belaka, namun lebih dari itu dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya secara umum dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBD Kota Bontang selama tahun 2017 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari kinerja pengelolaan APBD Kota Bontang maupun kinerja pelaksanaan program selama tahun 2017 yang diindikasikan dari tingkat realisasi APBD maupun tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Namun demikian perlu disadari bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus disikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif, inovatif dan solutif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dicapai bukanlah karena tekad dan usaha Pemerintah Kota semata. Namun semua itu dapat dicapai berkat dukungan semua pihak di Kota Bontang yang telah ikut mengambil peran aktif dalam pembangunan di Kota ini. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam membangun Kota Bontang, pada tahun 2017 Pemerintah dan Masyarakat Kota Bontang berhasil memperoleh berbagai penghargaan baik skala regional maupun nasional, antara lain:

- ✓ Panji-panji Keberhasilan Tingkat Provinsi Kaltim
- ✓ Penghargaan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- ✓ Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2017
- ✓ Penghargaan Kota Berkinerja Terbaik
- ✓ Penghargaan Desa Maritim Award
- ✓ Penghargaan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2016.
- ✓ Penghargaan Bidang Kesehatan - Pasti Parama 2017
- ✓ Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya



- ✓ Penghargaan Anugerah Peduli TK TPA Alquran 2017
- ✓ Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha
- ✓ Penghargaan Walikota Enterprener Award 2017
- ✓ Penghargaan Kota Sehat (Swastisaba Wistara Emas) 2017
- ✓ Penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017
- ✓ Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2017

Meskipun telah cukup banyak yang telah dicapai pada pembangunan Tahun Anggaran 2017, namun masih banyak lagi yang harus menjadi perhatian untuk segera kita wujudkan bersama. Dalam kaitan ini kebersamaan serta partisipasi semua pihak dan seluruh elemen masyarakat senantiasa dibutuhkan. Dengan terus memupuk rasa kebersamaan, memiliki tekad dan komitmen yang sama, Insya Allah Visi Kota Bontang dapat segera terwujud. Amiin.

**LAMPIRAN MATRIKS REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KOTA BONTANG TAHUN 2017**

A. URUSAN WAJIB

1.01. URUSAN PENDIDIKAN

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		5.494.745.233,00	94,38	4.363.394.710,00	79,41	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Layanan Komunikasi	12 bulan	142.000.000,00	100,00	106.090.857,00	74,71	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	47 unit	15.750.000,00	60,00	5.332.800,00	33,86	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	34 Jenis	124.195.000,00	100,00	106.313.400,00	85,60	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	12 Jenis	278.900.000,00	100,00	271.615.000,00	97,39	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	144.126.000,00	100,00	142.526.000,00	98,89	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	3 Paket	127.250.000,00	100,00	121.068.750,00	95,14	Dinas Pendidikan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang Melaksanakan	157 Orang	522.370.000,00	100,00	423.068.670,00	80,99	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	250 Orang	4.140.154.233,00	95,01	3.187.379.233,00	76,99	Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur		100.000.000,00	100,00	99.731.500,00	99,73	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan	47 unit	100.000.000,00	100,00	99.731.500,00	99,73	Dinas Pendidikan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kedisiplinan sumber daya aparatu		3.650.100.000,00	100,00	2.115.342.748,00	57,95	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS	100%	3.650.100.000,00	100,00	2.115.342.748,00	57,95	Dinas Pendidikan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase kapasitas sumber daya aparatu		200.000.000,00	100,00	198.865.000,00	99,43	
	Pendidikan dan Pelatihan Character Building	Terlaksananya pelatihan character building	100 orang	200.000.000,00	100,00	198.865.000,00	99,43	Dinas Pendidikan
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyampaian informasi pembangunan daerah		360.940.000,00	100,00	354.169.000,00	98,12	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya event pameran expo dan bontang city carnival	2 kegiatan	283.940.000,00	100,00	282.988.000,00	99,66	Dinas Pendidikan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Terpublikasinya informasi pembangunan	3 media	77.000.000,00	100,00	71.181.000,00	92,44	Dinas Pendidikan
6	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Meningkatnya Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan Pada Jenjang PAUD		150.000.000,00	100,00	148.416.016,00	98,94	
	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini	1 paket	150.000.000,00	100,00	148.416.016,00	98,94	Dinas Pendidikan
7	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Meningkatnya Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar		24.071.666.178,00	88,86	19.622.687.810,00	81,52	
	Pembangunan Sarana Prasarana Kelas SD dan SMP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah	1 sekolah	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi)	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	4 sekolah	89.760.000,00	100,00	89.760.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Bidang Pendidikan SD)	29 sekolah	1.490.000.000,00	9,98	-	0,00	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Sedang/Berat SD Negeri 005 Bontang Selatan (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)	Rehabilitasi Sedang/Berat SD Negeri 005 Bontang Selatan (DAK Bidang Pendidikan)	1 paket	480.158.000,00	100,00	480.158.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Gedung SMP Negeri 9 (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Pembangunan RKB SMP Negeri 9 (DAK Bidang Pendidikan)	1 sekolah	244.372.000,00	100,00	244.372.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Komputer SMP Negeri 4 (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Pengadaan Komputer Server SMPN 4	2 set	60.000.000,00	100,00	43.500.000,00	72,50	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Komputer SMP Negeri 6 (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)	Pengadaan Komputer PC SMPN 6	22 Unit	169.400.000,00	100,00	161.570.000,00	95,38	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	595 siswa	514.996.862,00	79,75	409.311.150,00	79,48	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	510 siswa	457.942.756,00	88,07	403.253.343,00	88,06	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	708 siswa	628.898.936,00	89,03	536.200.150,00	85,26	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	502 siswa	405.771.360,00	91,81	369.383.895,00	91,03	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	624 siswa	510.081.727,00	96,33	487.285.662,00	95,53	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	445 siswa	360.925.692,00	87,40	313.494.130,00	86,86	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	545 siswa	482.056.500,00	77,46	356.417.338,00	73,94	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 008 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	556 siswa	474.365.301,00	89,98	416.487.535,00	87,80	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	429 siswa	343.200.286,00	94,34	323.784.870,00	94,34	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	404 siswa	327.241.009,00	96,66	314.690.270,00	96,16	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Utara	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	61 siswa	48.800.000,00	99,34	48.480.000,00	99,34	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	545 siswa	495.202.194,00	83,04	388.999.610,00	78,55	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	642 siswa	513.960.244,00	97,47	500.852.076,00	97,45	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	473 siswa	380.311.071,00	93,81	356.058.638,00	93,62	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	335 siswa	283.765.820,00	95,45	267.438.593,00	94,25	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	408 siswa	337.400.000,00	96,94	322.960.000,00	95,72	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	413 siswa	354.169.016,00	97,29	335.674.277,00	94,78	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	190 siswa	145.749.800,00	100,00	154.568.800,00	106,05	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	597 siswa	557.671.510,00	81,72	425.674.467,00	76,33	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	440 siswa	384.197.796,00	92,80	341.899.745,00	88,99	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	480 siswa	384.400.000,00	98,40	378.240.000,00	98,40	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	349 siswa	406.590.158,00	92,52	338.948.456,00	83,36	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	468 siswa	373.600.000,00	96,37	360.024.996,00	96,37	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	31 siswa	28.682.488,00	69,99	19.220.000,00	67,01	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	10 siswa	17.559.686,00	86,39	8.000.000,00	45,56	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	48 siswa	39.374.950,00	97,13	37.879.500,00	96,20	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Barat	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	354 siswa	283.200.000,00	99,55	281.920.312,00	99,55	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Barat	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	251 siswa	215.083.829,00	88,37	185.434.682,00	86,22	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Barat	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	401 siswa	312.000.000,00	97,52	304.275.000,00	97,52	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 004 Bontang Barat	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	737 siswa	866.907.732,00	75,17	547.632.344,00	63,17	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	470 siswa	609.098.870,00	81,74	444.946.607,00	73,05	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	671 siswa	671.645.092,00	87,18	585.513.434,00	87,18	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	589 siswa	641.793.706,00	85,77	530.659.824,00	82,68	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 4 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	479 siswa	536.342.386,00	78,83	401.285.365,00	74,82	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	657 siswa	864.395.180,00	86,97	674.005.680,00	77,97	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 6 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	205 siswa	205.666.610,00	95,89	196.966.700,00	95,77	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 7 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	305 siswa	396.578.678,00	84,36	292.425.841,00	73,74	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 8 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	327 siswa	330.570.933,00	89,68	291.708.541,00	88,24	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 9 Bontang	Jumlah Penerima dana BOS APBN Bagi Sekolah Negeri	208 siswa	281.350.000,00	71,57	168.229.160,00	59,79	Dinas Pendidikan
	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	1 paket	3.387.000.000,00	98,41	3.233.298.218,00	95,46	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Sekolah	Pengadaan peralatan perlengkapan sekolah	1 paket	630.000.000,00	100,00	619.343.000,00	98,31	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga	Tersedianya alat praktek dan peraga mahasiswa	1 paket	200.000.000,00	0,00	-	0,00	Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah unit Bangunan yang terehabilitasi	3 sekolah	348.615.000,00	100,00	328.897.030,00	94,34	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket A Setara SD	17 kejar	63.370.000,00	100,00	52.186.000,00	82,35	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Meningkatnya Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP	19 PKBM	108.278.000,00	100,00	80.492.500,00	74,34	Dinas Pendidikan
	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Mental Siswa	400 siswa	1.269.875.000,00	100,00	1.110.490.071,00	87,45	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	3 sekolah	48.290.000,00	98,14	47.390.000,00	98,14	Dinas Pendidikan
8	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Meningkatnya Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Menengah		348.113.000,00	100,00	315.721.500,00	90,70	
	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket C Setara SMA	21 PKBM	128.925.000,00	100,00	96.533.500,00	74,88	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Prestasi Siswa dan Pembina Kegiatan	Terselenggaranya berbagai ajang kreatifitas siswa	1 tahun	10.200.000,00	100,00	10.200.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah	Tersedianya RKB SMKN 1	1 sekolah	208.988.000,00	100,00	208.988.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
9	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Meningkatnya Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan Non Formal		275.000.000,00	68,89	226.074.780,00	82,21	
	Penyediaan Operasional Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Tersedianya operasional kantor sanggar kegiatan belajar	1 tahun	75.000.000,00	37,78	28.333.600,00	37,78	Dinas Pendidikan
	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SKB	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana SKB	1 paket	200.000.000,00	100,00	197.741.180,00	98,87	Dinas Pendidikan
10	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		28.625.218.000,00	100,00	27.952.313.753,00	97,65	
	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Tersedianya Tenaga Pendidik yang Profesional	27 Orang	1.721.160.000,00	100,00	1.572.603.387,00	91,37	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Bermutu dan Berkualitas	100%	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Meningkatnya Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2059 Orang	25.835.258.000,00	100,00	25.481.065.392,00	98,63	Dinas Pendidikan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru negeri yang ber-NUPTK yang mendapatkan laptop	213 Orang	1.067.000.000,00	100,00	896.844.974,00	84,05	Dinas Pendidikan
11	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Meningkatnya pelayanan mutu pendidikan		176.365.000,00	100,00	172.525.000,00	97,82	
	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Tersedianyan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Pendidikan yang Bermutu	100 %	1.320.000,00	100,00	1.320.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya sistem manajemen yang terintegrasi teknologi informasi	1 tahun	37.035.000,00	100,00	36.995.000,00	99,89	Dinas Pendidikan
	Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan	Terlaksananya perayaan hari besar bidang pendidikan	1 kegiatan	68.940.000,00	100,00	68.940.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Dana Pendamping Tambahan Penghasilan Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya Biaya Operasional Kegiatan Tambahan Perbaikan Penghasilan	1 tahun	7.700.000,00	100,00	7.700.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) APBN	Tersalurnya DAK BOP - PAUD (Dana APBN)	7.049 Anak	61.370.000,00	100,00	57.570.000,00	93,81	Dinas Pendidikan
12	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Meningkatnya pelayanan mutu pendidikan		13.886.642.998,00	57,67	7.185.678.936,00	51,75	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh siswa Tingkat Pendidikan Dasar	400 siswa	128.000.000,00	46,68	35.749.118,00	27,93	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang	Bebas biaya pendidikan	94 siswa	30.080.000,00	90,19	27.127.948,00	90,19	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pend. dasar	69 siswa	22.080.000,00	100,00	22.080.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	649 siswa	290.552.600,00	47,02	126.860.000,00	43,66	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	556 siswa	263.242.250,00	33,14	67.022.250,00	25,46	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	802 siswa	372.750.750,00	60,50	223.596.850,00	59,99	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan	512 siswa	241.618.100,00	44,34	92.171.900,00	38,15	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	627 siswa	248.903.900,00	73,74	180.821.200,00	72,65	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara	Terlaksananya Bebas biaya pendidikan	471 siswa	245.202.000,00	44,93	101.118.424,00	41,24	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	574 siswa	242.000.000,00	49,85	83.929.970,00	34,68	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	567 siswa	769.609.365,00	51,83	380.271.565,00	49,41	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	428 siswa	194.981.800,00	27,25	41.778.400,00	21,43	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh tingkat pendidikan dasar	412 siswa	182.610.000,00	35,54	42.160.500,00	23,09	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	61 siswa	80.400.000,00	46,83	37.655.000,00	46,83	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	545 siswa	393.022.000,00	50,84	178.907.350,00	45,52	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	646 siswa	401.804.200,00	54,78	200.439.200,00	49,88	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	481 siswa	232.723.000,00	58,48	124.874.500,00	53,66	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	322 siswa	179.545.700,00	81,01	144.588.550,00	80,53	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	396 siswa	205.350.750,00	63,31	124.762.750,00	60,76	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	447 siswa	353.976.900,00	46,06	162.897.650,00	46,02	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	191 siswa	76.500.000,00	66,75	44.391.000,00	58,03	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan	Terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar	628 siswa	368.805.550,00	39,85	109.775.550,00	29,77	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	bebas Biaya pendidikan	433 siswa	234.835.300,00	54,19	125.281.700,00	53,35	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan	Bebas Biaya Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	502 siswa	272.353.000,00	52,40	140.166.900,00	51,47	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	465 siswa	186.000.000,00	49,55	31.231.000,00	16,79	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	470 siswa	353.802.400,00	36,75	117.122.200,00	33,10	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	43 siswa	56.850.000,00	59,50	33.774.550,00	59,41	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	10 siswa	47.550.000,00	64,70	30.765.750,00	64,70	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan	Bebas Biaya Pendidikan	48 siswa	78.700.000,00	45,10	35.493.000,00	45,10	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat	Bebas Biaya Pendidikan	364 siswa	133.372.500,00	45,54	36.770.000,00	27,57	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat	Bebas biaya pendidikan bagi siswa pendidikan dasar	322 siswa	142.189.500,00	48,25	67.519.000,00	47,49	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	402 siswa	176.414.000,00	22,50	39.340.000,00	22,30	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	750 siswa	693.088.450,00	43,23	299.589.550,00	43,23	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	466 siswa	737.134.910,00	75,20	486.412.951,00	65,99	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	670 siswa	529.190.000,00	65,13	272.577.550,00	51,51	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	590 siswa	525.384.300,00	48,57	217.496.617,00	41,40	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan	481 siswa	436.063.750,00	73,78	309.918.771,00	71,07	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Sekolah Menengah	658 siswa	810.570.000,00	59,81	377.810.499,00	46,61	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa	178 siswa	124.360.000,00	46,67	43.458.000,00	34,95	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	251 siswa	170.680.000,00	58,56	95.373.781,00	55,88	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	327 siswa	196.480.000,00	28,90	52.713.750,00	26,83	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 1 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	657 siswa	619.038.222,00	91,89	568.837.500,00	91,89	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 2 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	599 siswa	134.665.160,00	99,71	134.280.160,00	99,71	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 3 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	617 siswa	129.747.200,00	99,64	129.285.840,00	99,64	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang	Program Kerja Sekolah Dapat Terlaksana	1.025 siswa	573.678.723,00	57,71	331.044.994,00	57,71	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 2 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	584 siswa	463.145.072,00	51,67	238.792.108,00	51,56	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 3 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	290 siswa	134.207.538,00	32,40	43.484.730,00	32,40	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SLB Negeri Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa seluruh tingkat pendidikan dasar	85 siswa	640.000,00	0,00	-	0,00	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMA Negeri 2 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan	100 %	37.487.000,00	92,50	34.677.000,00	92,50	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMA Negeri 3 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan	1 Tahun	2.863.000,00	0,00	-	0,00	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMK Negeri 1 Bontang	Program kerja Sekolah Dapat Terlaksana	1 tahun	26.025.000,00	100,00	26.025.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMK Negeri 2 Bontang	Bebas Biaya Pendidikan Bagi Siswa Seluruh Tingkat Pendidikan Menengah	1 Tahun	2.019.108,00	0,00	-	0,00	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) APBD Provinsi SMK Negeri 3 Bontang	terpenuhinya standar pelayanan minimum sekolah	1 tahun	4.110.000,00	89,78	3.690.000,00	89,78	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 9 Bontang	Bebas biaya pendidikan bagi siswa tingkat menengah	208 siswa	77.040.000,00	80,42	60.908.250,00	79,06	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina I Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD	255 siswa	153.000.000,00	100,00	149.294.400,00	97,58	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina II Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD	94 siswa	57.000.000,00	100,00	56.506.450,00	99,13	Dinas Pendidikan
	Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Satu Atap Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus (DAK) BOP PAUD	63 siswa	43.200.000,00	100,00	43.057.260,00	99,67	Dinas Pendidikan
13	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	Meningkatnya pelayanan mutu pendidikan		18.409.335.000,00	100,00	14.894.991.480,00	80,91	
	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi	Terlaksananya pembayaran administrasi	100 %	2.235.000,00	100,00	2.235.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam	29.445 siswa	18.407.100.000,00	100,00	14.892.756.480,00	80,91	Dinas Pendidikan
14	PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMI KOMUNITAS BONTANG (AK) DAN BONTANG TECHNO PARK (BTP)	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tinggi		148.370.000,00	80,99	92.478.700,00	62,33	
	Pembangunan Gedung Sekolah	Terbayarnya administrasi pembangunan Gedung AK	100 %	2.370.000,00	100,00	2.370.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Dana Operasional Lembaga Akademi Komunitas dan BTP	Tersedianya biaya operasional penyelenggaraan akademi Komunitas	1 lembaga	146.000.000,00	61,98	90.108.700,00	61,72	Dinas Pendidikan
15	PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Autis Center		830.721.750,00	100,00	637.559.198,00	76,75	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre	Tersedianya ruang sumber sekolah inklusif	1 Sekolah	29.641.750,00	100,00	29.641.750,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Operasionalisasi Lembaga Autis Centre	Tersedianya biaya operasional penyelenggaraan autis center	1 lembaga	1.080.000,00	100,00	1.080.000,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Autis Centre	tersedianya biaya operasional Lembaga autis center	1 tahun	200.000.000,00	100,00	181.977.400,00	90,99	Dinas Pendidikan
	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusif	Pembangunan/Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah inklusif	1 paket	600.000.000,00	100,00	424.860.048,00	70,81	Dinas Pendidikan
16	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tinggi		2.322.520.000,00	100,00	2.149.560.000,00	92,55	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahasiswa Bontang	Jumlah Asrama Mahasiswa yang di fasilitasi	11 Asrama	797.520.000,00	100,00	780.700.000,00	97,89	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM melalui Beasiswa	Jumlah Penerima besasiswa	330 Orang	1.525.000.000,00	100,00	1.368.860.000,00	89,76	Sekretariat Daerah
URUSAN PENDIDIKAN				99.049.737.159,00	93,17	80.529.510.131,00	81,30	

1.02. URUSAN KESEHATAN

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		5.686.927.925,00	98,70	5.493.927.224,00	96,61	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	408.040.000,00	100,00	370.336.010,00	90,76	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2	50 unit	46.000.000,00	98,26	41.911.600,00	91,11	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan jenis	15.000.000,00	100,00	14.992.000,00	99,95	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan Jenis	94.436.200,00	100,00	94.436.200,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan jenis	85.300.000,00	99,24	84.323.700,00	98,86	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Publikasi	1 media	4.268.000,00	100,00	4.268.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum yang sediakan Kotak	44.609.759,00	90,84	42.251.000,00	94,71	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri kali	476.691.019,00	100,00	473.891.222,00	99,41	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	202 orang	4.512.582.947,00	100,00	4.367.517.492,00	96,79	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			876.000.000,00	100,00	850.909.170,00	97,14	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara unit	430.000.000,00	100,00	429.605.300,00	99,91	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara Unit	46.000.000,00	100,00	45.236.870,00	98,34	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	Jumlah tempat parkir yang di bangun	2 tempat parkir	400.000.000,00	100,00	376.067.000,00	94,02	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			4.809.000.000,00	100,00	4.809.000.000,00	100,00	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS Orang	4.809.000.000,00	100,00	4.809.000.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	
	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			126.000.000,00	81,34	94.280.000,00	74,83	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran yang diikuti	1 kegiatan	51.000.000,00	100,00	51.000.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah Media Publikasi Media	75.000.000,00	62,67	43.280.000,00	57,71	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN			3.067.183.770,00	99,62	3.041.114.196,00	99,15	
	Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat yang disediakan jenis	840.865.000,00	98,48	827.020.282,00	98,35	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah alat yang dikalibrasi; Jumlah kegiatan peningkatan mutu penggunaan obat; jumlah tabung oksigen yang diisi Unit; 1 kegiatan; tabung	145.568.000,00	100,00	133.665.500,00	91,82	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Kefarmasian)	Jumlah jenis obat dan bahan medis yang disediakan Jenis	1.186.297.000,00	100,00	1.185.974.645,00	99,97	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat Kota (DAK Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)	Jumlah jenis obat dan bahan medis yang disediakan jenis	894.453.770,00	100,00	894.453.769,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
7	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			27.541.535.956,00	96,51	26.594.101.877,00	96,56	
	Pembinaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibina	6 kali	57.900.000,00	71,45	34.284.670,00	59,21	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan P3K Kegiatan Tertentu	Jumlah kegiatan P3K; Jumlah jenis bahan yang disediakan	85 kali; 5 jenis	173.877.000,00	100,00	173.828.100,00	99,97	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah kader yang menghadiri kegiatan orang	4.375.000,00	100,00	4.375.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2	Jumlah kader yang menghadiri kegiatan orang	48.425.000,00	100,00	48.425.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari	Jumlah kader yang menghadiri kegiatan orang	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1	Jumlah kader yang menghadiri kegiatan orang	35.700.000,00	100,00	35.700.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2	Jumlah Pelayanan kesehatan yang dilakukan kali	52.099.000,00	100,00	52.099.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat	Jumlah kader yang menghadiri kegiatan orang	29.000.000,00	100,00	23.000.000,00	79,31	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Jumlah peserta JPKM Jiwa	21.902.696.247,00	97,68	21.885.145.839,00	99,92	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Jamkesda	Operasional Jamkesda	12 bulan	80.003.000,00		71.063.370,00	88,83	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan serta Bahan Berbahaya	jumlah Pertemuan PKP	1 kali	7.800.000,00	100,00	7.800.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Klinik Pegawai dan Klinik Tumbuh Kembang	Penyediaan Dana Operasional Klinik Pegawai	12 bulan	515.507,00	100,00	265.507,00	51,50	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	12 bulan	338.800.000,00	100,00	321.305.450,00	94,84	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	12 bulan	309.097.250,00	79,94	231.093.070,00	74,76	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	12 bulan	323.600.000,00	90,45	231.116.043,00	71,42	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	12 bulan	395.184.000,00	100,00	381.859.000,00	96,63	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	12 bulan	341.500.000,00	87,91	254.382.300,00	74,49	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	12 bulan	334.000.000,00	99,65	328.135.550,00	98,24	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Penyediaan Biaya Operasional Manajemen DAK Non Fisik Operasional Kesehatan	12 bulan	135.356.700,00	94,83	129.878.884,00	95,95	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)	Penyediaan Dana Operasional Manajemen DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	12 bulan	48.901.100,00	73,42	43.402.750,00	88,76	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembangunan Instalasi Farmasi Kota (DAK Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)	Pembangunan gedung instalasi farmasi	1 unit	1.011.010.000,00	100,00	1.011.010.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kota (DAK Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian)	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan	5 Jenis	583.577.402,00	100,00	583.577.402,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)	Penyediaan Biaya Operasional JAMPERSAL Se-kota Bontang	12 bulan	929.120.900,00	100,00	364.533.418,00	39,23	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan UKS (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pembinaan UKS	15 kelurahan	32.540.000,00	100,00	32.540.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dukungan Manajemen e-Logistik Farmasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Penyediaan Biaya Operasional Manajemen E-Logistik Farmasi	12 bulan	79.780.000,00	96,62	76.133.674,00	95,43	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	12 bulan	45.895.000,00	100,00	45.895.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	12 bulan	43.418.000,00	100,00	43.418.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	12 bulan	34.678.000,00	100,00	34.148.000,00	98,47	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	Bantuan operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	12 bulan	13.700.000,00	100,00	13.700.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	12 bulan	73.887.500,00	100,00	73.887.500,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat	12 bulan	59.799.350,00	100,00	42.799.350,00	71,57	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Dukungan manajemen BOK	12 bulan	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
8	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			341.154.700,00	93,83	307.846.043,00	90,24	
	Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat	Penyediaan Dana Pembinaan Kelurahan Sehat; Jumlah peralatan yang disediakan	12 bulan; 2 unit	200.000.000,00	97,10	182.466.343,00	91,23	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	Penyediaan Biaya Operasional Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1	1 Tahun	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	Penyediaan Biaya Operasional Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2	1 Tahun	6.489.700,00	100,00	6.489.700,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	Penyediaan Biaya Operasional Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari	1 Tahun	9.465.000,00	78,34	6.990.000,00	73,85	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	Penyediaan Biaya Operasional Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1	1 Tahun	6.750.000,00	100,00	6.750.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	Penyediaan Biaya Operasional Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2	1 Tahun	4.950.000,00	100,00	4.950.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	15 Kelurahan	61.700.000,00		59.471.000,00	96,39	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengembangan dan Pembinaan Keluarga Sehat	Kegiatan Rakor Germas	1 keg	50.000.000,00	81,40	38.929.000,00	77,86	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
9	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT			108.375.000,00	100,00	105.965.800,00	97,78	
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Tersedianya Buffer Stock PMT Balita	36 Balita	50.000.000,00	100,00	48.826.800,00	97,65	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Pemantauan Gizi Buruk	1 Kali	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Pemantauan Gizi Buruk	1 Kali	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Pemantauan Gizi Buruk	1 Kali	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	Terlaksananya pelacakan balita BGM/BGT	1 paket	10.200.000,00	100,00	10.200.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Pemantauan Gizi Buruk	1 Kali	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	workshop Manajemen FKTP kegiatan pembinaan pelayanan gizi institusi dan gizi masyarakat	1 kali	3.025.000,00	100,00	3.025.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Operasional Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi	12 bulan	40.400.000,00	100,00	39.164.000,00	96,94	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
10	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT			205.704.500,00	100,00	192.417.500,00	93,54	
	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Penyediaan Operasional penyehatan Lingkungan Pemukiman	12 bulan	117.368.000,00	100,00	117.149.000,00	99,81	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembinaan Tempat-Tempat Umum	Penyediaan Biaya Operasional Pengumpulan Limbah Medis	12 bulan	14.868.000,00	100,00	1.800.000,00	12,11	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2	Kegiatan Penyehatan lingkungan di wilayah kerja Puseksmas	1 tahun	2.290.000,00	100,00	2.290.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	Kegiatan Penyehatan lingkungan di wilayah kerja Puseksmas	1 tahun	3.888.500,00	100,00	3.888.500,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat	Terlaksananya Forkohat Kota Bontang	1 Tahun	25.950.000,00	100,00	25.950.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyehatan Lingkungan Permukiman (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Penyehatan Lingkungan Permukiman	15 kelurahan	41.340.000,00	100,00	41.340.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
11	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR			615.616.090,00	93,91	584.551.740,00	94,95	
	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Jumlah lokasi penyemprotan/fogging	15 kelurahan	165.660.000,00	98,76	163.593.500,00	98,75	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kegiatan Pelayanan Penyakit Menular (TB)	1 Tahun	6.756.090,00	100,00	6.756.090,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Imunisasi	Pelaksanaan Imunisasi	15 Kelurahan	59.850.000,00	85,59	54.254.800,00	90,65	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1	Kegiatan Pengendalian Penyakit di wilayah kerja Puskesmas	1 Tahun	12.380.000,00	100,00	12.380.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari	Kegiatan Pengendalian Penyakit di wilayah kerja Puskesmas	1 Tahun	1.460.000,00	100,00	1.460.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 2	Kegiatan Pengendalian Penyakit di wilayah kerja Puskesmas	1 Tahun	6.550.000,00		6.550.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	15 kelurahan	252.770.000,00	97,43	244.781.500,00	96,84	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	15 Kelurahan	110.190.000,00	75,56	94.775.850,00	86,01	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
12	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA			30.028.908.205,00	92,30	21.588.685.536,00	71,89	
	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Halaman Puskesmas Bontang Lestari	1 Lokasi	229.837.500,00	100,00	229.331.000,00	99,78	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan	13 Jenis	350.000.000,00	100,00	325.380.000,00	92,97	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah paket belanja	7 Paket	94.486.000,00	100,00	65.402.686,00	69,22	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2	Jumlah paket belanja	10 paket	124.915.356,00	100,00	103.818.661,00	83,11	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari	Jumlah paket belanja	10 paket	320.788.942,00	98,99	312.499.368,00	97,42	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1	Jumlah paket belanja	13 paket	138.452.386,00	100,00	114.028.808,00	82,36	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 2	Jumlah paket belanja	13 paket	219.542.753,00	74,80	212.399.812,00	96,75	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat	Jumlah paket belanja	13 paket	144.262.698,00	100,00	128.633.885,00	89,17	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Puskesmas 24 Jam Bontang Utara 2 (Bantuan Keuangan Provinsi)	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas 24 Jam PONED BU 2	1 Tahun	2.820.000,00	100,00	2.820.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS	Dukungan operasional klinik	12 bulan	1.852.615.134,00	66,21	1.098.487.646,00	59,29	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 1	Tersedianya jasa pelayanan kesehatan bagi petugas dan tersedianya operasional pelayanan kesehatan dasar	12 bulan	2.236.286.180,00	69,85	909.326.130,00	40,66	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 2	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan	12 bulan	1.579.634.361,00	99,56	790.490.632,00	50,04	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Lestari	Jasa Pelayanan	12 bulan	440.122.840,00	66,89	225.415.724,00	51,22	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 1	Dukungan operasional	12 bulan	2.820.660.948,00	85,29	855.146.070,00	30,32	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 2	Dukungan operasional	12 bulan	1.385.395.200,00	97,77	624.529.314,00	45,08	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Barat	Jasa pelayanan	12 bulan	1.549.587.912,00	65,41	715.465.813,00	46,17	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas	1 kegiatan	9.730.000.000,00	90,41	8.297.281.000,00	85,28	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Puskesmas Keliling (DAK Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar)	Tersedianya mobil pusling	3 unit	1.052.160.000,00	100,00	1.052.160.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas	1 paket	1.220.000.000,00	100,00	991.680.882,00	81,29	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Sarana Penunjang Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	Penyediaan Sarana Penunjang Puskesmas	1 paket	1.050.000.000,00	100,00	1.047.593.250,00	99,77	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	1 paket	200.000.000,00	100,00	199.454.860,00	99,73	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar)	Terbangunnya puskesmas BS1, Bonles, BB dan BU 1	4 gedung	1.286.194.040,00	100,00	1.286.194.040,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Sarana Penunjang Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar)	Terbangunnya IPAL Puskesmas BU 1	1 unit	257.660.000,00	100,00	257.660.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar)	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas	1 paket	1.743.485.955,00	100,00	1.743.485.955,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
13	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN			264.932.500,00	93,90	234.455.919,00	88,50	
	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung	Pelayanan Penyakit Jantung	1 Tahun	73.500.000,00	88,10	70.781.500,00	96,30	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS	1 tahun	110.147.500,00	100,00	87.972.500,00	79,87	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker	Pelayanan Penyakit Kanker	1 tahun	73.110.000,00	87,49	67.526.919,00	92,36	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC	Pelayanan Penyakit TBC	1 tahun	8.175.000,00	100,00	8.175.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA			3.325.000,00	100,00	3.325.000,00	100,00	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak balita	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Anak Balita	1 Tahun	3.325.000,00	100,00	3.325.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
15	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK			239.554.301,00	100,00	226.534.061,00	94,56	
	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi	Manual Rujukan Ibu Hamil	1 Tahun	40.526.751,00	100,00	40.526.751,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1	Terlaksananya Pemutakhiran Data Kohort KIA, KB, DDTKA	1 Tahun	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya pelacakan bayi. Balita kunjungan rendah Kegiatan KIA	1 Tahun	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya pembinaan dukun terlatih Kegiatan KIA	1 Tahun	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Kegiatan KIA di PUSkesmas	1 Tahun	1.967.500,00	100,00	1.967.500,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)	Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita	3 kecamatan	194.940.050,00	100,00	181.919.810,00	93,32	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
16	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN			93.261.300,00	100,00	76.030.884,00	81,52	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Regulasi Kesehatan	Penyusunan Draft Perda/Perwali	2 draft	71.550.000,00	100,00	54.319.584,00	75,92	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Dukungan Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	Operasional Kegiatan DAK	1 Tahun	21.711.300,00	100,00	21.711.300,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
17	PROGRAM PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN, WABAH DAN BENCANA			11.950.000,00	100,00	11.150.000,00	93,31	
	Pelayanan Penanggulangan Wabah	Kegiatan Penanggulangan Wabah	1 Tahun	6.950.000,00	100,00	6.150.000,00	88,49	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jasa pelayanan kesehatan Tim TRC penanggulangan krisis kesehatan	1 Tahun	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)			421.682.205,00	99,24	420.456.750,00	99,71	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda	1 paket	265.068.210,00	100,00	265.068.210,00	100,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Dana Operasional Labkesda	Biaya Operasional Labkesda	1 Tahun	156.613.995,00	98,47	155.388.540,00	99,22	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			4.568.910.000,00	98,07	4.088.681.838,00	89,49	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telpon, Internet, Air, Listrik	1 tahun	3.399.600.000,00	100,00	3.008.094.616,00	88,48	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasionalUnit	59.310.000,00	100,00	50.404.800,00	84,99	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan yang disediakanJenis	100.000.000,00	100,00	95.059.711,00	95,06	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan TamuKotak	65.000.000,00	100,00	64.025.000,00	98,50	Rumah Sakit Umum Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan0 Kali	200.000.000,00	97,70	195.397.711,00	97,70	Rumah Sakit Umum Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Orang	745.000.000,00	90,70	675.700.000,00	90,70	Rumah Sakit Umum Daerah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			2.712.025.046,00	100,00	2.317.984.095,00	85,47	
	Pembuatan Taman Perkantoran	jumlah taman yang di bangun	1 taman	75.000.000,00	100,00	55.207.900,00	73,61	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	484.066.000,00	100,00	477.831.127,00	98,71	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara Unit	811.917.500,00	100,00	810.358.022,00	99,81	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara Jenis	311.310.946,00	100,00	311.310.946,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara Jenis	1.029.730.600,00	100,00	663.276.100,00	64,41	Rumah Sakit Umum Daerah
3	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			51.000.000,00	100,00	50.860.205,00	99,73	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran yang diikuti Kali	51.000.000,00	100,00	50.860.205,00	99,73	Rumah Sakit Umum Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			14.305.500,00	100,00	14.305.500,00	100,00	
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah media promosi	1 media	14.305.500,00	100,00	14.305.500,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
5	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA			10.496.498.050,00	99,91	10.385.669.438,00	98,94	
	Pengadaan Linen Rumah Sakit Umum Daerah	Jumlah jenis linen yang disediakan Jenis	136.087.050,00	100,00	136.087.050,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pembangunan Tempat Parkir Rumah Sakit	Jumlah tempat parkir yang dibangun	1 lokasi	75.000.000,00	100,00	74.040.069,00	98,72	Rumah Sakit Umum Daerah
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Sarana Pelayanan Rujukan)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan Unit	10.285.411.000,00	99,73	10.175.542.319,00	98,93	Rumah Sakit Umum Daerah
6	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA			170.360.500,00	100,00	170.360.500,00	100,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan yang dipelihara unit	170.360.500,00	100,00	170.360.500,00	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
7	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD			67.752.736.215,00	97,78	59.192.782.785,00	87,37	
	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD	Penyediaan dana BLUD	12 bulan	67.752.736.215,00	97,78	59.192.782.785,00	87,37	Rumah Sakit Umum Daerah
URUSAN KESEHATAN				160.210.946.763,00	97,80	140.859.396.061,00	87,92	

1.03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Fisik (%)	Realisasi		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran		1.603.675.902,00	100,00	1.309.075.173,00	81,63	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	PLN, PDAM, Listrik dan internet	394.624.670,00	100,00	249.903.101,00	63,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya mobiltas dalam menunjang kegiatan dinas	KIR 6 unit & STNK 57 Unit	44.980.700,00	100,00	17.386.866,00	38,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya bahan kerja dalam menunjang kegiatan	1 pkt	51.080.000,00	100,00	50.234.000,00	98,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan kerja dalam menunjang kegiatan	1 thn	47.981.000,00	100,00	43.281.000,00	90,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan Instalasi Listrik	1 kgtn	8.265.000,00	100,00	8.265.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan Tamu	1 thn	25.000.000,00	100,00	12.822.000,00	51,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya kinerja Pegawai	Dinas dalam daerah 33 kali, dinas luar daerah 26 kali	442.546.000,00	100,00	350.984.674,00	79,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Adm. Perkantoran	30 Non PNS	589.198.532,00	100,00	576.198.532,00	97,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		387.876.500,00	100,00	386.062.400,00	99,53	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	1 kgtn	20.820.000,00	100,00	20.820.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan mobilitas dalam menunjang kegiatan dinas	17 unit , 13 unit	280.051.500,00	100,00	278.237.400,00	99,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang terlaksana	1 Keg Bayar Utang TA. 2016	70.670.000,00	100,00	70.670.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana	1 Kegiatan	16.335.000,00	100,00	16.335.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kinerja Aparatur PNS		2.782.511.250,00	100,00	1.325.107.291,00	47,62	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur	1 thn	2.782.511.250,00	100,00	1.325.107.291,00	47,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Masyarakat Lebih memahami tentang Pembangunan Infrastruktur Kota Bontang		72.940.000,00	100,00	70.300.000,00	96,38	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terpublikasinya informasi pembangunan	1 kgtn	51.000.000,00	100,00	50.900.000,00	99,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Terpublikasinya informasi pembangunan	1 kgtn	21.940.000,00	100,00	19.400.000,00	88,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatnya proporsi panjang jalan dalam kondisi baik		31.962.646.900,00	84,31	28.584.388.250,00	89,43	
	Pembangunan Jalan Abdi Negara Teluk Kadere (DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)	Jalan Abdi Negara Teluk Kadere yang terbangun	1.050 m	7.482.748.000,00	100,00	7.412.811.500,00	99,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Jembatan Kelurahan Gunung Telihan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jembatan Kelurahan Gunung Telihan yang terbangun	1 unit	8.000.000.000,00	74,44	4.737.157.850,00	59,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	DED Pembangunan Jalan SP Bhayangkara - Jalan Ir. Simon Tampubolon	Dokumen DED Pembangunan Jalan SP Bhayangkara - Jalan Ir. Simon Tampubolon	1 dok	517.902.000,00	100,00	517.902.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DED Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang	Dokumen DED Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Bontang	1 dok	319.994.000,00	100,00	319.994.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Review DED dan AMDAL Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang	Dokumen Review DED dan AMDAL Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang	1 dok	1.431.020.500,00	100,00	1.431.020.500,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan Karya Bakti (Tambah DAK Jalan/Jembatan)	Jalan Karya Bakti yang ditingkatkan	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	5.374.912.000,00	100,00	5.374.912.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo (Tambah DAK Jalan/Jembatan)	Jalan Urip Soemoharjo yang ditingkatkan	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	8.786.070.400,00	100,00	8.786.070.400,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Menuju Taman Wisata Mangrove BSD	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Menuju Taman Wisata Mangrove BSD	1 dok	50.000.000,00	0,00	4.520.000,00	9,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Meningkatnya Kondisi Saluran Dalam Kondisi Baik		2.498.232.600,00	86,40	2.220.234.600,00	88,87	
	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	357 m	386.626.600,00	64,00	386.626.600,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	1 dok	42.196.000,00	100,00	42.196.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah	Panjang saluran drainase yang dibangun	6443 m	1.000.000.000,00	100,00	770.940.000,00	77,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	DED Pembangunan Drainase Kelurahan Tanjung Laut Indah	Dokumen DED Pembangunan Drainase Kelurahan Tanjung Laut Indah	1 dok	181.208.000,00	100,00	181.208.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Saluran Drainase di RT. 19 dan RT. 20, Kelurahan Telihan	Panjang saluran drainase yang dibangun	138,82 m	679.602.000,00	100,00	679.602.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Normalisasi Saluran Drainase RT. 27 Kelurahan Telihan	Panjang saluran drainase yang dinormalisasi	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembuatan Parit Induk + Penutup Parit gg Damai RT. 25 Kelurahan Bontang Baru	Panjang saluran drainase yang dibangun	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembuatan Saluran Induk RT. 12 Kelurahan Api-Api	Panjang saluran drainase yang dibangun	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Revitalisasi Parit Jalan Habibon RT. 32 Kel. Tanjung Laut	Panjang saluran drainase yang direvitalisasi	25 m	175.000.000,00	100,00	153.062.000,00	87,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Normalisasi Saluran Drainase Jalan KS. Tubun Kel. Api - Api	Panjang saluran drainase yang dinormalisasi	1 dok	27.000.000,00	0,00	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Berkurangnya wilayah Aliran Sungai Rawan Longsor		22.207.474.000,00	99,75	20.671.682.500,00	93,08	
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai	Panjang turap sungai terbangun	30 m	395.074.000,00	100,00	395.074.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan	Panjang turap sungai terbangun	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	1.600.000,00	100,00	1.600.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Satimpo	Panjang turap sungai terbangun	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang di Belakang Puskesmas Kanaan Kelurahan Kanaan	Panjang turap sungai terbangun	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang di Jl. Belibis Munuju Jl. Simon Tampubolon Kelurahan Kanaan	Panjang turap sungai terbangun	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penurapan Sungai Bontang Dari Jembatan Brokoli sampai Jl. Simon Tampubolon Kelurahan Api-Api	Panjang turap sungai terbangun	1 Paket (bayar Hutang ta. 2016)	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penanganan Longsor Jalan Lingkar Komplek Pemerintah Kota Bontang	Titik longsor Jalan Lingkar Komplek Pemkot Bontang yang tertangani	1 titik	5.780.000.000,00	100,00	5.773.272.000,00	99,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang Di Segmen 1 (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang turap sungai terbangun	120 m	8.000.000.000,00	95,00	7.201.197.000,00	90,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang Di Segmen 2 (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang turap sungai terbangun	380 m	4.000.000.000,00	100,00	3.293.674.500,00	82,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang Di Kelurahan Gunung Telihan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang turap sungai terbangun	380 m	4.000.000.000,00	100,00	3.976.065.000,00	99,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Turap Jalan Mangga RT. 25	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Turap Jalan Mangga RT. 25	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembuatan Siring Sungai dan Semenisasi Bahu Jalan RT. 15 Kel. Api-Api	Dokumen Perencanaan Teknis Pembuatan Siring Sungai dan Semenisasi Bahu Jalan RT. 15 Kel. Api-Api	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penurapan Sungai Bontang di RT. 5, 8, dan 29 Kelurahan Api-api	Dokumen Perencanaan Teknis Penurapan Sungai Bontang di RT. 5, 8, dan 29 Kelurahan Api-api	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang di RT. 8, 22, 28, 29 dan 35 Kelurahan Api-api	Dokumen Perencanaan Teknis Penurapan Sungai Bontang di RT. 8, 22, 28, 29 dan 35 Kelurahan Api-api	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang di RT. 11, 13, 23 dan 24 Kelurahan Api-Api	Dokumen Perencanaan Teknis Penurapan Sungai Bontang di RT. 11, 13, 23 dan 24 Kelurahan Api-Api	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai Bontang di RT. 14 dan 34 Kelurahan Api-api	Dokumen Perencanaan Teknis Penurapan Sungai Bontang di RT. 14 dan 34 Kelurahan Api-api	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai RT. 21 Belakang HOP 1 Kel. Satimpo	Dokumen Perencanaan Teknis Penurapan Sungai RT. 21 Belakang HOP 1 Kel. Satimpo	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai RT. 21 Belakang Masjid Al Falah Kel. Satimpo	Dokumen Perencanaan Teknis Penurapan Sungai RT. 21 Belakang Masjid Al Falah Kel. Satimpo	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penurapan Sungai RT. 21 Dekat Jembatan Kelurahan Satimpo	Dokumen Perencanaan Teknis Penurapan Sungai RT. 21 Dekat Jembatan Kelurahan Satimpo	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penurapan Sungai RT. 21 Pisangan Kel. Satimpo	Dokumen Perencanaan Teknis Penurapan Sungai RT. 21 Pisangan Kel. Satimpo	1 dok	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik		9.466.427.750,00	100,00	9.045.576.750,00	95,55	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara	Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara yang direhabilitasi	11 pkt	2.318.233.500,00	100,00	2.226.677.000,00	96,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan	Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan yang direhabilitasi	12 pkt	5.216.539.500,00	100,00	5.041.668.000,00	96,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat	Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat yang direhabilitasi	1 pkt	1.909.171.750,00	100,00	1.754.748.750,00	91,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Soekarno - Hatta	Panjang Jalan Soekarno - Hatta yang direhabilitasi	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	12.436.500,00	100,00	12.436.500,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan M. Roem	Panjang Jalan M.Roem yang direhabilitasi	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	10.046.500,00	100,00	10.046.500,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Irigasi		2.612.403.000,00	86,50	2.327.840.000,00	89,11	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Jaringan Irigasi Nyerakat Kiri (DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Pendukung Kedaulatan Pangan)	Panjang Jaringan irigasi Nyerakat Kiri yang terbangun	3367 m	2.512.403.000,00	73,00	2.259.176.000,00	89,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pendampingan Kegiatan DAK Peningkatan Jaringan Irigasi Nyerakat Kiri	Panjang Jaringan irigasi Nyerakat Kiri yang terbangun	3367 m	100.000.000,00	100,00	68.664.000,00	68,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Berkurangnya daerah luasan banjir		757.682.000,00	100,00	751.829.000,00	99,23	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara	Panjang saluran drainase/sungai di Kecamatan Bontang Utara yang direhabilitasi/dinormalisasi	345 m	244.221.000,00	100,00	244.221.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	1 dok	48.700.000,00	100,00	48.526.000,00	99,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat	Panjang saluran drainase/sungai di Kecamatan Bontang Barat yang direhabilitasi/dinormalisasi	450 m	464.761.000,00	100,00	459.082.000,00	98,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KECIPTAKARYAAN	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Keciptakaryaan		3.295.252.000,00	100,00	3.266.546.000,00	99,13	
	Pemeliharaan Kegiatan Keciptakaryaan	Terlaksananya Pemeliharaan Kegiatan Keciptakaryaan	15 pkt	3.295.252.000,00	100,00	3.266.546.000,00	99,13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Pemutakhiran data/informasi		175.159.000,00	100,00	169.555.000,00	96,80	
	Program Pengembangan Data / Informasi (Sistem Evaluasi dan Monitoring Organisasi Perangkat Daerah) (SIE MONTOP DAH)	Sistem Evaluasi dan Monitoring Organisasi Perangkat Daerah (SIE MONTOP DAH)	1 program data informasi	175.159.000,00	100,00	169.555.000,00	96,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya sarana dan prasarana pemerintah yang layak		11.841.880.400,00	100,00	11.444.704.317,00	96,65	
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bontang Baru	Terbangunnya Kantor Kelurahan Bontang Baru	572 m2	3.297.478.400,00	100,00	3.251.942.317,00	98,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Kantor Kelurahan Guntung	Terbangunnya Kantor Kelurahan Guntung	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	1.664.102.000,00	100,00	1.664.102.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terbangunnya Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah	498 m2	3.973.970.800,00	100,00	3.834.196.800,00	96,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kanaan	Terbangunnya Kantor Kelurahan Kanaan	911 m2	2.906.329.200,00	100,00	2.694.463.200,00	92,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah yang Representatif		10.788.558.400,00	88,88	10.323.016.400,00	95,68	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Revitalisasi POLRES Kota Bontang	Bangunan POLRES yang direvitalisasi	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	1.308.732.100,00	100,00	1.308.732.100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pemerintah Daerah Kota Bontang	Prasarana dan sarana pemerintah daerah yang dipelihara	10 pkt	2.574.292.000,00	100,00	2.539.386.000,00	98,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Kantor KPU Bontang	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor KPU Bontang	1 dok	50.000.000,00	100,00	49.617.000,00	99,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah	Prasarana dan sarana pemerintah daerah yang dibangun	7 pkt	1.402.856.000,00	100,00	1.391.277.000,00	99,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah (Lanjutan)	Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah yang direhabilitasi	893 m2	2.625.561.900,00	100,00	2.535.517.900,00	96,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Musholla At-Taqwa Kelurahan Api-Api	Musholla At-Taqwa Kelurahan Api-Api yang direhabilitasi	100 m2	150.000.000,00	100,00	147.348.000,00	98,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Barak Bujang Kejaksaan Negeri Kota Bontang	Bangunan Barak Bujang Kejaksaan Negeri Kota Bontang yang dibangun	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	532.626.400,00	100,00	532.626.400,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Masjid Nurul Hikmah	Masjid Nurul Hikmah yang dibangun	1 unit	150.000.000,00	100,00	116.536.000,00	77,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Mushola Kejaksaan Negeri Bontang	Mushola Kejaksaan Negeri Bontang yang direhabilitasi	21 m2	200.000.000,00	100,00	193.690.000,00	96,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Masjid Baitul Muttaqin RT. 20 Gn. Elai (Lanjutan)	Masjid Baitul Muttaqin RT. 20 Gn. Elai yang dibangun	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	463.450.000,00	100,00	463.450.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Masjid Terapung Selambai Kelurahan Loktuan	1 dok	200.000.000,00	0,00	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga POLRES Bontang	Dokumen Perencanaan Teknis Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga POLRES Bontang	1 dok	50.000.000,00	100,00	7.750.000,00	15,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Pagar Kejaksaan Negeri Bontang	Pagar Kejaksaan Negeri Bontang yang direhabilitasi	100 m	200.000.000,00	39,00	198.213.000,00	99,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Masjid Nurul Huda	Masjid Nurul Huda yang direhabilitasi	100 m2	150.000.000,00	83,00	130.326.000,00	86,88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan/Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Peribadatan	Sarana peribadatan yang dibangun/ direhabilitasi	9 paket	560.880.000,00	100,00	539.326.000,00	96,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Sarana Pendukung Pelayanan Gedung Kejaksaan	Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sarana Pendukung Pelayanan Gedung Kejaksaan	3 dok	170.160.000,00	100,00	169.221.000,00	99,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik		18.401.939.250,00	100,00	17.298.185.673,00	94,00	
	Penanganan Longsoran Jl. Soekarno-Hatta Bontang Lestari	Dokumen Perencanaan Teknis Penanganan Longsoran Jl. Soekarno-Hatta Bontang Lestari	2 dok	323.016.000,00	100,00	320.643.000,00	99,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan Kenangan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Jalan Kenangan yang ditingkatkan	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	15.282.250,00	100,00	15.282.250,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan Pontianak (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Jalan Pontianak yang ditingkatkan	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	15.479.000,00	100,00	15.479.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Turap Jalan Brokoli (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Turap Jalan Brokoli yang dibangun	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	15.514.000,00	100,00	15.514.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo (DAK Bidang Infrastruktur Publik)	Panjang Jalan Urip Soemoharjo yang ditingkatkan	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	13.080.000,00	100,00	13.080.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari (DAK Bidang Infrastruktur Publik)	Panjang Jalan M.Roem yang direhabilitasi	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	13.080.000,00	100,00	13.080.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bontang Lestari (DAK Bidang Infrastruktur Publik)	Panjang Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Bontang Lestari yang direhabilitasi	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	10.440.000,00	100,00	10.440.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo (DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)	Panjang Jalan Urip Soemoharjo yang ditingkatkan	800 m	8.806.992.000,00	100,00	8.402.762.400,00	95,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan M. Roem (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Jalan M.Roem yang ditingkatkan	2300 m	5.000.000.000,00	100,00	4.568.047.073,00	91,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan Satya Lencana 1 (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Jalan Satya Lencana 1 yang ditingkatkan	595 m	4.000.000.000,00	100,00	3.738.019.450,00	93,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan BSD	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan BSD	1 dok	50.000.000,00	100,00	48.950.500,00	97,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Habibon	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Habibon	1 dok	50.000.000,00	100,00	48.874.000,00	97,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan KS. Tubun	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan KS. Tubun	1 dok	50.000.000,00	100,00	48.958.000,00	97,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan Arief Rahman Hakim RT. 41 (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Jalan Arief Rahman Hakim RT. 41 yang ditingkatkan	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	15.017.000,00	100,00	15.017.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan RT. 15 Lok Tunggul (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Jalan RT. 15 Lok Tunggul yang ditingkatkan	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	12.213.000,00	100,00	12.213.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan Salantuko RT. 14 (Bantuan Keuangan Provinsi)	Panjang Jalan Salantuko RT. 14 yang ditingkatkan	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	11.826.000,00	100,00	11.826.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman		50.424.369.485,00	100,00	50.357.432.485,00	99,87	
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala	Infrastruktur permukiman Kelurahan Bontang Kuala yang dibangun	4 pkt	627.984.000,00	100,00	627.984.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Loktuan yang dibangun	4 pkt	630.640.000,00	100,00	630.640.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Berbas Tengah yang dibangun	5 pkt	659.608.000,00	100,00	659.608.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Bontang Lestari yang dibangun	4 pkt	631.948.000,00	100,00	631.948.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Kanaan yang dibangun	4 pkt	634.067.000,00	100,00	634.067.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Infrastruktur Permukiman Kelurahan Gunung Telihan yang dibangun	4 pkt	688.126.000,00	100,00	634.126.000,00	92,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Berbas Pantai	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Berbas Pantai yang dibangun	1 pkt	200.000.000,00	100,00	187.063.000,00	93,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Kota Bontang	Prasarana dan Sarana Dasar Kota Bontang yang dibangun	220 pkt	46.351.996.485,00	100,00	46.351.996.485,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tertatanya kawasan yang sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan ketaatan terhadap kesesuaian tata ruang Kota Bontang		21.000.000,00	100,00	5.836.000,00	27,79	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verifikasi Permohonan Site Plan Kawasan Non Perumahan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	Dokumen laporan hasil Verifikasi Permohonan Site Plan Kawasan Non Perumahan dan Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bontang	1 dok	21.000.000,00	100,00	5.836.000,00	27,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN			50.812.000,00	100,00	28.747.000,00	56,58	
	Pembangunan Jalan di Perumahan Pemkot Bontang	Dokumen Perencanaan teknis Pembangunan Jalan di Perumahan Pemkot Bontang	1 dok	50.812.000,00	100,00	28.747.000,00	56,58	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	
	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan HSPK	Tersedianya laporan HSPK PU tahun 2017	1 dok	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman		3.620.927.800,00	100,00	3.340.403.000,00	92,25	
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	1 dok	56.860.000,00	100,00	54.374.000,00	95,63	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	1 dok	49.820.000,00	100,00	43.869.000,00	88,05	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Dokumen Perencanaan Teknis dan Infrastruktur Permukiman Kelurahan Loktuan yang dibangun	9 paket	822.033.000,00	100,00	741.427.000,00	90,19	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	1 dok	28.960.000,00	100,00	26.550.000,00	91,68	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah	1 dok	28.960.000,00	100,00	26.615.000,00	91,90	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	1 dok	59.060.000,00	100,00	54.388.000,00	92,09	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	2 dok	120.080.000,00	100,00	105.678.000,00	88,01	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	2 dok	95.220.000,00	100,00	92.323.000,00	96,96	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	3 dok	168.790.800,00	100,00	158.990.000,00	94,19	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api	2 dok	97.240.000,00	100,00	78.875.000,00	81,11	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung	2 dok	90.340.000,00	100,00	78.453.000,00	86,84	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan	Dokumen Perencanaan Teknis dan Infrastruktur Permukiman Kelurahan Loktuan yang dibangun	3 paket	309.635.000,00	100,00	291.886.000,00	94,27	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai	1 dok	28.960.000,00	100,00	26.561.000,00	91,72	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai	2 dok	126.265.000,00	100,00	110.062.000,00	87,17	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari	2 dok	107.840.000,00	100,00	89.660.000,00	83,14	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah	1 dok	53.680.000,00	100,00	44.414.000,00	82,74	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing	1 dok	53.680.000,00	100,00	44.263.000,00	82,46	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan	1 dok	28.960.000,00	100,00	28.916.000,00	99,85	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan	1 dok	28.960.000,00	100,00	26.676.000,00	92,11	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Badan Jalan dan Parit Gang Ampana RT. 16 Kelurahan Bontang Kuala (Bantuan Keuangan Provinsi)	Badan Jalan dan Parit Gang Ampana RT. 16 Kelurahan Bontang Kuala yang dibangun	83 m	200.000.000,00	100,00	199.403.000,00	99,70	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembuatan Parit Jalan Brokoli RT. 14 Kelurahan Gunung Elai (Bantuan Keuangan Provinsi)	Parit Jalan Brokoli RT. 14 Kelurahan Gunung Elai yang dibangun	213 m	200.000.000,00	100,00	199.279.000,00	99,64	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembuatan Parit Gang Piranha RT. 20 Kel. Tanjung Laut Indah (Bantuan Keuangan Provinsi)	Parit Gang Piranha RT. 20 Kel. Tanjung Laut Indah yang dibangun	102 m	200.000.000,00	100,00	199.327.000,00	99,66	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembuatan Badan Jalan RT. 25 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Badan Jalan RT. 25 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan yang dibangun	142 m	200.000.000,00	100,00	199.068.000,00	99,53	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Perumahan HOP Kel. Satimpo, Kel. Gunung Elai, Kel. Kanaan, Kel. Gunung Telihan	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Perumahan HOP Kel. Satimpo, Kel. Gunung Elai, Kel. Kanaan, Kel. Gunung Telihan	1 dok	175.356.000,00	100,00	156.827.000,00	89,43	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kota Bontang	Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kota Bontang	1 dok	229.288.000,00	100,00	208.469.000,00	90,92	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Perumahan Griya Wisata Kelurahan Bontang Kuala	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Perumahan Griya Wisata Kelurahan Bontang Kuala	1 dok	60.940.000,00	100,00	54.050.000,00	88,69	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				172.972.768.237,00	97,29	162.927.521.839,00	94,19	

1.04. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			879.073.000,00	81,20	785.726.538,00	89,38	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, listrik kantor, air dan internet	12 bulan	77.364.000,00	27,39	16.447.209,00	21,26	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	42 unit	27.600.000,00	61,96	7.289.300,00	26,41	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 paket	61.320.000,00	97,85	59.230.000,00	96,59	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	1 tahun	25.000.000,00	100,00	24.975.000,00	99,90	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 tahun	444.239.000,00	100,00	443.185.029,00	99,76	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi teknis perkantoran	10 orang	243.550.000,00	100,00	234.600.000,00	96,33	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			61.219.200,00	100,00	61.014.250,00	99,67	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14 unit	61.219.200,00	100,00	61.014.250,00	99,67	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			1.435.287.783,00	100,00	697.622.237,00	48,61	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	1 tahun	1.435.287.783,00	100,00	697.622.237,00	48,61	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			51.000.000,00	100,00	50.210.000,00	98,45	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	tersedianya Informasi tentang pelayanan publik	1 kali	51.000.000,00	100,00	50.210.000,00	98,45	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			587.750.000,00	85,07	475.328.000,00	80,87	
	Kajian Naskah Akademik Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bontang	Tersusunnya naskah akademik Raperda perumahan dan kawasan permukiman	1 dok	587.750.000,00	85,07	475.328.000,00	80,87	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN			1.546.563.000,00	60,42	1.182.780.718,00	76,48	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Sarana dan prasarana Rusunawa	1 paket	919.936.000,00	94,43	872.380.000,00	94,83	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Rumah Khusus Kota Bontang	Terbangunnya jaringan SUTR	1 paket	244.108.000,00	0,00	-	0,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kota Program KOTAKU	Terfasilitasinya program kegiatan KOTAKU	1 paket	382.519.000,00	86,84	310.400.718,00	81,15	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN			200.000.000,00	96,94	193.088.300,00	96,54	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penimbunan Lahan Kuburan Baru Loktuan	Terpeliharanya areal pemakaman	1 paket	200.000.000,00	96,94	193.088.300,00	96,54	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.588.783.800,00	99,61	1.538.784.061,00	96,85	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1 Tahun	131.880.000,00	100,00	110.977.262,00	84,15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Seluruh Kendaraan tidak mengalami kendala perizinan KIR dan STNK	1 Tahun	20.400.000,00	98,04	15.312.300,00	75,06	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang sehat	1 tahun	38.582.000,00	100,00	37.950.000,00	98,36	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan alat Tulis Kantor selama setahun	64 Jenis	73.250.800,00	100,00	71.719.450,00	97,91	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	21.625.000,00	100,00	21.242.160,00	98,23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	25 Unit	124.000.000,00	100,00	122.331.000,00	98,65	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan tertentu	1 Paket	30.000.000,00	100,00	29.915.600,00	99,72	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Mewujudkan Peningkatan Kinerja PMK	12 Bulan	394.104.000,00	100,00	393.356.769,00	99,81	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan tenaga teknis	12 Bulan	754.942.000,00	98,42	735.979.520,00	97,49	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			405.290.000,00	100,00	380.128.218,00	93,79	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya sarana mobilitas berkondisi baik	12 Bulan	379.490.000,00	100,00	354.328.918,00	93,37	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Paket	25.800.000,00	100,00	25.799.300,00	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			942.420.000,00	100,00	780.011.955,00	82,77	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan Non PNS	144 pasang	114.420.000,00	100,00	113.635.000,00	99,31	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur PNS	12 Bulan	828.000.000,00	100,00	666.376.955,00	80,48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			20.113.361,00	100,00	11.370.000,00	56,53	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	20.113.361,00	100,00	11.370.000,00	56,53	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			51.000.000,00	100,00	50.930.000,00	99,86	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	1 kali	51.000.000,00	100,00	50.930.000,00	99,86	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN			2.152.121.000,00	86,85	1.456.761.900,00	67,69	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran	Tersedianya SDM yang Terampil	28 Orang	233.766.000,00	100,00	233.725.600,00	99,98	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan	3 Kali	45.130.000,00	100,00	44.345.700,00	98,26	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai	6 paket	667.800.000,00	71,55	473.319.100,00	70,88	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Kebakaran dan Penyelamatan	1 Tahun	112.720.000,00	79,20	88.348.500,00	78,38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK	Jumlah Bangunan Gedung yang diperiksa	15 Jenis	18.725.000,00	100,00	18.568.000,00	99,16	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pembinaan Kesiapsiagaan Linmas dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat	672 Stel	673.980.000,00	44,03	200.194.000,00	29,70	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Workshop Pemadam Kebakaran	Tersedianya workshop pemadam kebakaran yang representatif	1 Bangunan	200.000.000,00	100,00	199.373.000,00	99,69	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pengadaan Alat Penyelamatan	Tersedianya alat penyelamatan yang memadai	1 Paket	200.000.000,00	100,00	198.888.000,00	99,44	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN			1.558.373.000,00	100,00	1.558.373.000,00	100,00	
	Pembangunan Rusunawa Kota Bontang	Rusunami dan Rusunawa yang Terbangun	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	1.387.546.000,00	100,00	1.387.546.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembuatan DED Kawasan Kumuh Kota Bontang	Dokumen DED Kawasan Kumuh Kota Bontang	4 dok	170.827.000,00	100,00	170.827.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH			8.656.866.934,00	100,00	8.488.027.424,00	98,05	
	Pembangunan IPAL Kota Bontang	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	1.396.734.000,00	100,00	1.396.734.000,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan IPAL Kota Bontang (DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi)	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	41 SR	1.539.428.000,00	100,00	1.539.203.000,00	99,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bontang (DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum)	Panjang pipa dan jumlah sambungan rumah yang terpasang	1 paket	3.276.848.000,00	100,00	3.113.313.490,00	95,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Konvensional Kap. 25 lt/dt di Kelurahan Loktuan	WTP Konvensional 25 lt/dt yang terbangun	1 unit	2.223.098.384,00	100,00	2.223.098.384,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Bidang Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi)	Panjang pipa dan jumlah sambungan rumah yang terpasang	1 Kegiatan (bayar Hutang ta. 2016)	107.118.550,00	100,00	107.118.550,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perencanaan Teknis Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbas Tengah	Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbas Tengah	1 dok	56.820.000,00	100,00	56.061.000,00	98,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem IPAL Berbas Pantai	Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem IPAL Berbas Pantai	1 dok	56.820.000,00	100,00	52.499.000,00	92,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH			27.206.211,00	100,00	27.206.211,00	100,00	
	Pemeliharaan IPAL Kota Bontang	Belanja listrik	4 bulan	27.206.211,00	100,00	27.206.211,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				20.163.067.289,00	94,38	17.737.362.812,00	87,97	

1.05. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi		OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kinerja		Fisik (%)	Rp.	%	Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.965.085.586,00	98,53	1.795.216.469,00	91,36	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Telepon, Listrik dan Internet Kantor (Bulan)	12 Bulan	42.108.375,00	100,00	38.129.211,00	90,55	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas maupun Operasional (Unit)	24 Unit	20.420.000,00	88,20	11.107.700,00	54,40	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Sesuai dengan Kebutuhan (Jenis)	1 Tahun	5.661.000,00	100,00	5.633.540,00	99,51	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Pekerjaan/Aktifitas Kantor dengan Baik (Unit)	42 Jenis	84.871.350,00	100,00	84.668.875,00	99,76	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu (Tahun)	9 Unit	99.500.000,00	100,00	98.450.000,00	98,94	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kali)	1 Tahun	95.865.000,00	100,00	95.648.850,00	99,77	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Tenaga Teknis / Administrasi Perkantoran	67 Kali	498.066.000,00	100,00	353.484.432,00	70,97	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis / Administrasi Perkantoran	102 Orang	1.118.593.861,00	100,00	1.108.093.861,00	99,06	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		346.755.790,00	97,73	326.350.849,00	94,12	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (Unit)	24 Unit	328.655.790,00	95,45	308.750.849,00	93,94	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Tahun)	1 Tahun	18.100.000,00	100,00	17.600.000,00	97,24	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Pegawai		1.035.000.000,00	100,00	826.028.060,00	79,81	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Orang)	44 Orang	1.035.000.000,00	100,00	826.028.060,00	79,81	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan		51.000.000,00	100,00	50.353.600,00	98,73	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Pameran Pembangunan (Keg)	1 Kegiatan	51.000.000,00	100,00	50.353.600,00	98,73	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
5	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		282.820.000,00	100,00	236.292.640,00	83,55	
	Penyiapan Tenaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pelaksanaan Monitoring Satlinmas guna Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan (Bulan)	12 Bulan	83.200.000,00	100,00	47.509.000,00	57,10	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan PAM Acara Penting/Hari Besar Nasional dengan Baik (%)	100%	29.070.000,00	100,00	21.197.880,00	72,92	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditegakkan guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat (Perda)	6 Perda	170.550.000,00	100,00	167.585.760,00	98,26	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
6	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		170.150.000,00	59,27	79.727.780,00	46,86	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Monitoring Wilayah	Tersedianya data Daerah - Daerah yang Besar Potensi Kriminal dan Pelanggaran Perda di Kota Bontang (Kelurahan)	15 Kelurahan	170.150.000,00	59,27	79.727.780,00	46,86	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
7	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Peningkatan pendidikan politik pada masyarakat		291.820.000,00	93,06	255.538.757,00	87,57	
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Lembaga penyelenggara yang difasilitasi	3 lembaga	127.880.000,00	99,75	114.571.257,00	89,59	Kecamatan Bontang Utara
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya tahapan persiapan pilgub	5 persen	118.820.000,00	93,00	105.480.000,00	88,77	Kecamatan Bontang Selatan
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Terlaksananya tahapan persiapan pilgub	5 persen	45.120.000,00	86,44	35.487.500,00	78,65	Kecamatan Bontang Barat
URUSAN KETENRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.142.631.376,00	93,57	3.569.508.155,00	86,17	

1.06. URUSAN SOSIAL

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		1.352.187.172,00	100,00	1.239.714.394,00	91,68	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan yang dibayar	3 jenis	37.920.000,00	100,00	15.541.320,00	40,98	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perizinannya	9 uni R4, 19 unit R2	31.812.000,00	100,00	9.793.700,00	30,79	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan Tempat Kerja	1 tahun	5.660.000,00	100,00	5.623.750,00	99,36	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	1 tahun	65.263.000,00	100,00	62.382.380,00	95,59	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman	1 tahun	47.500.000,00	100,00	38.474.800,00	81,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	1 tahun	546.768.260,00	100,00	501.834.532,00	91,78	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kerja Non PNS	34 orang	617.263.912,00	100,00	606.063.912,00	98,19	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		135.000.000,00	100,00	132.104.350,00	97,86	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 unit mobil, 1 unit motor	135.000.000,00	100,00	132.104.350,00	97,86	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur		1.730.811.419,00	100,00	836.889.332,00	48,35	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS	100%	1.730.811.419,00	100,00	836.889.332,00	48,35	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat publikasi pembangunan		101.000.000,00	100,00	53.458.900,00	52,93	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Expo dan BCC	2 event	51.000.000,00	100,00	31.678.900,00	62,12	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Advertorial 7	50 publikasi	50.000.000,00	100,00	21.780.000,00	43,56	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA	Terwujudnya masyarakat petani, nelayan, dan pedagang miskin yang mandiri serta SDM Kesos dengan kualitas pendamping sosial yang terampil		495.610.000,00	100,00	463.235.600,00	93,47	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah pendamping KUBE dan TKSK dalam pendampingan 200 KUBE (2.000 KK)	9 pendamping , 3 TKSK	232.650.000,00	100,00	220.850.000,00	94,93	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	Bantuan Yang diserahkan kepada Masyarakat	1 paket	30.000.000,00	100,00	29.480.000,00	98,27	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Sewa dan Operasional Rumah Singgah	Tersedianya operasional dan kebutuhan klien rumah singgah	1 rumah singgah	232.960.000,00	100,00	212.905.600,00	91,39	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat serta tercapainya sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan sosial		745.468.880,00	93,39	651.168.400,00	87,35	
	Penanganan Korban Bencana	Tersedianya bantuan untuk korban bencana	1 tahun	90.500.000,00	100,00	76.037.000,00	84,02	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyaluran Beras Raskin	Tersedianya jasa angkut Raskin/Rasda	1 tahun	20.000.000,00	100,00	18.000.000,00	90,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Tersantuni dan tertibnya administrasi kematian	256 orang	477.800.000,00	100,00	477.800.000,00	100,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Penyediaan Rasda	Tersedianya Rasda bagi PMKS yang tidak menerima Rastra	352	157.168.880,00	73,54	79.331.400,00	50,48	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
7	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL			81.500.000,00	100,00	73.809.551,00	90,56	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	1 tahun	81.500.000,00	100,00	73.809.551,00	90,56	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Optimalnya peran lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial		90.015.000,00	100,00	89.452.592,00	99,38	
	Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	Jumlah veteran/piveri penerima bantuan kebutuhan dasar dan Peringatan Hari Pahlawan	100%	69.500.000,00	100,00	68.937.592,00	99,19	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Fasilitasi Kelembagaan Amil Zakat	Jumlah kegiatan BAZ	1 kegiatan	20.515.000,00	100,00	20.515.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
URUSAN SOSIAL				4.731.592.471,00	99,27	3.539.833.119,00	74,81	

1.07. URUSAN TENAGA KERJA

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi		OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kinerja		Fisik (%)	Rp.	%	Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	perselisihan hubungan industrial (PHI) yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan /perjanjian bersama (PB)		301.162.900,00	99,87	267.368.505,00	88,78	
	Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan	2 Rekomendasi	149.296.600,00	99,98	134.061.005,00	89,80	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Dewan Pengupahan Kota Bontang	Jumlah saran dan pertimbangan	2 saran dan pertimbangan KHL & UMK	151.866.300,00	99,76	133.307.500,00	87,78	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN TENAGA KERJA				301.162.900,00	99,87	267.368.505,00	88,78	

1.08. PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		35.245.000,00	100,00	30.907.154,00	87,69	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Satuan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah peserta terlatih KHA (Konvensi Hak Anak)	35 Orang	35.245.000,00	100,00	30.907.154,00	87,69	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		164.605.000,00	100,00	140.855.256,00	85,57	
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah pendampingan kasus perempuan dan anak korban kekerasan	1 Tahun	164.605.000,00	100,00	140.855.256,00	85,57	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				199.850.000,00	100,00	171.762.410,00	85,95	

1.09. PANGAN

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan		169.945.000,00	100,00	159.077.700,00	93,61	
	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terlaksananya penganekaragaman konsumsi pangan	1 Paket	134.850.000,00	100,00	123.993.200,00	91,95	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Pelaksanaan survey menjelang HBKN dan survey bahan pangan	1 Paket	35.095.000,00	100,00	35.084.500,00	99,97	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PANGAN				169.945.000,00	100,00	159.077.700,00	93,61	

1.10. PERTANAHAN

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN			17.728.719.000,00	34,27	516.200.640,00	2,91	
	Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Terpenuhinya pengadaan lahan untuk kepentingan umum dan pemerintah	1 Paket	8.250.466.000,00	1,19	68.466.000,00	0,83	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Lahan Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Luasan tanah untuk kepentingan publik	9.365 Ha	9.268.023.000,00	3,63	259.334.640,00	2,80	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Inventarisasi Permasalahan Pertanahan	Berkurangnya konflik pertanahan	6 Permasalahan	210.230.000,00	97,99	188.400.000,00	89,62	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
URUSAN PERTANAHAN				17.728.719.000,00	3,61	516.200.640,00	2,91	

1.11. LINGKUNGAN HIDUP

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.159.534.507,00	100,00	1.119.805.083,00	96,57	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon	12 bulan	840.000,00	100,00	541.190,00	64,43	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang diurus kelengkapan suratnya	88 unit	15.848.000,00	100,00	11.512.400,00	72,64	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	1 paket	66.568.192,00	100,00	59.951.400,00	90,06	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 tahun	25.000.000,00	100,00	24.872.650,00	99,49	Dinas Lingkungan Hidup
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	519.300.000,00	100,00	518.849.128,00	99,91	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tercapainya pelayanan prima administrasi perkantoran	1 tahun	531.978.315,00	100,00	504.078.315,00	94,76	Dinas Lingkungan Hidup
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			2.384.964.141,00	100,00	2.348.318.715,00	98,46	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	1 tahun	2.384.964.141,00	100,00	2.348.318.715,00	98,46	Dinas Lingkungan Hidup
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			1.213.892.640,00	100,00	1.108.145.942,00	91,29	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Tercapainya pelayanan prima administrasi perkantoran	1 tahun	1.213.892.640,00	100,00	1.108.145.942,00	91,29	Dinas Lingkungan Hidup
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			51.000.000,00	100,00	50.237.000,00	98,50	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	1 kali	51.000.000,00	100,00	50.237.000,00	98,50	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH			8.974.098.799,00	100,00	8.822.761.206,00	98,31	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kendaraan pengangkut sampah 3 roda	4 unit	345.840.000,00	100,00	345.055.425,00	99,77	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok masyarakat/swadaya/perusahaan yang melakukan pengelolaan sampah mandiri	8 Kelompok	8.381.799.399,00	100,00	8.236.598.181,00	98,27	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Sewa dumptruck untuk kegiatan penimbunan tanah urug (top soil) di area zona aktif TPA sampah	1100 rit	246.459.400,00	100,00	241.107.600,00	97,83	Dinas Lingkungan Hidup
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1.113.979.449,00	97,15	965.110.689,00	86,64	
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Nilai pemantauan Adipura	76	106.477.949,00	91,45	82.280.000,00	77,27	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau air sungai	9 titik pantau	349.200.000,00	100,00	234.058.400,00	67,03	Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan/Momen Tahunan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan hidup	4 keg	658.301.500,00	100,00	648.772.289,00	98,55	Dinas Lingkungan Hidup
7	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			4.406.699.000,00	90,91	4.161.402.047,00	94,43	
	Pemeliharaan RTH	Tersedianya lingkungan perkotaan yang asri dan indah	1 Paket	4.150.759.000,00	99,40	3.951.744.047,00	95,21	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembuatan Taman Median Jalan	Tersedianya luasan median jalan yang ditanami	1 Paket	228.940.000,00	86,90	198.009.000,00	86,49	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan Taman Kawasan Perkantoran	Terselesaikannya perencanaan pembuatan taman	1 paket	27.000.000,00	86,44	11.649.000,00	43,14	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN			5.201.355.000,00	98,45	4.849.611.229,00	93,24	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum	Terpeliharanya lampu penerangan jalan dan lampu taman dengan baik	1 Paket	3.436.765.000,00	98,72	3.142.149.083,00	91,43	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembuatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Terpasangya lampu penerangan jalan dengan baik	1 Paket	1.764.590.000,00	98,18	1.707.462.146,00	96,76	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN			174.530.000,00	100,00	148.791.200,00	85,25	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terpeliharanya areal pemakaman	1 Paket	77.590.000,00	100,00	71.960.600,00	92,74	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terpeliharanya areal pemakaman	1 Paket	96.940.000,00	100,00	76.830.600,00	79,26	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				24.680.053.536	98,50	23.574.183.111	95,52	

1.12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.776.630.435,00	100,00	1.613.294.646,00	90,81	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan belanja jasa kantor	1 Tahun	220.000.000,00	100,00	139.658.609,00	63,48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertibnya administrasi perijinan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	25.000.000,00	100,00	7.337.300,00	29,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan	1 Tahun	98.564.950,00	100,00	82.268.280,00	83,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan yang memadai	1 Tahun	62.500.000,00	100,00	61.481.000,00	98,37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK yang memadai	1 tahun	392.006.229,00	100,00	381.383.685,00	97,29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	20.888.500,00	100,00	20.687.463,00	99,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan serta perlengkapan kantor	1 Tahun	317.648.300,00	100,00	306.853.180,00	96,60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	11 Jenis sembako, 2300 kotak dan 214 ok	22.386.000,00	100,00	21.183.450,00	94,63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Optimalisasi dalam penguatan wawasan, konsultasi teknis, orientasi, koordinasi sinkronisasi dengan tugas SKPD	99 Kali	226.164.000,00	100,00	224.912.223,00	99,45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya kebutuhan tenaga kerja Non PNS	1 tahun	349.472.456,00	100,00	347.872.456,00	99,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang	Indek kepuasan masyarakat	2 Dokumen	42.000.000,00	100,00	19.657.000,00	46,80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	48.324.000,00	100,00	47.393.500,00	98,07	
	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meja dan kursi		27.324.000,00	100,00	27.324.000,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	7 Roda 4 dan 13 roda 2	21.000.000,00	100,00	20.069.500,00	95,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	863.292.544,00	100,00	773.619.963,00	89,61	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS	100%	863.292.544,00	100,00	773.619.963,00	89,61	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100%	13.750.000,00	100,00	13.750.000,00	100,00	
	Penyusunan Renstra SKPD	Renstra DISDUKCAPIL	1 Dokumen	13.750.000,00	100,00	13.750.000,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100,00	51.000.000,00	100,00	49.613.630,00	97,28	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Meningkatnya pemahaman penduduk tentang peraturan kependudukan dan capil	100,00	51.000.000,00	100,00	49.613.630,00	97,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	88%	732.831.000,00	100,00	484.513.682,00	66,12	
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	4 lokasi	101.260.000,00	100,00	97.986.500,00	96,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pelayanan Dokumen Kependudukan	3 kecamatan	159.000.000,00	100,00	14.998.500,00	9,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Penerbitan Dokumen Kependudukan	100%	318.176.000,00	100,00	303.539.482,00	95,40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100%	35.000.000,00	100,00	24.310.000,00	69,46	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan	100%	118.000.000,00	100,00	42.284.200,00	35,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Mobilisasi dan Pendistribusian e-KTP	Distribusi e-KTP	6 kelurahan	1.395.000,00	100,00	1.395.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL				3.485.827.979,00	100,00	2.982.185.421,00	85,55	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT			342.470.000,00	100,00	321.795.676,00	93,96	
	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat PKK)	Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat PKK)	1 Paket	342.470.000,00	100,00	321.795.676,00	93,96	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				342.470.000,00	100,00	321.795.676,00	93,96	

1.14 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Pengendalian Angka Kelahiran		1.196.475.000,00	91,78	906.125.500,00	75,73	
	Pembangunan Balai Penyuluh KKB Tingkat Kecamatan (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Keluarga Berencana)	Pembangunan Balai Penyuluh KKB Tingkat Kecamatan	1 Paket	979.125.000,00	100,00	793.079.000,00	81,00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga (DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB)	Terlaksananya bantuan operasional kesehatan keluarga	1 Tahun	217.350.000,00	83,56	113.046.500,00	52,01	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Meningkatnya pemahaman sdm kader sub ppkbk (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) mengenai program KB		91.000.000,00	100,00	87.233.600,00	95,86	
	Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Alat Kontrasepsi dan Penunjang Pelayanan KB	1 Paket	10.000.000,00	100,00	9.994.600,00	99,95	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Penyediaan Pelayanan KB Mobile	Jumlah Peserta KB yang terlayani	200 orang	32.387.500,00	100,00	30.287.500,00	93,52	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan KB di Daerah Pesisir	Jumlah akseptor KB yang terlayani	60 orang	12.170.000,00	100,00	11.478.000,00	94,31	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Pelayanan Manunggal KB KES	Jumlah Akseptor yang terlayani	275 orang	36.442.500,00	100,00	35.473.500,00	97,34	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai KB		265.375.000,00	100,00	258.164.800,00	97,28	
	Pembinaan IMP KB	Meningkatnya pemahaman sdm kader sub ppkbk (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) mengenai program KB	500 RT dan 15 Kelurahan	265.375.000,00	100,00	258.164.800,00	97,28	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.552.850.000,00	97,26	1.251.523.900,00	80,60	

1.15. URUSAN PERHUBUNGAN

			Target		Realisasi	OPD
--	--	--	--------	--	-----------	-----

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Fisik (%)	Keuangan		Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.466.544.506,00	99,97	1.422.171.915,00	96,97	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan, telepon, air dan listrik	1 tahun	29.000.000,00	100,00	16.596.314,00	57,23	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	35 unit	26.600.000,00	100,00	16.346.600,00	61,45	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Tahun	151.986.045,00	99,81	145.942.140,00	96,02	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun	119.000.000,00	100,00	115.365.020,00	96,95	Dinas Perhubungan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi	1 tahun	360.000.000,00	100,00	353.363.380,00	98,16	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terbayarnya jasa tenaga administrasi	1 tahun	779.958.461,00	100,00	774.558.461,00	99,31	Dinas Perhubungan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		758.130.725,00	100,00	747.470.595,00	98,59	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan beroperasi dengan baik	14 unit 4 unit 18 unit	294.130.725,00	100,00	288.768.175,00	98,18	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pindah gedung ke pelabuhan loktuan	81 unit	464.000.000,00	100,00	458.702.420,00	98,86	Dinas Perhubungan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur		1.404.237.250,00	100,00	929.722.097,00	66,21	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	meningkatkan kinerja aparatur pns	100%	1.404.237.250,00	100,00	929.722.097,00	66,21	Dinas Perhubungan
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		251.000.000,00	100,00	147.733.822,00	58,86	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	berpartisipasi dalam penyelenggaraan Bontang Expo 2017	2 kegiatan	251.000.000,00	100,00	147.733.822,00	58,86	Dinas Perhubungan
5	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan laut		3.591.526.010,00	99,40	924.758.737,00	25,75	
	Revitalisasi Terminal dan Pemeliharaan Traffic Light serta Rambu-Rambu Lalu Lintas	tersedianya pelayanan perhubungan yang prima	1 paket	297.236.010,00	100,00	293.402.085,00	98,71	Dinas Perhubungan
	Pembangunan Sarana Penunjang Terminal Pelabuhan	tertanganinya pelayanan kesehatan penumpang	1 dokumen	293.450.000,00	100,00	291.430.000,00	99,31	Dinas Perhubungan
	Pengecetan Zona Aman Anak Sekolah	berfungsinya Zoss dengan baik	1 unit	200.000.000,00	97,00	199.519.643,00	99,76	Dinas Perhubungan
	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Anak Sekolah	Tercapainya perencanaan pembangunan JPO	100%	50.000.000,00	100,00	49.710.375,00	99,42	Dinas Perhubungan
	Penimbungan Lahan Ex Shet Pile Area Parkir Pelabuhan	terwujudnya kenyamanan pengguna jasa pelabuhan	100%	100.840.000,00	100,00	90.696.634,00	89,94	Dinas Perhubungan
	Ganti Rugi Bangunan Di Area Pelabuhan Loktuan	tersedianya lahan untuk pelabuhan		2.650.000.000,00	0,00	-	0,00	Dinas Perhubungan
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Peningkatan Pelayanan angkutan Darat		200.000.000,00	100,00	194.513.000,00	97,26	
	Pelaksanaan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) & Dukungan Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN), Serta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas	2 kegiatan	200.000.000,00	100,00	194.513.000,00	97,26	Dinas Perhubungan
7	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Presentase pembengunan sarana dan prasarana perhubungan udara Jumlah sarana dan prasarana perhubungan darat jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun		3.233.472.750,00	100,00	3.076.537.350,00	95,15	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perencanaan Pengadaan Lahan Bandara	tersedianya dokumen perencanaan lahan bandara	1 dokumen	233.472.750,00	100,00	230.453.800,00	98,71	Dinas Perhubungan
	Lanjutan Pembangunan Jalan Masuk Bandara Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi)	tersedianya jalan masuk bandara Bontang yang memadai	1 paket	3.000.000.000,00	100,00	2.846.083.550,00	94,87	Dinas Perhubungan
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Prosentase Ketertiban Lalu Lintas		150.000.000,00	100,00	149.610.402,00	99,74	
	Pengecatan Median Jalan	berfungsinya median dengan semestinya	100%	150.000.000,00	100,00	149.610.402,00	99,74	Dinas Perhubungan
9	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS	Persentase lalu lintas yang aman dan terkendali		9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Tertibnya lalu lintas Kota Bontang	1 tahun	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	Dinas Perhubungan
URUSAN PERHUBUNGAN				11.063.911.241,00	75,99	7.601.517.918,00	68,71	

1.16. URUSAN KOMUNIKASI

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.189.861.784,00	99,72	1.157.863.352,00	97,31	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya tertib administrasi kendaraan	1 Tahun	11.150.000,00	100,00	7.167.880,00	64,29	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	12 Bulan	133.616.735,00	100,00	119.433.650,00	89,39	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan peralatan dan perlengkapan kantor	14 Item	281.000.000,00	100,00	276.345.900,00	98,34	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman kantor	12 Bulan	55.000.000,00	100,00	54.978.550,00	99,96	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi / teknis perkantoran	1 Tahun	408.595.049,00	98,29	399.637.372,00	97,81	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi / teknis perkantoran	1 Tahun	300.500.000,00	100,00	300.300.000,00	99,93	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		79.309.105,00	100,00	78.712.200,00	99,25	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	79.309.105,00	100,00	78.712.200,00	99,25	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur		720.000.000,00	95,00	567.181.811,00	78,78	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur	12 Bulan	720.000.000,00	95,00	567.181.811,00	78,78	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		273.480.000,00	100,00	261.950.085,00	95,78	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pembangunan kota bontang	1 Kegiatan	63.480.000,00	100,00	62.402.000,00	98,30	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Meningkatnya kualitas publikasi kegiatan pembangunan	1 Kegiatan	210.000.000,00	100,00	199.548.085,00	95,02	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase interoperabilitas sistem informasi		5.543.263.190,00	97,62	5.063.274.208,00	91,34	
	Penyediaan Jasa Layanan Internet	Nilai pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	1 Paket	2.150.946.440,00	100,00	2.145.742.240,00	99,76	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pelaksanaan e-Procurement	Nilai pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	1 Paket	559.220.000,00	100,00	521.029.900,00	93,17	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang	Nilai pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	1 Paket	228.500.000,00	100,00	221.991.600,00	97,15	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pembangunan Sistem Smart City Kota Bontang	Nilai pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	1 Paket	1.632.246.750,00	100,00	1.537.904.178,00	94,22	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Launching Sistem Smart City Kota Bontang	Nilai pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	1 Paket	322.000.000,00	100,00	227.668.815,00	70,70	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Bimtek e-government	Persentase peserta yang memahami e-Government	100 Orang	50.350.000,00	100,00	14.796.475,00	29,39	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Nilai pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	4 Aplikasi	600.000.000,00	83,33	394.141.000,00	65,69	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
6	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Terpublikasinya informasi melalui mass media		2.062.618.345,00	97,50	1.966.957.107,00	95,36	
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jenis Media	4 media	2.062.618.345,00	97,50	1.966.957.107,00	95,36	Sekretariat Daerah
URUSAN KOMUNIKASI				9.868.532.424,00	98,31	9.095.938.763,00	92,17	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.17. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.896.417.415,00	100,00	2.795.092.479,00	96,50	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, air,telpon dan internet dinas setiap bulan	1 tahun	50.400.000,00	100,00	28.429.566,00	56,41	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	pembayaran stnk * kir kend.dinas operasional	1 tahun	26.900.000,00	100,00	25.588.000,00	95,12	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis	12 Bulan	49.700.000,00	100,00	49.421.900,00	99,44	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan tiap bulan	12 Bulan	128.625.000,00	100,00	128.254.500,00	99,71	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	5.000.000,00	100,00	4.900.800,00	98,02	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	52.975.000,00	100,00	52.840.000,00	99,75	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase jumlah perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS	1 tahun	417.766.400,00	100,00	417.506.698,00	99,94	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jumlah tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	2.165.051.015,00	100,00	2.088.151.015,00	96,45	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			129.730.000,00	100,00	129.061.300,00	99,48	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	42 Kendaraan	89.730.000,00	100,00	89.461.300,00	99,70	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	40.000.000,00	100,00	39.600.000,00	99,00	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			1.294.101.520,00	100,00	1.250.616.161,00	96,64	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Persentase peningkatan kinerja aparatur	12 Bulan	1.294.101.520,00	100,00	1.250.616.161,00	96,64	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			101.000.000,00	100,00	99.785.000,00	98,80	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terpromosinya produk UKM Kota Bontang	1 kali pameran	51.000.000,00	100,00	51.000.000,00	100,00	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Terpublikasinya kegiatan pembangunan bidang indagkop & UKM	40 berita, 5 banner iklan	50.000.000,00	100,00	48.785.000,00	97,57	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
5	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF			271.197.000,00	94,20	197.371.399,00	72,78	
	Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab/Kota Se-Kalimantan Timur	Persentase terlaksananya Rapat Koordinasi	1 kali rakor	88.392.000,00	100,00	79.332.000,00	89,75	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Pendampingan Legalitas Operasional BLUD Dana Bergulir	Laporan Monev & % Progres UPT menjadi BLUD Dana Bergulir	2 laporan & progress 75%	182.805.000,00	88,39	118.039.399,00	64,57	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			125.000.000,00	100,00	124.053.000,00	99,24	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Permodalan bagi UKM dan Koperasi	Jumlah UKM	8 UKM	125.000.000,00	100,00	124.053.000,00	99,24	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				4.817.445.935,00	99,03	4.595.979.339,00	95,40	

1.18. PENANAMAN MODAL

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.382.247.319,00	97,68	1.353.340.169,00	97,91	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Materai dan pengiriman	Materai 6.000 : 350 lembar , materai 3.000 : 100 lembar	2.900.000,00	82,76	2.400.000,00	82,76	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayar rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	53.500.000,00	100,00	50.641.879,00	94,66	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayar pajak kendaraan dinas/operasional	19 unit	18.450.000,00	100,00	18.399.037,00	99,72	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	1 th	80.000.000,00	100,00	79.903.800,00	99,88	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	123.943.000,00	96,35	118.839.300,00	95,88	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit	216.574.000,00	100,00	198.488.900,00	91,65	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi tamu dan peserta rapat	1 tahun	62.700.000,00	100,00	62.690.400,00	99,98	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat dalam pelayanan publik, teknologi informasi dan investasi	19 kali	461.903.000,00	100,00	461.699.534,00	99,96	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi teknis	15 Orang	362.277.319,00	100,00	360.277.319,00	99,45	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		178.459.430,00	100,00	177.446.995,00	99,43	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Perbaikan gedung kantor	111.061.430,00	100,00	110.572.495,00	99,56	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	20 unit	52.398.000,00	100,00	52.008.000,00	99,26	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Peralatan kantor terpelihara	15.000.000,00	100,00	14.866.500,00	99,11	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur		1.271.920.713,00	100,00	1.071.089.392,00	84,21	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur PNS	100%	1.271.920.713,00	100,00	1.071.089.392,00	84,21	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			290.060.000,00	100,00	288.888.606,00	99,60	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Keikutsertaan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Bontang expo	...	290.060.000,00	100,00	288.888.606,00	99,60	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Lama Proses Perizinan Perdagangan (HO, SIUP, TDP) (Hari)		45.302.000,00	100,00	44.943.000,00	99,21	
	Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perijinan	Terpeliharanya aplikasi pelayanan perijinan dan tenaga kerja	2 aplikasi	45.302.000,00	100,00	44.943.000,00	99,21	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	Peningkatan PAD dari retribusi perizinan 5% per tahun		63.793.000,00	100,00	63.785.000,00	99,99	
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Terlaksananya sosialisasi mengenai perijinan	...	63.793.000,00	100,00	63.785.000,00	99,99	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PENANAMAN MODAL				3.231.782.462,00	99,61	2.999.493.162,00	92,81	

1.19. URUSAN KEPEMUDAN DAN OLAH RAGA

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.434.614.154,00	100,00	1.312.154.372,00	91,46	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bangunan/ Gedung Yang Menggunakan Listrik Dan Air	5 Gedung	70.300.000,00	100,00	27.941.142,00	39,75	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Mendapat Pemeliharaan Perizinan	7 Unit Mobil, 12 Unit Motor	18.700.000,00	100,00	11.048.800,00	59,08	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Subbag dan Seksi Yang dilayani	8 Bagian	72.815.000,00	100,00	69.844.000,00	95,92	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat dalam setahun	20 Kali	30.000.000,00	100,00	29.979.500,00	99,93	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan	20 Kali	460.000.000,00	100,00	456.671.776,00	99,28	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	49 Orang	782.799.154,00	100,00	716.669.154,00	91,55	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		594.360.000,00	100,00	555.592.625,00	93,48	
	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terpasang	-	550.000.000,00	100,00	511.990.625,00	93,09	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	7 Unit Mobil. 12 Unit Motor	44.360.000,00	100,00	43.602.000,00	98,29	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur		819.927.177,00	100,00	754.618.518,00	92,03	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Yang Diadakan	-	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	100,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Mendapat Penilaian Karya	25 Orang	812.427.177,00	100,00	747.118.518,00	91,96	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien		19.550.000,00	100,00	19.550.000,00	100,00	
	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Jumlah Publikasi Informasi pelayanan dan kegiatan OPD Selam Setahun	1 Media Publikasi	19.550.000,00	100,00	19.550.000,00	100,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		51.000.000,00	100,00	50.470.000,00	98,96	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah Event Yang Di ikuti dalam rangka HUT Kota Bontang	2 Event	51.000.000,00	100,00	50.470.000,00	98,96	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
6	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM		1.497.765.000,00	100,00	1.487.479.000,00	99,31	
	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Terlaksananya pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda	1 Kegiatan	40.000.000,00	100,00	38.545.000,00	96,36	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	Jumlah Anggota Paskibraka Kota Bontang	41 Orang	674.520.000,00	100,00	673.105.000,00	99,79	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Studi Orientasi bagi Paskibra. Pendamping. dan Pelatih Paskibra	Jumlah Peserta Studi Orientasi keluar daerah bagi pelatih, pendamping dan paskibraka kota bontang.	60 Orang	342.000.000,00	100,00	341.636.000,00	99,89	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Seleksi Paskibraka Kota Bontang	Jumlah Pelajar Kota Bontang yang Mengikuti Seleksi Paskibraka	1000 Orang	441.245.000,00	100,00	434.193.000,00	98,40	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga		587.824.500,00	100,00	570.528.380,00	97,06	
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang terbangun	1 Kegiatan	49.150.000,00	100,00	49.150.000,00	100,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpasang	1 Paket	14.674.000,00	100,00	14.674.000,00	100,00	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Taman Prestasi	jumlah Bangunan Yang Terpelihara	1 Bangunan	261.850.000,00	100,00	248.121.200,00	94,76	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Stadion Bessai Berinta	Jumlah Bangunan Yang Terpelihara	1 Unit	110.600.000,00	100,00	108.016.100,00	97,66	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala GOR Taman Lestari	Jumlah Bangunan Yang Terpelihara	1 Unit	51.020.000,00	100,00	50.470.000,00	98,92	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sport Center	Jumlah Bangunan Yang Terpelihara	1 Gedung	70.000.000,00	100,00	69.629.080,00	99,47	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta	Jumlah Bangunan Yang Terpelihara	1 Bangunan	30.530.500,00	100,00	30.468.000,00	99,80	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olahraga		2.652.812.650,00	54,17	2.106.535.650,00	79,41	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Sport Center Loktuan	Terbangunnya sport center lokyuan	1 Gedung	2.052.812.650,00	100,00	2.052.812.650,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Stadion Bessai Berinta Kota Bontang	Meningkatnya sarana dan prasarana stadion	1 unit	600.000.000,00	8,33	53.723.000,00	8,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				7.657.853.481,00	94,27	6.856.928.545,00	89,54	

1.20. URUSAN KEBUDAYAAN

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA			543.798.800,00	100,00	528.268.734,00	97,14	
	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlaksananya Erau Guntung dan Pesta Laut Bontang		343.798.800,00	100,00	338.248.800,00	98,39	Dinas Pendidikan
	Renovasi/Rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya	Bangunan Warisan Budaya yang direnovasi/direhabilitasi		200.000.000,00	100,00	190.019.934,00	95,01	Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA			500.000.000,00	100,00	493.894.900,00	98,78	
	Festival Seni Budaya	Jumlah event seni akhir tahun		500.000.000,00	100,00	493.894.900,00	98,78	Dinas Pendidikan
URUSAN KEBUDAYAAN				1.043.798.800,00	100,00	1.022.163.634,00	97,93	

1.21. URUSAN PERPUSTAKAAN

			Target		Realisasi	OPD
--	--	--	--------	--	-----------	-----

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Fisik (%)	Keuangan		Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		2.045.650.363,00	99,64	1.983.366.212,00	96,96	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan area hotspot	3 titik	475.677.681,00	96,76	433.054.903,00	91,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Surat-surat kendaraan bermotor	4 unit roda 4; 3 unit roda 2	11.500.000,00	100,00	8.318.200,00	72,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemeliharaan Tempat Kerja	1 tahun	465.585.000,00	100,00	465.585.000,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Tahun	29.783.091,00	100,00	29.783.000,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan	1 Tahun	17.345.000,00	100,00	17.345.000,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1.530.000,00	100,00	1.494.000,00	97,65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum rapat dan tamu	2 Paket	22.050.000,00	100,00	19.115.000,00	86,69	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyamaan persepsi terhadap program-program perpustakaan, arsip dan dokumentasi	1 Tahun	442.556.000,00	100,00	437.997.518,00	98,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya petugas tenaga administrasi kantor	37 orang	579.623.591,00	100,00	570.673.591,00	98,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		129.088.000,00	100,00	128.735.900,00	99,73	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai	1 Tahun	62.388.000,00	100,00	62.080.000,00	99,51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran	1 unit mobil	47.080.000,00	100,00	47.035.900,00	99,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor yang siap pakai	1 Tahun	19.620.000,00	100,00	19.620.000,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur		615.000.000,00	100,00	559.482.108,00	90,97	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah aparatur PNS	100%	615.000.000,00	100,00	559.482.108,00	90,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		51.000.000,00	100,00	50.977.000,00	99,95	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Bontang Expo dan BCC 2017	2 Event	51.000.000,00	100,00	50.977.000,00	99,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah		61.239.319,00	100,00	59.933.135,00	97,87	
	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah publikasi media cetak	2 media	15.300.000,00	100,00	15.300.000,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bahan pustaka dan katalog bahan pustaka	15 Paket	5.919.319,00	100,00	4.796.000,00	81,02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengadaan Buku - Buku Perpustakaan	Bahan pustaka pada perpustakaan bacaan di 3 RT	3 RT	40.020.000,00	100,00	39.837.135,00	99,54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PERPUSTAKAAN				2.901.977.682,00	99,93	2.782.494.355,00	95,88	

1.22. URUSAN KEARSIPAN

			Target		Realisasi	OPD
--	--	--	--------	--	-----------	-----

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Fisik (%)	Keuangan		Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN			81.950.000,00	100,00	78.250.000,00	95,49	
	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah OPD yang menerapkan arsip secara baku		81.950.000,00	100,00	78.250.000,00	95,49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Pengadaan sarana arsip		8.550.000,00	100,00	7.950.000,00	92,98	
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya pendapatan dan penataan dokumen/ arsip daerah	28 OPD	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Penduplikasian dokumen/ Arsip daerah dalam		5.450.000,00	100,00	4.850.000,00	88,99	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Pemeliharaan arsip daerah		30.722.000,00	100,00	29.787.000,00	96,96	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan arsip daerah		30.722.000,00	100,00	29.787.000,00	96,96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN KEARSIPAN				121.222.000,00	100,00	115.987.000,00	95,68	

1.23. URUSAN PENUNJANG

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		28.182.505.867,00	100,00	25.996.704.433,00	92,24	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	4.221.935.000,00	100,00	4.182.640.322,00	99,07	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah paket	2 paket	158.000.000,00	100,00	139.815.700,00	88,49	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	7.506.087.900,00	100,00	6.747.877.100,00	89,90	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	100 persen	346.640.500,00	100,00	341.107.800,00	98,40	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	100 persen	330.000.000,00	100,00	313.696.900,00	95,06	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	12 bulan	4.518.560.000,00	100,00	3.895.540.270,00	86,21	Sekretariat Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	480 DD dan 410 LD	3.369.666.000,00	99,98	3.307.473.519,00	98,15	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai dan tenaga administrasi/teknis perkantoran	PNS 130 orang dan Non PNS 124 orang	2.097.090.777,00	100,00	1.951.440.777,00	93,05	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah	Jumlah Tamu yang dilayani	65 orang	300.000.000,00	100,00	147.141.585,00	49,05	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Jasa Satpam Kantor	Terlaksananya Pengamanan Kantor Baru Walikota Bontang dan Gedung Taman Praja	100 persen	5.334.525.690,00	100,00	4.969.970.460,00	93,17	Sekretariat Daerah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		24.026.745.220,00	90,12	13.755.950.968,00	57,25	
	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang disediakan	2 unit	3.000.000.000,00	0,00	-	0,00	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Tersedianya Gudang Penyimpanan, Mess Pemkot, Desk Pilkada, dan Rumah Jabatan/Dinas	100 persen	692.000.000,00	100,00	528.000.000,00	76,30	Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 unit	2.643.924.950,00	97,40	1.731.824.000,00	65,50	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	6 Gedung / Kantor	2.641.524.500,00	100,00	2.420.119.331,00	91,62	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan KDH dan WKDH Secara Rutin/Berkala	100 persen	265.909.800,00	100,00	239.110.300,00	89,92	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket	3 paket	1.076.380.000,00	100,00	989.701.680,00	91,95	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	2 jenis	190.000.000,00	100,00	173.698.100,00	91,42	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	1 tahun	113.299.670,00	100,00	113.299.670,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis Peralatan Gedung yang dipelihara	5 Jenis	1.695.000.000,00	98,94	1.088.750.781,00	64,23	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 operen	515.475.000,00	100,00	266.310.000,00	51,66	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Umum	Sarana umum yang dipelihara	6 unit	547.000.000,00	100,00	440.899.700,00	80,60	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang akan diadakan	100 persen	1.831.971.500,00	97,27	1.501.600.800,00	81,97	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Gorden/Tirai Kantor	Jumlah gorden	Ruangan	200.000.000,00	100,00	198.101.813,00	99,05	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Bahan Bakar dan Pelumas Genset/Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	jumlah bahan bakar dan pelumas	3 paket	1.056.435.000,00	100,00	1.036.092.750,00	98,07	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH	1 paket	1.831.971.500,00	97,27	1.501.600.800,00	81,97	Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	100 persen	5.725.853.300,00	51,05	1.526.841.243,00	26,67	Sekretariat Daerah
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur		2.497.739.500,00	99,99	2.479.451.710,00	99,27	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	2 stel	100.000.000,00	100,00	83.710.000,00	83,71	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS	100 persen	2.397.739.500,00	99,98	2.395.741.710,00	99,92	Sekretariat Daerah
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien		780.107.000,00	100,00	767.947.200,00	98,44	
	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Radio	Jumlah dialog interaktif melalui radio	126 dialog	114.013.000,00	100,00	113.939.000,00	99,94	Sekretariat Daerah
	Penyebarluasan Pesan Layanan Masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat	kegiatan	573.594.000,00	100,00	562.154.000,00	98,01	Sekretariat Daerah
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan hasil Survey kepuasan masyarakat	laporan	92.500.000,00	100,00	91.854.200,00	99,30	Sekretariat Daerah
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		51.000.000,00	100,00	50.674.000,00	99,36	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Penyebarluasan informasi pembangunan melalui acara pameran pembangunan tingkat kota bontang	Kegiatan	51.000.000,00	100,00	50.674.000,00	99,36	Sekretariat Daerah
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		1.000.000.000,00	100,00	989.367.500,00	98,94	
	Pangadaan Studio Mini	Jumlah studio yang disediakan	1 paket	1.000.000.000,00	100,00	989.367.500,00	98,94	Sekretariat Daerah
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa		320.000.000,00	100,00	319.557.055,00	99,86	
	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Kota Bontang	Penunjang ULP	1 dokumen	320.000.000,00	100,00	319.557.055,00	99,86	Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terlayannya kegiatan kunjungan kerja Pimpinan daerah dan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/daerah/tokoh masyarakat		2.240.234.000,00	92,91	1.600.971.060,00	71,46	
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Terjalannya peningkatan kerjasama pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat	100 persen	216.000.000,00	100,00	109.716.000,00	50,79	Sekretariat Daerah
	Rapat Koordinasi Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)	Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 dokumen	172.594.000,00	78,74	78.197.545,00	45,31	Sekretariat Daerah
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	1 tahun	1.851.640.000,00	100,00	1.413.057.515,00	76,31	Sekretariat Daerah
9	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Mningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah		66.000.000,00	100,00	39.900.000,00	60,45	
	Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Kota	Jumlah pelaksanaan Raker Apeksi Regional Kalimantan dan Rakernas Apeksi	4 kali	66.000.000,00	100,00	39.900.000,00	60,45	Sekretariat Daerah
10	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan		2.190.730.000,00	100,00	1.396.018.750,00	63,72	
	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara perdata dan TUN	3 perkara	2.105.730.000,00	100,00	1.311.418.750,00	62,28	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Perubahan Peraturan Walikota Bontang tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya dokumen peraturan tentang pemberian hibah dan bansos	1 dokumen	85.000.000,00	100,00	84.600.000,00	99,53	Sekretariat Daerah
11	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Jumlah MoU Kerjasama antar Pemerintah daerah;		320.000.000,00	100,00	207.087.000,00	64,71	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Daerah Otonom	Jumlah sosialisasi UU 23 tahun 2014 dan peraturan perUU lainnya	-	200.000.000,00	100,00	102.532.000,00	51,27	Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemekaran/Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah kelurahan baru hasil pemekaran	5 kelurahan dan 1 kecamatan	120.000.000,00	100,00	104.555.000,00	87,13	Sekretariat Daerah
12	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Nilai LPPD		73.900.000,00	100,00	71.992.600,00	97,42	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan LPPD	1 paket	73.900.000,00	100,00	71.992.600,00	97,42	Sekretariat Daerah
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		81.600.000,00	100,00	67.630.000,00	82,88	
	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen ABK sebagai acuan dalam Penyelenggaraan dan Jumlah perda organisasi	2 dokumen	81.600.000,00	100,00	67.630.000,00	82,88	Sekretariat Daerah
14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase tingkat disiplin pegawai		282.150.000,00	99,01	257.548.678,00	91,28	
	Seleksi Calon Direktur Perusda AUJ Kota Bontang	Jumlah kegiatan Seleksi Penjaringan calon Direktur Perusda AUJ	1 Kali	282.150.000,00	99,01	257.548.678,00	91,28	Sekretariat Daerah
15	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan daerah		334.348.000,00	99,65	314.998.360,00	94,21	
	Fasilitasi Pelayanan Mess Perwakilan Pemerintah Kota Bontang di Jakarta	Tersedianya fasilitas mess Kota Bontang	1 tahun	334.348.000,00	99,65	314.998.360,00	94,21	Sekretariat Daerah
16	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	Terbinanya perangkat kecamatan dan kelurahan		49.940.000,00	100,00	49.940.000,00	100,00	
	Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan	Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan	3 Kecamatan	49.940.000,00	100,00	49.940.000,00	100,00	Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN	Cakupan layanan dan pembinaan kegiatan keagamaan		13.192.789.200,00	100,00	13.100.828.600,00	99,30	
	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Jumlah masjid yang dikunjungi	15 masjid	19.000.000,00	100,00	15.000.000,00	78,95	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Pelayanan Ibadah Haji Kota Bontang	jumlah pelayanan ibadah haji	150 jemaah	124.600.000,00	100,00	117.210.000,00	94,07	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Iman Masyarakat Melalui Dakwah	jumlah mubaligh	205 orang	1.845.000.000,00	100,00	1.845.000.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Iman Anak Sejak Usia Dini	jumlah guru ngaji	980 orang	9.297.175.000,00	100,00	9.225.004.400,00	99,22	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Umat Kristiani	jumlah guru sekolah minggu, pendeta, pasparawi, sirkumsisi	641 orang	1.596.600.000,00	100,00	1.590.600.000,00	99,62	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Wilayah	cabang yang dilombakan	1 kegiatan	107.818.200,00	100,00	107.818.200,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Pembinaan Umat Hindu	Jumlah pemangku dan guru sekolah	25 orang	142.800.000,00	100,00	140.400.000,00	98,32	Sekretariat Daerah
	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	Perayaan Paskah dan Natal Umat Kristiani Kota Bontang	1 kegiatan	59.796.000,00	100,00	59.796.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan		41.000.000,00	100,00	40.800.000,00	99,51	
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang	LKIP Kota Bontang	1 Dokumen	41.000.000,00	100,00	40.800.000,00	99,51	Sekretariat Daerah
19	PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI	Tingkat pemenuhan perumusan kebijakan ekonomi daerah		150.000.000,00	100,00	147.653.000,00	98,44	
	Kajian Naskah Akademik Dana Bagi Hasil Migas	Jumlah dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	100,00	147.653.000,00	98,44	Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran		10.193.243.826,00	100,00	9.683.706.485,00	95,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya sarana pelayanan / Tersedianya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 bulan)	12 Bulan	911.018.000,00	100,00	829.556.543,00	91,06	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Masa berlaku STNK tidak kedaluwarsa / Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional (Roda 4 = 22 unit, Roda 2 = 20 unit, Bus = 1 unit)	43 Unit	140.000.000,00	100,00	44.737.000,00	31,96	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor senantiasa bersih / Jasa kebersihan kantor (2 paket)	2 Paket	1.475.139.634,00	100,00	1.358.866.581,00	92,12	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan ATK dapat terpenuhi setiap saat / ATK (1 paket)	1 Paket	363.117.500,00	100,00	332.072.600,00	91,45	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan / Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan (4 paket)	4 Paket	748.776.500,00	100,00	738.692.000,00	98,65	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai / Peralatan dan perlengkapan kantor (17 paket)	17 Paket	1.471.340.000,00	100,00	1.347.809.172,00	91,60	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga dapat digunakan sesuai kebutuhan / Peralatan rumah tangga (1 paket)	1 Paket	10.000.000,00	100,00	9.500.000,00	95,00	Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan / Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (2 paket)	2 Paket	1.233.224.780,00	100,00	1.229.569.750,00	99,70	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan / Makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan (3 paket)	3 Paket	598.200.000,00	100,00	597.640.000,00	99,91	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan SDM Sekretariat DPRD dan terfasilitasinya pendampingan kegiatan DPRD / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (12 bulan)	12 Bulan	1.680.460.000,00	100,00	1.669.584.677,00	99,35	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatnya pelayanan terhadap lembaga / Tenaga administrasi (98 orang)	98 Orang	1.561.967.412,00	100,00	1.525.678.162,00	97,68	Sekretariat DPRD
21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		3.268.907.000,00	85,71	1.752.596.925,00	53,61	
	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan / Kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD (1 unit)	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	-	0,00	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat / Sarana dan prasarana gedung/kantor yang dipelihara (3 paket)	3 Paket	382.500.000,00	100,00	379.012.425,00	99,09	Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kendaraan unsur Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD selalu dalam kondisi baik dan siap pakai / Mobil jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD yang dipelihara (4 unit)	4 Unit	485.945.000,00	100,00	483.832.000,00	99,57	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya mobilitas dalam melaksanakan tugas / Jasa service dan suku cadang kendaraan dinas yang dipelihara (Roda 4 = 26 unit, Roda 2 = 20 unit, Bus = 1 unit)	47 Unit	299.462.000,00	100,00	296.942.000,00	99,16	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik / Sarana dan prasarana peralatan gedung kantor yang dipelihara (5 paket)	5 Paket	451.100.000,00	100,00	443.810.500,00	98,38	Sekretariat DPRD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Terpenuhinya rehab rumah jabatan / Review Perencanaan Rehab rumah jabatan Ketua DPRD (1 paket)	1 Paket	50.000.000,00	100,00	49.400.000,00	98,80	Sekretariat DPRD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan publik / Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (2 paket)	2 Paket	99.900.000,00	100,00	99.600.000,00	99,70	Sekretariat DPRD
22	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat pemenuhan kebutuhan pakaian pegawai		931.500.000,00	100,00	676.461.300,00	72,62	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur PNS / Jumlah aparatur PNS (100%)	100 %	931.500.000,00	100,00	676.461.300,00	72,62	Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat publikasi pembangunan		51.000.000,00	100,00	50.750.000,00	99,51	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan / Stand pameran/expo dan karnaval (2 kegiatan)	2 Kegiatan	51.000.000,00	100,00	50.750.000,00	99,51	Sekretariat DPRD
24	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat		17.245.545.000,00	91,45	14.620.323.551,00	84,78	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda dibahas sesuai tata tertib DPRD Kota Bontang / Jumlah Raperda yang dibahas (13 Raperda)	13 Raperda	352.800.000,00	92,91	232.540.000,00	65,91	Sekretariat DPRD
	Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya rapat dengar pendapat / Rapat dengar pendapat (12 bulan)	12 Bulan	125.900.000,00	100,00	125.300.000,00	99,52	Sekretariat DPRD
	Kegiatan Reses	Kegiatan Reses terlaksana sebagaimana mestinya / Kegiatan Reses (3 kali, Laporan Reses 25 Anggota DPRD)	3 Kali	2.767.905.000,00	100,00	1.924.982.000,00	69,55	Sekretariat DPRD
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah / Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah (48 kali)	48 Kali	51.840.000,00	100,00	50.196.000,00	96,83	Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Pimpinan dan Anggota DPRD / Pendidikan dan pelatihan formal Pimpinan dan Anggota DPRD (25 orang, 3 kali)	3 Kali	395.000.000,00	77,85	290.500.000,00	73,54	Sekretariat DPRD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi program kerja DPRD dan peraturan perundang-undangan terlaksana sesuai kebutuhan / Publikasi program kerja DPRD dan peraturan perundang-undangan (1 paket)	1 Paket	127.900.000,00	26,58	34.000.000,00	26,58	Sekretariat DPRD
	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda inisiatif disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / Raperda inisiatif DPRD (2 Raperda)	2 Raperda	340.000.000,00	100,00	340.000.000,00	100,00	Sekretariat DPRD
	Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah	Pengkajian dan penelaahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan / Kajian (2 paket)	2 Paket	200.000.000,00	100,00	190.000.000,00	95,00	Sekretariat DPRD
	Pelantikan Anggota DPRD	Terlaksananya pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan / Kegiatan pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD (1 kali)	1 Kali	107.450.000,00	100,00	107.265.000,00	99,83	Sekretariat DPRD
	Rapat-Rapat Fraksi	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat Fraksi / Honorarium tenaga ahli Fraksi (5 Fraksi)	5 Fraksi	390.000.000,00	100,00	390.000.000,00	100,00	Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggota DPRD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, studi banding, dan pelatihan ke luar daerah sebagaimana mestinya / Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (25 orang)	25 Orang	12.342.000.000,00	100,00	10.890.790.551,00	88,24	Sekretariat DPRD
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersedianya Perda APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan / Raperda APBD (1 Perda)	1 Perda	44.750.000,00	100,00	44.750.000,00	100,00	Sekretariat DPRD
25	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		578.906.914,00	100,00	483.736.653,00	83,56	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan telepon dan internet yang dibayarkan	2 Rekening	28.200.000,00	100,00	14.116.360,00	50,06	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perijinan dan pelunasan pajak daerah	20 Unit	16.300.000,00	100,00	9.260.300,00	56,81	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bagian Inspektorat daerah yang dilayani kebutuhan ATK	4 Bagian	45.586.600,00	100,00	41.677.500,00	91,42	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bagian Inspektorat daerah yang dilayani kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	4 Bagian	40.402.900,00	100,00	23.952.560,00	59,28	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah konsumsi tamu, rapat dan kegiatan yang dipenuhi	1 Tahun	50.000.000,00	100,00	30.589.960,00	61,18	Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi umum pemerintah kota bontang yang diikuti	9 IP Prov. Kaltim, 30 IP Pusat	262.500.000,00	100,00	228.222.559,00	86,94	Inspektorat Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah kebutuhan tenaga administrasi Non PNS yang dipenuhi	2 Orang	135.917.414,00	100,00	135.917.414,00	100,00	Inspektorat Daerah
26	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		320.000.000,00	100,00	310.566.750,00	97,05	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 4 yang dilaksanakan	1 Unit	245.000.000,00	100,00	236.020.000,00	96,33	Inspektorat Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin	20 Unit	75.000.000,00	100,00	74.546.750,00	99,40	Inspektorat Daerah
27	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah pegawai Inspektorat yang memiliki tingkat disiplin dan kinerja individu kategori "Sangat Baik"		1.053.158.340,00	100,00	862.553.841,00	81,90	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah PNS Inspektorat yang mendapatkan tunjangan kinerja tidak tetap	42 PNS	1.053.158.340,00	100,00	862.553.841,00	81,90	Inspektorat Daerah
28	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Predikat penerapan sistem informasi pelayanan publik Inspektorat Daerah		51.000.000,00	100,00	44.827.000,00	87,90	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah keikutsertaan Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pameran pembangunan Kota Bontang	1 event	51.000.000,00	100,00	44.827.000,00	87,90	Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase cakupan pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang berbasis risiko		782.375.000,00	100,00	568.142.184,00	72,62	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah penyelesaian audit intern penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang	17 Obrik	482.725.000,00	100,00	410.795.024,00	85,10	Inspektorat Daerah
	Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan kegiatan saber pungli Kota Bontang yang diterbitkan	12 laporan	299.650.000,00	100,00	157.347.160,00	52,51	Inspektorat Daerah
30	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase APIP yang memenuhi Standar Kompetensi yang dipersyaratkan penugasan tahunan		859.440.000,00	100,00	635.980.837,00	74,00	
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat sesuai kompetensi jenjangnya	43 Orang	859.440.000,00	100,00	635.980.837,00	74,00	Inspektorat Daerah
31	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.565.392.924,00	99,96	1.539.920.528,00	98,37	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya koneksi internet	12 Bulan	86.400.000,00	100,00	85.955.830,00	99,49	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan	22 Unit	20.850.000,00	99,66	16.459.900,00	78,94	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor; kelengkapan printer	36 Jenis	44.130.000,00	100,00	42.468.900,00	96,24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	15 Jenis	44.547.150,00	100,00	43.520.150,00	97,69	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 lemari arsip;10 laptop;1 drone; 3 GPS Jenis	222.300.000,00	100,00	206.515.000,00	92,90	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1600 kotak snack; 825 kotak makan Porsi	70.000.000,00	100,00	69.984.000,00	99,98	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	12 Bulan	887.800.000,00	100,00	885.650.974,00	99,76	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	7 Non PNS	189.365.774,00	100,00	189.365.774,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
32	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik		104.120.000,00	98,06	99.043.600,00	95,12	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 mobil;12 motor Kendaraan	51.920.000,00	100,00	51.403.000,00	99,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis peralatan gedung yang dipelihara	5 Jenis	52.200.000,00	96,12	47.640.600,00	91,27	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
33	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur		782.430.375,00	100,00	780.420.264,00	99,74	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Tunjangan kinerja untuk pegawai	37 Jenis	782.430.375,00	100,00	780.420.264,00	99,74	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
34	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mengikuti diklat		54.700.000,00	100,00	51.052.381,00	93,33	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti pegawai	10 Diklat	28.500.000,00	100,00	28.500.000,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Workshop Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah acara yang dilaksanakan;jumlah peserta	26 Orang	26.200.000,00	100,00	22.552.381,00	86,08	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
35	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase informasi/produk perencanaan yang dipublikasikan		131.000.000,00	98,75	125.578.000,00	95,86	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang Expo dan Bontang City Carnival	2 Kegiatan	51.000.000,00	100,00	50.578.000,00	99,17	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi kegiatan pembangunan melalui media cetak dan elektronik	80 Publikasi	80.000.000,00	97,50	75.000.000,00	93,75	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
36	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tingkat keterisian SIPD		21.800.000,00	100,00	21.770.000,00	99,86	
	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Buku database 8 kelompok data daerah	1 Dokumen	21.800.000,00	100,00	21.770.000,00	99,86	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
37	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program yang sinergis dalam dokumen perencanaan		267.400.000,00	100,00	267.400.000,00	100,00	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen hasil Musrenbang	1 Dokumen	58.000.000,00	100,00	58.000.000,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Penetapan RKPD	Dokumen Rancangan Awal RKPD, dokumen Rancangan RKPD, Perwali RKPD	3 Dokumen	28.500.000,00	100,00	28.500.000,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota	1 Dokumen	30.900.000,00	100,00	30.900.000,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Evaluasi RPJMD	Naskah evaluasi RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021	-	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
38	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase program yang sinergis dalam bidang Ekonomi		15.500.000,00	100,00	15.500.000,00	100,00	
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	15.500.000,00	100,00	15.500.000,00	100,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
39	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase program yang sinergis dalam bidang SDM, Pemerintahan, dan Aparatur		156.365.000,00	100,00	143.298.000,00	91,64	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Dokumen capaian tatanan kota sehat	1 Dokumen	156.365.000,00	100,00	143.298.000,00	91,64	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
40	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase jumlah program yang sesuai dengan perencanaan		18.650.000,00	100,00	14.760.000,00	79,14	
	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Laporan Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim	1 Dokumen	18.650.000,00	100,00	14.760.000,00	79,14	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase program yang sinergis dalam dokumen perencanaan		50.000.000,00	100,00	-	0,00	
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (e-planning)	1 Aplikasi	50.000.000,00	100,00	-	0,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
42	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase program yang sinergis dalam bidang pengembangan wilayah		170.000.000,00	91,39	118.316.178,00	69,60	
	Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Laporan peninjauan kembali RTRW, KLHS RTRW, dan Perda RTRW	1 Dokumen	150.000.000,00	82,77	108.316.178,00	72,21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
	Koordinasi Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Memorandum Program Sanitasi dan Air Minum	1 Dokumen	20.000.000,00	100,00	10.000.000,00	50,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
43	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase administrasi perkantoran yang baik		1.003.557.286,00	100,00	945.810.697,00	94,25	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	12 bulan	108.300.000,00	100,00	108.300.000,00	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	16 unit (11 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda empat)	38.608.000,00	100,00	35.616.600,00	92,25	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK yang tersedia	29 jenis	101.654.900,00	100,00	101.638.400,00	99,98	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	9 jenis	125.992.700,00	100,00	112.224.485,00	89,07	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman rapat tamu dan kegiatan	3 paket	50.052.000,00	100,00	45.979.725,00	91,86	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	50 kali	438.909.655,00	100,00	411.261.456,00	93,70	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	4 orang	140.040.031,00	100,00	130.790.031,00	93,39	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
44	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase tertib administrasi barang aset/daerah		22.350.000,00	100,00	16.535.600,00	73,98	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	8 Jenis	22.350.000,00	100,00	16.535.600,00	73,98	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
45	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kedisiplinan Aparatur		1.044.000.000,00	100,00	799.456.343,00	76,58	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur Negeri Sipil	45 Orang	1.044.000.000,00	100,00	799.456.343,00	76,58	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
46	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah layanan kepegawaian		51.000.000,00	100,00	49.930.100,00	97,90	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan pameran dan Bontang City Carnaval	2 kegiatan	51.000.000,00	100,00	49.930.100,00	97,90	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur yang mengikuti diklat sesuai kompetensi		1.842.278.345,00	100,00	1.780.378.180,00	96,64	
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta diklat struktural bagi PNS Daerah	37 orang	794.623.000,00	100,00	794.453.000,00	99,98	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti program tugas belajar dan ikatan dinas	27 orang	1.047.655.345,00	100,00	985.925.180,00	94,11	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase Penanganan Kasus		1.050.290.000,00	100,00	791.271.742,00	75,34	
	Seleksi Penerimaan Calon PNS	-					#####	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Ijin Perceraian	Jumlah pembahasan terkait berkas kasus yang masuk dari OPD	3 kali	30.150.000,00	100,00	24.000.000,00	79,60	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring/sidak kehadiran PNS	2 kali	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Pelaksanaan Penyerahan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah penerima penghargaan tanda kehormatan SLKS	150 PNS	17.800.000,00	100,00	17.800.000,00	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Pengusulan dan Penyerahan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah pegawai yang menerima SK Kenaikan Pangkat	500 orang	27.100.000,00	100,00	27.100.000,00	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Struktural dan Non Struktural	Jumlah pegawai yang mengisi jabatan sesuai formasi	100 PNS	509.920.000,00	100,00	315.340.978,00	61,84	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengusulan Kartu Status Pegawai	Jumlah kartu status pegawai yang selesai	150 kartu	23.300.000,00	100,00	23.300.000,00	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Pelaksanaan Ujian Dinas	Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas	177 orang	72.720.000,00	100,00	49.536.500,00	68,12	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Pengusulan Pemberhentian PNS	Jumlah SK Pemberhentian yang dikeluarkan	30 SK	27.850.000,00	100,00	27.850.000,00	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Evaluasi dan Pembahasan Kesejahteraan Pegawai	Dokumen evaluasi dan pembahasan kesejahteraan pegawai	1 Dokumen	323.250.000,00	100,00	288.144.264,00	89,14	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	Rekonsiliasi data kepegawaian	2 Periode	14.200.000,00	100,00	14.200.000,00	100,00	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
49	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas		5.095.194.998,00	99,36	4.562.203.584,00	89,54	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, Biaya pengiriman	12 Bulan	6.500.000,00	92,31	5.400.000,00	83,08	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya kenyamanan dan kelancaran kegiatan kantor	12 Bulan	506.800.000,00	100,00	446.956.686,00	88,19	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertib pemakaian kendaraan Dinas/Operasional sesuai dengan Peraturan yang berlaku	44 Unit	101.650.000,00	100,00	65.276.240,00	64,22	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor Yang Memadai	1 Paket	176.080.000,00	100,00	165.381.500,00	93,92	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan akan ATK selama 1 Tahun	1 Paket	400.463.100,00	100,00	390.727.300,00	97,57	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Penggandaan cetak/dokumentasi dan propaganda selama 1 Tahun	1 Paket	404.225.000,00	100,00	396.393.749,00	98,06	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor	1 Paket	65.000.000,00	100,00	64.440.000,00	99,14	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	289.240.000,00	100,00	228.282.500,00	78,92	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tertib Pelayanan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	73.520.000,00	100,00	72.525.000,00	98,65	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman rapat,tamu dan kegiatan selama 1 Tahun	1 Tahun	374.490.000,00	100,00	374.082.050,00	99,89	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1.737.934.000,00	100,00	1.704.733.914,00	98,09	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya jumlah kebutuhan SDM pelaksanaan administrasi dan teknis perkantoran	12 Bulan	959.292.898,00	100,00	648.004.645,00	67,55	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana mobilitas, sarana dan prasarana penunjang kerja dinas		1.131.845.000,00	100,00	1.027.666.757,00	90,80	
	Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Meubelair	1 Tahun	137.160.000,00	100,00	117.063.450,00	85,35	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehab Gedung Kantor,Taman dan Parkir	1 Tahun	431.240.000,00	100,00	383.914.007,00	89,03	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service,Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	44 Unit	299.125.000,00	100,00	295.560.800,00	98,81	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah diperbaiki	12 Bulan	264.320.000,00	100,00	231.128.500,00	87,44	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
51	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Seluruh Pegawai di lingkungan DPPKA		1.041.675.000,00	95,00	985.393.084,00	94,60	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS	12 Bulan	1.041.675.000,00	95,00	985.393.084,00	94,60	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
52	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Informasi yang tersebar kepada masyarakat		95.782.500,00	100,00	94.634.000,00	98,80	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Bontang City Carnival	1 Kali	51.000.000,00	100,00	50.396.000,00	98,82	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	1 Paket	44.782.500,00	100,00	44.238.000,00	98,78	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu		3.444.110.000,00	95,28	3.144.171.075,00	91,29	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga TA. 2018	40 Dokumen	55.500.000,00	100,00	52.502.000,00	94,60	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Tersedianya dokumen acuan penyusunan PPAS	5 Dokumen	139.100.000,00	100,00	130.600.000,00	93,89	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Tersedianya Dokumen acuan penyusunan APBD	5 Dokumen	141.700.000,00	100,00	135.100.000,00	95,34	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Tersedianya Dokumen acuan penyusunan PPAS Perubahan	5 Dokumen	164.200.000,00	100,00	159.200.000,00	96,95	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen acuan penyusunan APBD Perubahan	5 Dokumen	164.450.000,00	100,00	158.800.000,00	96,56	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersedianya Buku Dokumen APBD Tahun Anggaran	2 Dokumen	568.750.000,00	100,00	475.652.500,00	83,63	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	209.750.000,00	100,00	201.302.500,00	95,97	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Terlaksanannya Pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	5 Dokumen	560.750.000,00	100,00	493.340.000,00	87,98	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan	2 Dokumen	251.000.000,00	100,00	244.252.500,00	97,31	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tertib, akurat dan tepat waktu	10 Dokumen	134.450.000,00	100,00	133.819.000,00	99,53	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tercapainya Laporan Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tertib, akurat dan tepat waktu	10 Dokumen	77.500.000,00	100,00	77.377.375,00	99,84	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Pergeseran APBD	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pergeseran APBD	2 Dokumen	65.400.000,00	100,00	52.000.000,00	79,51	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Tercapainya Data Realisasi semester pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota	1 Dokumen	74.750.000,00	98,33	73.500.000,00	98,33	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penetapan Bendaharan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Terlaksananya Penetapan Bendaharan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	29 OPD	10.600.000,00	100,00	10.300.000,00	97,17	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Penggajian Pegawai	1 Aplikasi Sistem Penggajian Pegawai	75.000.000,00	100,00	74.195.000,00	98,93	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah	Data Dari Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	16.000.000,00	100,00	15.950.000,00	99,69	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	Tersedianya Laporan Semester I BMD dilingkungan Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	66.250.000,00	100,00	66.210.000,00	99,94	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Kegiatan Workshop Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	29 Entitas	346.200.000,00	100,00	324.000.000,00	93,59	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Terlaksananya Pendampingan Dalam Rangka menghadapi Audit Eksternal	29 OPD	70.360.000,00	100,00	70.080.200,00	99,60	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Terlaksananya Rekonsiliasi data barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	13.300.000,00	100,00	13.280.000,00	99,85	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual	Pendampingan Implemtasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	-	50.500.000,00	93,07	46.860.000,00	92,79	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Anggaran Kas	Tersedianya Modul Aplikasi Penyusunan Anggaran Kas	-	137.900.000,00	100,00	135.850.000,00	98,51	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Sosialisasi Mekanisme Perhitungan DID (Dana Insentif Daerah)	Terwujudnya Pemahaman Mengenai Perhitungan DID	-	50.700.000,00	0,00	-	0,00	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
54	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Penerimaan PAD		961.837.000,00	98,94	764.735.650,00	79,51	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	SPPT PBB kepada WP secara maksimal	38000 Lembar	148.700.000,00	100,00	128.532.500,00	86,44	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	1 Aplikasi Sistem Penggajian Pegawai	51.870.000,00	100,00	49.610.000,00	95,64	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Terlaksananya forum komunikasi dan konsolidasi daerah penghasil minyak dan gas bumi	1 Tahun	50.000.000,00	100,00	48.000.000,00	96,00	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Fasilitasi Pengelolaan Pajak Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan	Tercapainya PAD sektor Perkotaan dan Pedesaan	100 %	205.250.000,00	99,88	202.245.450,00	98,54	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pemeliharaan SISMIOP PBB	Terlaksananya SISMIOP PBB	1 Aplikasi Sistem	114.030.000,00	99,50	90.821.500,00	79,65	Badan Pengelolaan dan Keuangan
	Penghapusan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bontang	Terlaksananya penghapusan piutang pajak Pemkot Bontang	100 %	12.912.000,00	100,00	11.260.000,00	87,21	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pemutakhiran Data Piutang PBB P-2 sebelum Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pajak PBB P-2 oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya data tunggakan pajak PBB P2 yang baik dan akurat	100 %	5.450.000,00	100,00	5.450.000,00	100,00	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	100 %	373.625.000,00	92,14	228.816.200,00	61,24	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
55	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH	Prosentase Ketersediaan data aset yang akurat		487.504.650,00	87,50	372.269.158,00	76,36	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penghapusan Barang Milik Daerah	Tercapainya Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	17.550.000,00	100,00	17.537.500,00	99,93	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Tercapainya Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	18.050.000,00	100,00	17.732.500,00	98,24	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Tercapainya pelelangan/penjualan BMD dilingkungan Pemkot Bontang	1 Dokumen	40.300.000,00	100,00	34.260.000,00	85,01	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU dan RKPBU)	Terpenuhinya rencana penganggaran terhadap pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	10.800.000,00	100,00	10.750.000,00	99,54	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus	Tercapainya Penilaian Barang Milik Daerah	88 persen	97.504.650,00	100,00	82.223.058,00	84,33	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrua	Tercapainya Sistem Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrua	29 OPD	104.150.000,00	100,00	99.557.100,00	95,59	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan Aset	Tersedianya data penilaian aset yang akurat	-	111.000.000,00	100,00	110.209.000,00	99,29	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
	Penyusunan Buku Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Perwali Kodefikasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	88.150.000,00	0,00	-	0,00	Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
56	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Adm.Perkantoran		2.735.704.648,00	99,98	2.529.196.269,00	92,45	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	134.880.000,00	100,00	107.177.543,00	79,46	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	12 Kendaraan	6.525.000,00	100,00	5.076.080,00	77,79	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis ATK	12 Bulan	75.928.000,00	100,00	72.730.950,00	95,79	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis cetakan	7 Bulan	42.454.500,00	100,00	40.398.245,00	95,16	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 Bulan	25.000.000,00	100,00	24.815.000,00	99,26	Kecamatan Bontang Utara
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi DD dan LD	55 Kali	433.950.000,00	100,00	386.572.486,00	89,08	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga non ASN yang digaji	60 Non PNS	1.123.561.248,00	100,00	1.076.488.748,00	95,81	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Api-Api	Cakupan RT yang dilayani	42 RT	142.056.000,00	100,00	124.022.528,00	87,31	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Kuala	Cakupan RT yang dilayani	20 RT	135.000.000,00	99,78	131.948.212,00	97,74	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Baru	Cakupan RT yang dilayani	28 RT	135.000.000,00	100,00	123.821.459,00	91,72	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Guntung	Cakupan RT yang dilayani	18 RT	211.350.000,00	100,00	182.833.636,00	86,51	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Loktuan	Cakupan RT yang dilayani	52 RT	135.000.000,00	100,00	131.495.575,00	97,40	Kecamatan Bontang Utara
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Elai	Cakupan RT yang dilayani	45 RT	134.999.900,00	100,00	121.815.807,00	90,23	Kecamatan Bontang Utara

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan layanan sarana dan prasarana aparatur		70.899.900,00	100,00	65.677.040,00	92,63	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Volume kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	12 Kendaraan	51.372.000,00	100,00	51.007.000,00	99,29	Kecamatan Bontang Utara
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan yang dipelihara	9 Jenis	19.527.900,00	100,00	14.670.040,00	75,12	Kecamatan Bontang Utara
58	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur		2.615.262.339,00	100,00	2.389.219.739,00	91,36	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian PDU Camat dan Lurah	7 Stel	17.500.000,00	100,00	17.266.700,00	98,67	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur PNS	136 ASN	2.597.762.339,00	100,00	2.371.953.039,00	91,31	Kecamatan Bontang Utara
59	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur		217.150.000,00	100,00	165.149.123,00	76,05	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	16 Kali	217.150.000,00	100,00	165.149.123,00	76,05	Kecamatan Bontang Utara
60	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyampaian Informasi Pembangunan Kecamatan		101.000.000,00	100,00	97.022.250,00	96,06	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Carnaval dan Expo	2 Event	51.000.000,00	100,00	49.502.250,00	97,06	Kecamatan Bontang Utara
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Advertorial 12 bulan	2 Bulan	50.000.000,00	100,00	47.520.000,00	95,04	Kecamatan Bontang Utara
61	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN			125.280.000,00	100,00	114.409.000,00	91,32	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir	100 orang	21.950.000,00	100,00	21.950.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	jumlah patroli yang dilaksanakan	6 Kali	41.080.000,00	100,00	41.068.000,00	99,97	Kecamatan Bontang Utara
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	laporan profil monografi	1 Laporan	2.250.000,00	100,00	-	0,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Api-Api	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5 persen	10.000.000,00	100,00	9.447.500,00	94,48	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Kuala	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5 persen	10.000.000,00	100,00	8.200.000,00	82,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Baru	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5 persen	10.000.000,00	100,00	8.550.000,00	85,50	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Guntung	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5 persen	10.000.000,00	100,00	9.353.000,00	93,53	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Loktuan	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5 persen	10.000.000,00	100,00	9.085.500,00	90,86	Kecamatan Bontang Utara
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Elai	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5 persen	10.000.000,00	100,00	6.755.000,00	67,55	Kecamatan Bontang Utara
62	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan		441.000.000,00	100,00	417.651.300,00	94,71	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Terdampinginya masyarakat dalam pelaksanaan Produta Tingkat Kota	100 persen	151.000.000,00	100,00	144.674.000,00	95,81	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Terdampinginya masyarakat dalam pelaksanaan Produta Tingkat Kota	100 persen	290.000.000,00	100,00	272.977.300,00	94,13	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
63	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat		3.194.907.500,00	99,89	3.060.733.880,00	95,80	
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah masyarakat yang hadir	50 orang	8.350.000,00	100,00	8.350.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah masyarakat yang hadir	5 Cabang	100.000.000,00	100,00	99.501.500,00	99,50	Kecamatan Bontang Utara
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Skor UKS	20 UKS Aktif	30.000.000,00	100,00	25.557.000,00	85,19	Kecamatan Bontang Utara
	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang dibina	6 Kelurahan	16.257.500,00	100,00	15.879.300,00	97,67	Kecamatan Bontang Utara
	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang hadir	50 orang	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	GAJI RT	615 pengurus RT	2.437.200.000,00	99,96	2.351.850.000,00	96,50	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Api-Api	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	5 persen	50.000.000,00	100,00	48.542.500,00	97,09	Kecamatan Bontang Utara

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Kuala	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	5 persen	50.000.000,00	100,00	47.570.230,00	95,14	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Baru	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	5 persen	50.000.000,00	100,00	48.300.000,00	96,60	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Guntung	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	5 persen	50.000.000,00	100,00	47.945.000,00	95,89	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Loktuan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	5 persen	50.000.000,00	100,00	42.333.800,00	84,67	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	5 persen	50.000.000,00	100,00	45.260.000,00	90,52	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Api-Api	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 persen	52.000.000,00	100,00	47.399.100,00	91,15	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Kuala	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 persen	50.000.000,00	100,00	49.947.700,00	99,90	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Baru	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 persen	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Guntung	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 persen	50.000.000,00	100,00	34.809.000,00	69,62	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Loktuan	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 persen	50.000.000,00	98,00	46.488.750,00	92,98	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Elai	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 persen	50.000.000,00	100,00	49.900.000,00	99,80	Kecamatan Bontang Utara
64	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Capaian realisasi pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan		12.300.000,00	100,00	12.263.750,00	99,71	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang hadir	150 Orang	12.300.000,00	100,00	12.263.750,00	99,71	Kecamatan Bontang Utara
65	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT		6.003.887.879,00	97,44	3.338.558.346,00	55,61	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Api-Api	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	5 persen	588.300.000,00	100,00	552.007.240,00	93,83	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Baru	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	5 persen	384.700.000,00	100,00	379.822.000,00	98,73	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	5 persen	277.100.000,00	100,00	275.316.550,00	99,36	Kecamatan Bontang Utara

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Guntung	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	5 persen	260.100.000,00	100,00	259.418.600,00	99,74	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Loktuan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	5 persen	694.000.000,00	100,00	681.821.800,00	98,25	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Elai	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	5 persen	600.300.000,00	100,00	598.005.500,00	99,62	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 01	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.907.200,00	100,00	14.907.200,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 11	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	11.712.800,00	100,00	11.712.800,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 12	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.355.000,00	100,00	14.355.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 17	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	15.225.900,00	100,00	15.225.900,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 18	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	13.924.973,00	100,00	13.924.973,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 21	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.899.302,00	100,00	14.899.302,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 24	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	19.820.900,00	100,00	19.820.900,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 38	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	16.726.600,00	100,00	16.726.600,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 39	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	15.928.000,00	100,00	15.928.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 40	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	22.221.223,00	100,00	-	0,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Bontang Baru RT. 13	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	16.099.050,00	100,00	16.099.050,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Bontang Baru RT. 14	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	18.474.500,00	100,00	18.474.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Bontang Baru RT. 16	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	19.460.100,00	100,00	19.460.100,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Bontang Baru RT. 19	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	20.615.100,00	100,00	20.615.100,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Bontang Baru RT. 26	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	23.991.000,00	100,00	23.991.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 02	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.994.708,00	100,00	14.994.708,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 03	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.960.000,00	100,00	14.960.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 18	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.990.250,00	100,00	14.990.250,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 21	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.998.500,00	100,00	14.998.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 23	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.949.000,00	100,00	14.949.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 24	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	11.910.800,00	100,00	11.910.800,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 25	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.960.000,00	100,00	14.960.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 37	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.828.000,00	100,00	14.828.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 39	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.718.000,00	100,00	14.718.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Gunung Elai RT. 45	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	14.995.750,00	100,00	14.995.750,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Loktuan RT. 44	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	5 persen	22.221.223,00	100,00	22.221.223,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Api-Api	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	5 persen	31.500.000,00	100,00	31.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Bontang Baru	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	5 persen	21.000.000,00	100,00	21.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Bontang Kuala	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	5 persen	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Guntung	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	5 persen	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Loktuan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	5 persen	39.000.000,00	100,00	39.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Gunung Elai	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	5 persen	67.500.000,00	100,00	67.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
66	Pengadaan Lahan Posyandu	luas lahan yang dibebaskan	100 persen	2.585.000.000,00	0,00	-	0,00	Kecamatan Bontang Utara
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kinerja aparatur		2.596.085.699,00	100,00	2.390.498.034,00	92,08	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 persen	115.200.000,00	100,00	76.249.525,00	66,19	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	13 persen	6.350.000,00	100,00	5.746.940,00	90,50	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat	3 persen	50.000.000,00	100,00	42.300.000,00	84,60	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kec. Bontang Selatan	12 persen	33.020.000,00	100,00	32.183.000,00	97,47	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 persen	34.870.000,00	100,00	29.158.500,00	83,62	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar di Kecamatan Bontang Selatan	12 persen	9.750.000,00	100,00	4.185.000,00	42,92	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12 persen	47.500.000,00	100,00	44.733.600,00	94,18	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Berjalannya koordinasi dan konsultasi pegawai kecamatan Bontang Selatan	12 persen	451.520.000,00	100,00	451.179.534,00	99,92	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi/teknis di kecamatan	39 persen	838.728.699,00	100,00	761.978.699,00	90,85	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat	0,15 persen	15.000.000,00	100,00	14.996.000,00	99,97	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	24 persen	227.579.000,00	100,00	213.390.148,00	93,77	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	62 persen	143.310.000,00	100,00	130.688.916,00	91,19	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	19 persen	166.000.000,00	100,00	160.852.242,00	96,90	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	25 persen	147.503.000,00	100,00	137.225.765,00	93,03	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	38 persen	156.310.000,00	100,00	141.399.479,00	90,46	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	33 persen	153.445.000,00	100,00	144.230.686,00	94,00	Kecamatan Bontang Selatan
67	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan layanan sarana dan prasarana aparatur		687.826.000,00	100,00	662.438.400,00	96,31	
	Pembuatan Taman Perkantoran	Terbangunnya taman kantor	1 persen	175.000.000,00	100,00	172.264.200,00	98,44	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang di pelihara	1 persen	200.000.000,00	100,00	198.107.000,00	99,05	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Volume kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	13 persen	83.026.000,00	100,00	82.523.200,00	99,39	Kecamatan Bontang Selatan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12 persen	29.800.000,00	100,00	22.800.000,00	76,51	Kecamatan Bontang Selatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhab	1 persen	200.000.000,00	100,00	186.744.000,00	93,37	Kecamatan Bontang Selatan
68	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur		2.578.486.500,00	100,00	2.331.399.618,00	90,42	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian PDU Camat dan Lurah	7 persen	17.500.000,00	100,00	17.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur PNS	132 persen	2.560.986.500,00	100,00	2.313.899.618,00	90,35	Kecamatan Bontang Selatan
69	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		208.650.000,00	100,00	194.952.366,00	93,44	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	5 persen	208.650.000,00	100,00	194.952.366,00	93,44	Kecamatan Bontang Selatan
70	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyampaian Informasi Pembangunan Kecamatan		51.000.000,00	100,00	50.891.550,00	99,79	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Carnival dan Expo	1 persen	51.000.000,00	100,00	50.891.550,00	99,79	Kecamatan Bontang Selatan
71	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan		122.900.000,00	100,00	121.986.000,00	99,26	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Musrenbang tingkat Kecamatan Bontang Selatan	100 persen	19.050.000,00	100,00	19.050.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Kelurahan	Kelurahan terbaik tingkat Kecamatan Bontang Selatan	1 persen	9.800.000,00	100,00	9.500.000,00	96,94	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Pembinaan dan monitoring kamtrantibmas tingkat kecamatan	50 persen	18.850.000,00	100,00	18.550.000,00	98,41	Kecamatan Bontang Selatan
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku profil dan monografi Kecamatan Bontang Selatan	1 persen	800.000,00	100,00	800.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah penduduk pemegang KTP elektronik	201 persen	5.100.000,00	100,00	5.100.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Patroli Keamanan dan Ketertiban	Patroli wilayah dan monitoring kamtrantibmas	6 persen	9.300.000,00	100,00	9.000.000,00	96,77	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	24 persen	10.000.000,00	100,00	9.987.500,00	99,88	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	62 persen	10.000.000,00	100,00	9.998.500,00	99,99	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	19 persen	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	25 persen	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	33 persen	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	38 persen	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
72	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		3.106.330.000,00	99,99	3.066.378.571,00	98,71	
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Sosialisasi FKDM di Kecamatan Bontang Selatan	50 persen	7.300.000,00	100,00	7.300.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kegiatan keagamaan di Kecamatan Bontang Selatan	201 persen	102.670.000,00	100,00	100.170.000,00	97,57	Kecamatan Bontang Selatan
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Pembinaan dan lomba UKS di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan	70 persen	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Sosialisasi FPK di Kecamatan Bontang Selatan	50 persen	7.300.000,00	100,00	7.000.000,00	95,89	Kecamatan Bontang Selatan
	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kecamatan	60 persen	24.050.000,00	100,00	23.750.000,00	98,75	Kecamatan Bontang Selatan
	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Penyuluhan pembangunan di kawasan pesisir	50 persen	8.500.000,00	100,00	8.200.000,00	96,47	Kecamatan Bontang Selatan
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Terdampingnya masyarakat dalam pelaksanaan Produta	201 persen	2.311.800.000,00	99,77	2.296.270.000,00	99,33	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	24 persen	50.000.000,00	100,00	49.967.000,00	99,93	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	62 persen	57.000.000,00	100,00	56.865.600,00	99,76	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	19 persen	50.000.000,00	100,00	49.705.000,00	99,41	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	25 persen	50.010.000,00	100,00	50.010.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	33 persen	58.100.000,00	100,00	56.881.250,00	97,90	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	38 persen	50.000.000,00	100,00	36.940.550,00	73,88	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	24 persen	50.000.000,00	100,00	47.050.000,00	94,10	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	62 persen	62.600.000,00	100,00	61.408.600,00	98,10	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	19 persen	50.000.000,00	100,00	49.750.000,00	99,50	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	25 persen	52.000.000,00	100,00	50.472.000,00	97,06	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	33 persen	50.000.000,00	100,00	49.700.000,00	99,40	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	38 persen	50.000.000,00	100,00	49.938.571,00	99,88	Kecamatan Bontang Selatan
73	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat		3.574.623.040,00	99,65	3.357.926.665,00	93,94	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	24 persen	348.000.000,00	100,00	330.944.190,00	95,10	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	62 persen	874.600.000,00	100,00	843.375.880,00	96,43	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	19 persen	283.800.000,00	100,00	270.736.690,00	95,40	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	25 persen	340.900.000,00	100,00	247.623.580,00	72,64	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	33 persen	514.400.000,00	83,78	477.906.400,00	92,91	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	38 persen	440.400.000,00	100,00	414.915.525,00	94,21	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 08	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	18.480.000,00	100,00	18.480.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 14	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	14.679.500,00	100,00	14.679.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 17	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	30.525.000,00	100,00	30.525.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 19	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	13.810.500,00	100,00	13.810.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 20	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	17.297.500,00	100,00	17.297.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 21	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	13.013.000,00	100,00	13.013.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 23	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	28.930.000,00	100,00	28.930.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 24	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	17.792.500,00	100,00	17.792.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 26	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	16.868.500,00	100,00	16.868.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 27	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	18.755.000,00	100,00	18.755.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 29	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	26.719.000,00	100,00	26.719.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 30	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	24.128.500,00	100,00	24.128.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 31	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	21.230.000,00	100,00	21.230.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 32	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	30.118.000,00	100,00	30.118.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 34	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	31.196.000,00	100,00	31.196.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 37	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	19.470.000,00	100,00	19.470.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 38	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	14.300.000,00	100,00	14.300.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 48	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	30.336.900,00	100,00	30.336.900,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 49	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	18.865.000,00	100,00	18.865.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 51	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	26.922.500,00	100,00	26.922.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 52	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	14.943.500,00	100,00	14.943.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Tengah RT. 55	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	34.298.000,00	100,00	34.298.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 01	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	19.500.000,00	100,00	19.408.000,00	99,53	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 02	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	643.300,00	100,00	643.000,00	99,95	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 03	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	9.005.000,00	100,00	9.005.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 05	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	10.100.000,00	100,00	10.100.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 11	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	17.500.000,00	100,00	17.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 14	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	7.900.000,00	100,00	7.900.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 16	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	4.400.000,00	100,00	4.400.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 18	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	17.500.000,00	100,00	17.494.000,00	99,97	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 20	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	11.400.840,00	100,00	11.400.500,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 21	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	900.000,00	100,00	900.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 22	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	1.845.000,00	100,00	1.845.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 23	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	16.900.000,00	100,00	16.900.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Berbas Pantai RT. 24	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	1 persen	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Berbas Pantai	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	24 persen	36.000.000,00	100,00	36.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Berbas Tengah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	62 persen	46.500.000,00	100,00	46.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Bontang Lestari	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	19 persen	14.250.000,00	100,00	14.250.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Satimpo	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	25 persen	18.750.000,00	100,00	18.750.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Tanjung Laut	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	38 persen	28.500.000,00	100,00	28.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Tanjung Laut Indah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	33 persen	24.750.000,00	100,00	24.750.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
74	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kinerja aparatur		2.207.804.426,00	100,00	2.105.371.021,00	95,36	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 persen	79.584.050,00	100,00	73.320.125,00	92,13	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	5 persen	6.100.000,00	100,00	4.871.400,00	79,86	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						#####	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Kec. Bontang Barat	5 persen	20.426.100,00	100,00	20.420.000,00	99,97	Kecamatan Bontang Barat

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 persen	15.949.600,00	100,00	14.894.595,00	93,39	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Kantor Kec. Bontang Barat	5 persen	10.616.000,00	100,00	10.396.100,00	97,93	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	5 persen	36.750.000,00	100,00	35.939.800,00	97,80	Kecamatan Bontang Barat
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pegawai kecamatan Bontang Barat	5 persen	337.296.000,00	100,00	288.657.456,00	85,58	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi/teknis di kecamatan	5 persen	699.144.676,00	100,00	691.544.676,00	98,91	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	5 persen	284.200.000,00	100,00	268.011.862,00	94,30	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	5 persen	206.624.000,00	100,00	204.961.508,00	99,20	Kecamatan Bontang Barat
	Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	5 persen	511.114.000,00	100,00	492.353.499,00	96,33	Kecamatan Bontang Barat
75	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan layanan sarana dan prasarana aparatur		107.978.000,00	100,00	106.073.277,00	98,24	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang di pelihara	5 persen	45.610.000,00	100,00	45.321.650,00	99,37	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Volume kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	5 persen	44.268.000,00	100,00	44.161.627,00	99,76	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 persen	6.600.000,00	100,00	6.600.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya komputer kantor	5 persen	11.500.000,00	100,00	9.990.000,00	86,87	Kecamatan Bontang Barat

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur		1.561.671.542,00	100,00	1.424.110.256,00	91,19	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian PDU Camat dan Lurah	5 persen	10.000.000,00	100,00	9.988.000,00	99,88	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur PNS	5 persen	1.551.671.542,00	100,00	1.414.122.256,00	91,14	Kecamatan Bontang Barat
77	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		149.800.000,00	100,00	73.203.203,00	48,87	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	5 persen	149.800.000,00	100,00	73.203.203,00	48,87	Kecamatan Bontang Barat
78	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyampaian Informasi Pembangunan Kecamatan		101.000.000,00	100,00	90.546.000,00	89,65	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya Bontang City Carnival dan Expo Kota Bontang	5 persen	51.000.000,00	100,00	50.946.000,00	99,89	Kecamatan Bontang Barat
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Terpublikasinya kegiatan Kecamatan Bontang Barat	5 persen	50.000.000,00	100,00	39.600.000,00	79,20	Kecamatan Bontang Barat
79	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan		77.800.000,00	100,00	77.789.600,00	99,99	
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan	Musrenbang tingkat Kecamatan Bontang Barat	5 persen	18.175.000,00	100,00	18.175.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Pembinaan dan monitoring kamtrantibmas tingkat kecamatan	5 persen	27.125.000,00	100,00	27.125.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan	Buku profil dan monografi Kecamatan Bontang Barat	5 persen	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang	Jumlah penduduk pemegang KTP elektronik	5 persen	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5 persen	10.000.000,00	100,00	9.989.600,00	99,90	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5 persen	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan	Jumlah usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5 persen	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
80	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		2.014.424.000,00	100,00	1.981.768.193,00	98,38	
	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kegiatan keagamaan di Kecamatan Bontang Barat	5 persen	102.700.000,00	100,00	102.540.550,00	99,84	Kecamatan Bontang Barat
	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Pembinaan dan lomba UKS di sekolah se-Kecamatan Bontang Barat	5 persen	30.000.000,00	100,00	29.952.000,00	99,84	Kecamatan Bontang Barat
	Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan	Penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kecamatan	5 persen	6.200.000,00	100,00	4.450.000,00	71,77	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pembina Kegiatan di Masyarakat	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM masyarakat di Kelurahan Belimbing	5 persen	131.600.000,00	100,00	124.322.034,00	94,47	Kecamatan Bontang Barat
	Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Terdampinginya masyarakat dalam pelaksanaan Produta	5 persen	1.065.600.000,00	100,00	1.060.200.000,00	99,49	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	5 persen	50.200.000,00	100,00	44.396.800,00	88,44	Kecamatan Bontang Barat

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	5 persen	208.574.000,00	100,00	200.796.637,00	96,27	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	5 persen	129.850.000,00	100,00	129.644.000,00	99,84	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 persen	50.000.000,00	100,00	48.580.000,00	97,16	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 persen	50.000.000,00	100,00	49.699.050,00	99,40	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan	Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	5 persen	189.700.000,00	100,00	187.187.122,00	98,68	Kecamatan Bontang Barat
81	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat		1.524.464.950,00	100,00	1.408.913.641,00	92,42	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	5 persen	713.100.000,00	100,00	677.272.060,00	94,98	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	5 persen	233.175.000,00	100,00	159.442.631,00	68,38	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	5 persen	418.500.000,00	100,00	412.509.000,00	98,57	Kecamatan Bontang Barat

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Belimbing RT. 18	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	100 persen	14.994.650,00	100,00	14.994.650,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kelurahan Belimbing RT. 37	Meningkatnya kualitas sarana dan lingkungan RT	100 persen	29.945.300,00	100,00	29.945.300,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Belimbing	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	100 persen	38.250.000,00	100,00	38.250.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Kanaan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	100 persen	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
	Pendampingan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat RT Kelurahan Gunung Telihan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	100 persen	67.500.000,00	100,00	67.500.000,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
82	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.323.821.147,00	100,00	1.199.097.250,00	90,58	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pemasangan instalasi dan pembayaran rekening telepon, listrik, air, internet dan tv kabel	1 tahun	69.480.000,00	100,00	48.786.761,00	70,22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Memenuhi KIR dan Pajak STNK Kendaraan	1 tahun	79.100.050,00	100,00	64.342.640,00	81,34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	memenuhi kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24 jenis	4.576.000,00	100,00	4.528.700,00	98,97	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor	64 jenis	26.671.800,00	100,00	26.592.665,00	99,70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memenuhi Kebutuhan Jasa Penjilidan,Barang Cetak dan Fotocopy	1 tahun	16.827.250,00	100,00	16.822.200,00	99,97	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (laptop 1 unit, AC 8 unit dan TV 2 unit)	14 unit	73.273.000,00	100,00	66.596.000,00	90,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memenuhi Makanan dan Miunan untuk rapat, Tamu dan Kegiatan	1 tahun	229.855.000,00	100,00	171.737.937,00	74,72	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	penyediaan dana SPPD untuk rakor,konsultasi dan orientasi	1 tahun	333.552.000,00	100,00	314.904.300,00	94,41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	memenuhi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Memenuhi Pegawai di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 tahun	490.486.047,00	100,00	484.786.047,00	98,84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
83	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			323.568.000,00	100,00	303.535.150,00	93,81	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terwujudnya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1 paket	10.000.000,00	100,00	9.900.000,00	99,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya sarana dan prasarana kendaraan operasional dengan baik	100 persen	302.128.000,00	100,00	282.235.150,00	93,42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya fasilitas dan Kualitas TV,AC,Komputer,Notebook/laptop dan Printer	2 paket	11.440.000,00	100,00	11.400.000,00	99,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
84	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			663.085.000,00	100,00	478.684.037,00	72,19	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	terwujudnya pakaian dinas untuk seluruh anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah	182 ITEM	63.585.000,00	100,00	63.172.200,00	99,35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	terwujudnya pakain rescue untuk seluruh anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129 ITEM	59.500.000,00	100,00	59.388.200,00	99,81	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Peningkatan Kinerja Aparatur	terwujudnya kualitas kinerja bagi PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18 orang	540.000.000,00	100,00	356.123.637,00	65,95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
85	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			51.000.000,00	100,00	51.000.000,00	100,00	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	terwujudnya penyampaian informasi kepada masyarakat	1 Kegiatan	51.000.000,00	100,00	51.000.000,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
86	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA			314.245.040,00	100,00	295.128.000,00	93,92	
	Rapat Koordinasi Kebencanaan	-terwujudnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah, instansi vertikal; pihak perusahaan dan FKDM se kota bontang	1 dokumen	8.750.000,00	100,00	8.750.000,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyuluhan Antisipasi Bencana	Pemenuhan kompetensi bagi masyarakat dalam kesiagaan bencana	1400 orang	45.350.000,00	100,00	45.350.000,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	termonitornya potensi bencana	1 dokumen	60.620.000,00	100,00	59.130.000,00	97,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	terwujudnya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	189 item	199.525.040,00	100,00	181.898.000,00	91,17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
87	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran (%)		249.706.831,00	100,00	241.279.932,00	96,63	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Surat ijin kendaraan dinas (unit)	5 Unit	4.050.000,00	100,00	3.119.400,00	77,02	Kantor Sekretariat KORPRI
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor (jenis)	20 Jenis	9.520.000,00	100,00	9.438.000,00	99,14	Kantor Sekretariat KORPRI
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman (kotak)	1606 Kotak	26.500.000,00	100,00	26.475.000,00	99,91	Kantor Sekretariat KORPRI
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	46 Orang	193.200.000,00	100,00	185.810.701,00	96,18	Kantor Sekretariat KORPRI
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatnya kinerja aparatur (%)	100 persen	16.436.831,00	100,00	16.436.831,00	100,00	Kantor Sekretariat KORPRI
88	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)		10.888.000,00	100,00	10.868.000,00	99,82	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit)	5 Unit	10.888.000,00	100,00	10.868.000,00	99,82	Kantor Sekretariat KORPRI

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur (%)		234.600.000,00	100,00	171.702.845,00	73,19	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS (orang)	9 orang	234.600.000,00	100,00	171.702.845,00	73,19	Kantor Sekretariat KORPRI
90	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) (%)		222.570.500,00	100,00	204.685.500,00	91,96	
	Perayaan HUT KORPRI	Kegiatan perayaan HUT KORPRI (kegiatan)	5 Kegiatan	46.840.500,00	100,00	44.725.000,00	95,48	Kantor Sekretariat KORPRI
	Pembinaan Atlet Prestasi Anggota KORPRI	Tim olahraga Korpri (tim)	5 Tim	127.580.000,00	100,00	124.175.500,00	97,33	Kantor Sekretariat KORPRI
	Pembinaan Korps Musik Anggota KORPRI dan Keluarga	Jumlah anggota tim korsik dan pelatih korsik (orang)	1 Orang	33.150.000,00	100,00	20.800.000,00	62,75	Kantor Sekretariat KORPRI
	Pembentukan Tim Fardu Kifayah Anggota Korpri dan Keluarga	Tim Fardu Kifayah (tim)	2 Tim	15.000.000,00	100,00	14.985.000,00	99,90	Kantor Sekretariat KORPRI
URUSAN PENUNJANG				169.574.397.386,00	93,74	142.944.688.367,00	84,30	

1.24.URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancar pelayanan Administrasi Perkantoran		763.852.877,00	100,00	657.416.167,00	86,07	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian telepon, air dan Listrik	1 Tahun	18.700.000,00	100,00	-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KIR dan STNK	1 Tahun	9.990.000,00	100,00	8.528.600,00	85,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK Sekretariat	1 Tahun	24.898.000,00	100,00	24.669.670,00	99,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	22.600.000,00	100,00	20.741.474,00	91,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Kegiatan dan Rapat	1 Tahun	57.500.500,00	100,00	49.151.150,00	85,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman Pegawai	31 Orang	381.800.000,00	100,00	337.010.896,00	88,27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	15 Orang	248.364.377,00	100,00	217.314.377,00	87,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		75.000.000,00	100,00	73.012.500,00	97,35	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Mobil	1 Tahun	75.000.000,00	100,00	73.012.500,00	97,35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur		828.000.000,00	100,00	547.544.732,00	66,13	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS	100 %	828.000.000,00	100,00	547.544.732,00	66,13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur		50.000.000,00	100,00	33.389.000,00	66,78	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai	31 Orang	50.000.000,00	100,00	33.389.000,00	66,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		51.125.000,00	100,00	50.859.500,00	99,48	
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pameran dan BCC	2 Kegiatan	51.125.000,00	100,00	50.859.500,00	99,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Peningkatan Kemitraan Melalui Pengembangan Wawasan Kebangsaan		6.005.846.750,00	100,00	5.615.056.587,00	93,49	
	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Kota	Jumlah Peserta MTQ Pelajar dan MTQ tingkat Kota	40 tingkat kota, tingkat propinsi dan tingkat nasional	1.513.091.750,00	100,00	1.439.519.857,00	95,14	Sekretariat Daerah
	Perayaan HUT RI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan HUT RI	1 Kegiatan	282.245.000,00	100,00	238.565.000,00	84,52	Sekretariat Daerah
	Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bontang	Jumlah kegiatan penyelenggaraan HUT Kota Bontang	100 persen	153.500.000,00	100,00	107.964.380,00	70,34	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Ketenangan dan Ketertiban Umat Islam	Jumlah kegiatan perayaan hari besar Islam	1 kegiatan	960.000.000,00	100,00	960.000.000,00	100,00	Sekretariat Daerah
	Intensitas Komunikasi dan Ketertiban Umat Beragama	jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan	1 kegiatan	2.194.200.000,00	100,00	2.058.000.000,00	93,79	Sekretariat Daerah
	Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Kegiatan Sekretariat FKUB dan PAKEM	1 Tahun	164.170.000,00	100,00	146.976.900,00	89,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Tim Koordinasi Kominda dan PKS Tingkat Kota	1 Tahun	156.050.000,00	100,00	151.085.800,00	96,82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Fasilitasi Pemberdayaan FKDM	1 Tahun	203.170.000,00	100,00	181.505.000,00	89,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kegiatan FPK	1 Tahun	248.370.000,00	100,00	225.712.500,00	90,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Upacara Hari-Hari Besar Nasional	3 Kegiatan	131.050.000,00	100,00	105.727.150,00	80,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Sistem dan Prosedur dalam Menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah		200.000.000,00	100,00	152.115.500,00	76,06	
	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Keagamaan/Paguyuban	Sosialisasi dan Dialog Orkemas	1 Kegiatan	200.000.000,00	100,00	152.115.500,00	76,06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Jumlah Kasus Narkoba		302.070.000,00	100,00	249.701.523,00	82,66	
	Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	Kegiatan BNK	1 Tahun	302.070.000,00	100,00	249.701.523,00	82,66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik		272.620.000,00	100,00	238.031.390,00	87,31	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verifikasi Data Orkemas	Profil Orkemas	50 Ormas	17.725.000,00	100,00	9.652.500,00	54,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Rakor dan Monitoring	100 persen	42.975.000,00	100,00	36.688.000,00	85,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya pemilu	100 persen	211.920.000,00	100,00	191.690.890,00	90,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				8.548.514.627,00	100,00	7.617.126.899,00	89,10	

B. URUSAN PILIHAN

2.01.URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		1.950.536.716,00	100,00	1.940.956.816,00	99,51	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya layanan komunikasi air dan listrik	1 Tahun	91.176.616,00	100,00	91.030.538,00	99,84	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan STNK dan KIR	43 Motor 16 Mobil	34.926.631,00	100,00	30.653.700,00	87,77	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	1 Tahun	100.469.200,00	100,00	100.448.150,00	99,98	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dan Jilid	1 Tahun	54.281.000,00	100,00	53.946.500,00	99,38	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	1 Tahun	126.500.000,00	100,00	125.151.400,00	98,93	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	614.960.000,00	100,00	614.253.259,00	99,89	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	58 Orang	928.223.269,00	100,00	925.473.269,00	99,70	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		643.087.900,00	100,00	624.181.250,00	97,06	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	121.845.400,00	100,00	120.620.500,00	98,99	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	43 Motor 16 Mobil	496.798.500,00	100,00	479.360.750,00	96,49	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer	50 Komputer	24.444.000,00	100,00	24.200.000,00	99,00	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur		1.675.768.325,00	100,00	1.524.302.868,00	90,96	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian batik yang disediakan	130 Orang	65.000.000,00	100,00	64.350.000,00	99,00	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur PNS	78 PNS	1.610.768.325,00	100,00	1.459.952.868,00	90,64	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		410.000.000,00	100,00	408.080.018,00	99,53	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	21 Orang	410.000.000,00	100,00	408.080.018,00	99,53	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
5	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		131.000.000,00	100,00	130.416.000,00	99,55	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Pameran Bontang Expo	1 Kali	51.000.000,00	100,00	50.600.000,00	99,22	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya penyampaian informasi melalui media/2 media	2 Media	80.000.000,00	100,00	79.816.000,00	99,77	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah Produksi Rumput Laut		1.902.835.587,00	100,00	1.715.594.344,00	90,16	
	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok pembudidaya	21 Kelompok	18.500.000,00	100,00	16.875.000,00	91,22	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Ketersediaan biaya operasional	1 Tahun	262.670.000,00	100,00	248.636.500,00	94,66	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan	31 Kelompok	17.000.000,00	100,00	17.000.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut (DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut	6,75 Ton Kering	1.447.579.000,00	100,00	1.276.037.057,00	88,15	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pembangunan Sarana dan Prasarana BBIP (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	Tersedianya Pos Jaga dan Gedung Pertemuan	2 Unit	137.666.587,00	100,00	137.666.587,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Saran dan Prasarana Perikanan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	19.420.000,00	100,00	19.379.200,00	99,79	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi hasil tangkapan		2.851.800.000,00	100,00	2.834.023.337,00	99,38	
	Fasilitasi Bantuan Sarana bagi Nelayan Tangkap	Tersedianya alat tangkap dan pemahaman tentang pengoperasian alat tangkap	10 Paket	1.887.000.000,00	100,00	1.879.288.205,00	99,59	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pengoperasian PPI/TPI	Kesejahteraan pegawai	1 Tahun	212.800.000,00	100,00	212.341.400,00	99,78	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pembangunan Fasilitas TPI	Dokumen RIP tpi/PPI, Fasilitasi PPI/TPI	1 Unit	752.000.000,00	100,00	742.393.732,00	98,72	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
8	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Bertambahnya kelurahan yang menjadi sentra pengolahan hasil perikanan		114.155.800,00	100,00	114.155.800,00	100,00	
	Pembinaan dan Promosi Hasil Perikanan dan Kelautan	Terlaksananya Publikasi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	1 Media	59.400.000,00	100,00	59.400.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)	Tersedianya Sarana Prasarana pengolahan dan peningkatan mutu	Penggilingan Mie dan Kendaraan Roda 3	54.755.800,00	100,00	54.755.800,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.679.184.328,00	100,00	9.291.710.433,00	96,00	

2.02. URUSAN PARIWISATA

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA			1.937.682.000,00	100,00	1.773.018.558,00	91,50	
	Perencanaan Wisata Adat di Kelurahan Guntung	Jumlah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	1 Dokumen	39.682.000,00	100,00	36.510.000,00	92,01	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pengembangan Objek Pariwisata Mangrove Berbas Pantai (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata Sub Penataan Kawasan Pariwisata)	Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata Yang Di Bangun	1 Paket	1.500.000.000,00	100,00	1.342.386.000,00	89,49	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Pembangunan Objek Wisata Pesisir	Dokumen Perencanaan Pembangunan Objek Wisata	1 Dokumen	398.000.000,00	100,00	394.122.558,00	99,03	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN			20.050.000,00	100,00	17.450.000,00	87,03	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	2 Kegiatan	20.050.000,00	100,00	17.450.000,00	87,03	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
URUSAN PARIWISATA				1.957.732.000,00	100,00	1.790.468.558,00	91,46	

2.03 URUSAN PERTANIAN

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya keterampilan petani		450.509.853,00	100,00	442.712.928,00	98,27	
	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah kelompok tani	14 kelompok tani	391.259.853,00	100,00	389.487.600,00	99,55	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Kegiatan Sarana dan Prasarana Operasi Balai Penyuluh	Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana operasi balai penyuluh	100%	59.250.000,00	100,00	53.225.328,00	89,83	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
2	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Persentase Kesiediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan		20.704.200,00	100,00	16.978.000,00	82,00	
	Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	6 Pangan Segar asal tumbuhan	20.704.200,00	100,00	16.978.000,00	82,00	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
3	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Kelompok tani penerima bantuan		493.011.000,00	100,00	484.322.471,00	98,24	
	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1 Kegiatan	83.775.000,00	100,00	83.124.251,00	99,22	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian)	Penyediaan Bantuan sarana dan prasarana teknis pertanian berupa sumur dangkal/ 2 unit	2 Unit Sumur Dangkal	345.361.000,00	100,00	344.608.312,00	99,78	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendampingan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	Pendampingan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	100%	37.200.000,00	100,00	36.803.908,00	98,94	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pengendalian, Perencanaan dan Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terwujudnya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan/ 10 kelompok	1 Kegiatan	26.675.000,00	100,00	19.786.000,00	74,17	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Meningkatnya Kelancaran Balai Penyuluhan Pertanian		197.801.000,00	100,00	197.801.000,00	100,00	
	Pembangunan/Penambahan Sarana Balai Penyuluhan (DAK Bidang Kedaulatan Pangan)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan	100%	197.801.000,00	100,00	197.801.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
5	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak		53.584.250,00	100,00	37.564.450,00	70,10	
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Tersedianya obat ternak dan terlaksana bimtek, sosialisasi dan penyuluhan	100%	53.584.250,00	100,00	37.564.450,00	70,10	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
6	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	'Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pasar Hasil Produksi Peternakan		1.154.906.682,00	100,00	1.097.201.101,00	95,00	
	Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal	2 Unit Pelaku Usaha	44.500.000,00	100,00	44.154.000,00	99,22	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (DAK Bidang Kedaulatan Pangan)	Terbangnnya Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)/ unit	1 Unit Puskesmas, 1 Unit Rumah Dinas	44.385.000,00	100,00	44.385.000,00	100,00	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Pembangunan/Renovasi dan Fasilitas Peralatan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (DAK Bidang Kedaulatan Pangan)	Terbangnnya renovasi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Fasilitas Peralatan RPH	100%	648.311.682,00	100,00	630.935.401,00	97,32	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
	Operasional Rumah Potong Hewan	Terpeliharanya sarana RPH dan Puskesmas	100%	417.710.000,00	100,00	377.726.700,00	90,43	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian
URUSAN PERTANIAN				2.370.516.985,00	100,00	2.276.579.950,00	96,04	

2.04. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Presentasi pemanfaatan energi listrik PLTS komunal		32.065.000,00	100,00	32.065.000,00	100,00	
	Pemeliharaan Rutin Berkala PLTS Komunal Kota Bontang	lokasi tempat PLTS komunal yang diawasi	5 Lokasi	32.065.000,00	100,00	32.065.000,00	100,00	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				32.065.000,00	100,00	32.065.000,00	100,00	

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.05. URUSAN PERDAGANGAN

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Banyaknya Pelaku Usaha yang Menjual Produk tingkat Propinsi dan Nasional		945.386.004,00	66,67	889.457.056,00	94,08	
	Peningkatan Sarana Pasar Tradisional	Jumlah sarana & prasarana yang diperbaiki/ dibangun/ diperoleh	3 pasar	700.386.004,00	100,00	696.088.000,00	99,39	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Kota Bontang	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	-	0,00	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Pemeliharaan Pasar Kota Bontang	Jumlah sarana & prasarana yang diperbaiki/ dibangun/ diperoleh	3 pasar	195.000.000,00	100,00	193.369.056,00	99,16	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Mendapatkan Pembinaan		159.800.000,00	100,00	158.950.000,00	99,47	
	Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan	Jumlah PKL yang mendapat Bantuan Meja PKL	17 rombongan PKL	159.800.000,00	100,00	158.950.000,00	99,47	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	Terbangunnya Sarana Perdagangan yang Representatif		8.046.814.497,00	65,64	1.511.954.011,00	18,79	
	Revitalisasi Pasar Tradisional (DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar)	Gedung Pasar	1 Paket	907.783.000,00	100,00	748.819.000,00	82,49	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Pembangunan Pasar Rawa Indah	Terbangunnya pasar	750 m2	6.639.984.236,00	0,00	264.087.750,00	3,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/Kegiatan	Output/Outcome	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi			OPD Penanggung Jawab
					Fisik (%)	Keuangan		
						Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Pasar Citra Mas Loktuan	Terbangunnya pasar	1 dok	499.047.261,00	96,93	499.047.261,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PERDAGANGAN				9.152.000.501,00	78,78	2.560.361.067,00	27,98	